



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2016 - 2021



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, diperlukan penyesuaian nomenklatur indikator sasaran, perubahan indikator kinerja sasaran, penyesuaian penempatan program, dan perubahan indikator sasaran program;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kutai Kartanegara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 1 (satu) tahun
10. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan.
 16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.
 17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 18. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 19. Prioritas pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
 20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 21. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

RPJMD memuat Tujuan dan Sasaran, strategi pembangunan daerah dan Arah Kebijakan, serta Program Pembangunan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan program Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

3. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
 - b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Provinsi, serta dengan perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - c. sebagai pedoman bagi:
 1. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2021; dan
 2. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD disusun dengan sistematika terdiri dari:

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	:	Gambaran Keuangan Daerah;
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
BAB VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
BAB IX	:	Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan.
- (2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Desember 2019



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

A blue ink signature is written over the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,'. The signature is stylized and appears to be 'Sunggono'. Below the signature, the name 'SUNGONO' is printed in blue capital letters.

SUNGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 127

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 100/9/2019

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019, TANGGAL 27 DESEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-
2021

Bab

Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

1.1 Latar Belakang

Dinamika perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan mengarah pada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber dana pembangunan yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menyusun perangkat peraturan perundangan di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam tataran operasional, perangkat peraturan perundangan nasional tentang perencanaan pembangunan tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam horizon waktu jangka panjang, menengah dan tahunan yang meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih dalam satu periode. Hal ini juga sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menyatakan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Dengan telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 maka pada saat ini RPJMD ini telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 dengan berbagai hasil capaian pembangunan, adanya gejolak perekonomian global yang berimbas pada perekonomian nasional dan fiskal. Kemudian dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan di tindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 di sebutkan bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 di sebutkan perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa susbtansi yang di rumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017; dan
- c. terjadi perubahan mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dengan menyusun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 menjadi alasan kuat bagi Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara untuk merubah dan menyesuaikan dokumen RPJMD Kabupten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021 sesuai sengan struktur Perangkat Daerah yang baru.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD proses penyusunannya harus komprehensif dengan pendekatan spesifik sebagai berikut;

1. Pendekatan politik yang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;
2. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
3. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan atas-bawah (topdown) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Sesuai dengan uraian diatas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara Periode tahun 2016-2021, yaitu; Ibu Hj. Rita Widyasari, Ph.D dan Bapak Drs Edi Damansyah, M.Si. Dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 17 Pebruari 2016. Kepemimpinan Bupati Rita Widyasari merupakan kepemimpinan periode ke-dua dengan melanjutkan dan mengaktualisasi kembali konsepsi pembangunan Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA). oleh karena itu, GERBANG RAJA ditempatkan sebagai mainstream pembangunan, yang akan mewarnai seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Penjabaran visi, misi dan program tersebut juga diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Pem-

bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013–2018.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021 akan menjadi salah satu instrumen yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah, agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan regional, nasional maupun global. Dalam tataran teknis, Dokumen RPJMD ini selanjutnya juga dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021, sebagai berikut:

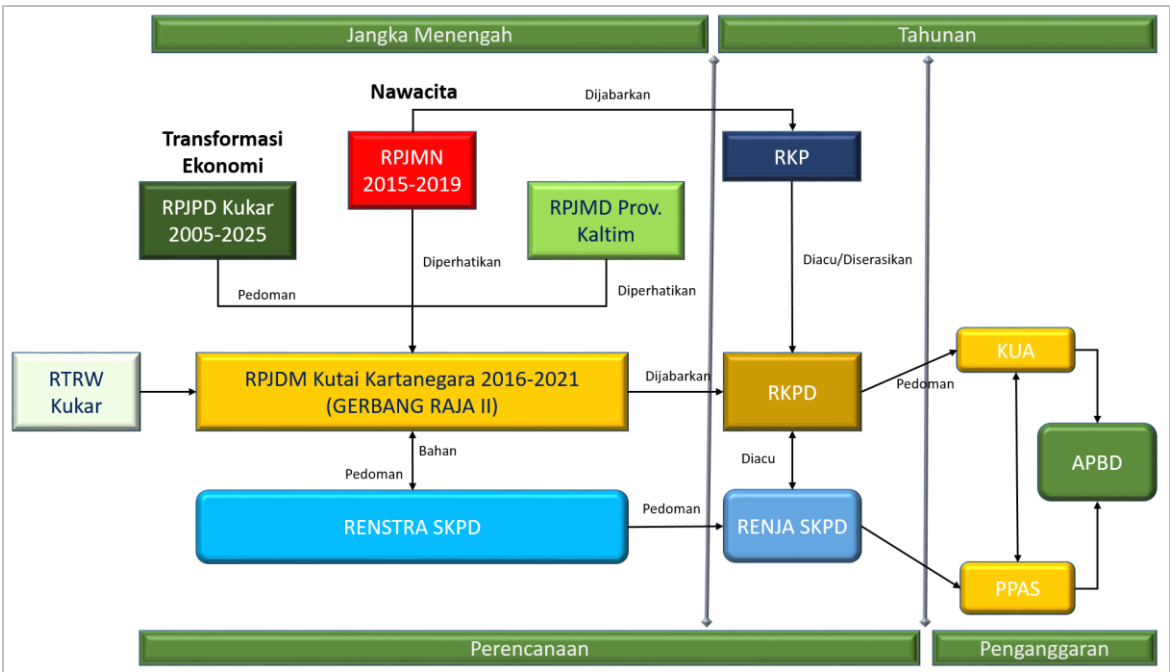
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kali-mantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bon-tang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indo-nesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kar-tanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Re-publik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sebagai Dasar Dalam Penyesuaian Nomenklatur Program;
 22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2023;
 23. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2019-2023;
 24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
 25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
 26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar I-1. Keterkaitan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



1.3.1 Keterkaitan RPJMD dan RPJPD

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti tahun 2016- 2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tentang RPJPD.

Berikut ini adalah Gambar Pentahapan agenda pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2005-2025.

Gambar I-2. Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

PERIODE I TAHUN 2005-2010	• Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan terselenggaranya pemerintahan kabupaten yang baik dan bersih berlandaskan asas keadilan, kesetaraan, keseragaman, dan demokrasi
PERIODE II TAHUN 2011-2015	• Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan tersedianya sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi.
PERIODE III TAHUN 2016-2020	• Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari
PERIODE IV TAHUN 2021-2025	• Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari

1.3.2 Keterkaitan RPJMD dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 memperhatikan 9 prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara dengan kebijakan pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional 2015-2019 yang dinamai dengan NAWA CITA, antara lain :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kutai Kartanegara dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2013-2018. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018 adalah; Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan. Sedangkan misi pembangunan jangka menengah daerah, antara lain;

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim

1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Kaltim dan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan KLHS

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 memperhatikan dan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dimana pelaksanaan KLHS RPJMD meliputi pengkajian tentang pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia yaitu : (a) memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c) memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berjangka 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh

setiap Perangkat Daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.3.7 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2 Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Renstra PD periode 2016-2021;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan;
3. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing PD tahun 2016-2021;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
5. Menetapkan indikator kinerja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kutai Kartanegara periode 2016-2021.
6. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2016-2021;
7. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
8. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
9. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kutai Kertanegara;
10. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan indikator-indikator terkait.

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 9 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

Babb II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini memberikan gambaran tentang dinamika kondisi umum Kabupaten Kutai Kartanegara, yang meliputi; aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum daerah ini selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi pengembangan rencana target pembangunan dalam berbagai urusan kewenangan pemerintah daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

2.1.1 Letak, Batas dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak diantara 115°26'28" Bujur Timur/Longitude East 117°36'43" Bujur Timur/Longitude East 1°28'21" Lintang Utara/Latitude North 1°08' 06" Lintang Selatan/Latitude South. Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Sebelah Timur : Selat Makasar. Sebelah Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Barat. Selain dari itu wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengelilingi wilayah Kota Samarinda.

Luas Kabupaten Kutai Kartanegara 27.263,10 Km², yang terbagi atas 18 kecamatan dengan luas wilayah sebagai berikut :

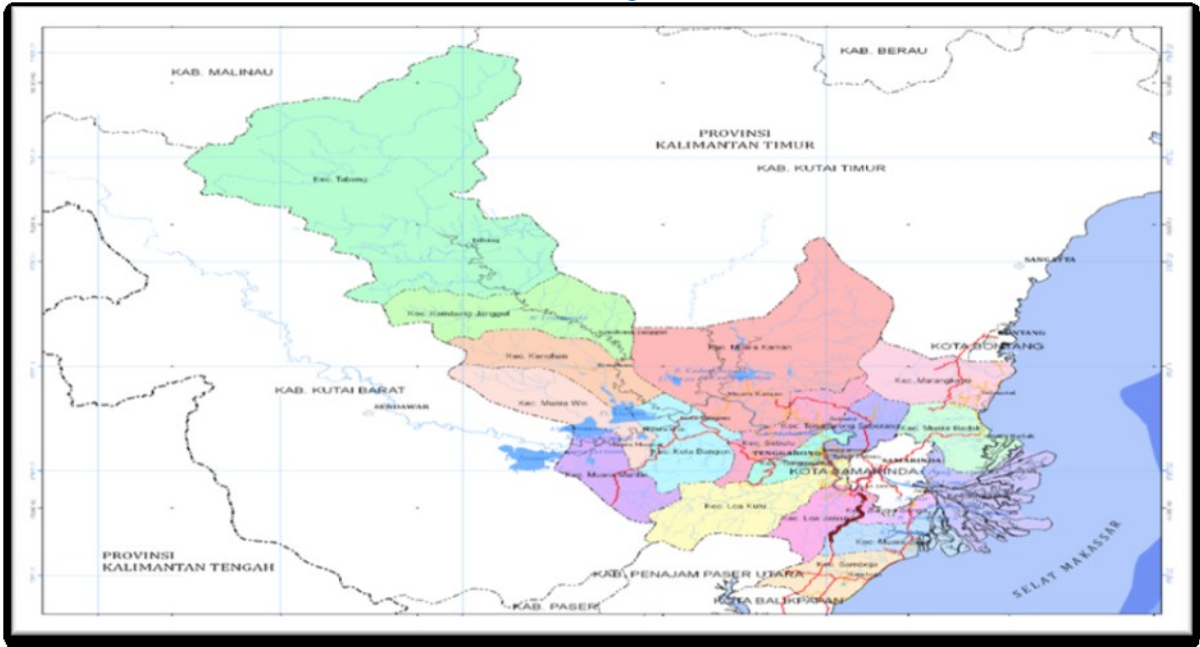
Tabel 2.1. Luas wilayah berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Luas (Km ²)
1.Samboja	1,045.90
2.Muara Jawa	754.50
3.Sanga-Sanga	233.40
4.Loa Janan	644.20

Kecamatan	Luas (Km ²)
5.Loa Kulu	1,405.70
6.Muara Muntai	928.60
7.Muara Wis	1,108.16
8.Kota Bangun	1,143.74
9.Tenggarong	398.10
10.Sebulu	859.50
11.Tenggarong Seberang	437.00
12.Anggana	1,798.80
13.Muara Badak	939.09
14.Marang Kayu	1,165.71
15.Muara Kaman	3,410.10
16.Kenohan	1,302.20
17.Kembang Janggut	1,923.90
18.Tabang	7,764.50
Total	27,263.10

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2017

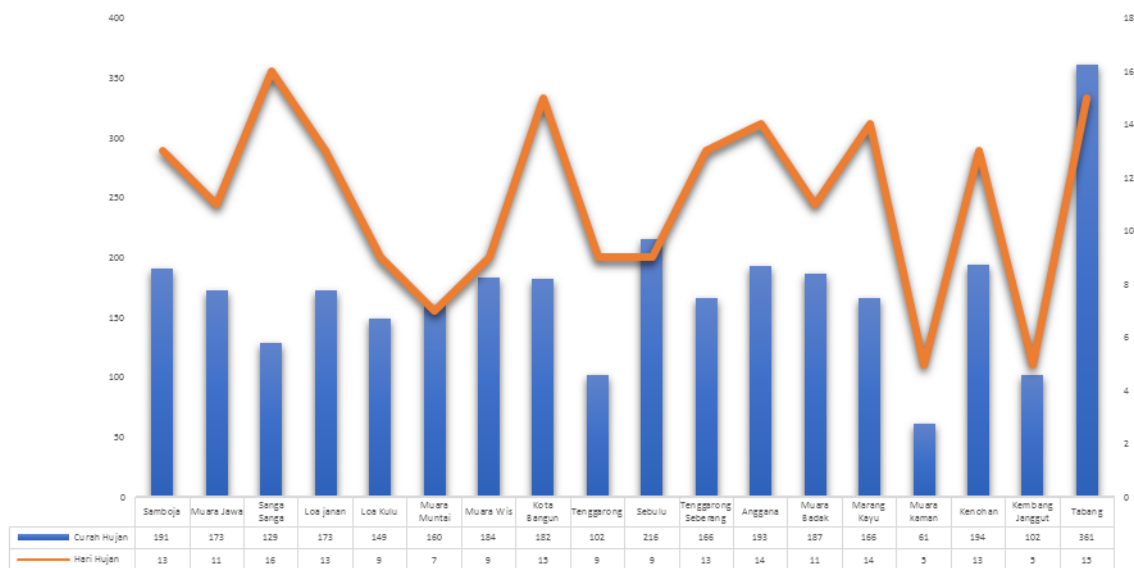
Gambar II-1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara



2.1.2 Iklim

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis yang memiliki dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau, yang terlihat dari curah hujan yang tidak merata setiap tahun, curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu 291 mm dengan jumlah hari hujan 18 hari. Wilayah kecamatan tertinggi curah hujan terdapat di Kecamatan Tabang sebesar 361 mm dan terendah di Kecamatan Muara Kaman 61 mm, sedangkan hari hujan terbanyak di Kecamatan Sanga-sanga yakni 16 hari.

Gambar II-2. Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Kecamatan



Sumber : Daerah Dalam Angka, 2017

2.1.3 Penduduk

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah, pertumbuhan dan pola sebaran penduduk menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2018 Bulan Januari sebanyak 674.759 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,40%, sedangkan sebaran penduduk cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dengan tingkat distribusi terbesar pada kecamatan Tenggarong sebesar 14,81%, Loa Janan 9,51% dan Tenggarong Seberang 9,40%. Sedangkan kepadatan penduduk, tertinggi di Kecamatan Tenggarong sebesar 251 jiwa per km² , diikuti Kecamatan Tenggarong Seberang 145 jiwa per km² dan Kecamatan Loa Janan sebesar 100 jiwa per km². Sedangkan terendah di kecamatan Tabang dengan kepadatan penduduk sebesar 1 jiwa per km². Sedangkan rata-rata kepadatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 25 jiwa per Km² .

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2017
<i>Samboja</i>	60,980
<i>Muara Jawa</i>	38,801
<i>Sanga Sanga</i>	19,195
<i>Loa Janan</i>	64,177
<i>Loa Kulu</i>	48,307
<i>Muara Muntai</i>	18,729
<i>Muara Wis</i>	8,798
<i>Kota Bangun</i>	33,502
<i>Tenggarong</i>	99,917
<i>Sebulu</i>	37,985
<i>Tenggarong Seberang</i>	63,396

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2017
Anggana	31,411
Muara Badak	42,439
Marang Kayu	25,938
Muara kaman	37,588
Kenohan	10,895
Kembang Janggut	22,803
Tabang	9,898
Jumlah Penduduk Kukar	674,759

Sumber : Disdukcapil, Januari 2018

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan trend laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir cenderungfluktuatif. Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan, yakni: Dengan Migas, Tanpa Migas; dan Tanpa Migas dan Batu Bara. Adapun gambaran perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi dengan migas, penurunan nilai tambah bruto pertambangan dan penggalian memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah, yang disebabkan tingginya dominasi kontirbusi pertambangan dan penggalian pada PDRB yakni mencapai 65.72% dan khusus migas sebesar 30,56% (2017).Kinerja pertambangan dan penggalian selain dipengaruhi oleh kapasitas produksi, juga dipengaruhi oleh harga komoditas pasar global dan permintaan pasar, dalam tiga tahun terakhir kapasitas produksi migas Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung menurun, sehingga laju pertumbuhan produksi pertambangan minyak dan gas bumi dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) selalu tumbuh negatif, yakni berturut-turut -1,97%, -1,16% dan -3,88%. Kondisi ini secara agregat berimplikasi pada laju pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara, pada tahun 2017, yakni sebesar 1,12%, namun lebih baik dibanding tahun 2016 yang mengalami kontraksi sebesar-1,81%, dan tahun 2015 sebesar -7,19%.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas, perhitungan PDRB ini dilakukan dengan mengeluarkan Nilai Tambah Bruto (NTB) sub kategori pertambangan minyak dan gas bumi sedangkan subkategori pertambangan dan penggalian lainnya tetap menjadi bagian dari perhitungan PDRB, pendekatan ini dilakukan untuk melihat kinerja perekonomian daerah dengan mengeluarkan produksi komoditas migas dalam sistem perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui pendekatan ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengalami kontraksi yang cukup tinggi, pada tahun 2015 sebesar -10,72%, dan terus berlanjut ke tahun 2016 dengan pertumbuhan -2,28%, dan menunjukkan trend membaik tahun 2017 yakni tumbuh sebesar 4,17%. Kondisi ini disebabkan karena Pertambangan Batubara mengalmi pertumbuhan sebesar 4,01% dan memiliki kontribusi sebesar 32,44%.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batu bara, pendekatan perhitungan ini dilakukan untuk melihat kinerja perekonomian daerah dengan mengeluarkan dua subkategori yang termasuk dalam unrenewable resources (sektor tak terbarukan), yakni migas dan batu bara, perhitungan ini diasumsikan lebih mendekati pada kondisi riil gambaran kinerja perekonomian daerah, khususnya terkait dengan pencapaian proses transformasi ekonomi daerah dari dominasi komoditas tak terbarukan menuju optimalisasi komoditas terbarukan. Pada perhitungan ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa bergerak positif, namun trend tiga tahun terakhir cenderung melambat, yang terlihat pada tahun 2016 sebesar 2.22%, tahun 2015 tumbuh sebesar 4,47%, tahun 2014 yang tumbuh sebesar 6,79%. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara kembali positif yakni sebesar 4,36%.

Tabel 2.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2017

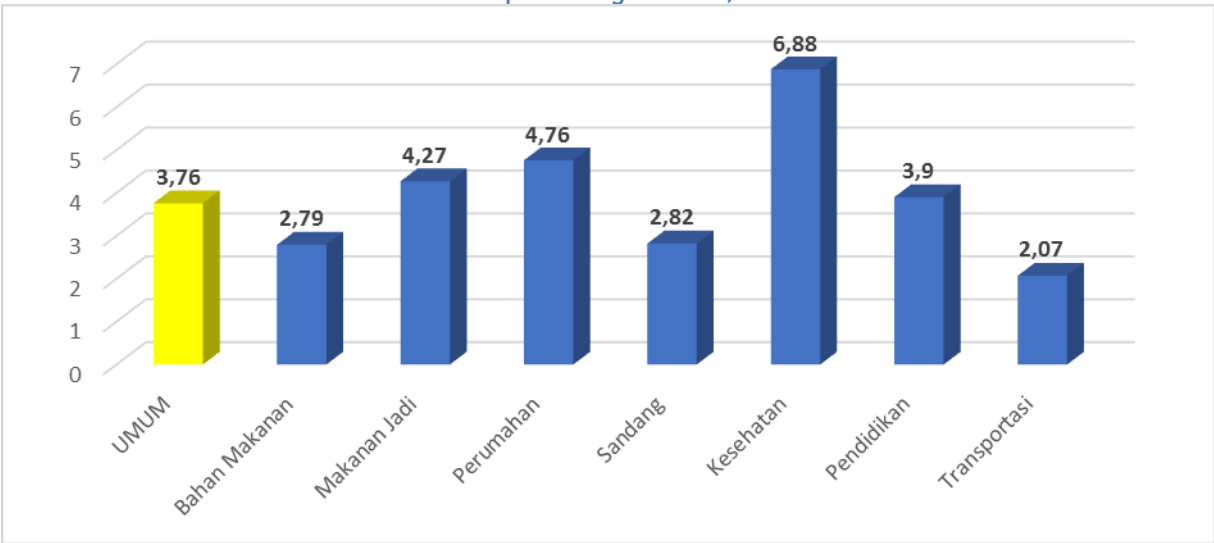
LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017**
1. Pertanian	9.42	4.67	6.79	3.05	4.24
2. Pertambangan dan Penggalian	-1.67	-3.27	-10.66	-3.25	-0.10
2.1. Pertambangan Minyak & Gas Bumi	-6.72	-8.27	-1.97	-1.16	-3.88
2.2. Pertambangan Batubara dan Lignit	3.69	1.44	-19.08	-5.72	4.01
2.3. Pertambangan Bijih Logam	0.76	-5.84	-8.94	-8.94	-2.50
2.4. Pertambangandan PenggalianLainnya	2.30	2.03	1.36	0.30	3.16
3. IndustriPengolahan	6.23	5.45	4.92	8.59	4.19
4. Pengadaan ListrikDanGas	3.38	21.22	28.23	9.63	13.58
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.02	6.28	5.81	7.64	8.45
6. Konstruksi	4.70	14.12	-0.03	-5.46	3.94
7. Perdagangan	4.91	2.19	2.29	4.66	5.80
8. Transportasi dan Pergudangan	7.63	6.65	4.43	6.50	5.68
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6.87	6.85	5.99	9.53	10.80
10. Informasi dan Komunikasi	11.04	11.76	10.86	9.03	9.95
11. Jasa Keuangan	16.52	3.40	5.17	4.11	2.69
12. Real Estate	5.69	7.40	4.31	-1.30	1.17
13. Jasa Perusahaan	4.22	6.50	-1.77	-5.83	3.04
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	5.08	8.90	13.87	-0.48	-1.54
15. Jasa Pendidikan	14.81	11.91	6.76	11.89	8.50
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	6.06	9.59	8.39	11.18	8.81
17. Jasa Lainnya	4.54	9.19	9.12	12.70	9.88
PDRB	0.04	-1.08	-7.19	-1.81	1.12
PDRB Tanpa Migas	4.79	3.42	-10.08	-2.20	4.17
PDRB Tanpa Migas dan Batubara	6.72	6.79	4.47	2.22	4.36

** Data Sangat Sementara, Sumber : BPS Kutai Kartanegara (2018)

b. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Tingkat keparahan inflasi terbagi atas : Inflasi ringan (<10% setahun); Inflasi sedang (10%-30% setahun); Inflasi berat (30%-100% setahun); dan Hiperinflasi (>100% setahun). Laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kelompok Pengeluaran tahun 2017, terbesar pada kelompok kesehatan, diikuti oleh perumahan, dan makanan jadi, yang keseluruhannya berada diatas rata-rata inflasi daerah sebesar 3,76%.

Gambar II-3. Laju Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kelompok Pengeluaran, 2017

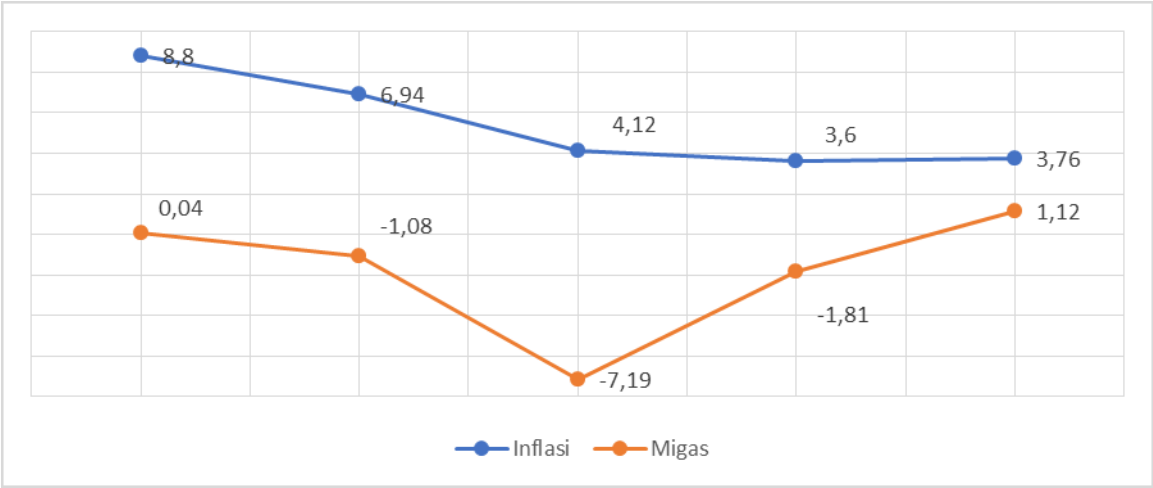


Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2018)

Laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 3 (tiga) tahun terakhir terkendali dibawah satu digit, dengan kecenderungan mengalami stagnan, pada tahun 2015 sebesar 4,12%, tahun 2016

sebesar 3,60%, dan tahun 2017 sebesar 3,76%. Berikut gambaran trend inflasi Kutai Kartanegara 2013-2017, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dengan migas, yang mengindikasikan bahwa tingkat inflasi diatas laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Gambar II-4. Perkembangan Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2017

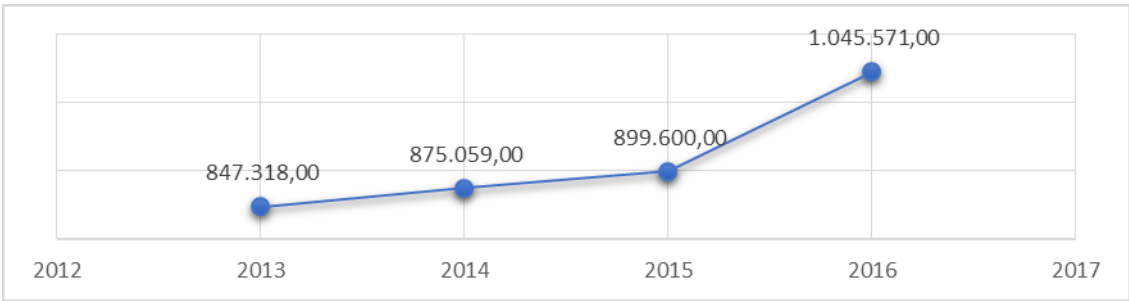


Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2018)

c. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Susenas tiga tahun terakhir (data 2013-2016) bergerak positif, sampai dengan tahun 2016 pengeluaran perkapita penduduk perbulan sebesar Rp. 1.045.571,00, dengan rata-rata pengeluaran desil 1 sebesar Rp. 424.375 dan tertinggi desil 10 sebesar Rp.2.362.893,00. Kecenderungan peningkatan pengeluaran perkapita ini menggambarkan bahwa tingkat daya beli penduduk terus meningkat.

Gambar II-5. Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2016



Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2017)

d. Indeks Gini

Tahun 2014, nilai indeks gini Kabupaten Kutai Kartanegara masih bertahan pada angka 0,31, tetapi pada tahun 2015 nilai indeks gini kembali turun 0,02 poin menjadi 0,29 dan terakhir di tahun 2016 kembali turun 0,02 poin menjadi 0,27 dan pada tahun 2017 sebesar kembali meningkat menjadi 0,29, namun trend gini rasio Kutai Kartanegara periode 2013-2017 secara umum semakin menyempit.

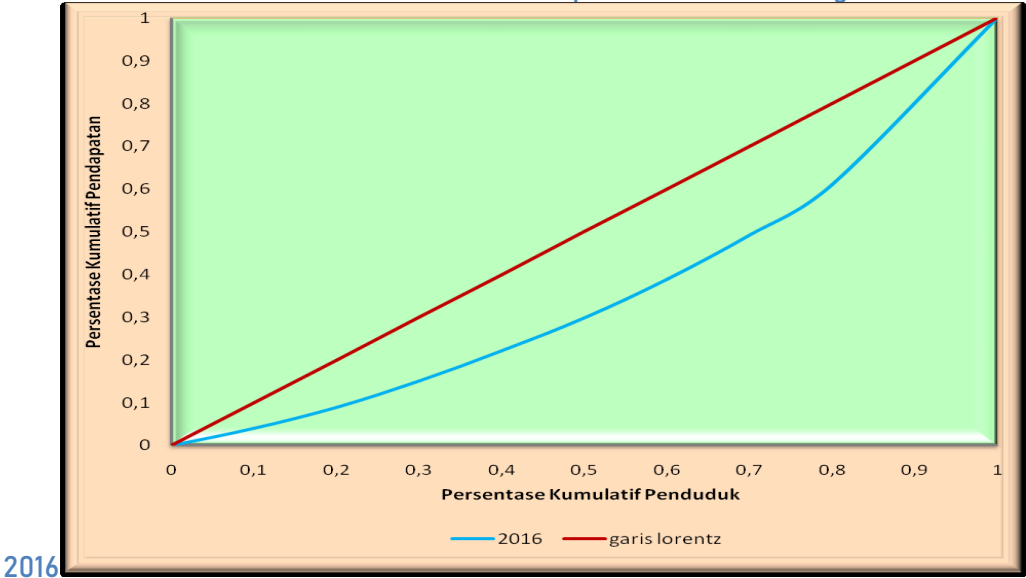
Tabel 2.4
Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2016

Distribusi Pembagian Pendapatan	2013	2014	2015	2016
40% Rendah	21,6	21,48	22,11	22,93
40% sedang	36,81	36,93	38,98	40,15
20% Tinggi	41,59	41,6	38,92	36,92

Distribusi Pembagian Pendapatan	2013	2014	2015	2016
Indeks Gini	0,31	0,31	0,29	0,27
Kategori Ketimpangan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka (2017)

Gambar II-6. Kurva Lorentz Kabupaten Kutai Kartanegara

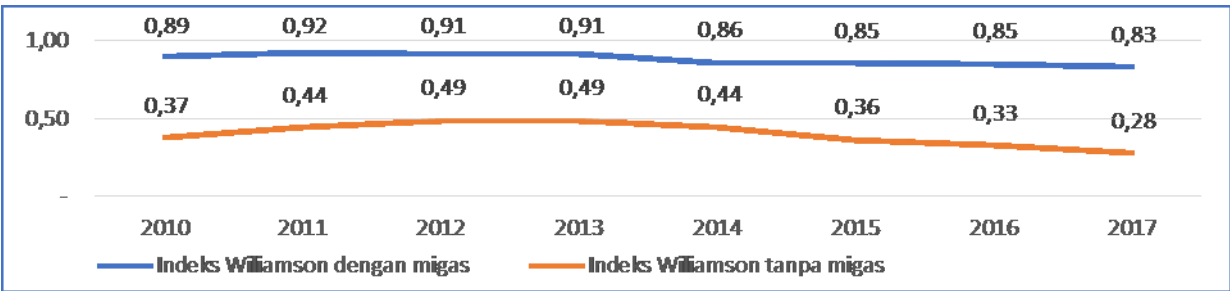


Sumber : BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka (2017)

e. Indeks Williamson

Indeks Williamson Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu pendekatan perhitungan ketimpangan wilayah berdasarkan atas kinerja perekonomian berdasarkan daerah dibawahnya dalam hal ini kecamatan, pendekatan perhitungan yang dilakukan adalah menggunakan proyeksi PDRB Kecamatan tahun 2013 yang disesuaikan PDRB Kabupaten. Berdasarkan atas hasil analisis Indeks Williamson, ketimpangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dalam kategori tinggi, mengingat nilai PDRB kecamatan tertinggi saat ini masih didominasi wilayah pesisir sebagai daerah penghasil migas, sedangkan daerah zona tengah dan hulu secara umum tidak memiliki potensi migas. Namun demikian seiring dengan upaya pemerataan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, kegiatan-kegiatan ekonomi saat ini cenderung merata yang ditunjukkan dengan menurunnya angka Indeks Wiliamson pada tahun 2016 dengan nilai 0,85, dan 0,83 untuk tahun 2017. Sedangkan perhitungan Indeks Williamson tanpa migas menunjukkan kategori rendah, yakni pada tahun 2016 dan 2017 dengan nilai 0,33 dan 0,28. Berikut perkembangan Indeks Williamson Kabupaten Kutai Kartanegara 2010–2017.

Gambar II-7. Indeks Williamson Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 – 2017



Sumber : Data Analisis, 2018

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

1) Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu pendekatan pemenuhan pelayanan pendidikan di suatu wilayah, dengan membandingkan jumlah penduduk bersekolah terhadap total penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan, pendekatan indikator ini untuk melihat kecenderungan penduduk yang bersekolah namun tidak sesuai dengan kisaran usia sekolah setiap jenjang, hal ini terkait pula Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) . Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan perhitungan proporsi penduduk yang bersekolah sesuai dengan usia sekolah pada jenjang sekolah tersebut, sehingga APM digunakan untuk melihat partisipasi penduduk masa usia sekolah terhadap jenjang pendidikan yang harus diikutinya. APM SD/MI pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015, kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal. Berikut trend perbandingan APK dan APM Kabupaten Kutai Kartanegara 2014 - 2016.

Tabel 2.5.
Perkembangan APM dan APK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 – 2016

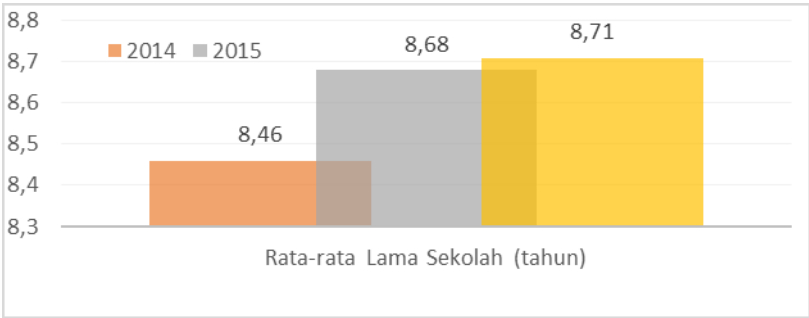
JENJANG PENDIDIKAN	2014		2015		2016		2017	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK*	APM
SD/MI/Paket A	111.36	98.42	117,58	99,47	114,34	96,34	114,34	99,86
SMP/MTs/Paket B	92.79	90.65	92,58	76,89	97,48	82,39	97,48	93,91
SMA/SMK/MA/ Paket C	81,223	78.08	84,40	59,20	96,69	73,38	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Data disamakan tahun 2016, 2017 belum tersedia

2) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan indikator kinerja bidang pendidikan yang memberikan gambaran tentang ukuran rata-rata tingkat pendidikan penduduk dalam suatu wilayah. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kinerja yang meningkat, namun demikian kita sadari bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara belum mencapai target nasional yakni minimal pendidikan dasar setingkat 9 (sembilan) tahun. Berikut perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2016.

Gambar II-8. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 – 2016



Sumber : BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2017

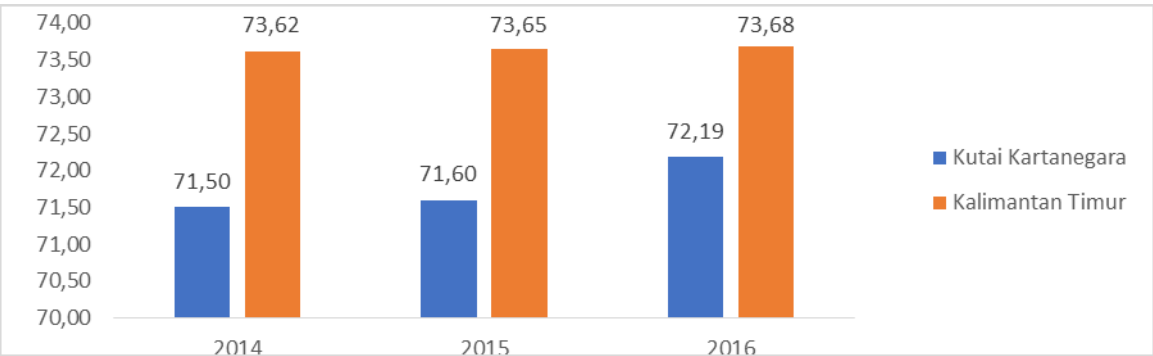
b. Kesehatan

1) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2016 disajikan pada gambar berikut.

Gambar II-9. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2016



Sumber : BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka (2017)

Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk kesehatan. AHH yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik dan lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula. Namun demikian untuk mengukur angka harapan hidup suatu daerah perlu dibandingkan dengan angka harapan hidup di level yang lebih tinggi. Angka harapan hidup di Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 adalah 73,68 tahun, sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 72,19 tahun. Guna mencapai menurunkan gap dengan AHH Kalimantan Timur, maka perlu adanya dukungan berbagai pihak dalam menjalankan program pembangunan kesehatan, program kesehatan lingkungan, gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan.

2) Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan salah satu indikasi tingkat pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data laporan kematian bayi dan balita pada pusat kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. AKN (umur 0-28 hari) tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, dengan total kematian sebanyak 166 kasus dengan nilai AKN sebesar 12 kematian per 1.000 penduduk, kondisi ini tidak lebih baik dari tahun 2016 dengan angka 9 kematian per 1.000 penduduk. AKB secara absolut tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Jika dilihat dari pendekatan wilayah AKB tertinggi terdapat pada Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang dan Muara Kaman, AKB Kutai Kartanegara tahun 2017 sebesar 4 kematian per kelahiran 1.000 penduduk, kondisi ini sama dengan tahun 2016 namun lebih baik daripada tahun 2015, yang mencapai 16 kematian per 1000 penduduk. Sedangkan AKABA mengalami peningkatan pada tahun 2017, dengan jumlah kematian sebanyak 248 kasus, dengan nilai 18, atau terdapat 18 kasus kematian dari total kelahiran per 1.000 penduduk, kondisi ini lebih tinggi dibanding tahun 2016. Berikut secara rinci perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.6.
Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN											
		NEONATAL			BAYI			ANAK BALITA			BALITA		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN											
		NEONATAL			BAYI			ANAK BALITA			BALITA		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	SAMBOJA	7	14	15	13	9	5	2	3	1	15	20	21
2	MUARA JAWA	9	14	14	22	8	1	3	4	5	25	26	20
3	SANGA SANGA	3	2	4	5	2	2	0	0	0	5	4	6
4	LOA JANAN	14	13	12	15	3	1	1	0	0	16	16	13
5	LOA KULU	11	4	6	15	3	3	2	0	0	17	7	9
6	MUARA MUNTAI	4	8	16	7	2	2	0	3	2	7	13	20
7	MUARA WIS	9	3	3	12	4	2	0	0	2	12	7	7
8	KOTA BANGUN	9	6	6	10	2	4	1	0	0	11	8	10
9	TENGGARONG	9	11	15	15	2	8	0	0	5	15	13	28
10	SEBULU	5	14	15	8	3	4	0	0	3	8	17	22
11	TGR SEBERANG	8	4	8	15	5	7	1	3	2	16	12	17
12	ANGGANA	5	1	9	8	1	2	0	0	1	8	2	12
13	MUARA BADAK	9	8	12	13	2	1	2	1	1	15	11	14
14	MARANGKAYU	9	3	3	12	7	0	1	1	1	13	11	4
15	MUARA KAMAN	21	5	15	25	4	6	0	9	1	25	18	22
16	KENOHAN	2	0	2	3	0	1	0	1	1	3	1	4
17	KEMBANG JANGGUT	6	3	8	12	0	2	1	1	2	13	4	12
18	TABANG	0	3	3	1	1	2	0	1	2	1	5	7
Jumlah		140	116	166	211	58	53	14	27	29	225	195	248
Angka Kematian (Dilaporkan)		10	9	12	16	4	4	1	2	2	17	15	18

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Tingkat AKI Kabupatn Kutai Kartanegara berdasarkan data laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, cenderung mengalami peningkatan tahun 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut kasus kematian ibu sebesar 29, 32 dan 35. Sehingga AKI tahun 2017 sebesar 250 per 100.000 kelahiran penduduk, lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 243, dan tahun 2015 sebesar 216. Kondisi ini menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan pelayanan kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.7.
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN IBU		
		2015	2016	2017
1	SAMBOJA	1	1	5
2	MUARA JAWA	2	3	1
3	SANGA SANGA	1	3	2
4	LOA JANAN	3	3	1
5	LOA KULU	3	2	2
6	MUARA MUNTAI	1	0	1
7	MUARA WIS	1	0	0
8	KOTA BANGUN	2	1	3
9	TENGGARONG	4	4	4
10	SEBULU	0	2	0
11	TGR SEBERANG	0	0	1
12	ANGGANA	0	3	3
13	MUARA BADAK	1	4	2
14	MARANGKAYU	0	0	0
15	MUARA KAMAN	6	4	3
16	KENOHAN	1	0	3
17	KEMBANG JANGGUT	3	2	3
18	TABANG	0	0	1
Jumlah		29	32	35
Angka Kematian (Dilaporkan)		216	243	250

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018

4) Persentase Balita Gizi Buruk

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut badan badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score ≤3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menurut petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2008 memiliki definisi operasional yaitu balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kasus balita gizi buruk dari tahun 2013-2017 mengalami pasang surut dan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 110 kasus. Kasus balita gizi buruk yang

terjadi setiap tahun dapat tertangani secara keseluruhan, sehingga cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Kutai Kartanegara 100 persen Nilai yang sangat baik melihat semua kasus gizi buruk dapat tertangani, ke depannya hal semacam ini dapat dipertahankan. Dengan demikian penduduk kabupaten Kutai Kartanegara memiliki taraf kehidupan dan kesehatan yang baik.

Tabel 2.8.
Balita Gizi Buruk Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan	110	64	87	88	73
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	110	64	87	88	73
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD 2017

5) Kemiskinan

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data persentase penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah garis kemiskinan disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017*

TAHUN	PENDUDUK MISKIN	GARIS KEMISKINAN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (P ₀)
2013	68.313	-	7.52
2014	52.530	371.791	7.43
2015	56.990	389.195	7.99
2016	55.820	424.717	7.63
2017*	56.570	450.581	7.57

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2018)

Jumlah penduduk miskin Kutai Kartanegara periode 2015-2017 terus mengalami penurunan, kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas pelayanan dasar yang dilakukan saat ini menunjukkan dampak terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat, ke depan program-program kemiskinan pemerintah harus lebih efektif dan mengarah pada akar permasalahan kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini mengalami goncangan oleh karena menurunnya produksi komoditas migas dan batu bara.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara, secara umum berada dikisaran 5-11 persen, angka TPT tertinggi pada tahun 2010 dengan nilai 11,53% dan terendah pada tahun 2017 dengan nilai 5,72%, meningkatnya TPT pada tahun 2015, merupakan eksek terhadap melemahnya kondisi perekonomian nasional dan daerah yang berimbas pada menurunnya volumen produksi pertambangan batu bara, sehingga terdapat beberapa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja, selain daripada itu Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah terbuka yang diminati oleh para pencari kerja dari luar daerah, sehingga pendataan terhadap angkatan kerja Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa meningkat yang tidak hanya dari penduduk lokal namun pula dari pendatang.

Tabel 2.10.
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2017

TAHUN	LAKI-LAKI (%)	PEREMPUAN (%)	TPT LAKI-LAKI DAN PREMPUAN (%)
2010	7,99	19,20	11,53
2011	7,01	9,29	7,68
2012	6,95	10,42	7,89

TAHUN	LAKI-LAKI (%)	PEREMPUAN (%)	TPT LAKI-LAKI DAN PREMPUAN (%)
2013	6,80	8,89	7,73
2014	7,82	7,27	7,65
2015	8,74	14,77	10,22
2016			7.97
2017			5.72

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (Sakernas 2015)

7) Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia, dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), pergeseran orientasi pembangunan saat ini yang memposisikan manusia tidak hanya sebagai objek namun dipandang pula sebagai subjek, dan telah menjadi simbol pembangunan di beberapa negara maju. Pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan angka IPM secara umum menunjukkan trend positif, setiap tahun nilai IPM terus meningkat, yang diiringi pula peningkatan 4 (empat) komponen IPM, yani Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan. Jika dibandingkan dengan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki posisi kelima, dibawah Kota Bontang, Kota Samarinda Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau. IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Indeks Indeks Pembangunan Manusia Kutai Kartanegara Tahun 2010-2016

Komponen	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,50	71,60	71,64
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,24	13,25	13,26
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,46	8,68	8,71
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan (ribuan)	9.984	10.250	10.593
IPM	71,20	71,78	72,19
Peringkat IPM Dalam Provinsi Kalimantan Timur	5	5	5

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2018)

Kedudukan pembangunan manusia Kabupaten Kutai Kartanegara jika dibandingkan dengan Kalimantan Timur tahun 2016, rata-rata masih dibawah Kalimantan Timur, baik IPM maupun komponen pembentuk IPM. Berikut perbandingan IPM Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara.

Gambar II-10. IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur Tahun 2010-2016



2.2.3 Seni Budaya dan Olah Raga

a. Kebudayaan

Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat banyak suku-suku yang tersebar dari wilayah pesisir hingga pedalaman dengan aneka ragam seni budaya daerah, antara lain:

- 1. Kesenian Keraton terdiri dari: Tari, Mulawarman, Ganjur Bini, Kenjar Laki, Tari Kanjal, Tari Topeng, Tari Dewa.
- 2. Kesenian Penduduk asli terdiri dari: Patun, Ngelawai, Ngerangkau, Tari Leleng, Datun, Gong, Kelian Anak, Hudo' dan Pepatai (tari perang), Belian.

Kesenian Kutai Kartanegara Pedalaman terdiri dari: Kesenian Tingkilan, Tarsul, Pantun, Sair Jepen dan Hadrah.

Kemajuan pembinaan seni dan budaya saat ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah grup kesenian yang eksis di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut jumlah organisasi kesenian di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2016.

Tabel 2.12.
Jumlah Kelompok Kesenian

Tahun	Jumlah
2013	123
2014	174
2015	183
2016	257

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kukar 2017

b. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional. Sarana dan prasarana olahraga dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 2.13
Gedung Sarana Olahraga Di Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PRASARANA	FASILITAS	LOKASI
1	Stadion Olahraga Rondong Demang	Lapangan Sepak bola Lapangan Tenis (outdoor) Gedung Squas Kolam Renang Gedung Beladiri	Jl. Stadion Tenggarong
2	Lapangan Pemuda	Lapangan Sepak bola Lapangan Tenis (outdoor)	Jl. Mawar Tenggarong
3	Gedung Olahraga DPRD	Lapangan Bulu Tangkis Lapangan Tenis (outdoor & indoor)	Jl. Patin Tenggarong
4	Komplek Olahraga Perjiwa	Lapangan Sepak Bola dan Atletik Lapangan Panahan Gedung Beladiri Velodroom Lapangan berkuda Sirkuit Cros BMX Mess Atlit	Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang
5	Gedung KNPI	Ruang Pertemuan dan Sekretariat	Jl. Mawar Tenggarong
6	Gedung KONI	Sekretariat	Jln. Mulawarman
7	Gedung Bulu Tangkis/BPU	Tersebar di 18 Kecamatan	Di Kecamatan

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Gambaran perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, namun di beberapa indikator mengalami perkembangan yang baik, seperti tingkat angka putus sekolah yang semakin menurun kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah cukup berhasil. Berikut Indikator capaian layanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2.14.
Capaian Pelayanan Umum Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR PENDIDIKAN	SEKOLAH DASAR/MI				SEKOLAH PERTAMA/MTS				SEKOLAH MENENGAH			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Murid												
	Umum (Negeri)	184	189	192	192	238	254	249	261	359	361	366	431
	Umum (Swasta)	201	221	239	227	109	100	114	116	74	74	68	93
	Departemen Agama (Negeri)	302	309	309	641	395	429	444	454	232	242	266	341
	Departemen Agama (Swasta)	97	90	109	123	124	137	144	148	78	84	87	83
	SMK (Negeri)									291	332	-	333
	SMK (Swasta)									284	276	277	242
2	Rasio Murid Terhadap Guru												
	Negeri	12	12	14	13	12	11	12	18	13	13	13	26
	Swasta	12	13	8	14	10	8	5	8	3	4	6	10
3	Angka Putus Sekolah (%)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05	0.01	0.01	0.00	0.35	0.20	0.14	0.00
4	Angka Kelulusan (%)	100	98.20	99.10	100	96.27	99.96	99.98	100	99.74	99.48	99.54	100

NO	INDIKATOR PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	APK PAUD	46,95	76,80	53,51	77.44	77.50
2	SD/MI - SMP/MTs	100.12	100.04	100.02	100.08	100.10
3	SMP/MTs - SMA/SMK/MA	99.14	99.39	99.23	99.46	
4	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi (S1/D-IV)	80.35	83.62	89.06	89.12	91.94

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2016 & Data LPPD

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2016 & Data LPPD

b. Kesehatan

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari progres pencapaian Indikator kinerja kunci yang diasumsikan sebagai representasi tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik, namun di beberapa indikator mengalami penurunan seperti cakupan kunjungan bayi dan pertolongan persalinan terhadap tenaga kesehatan, kondisi ini menjadi salah satu perhatian serius dalam upaya menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan gambaran layanan kesehatan tahun 2015-2017

Tabel 2.15.
Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR PELAYANAN UMUM BIDANG KESEHATAN	2015	2016	2017
1	Rasio Posyandu Per 100 Balita	0.97	1.49	1.02

NO	INDIKATOR PELAYANAN UMUM BIDANG KESEHATAN	2015	2016	2017
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	2.93	2,87	2,87
3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0.0042	0.0041	0.0040
4	Rasio Tenaga Medis/Keperawatan Per 100.000 Penduduk			
	<i>Dokter Spesialis</i>	6.09	8.09	59.09
	<i>Dokter Umum</i>	15.93	18.62	144.93
	<i>Bidan</i>	83.37	94.18	717.96
	<i>Perawat</i>	137.10	158.28	1.157.22
5	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	98,45	100	100
	<i>Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan</i>	2.858	3.522	3.630
	<i>Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan</i>	2.903	3.522	3.630
6	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	92,47	84.55	80.20
	<i>Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan</i>	12.839	12.489	13.240
	<i>Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin</i>	13.885	14.772	16.509
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	73.83	71.31	77.64
	<i>Jumlah Desa/ Kelurahan UCI</i>	175	169	184
	<i>Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan</i>	237	237	237
8	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100
	<i>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan</i>	87	88	73
	<i>Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan</i>	87	88	73
9	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA Positif (%)	100	100	53.85
	<i>Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati</i>	446	392	475
	<i>Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)</i>	446	392	882
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100
	<i>Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai SOP</i>	886	1.739	264
	<i>Jumlah Penderita DBD yang ditemukan</i>	886	1.739	264
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100	100	100
12	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	82.9	81.89	79.46
	<i>Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan</i>	11,129	11482	11,942
	<i>Jumlah seluruh bayi lahir hidup</i>	13,424	14022	15,029

Sumber : Profil Kesehatan 2015-2017, Lppd 2015-2017

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas; jalan negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten, panjang jalan kabupaten sampai tahun 2016 mencapai 2,193.02 Km, dengan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 48,36%, jalan sedang 15,20%, jalan rusak sebesar 20,18% dan jalan rusak berat sebesar 16,27%. Kondisi ini menjadi gambaran pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.16.

Panjang dan kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	STATUS JALAN	PANJANG JALAN (KM)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jalan Negara	367.55	367.55	367.55	367.55	367.55	367.55	367.55
2	Jalan Provinsi	353.90	353.90	353.90	353.90	353.90	353.90	353.90

3	Jalan Kabupaten	1.511,45	1,543.93	1.547.110	2.276,77	2.276,77	2.276,77	2.193,02
---	-----------------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------

NO.	KECAMATAN	KONDISI JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN JALAN (KM)					JUMLAH 2016
		ASPAL	KERIKIL	BATU	TANAH	BETON	
1	Baik	192.13	289.48	-	196.67	382.27	1,060.55
2	Sedang	60.37	90.96	-	61.80	120.11	333.24
3	Rusak	80.16	120.77	-	82.05	159.48	442.46
4	Rusak Berat	64.63	97.38	-	66.16	128.60	356.77
	2016	397.29	598.59	-	406.68	790.46	2.193,02
	2015	452.69	551.94	260.57	735.17	892.20	2,892.57
Jumlah	2014	444.62	483.18	258.84	727.00	690.54	2,604.17
	2013	412.75	279.52	247.74	681.04	356.96	1,978.01

Sumber : BPS; DDA, 2017

2) Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2017 dalam kondisi baik mencapai 70,63% dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.13 Hektar.

Tabel 2.17.
Kondisi Irigasi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

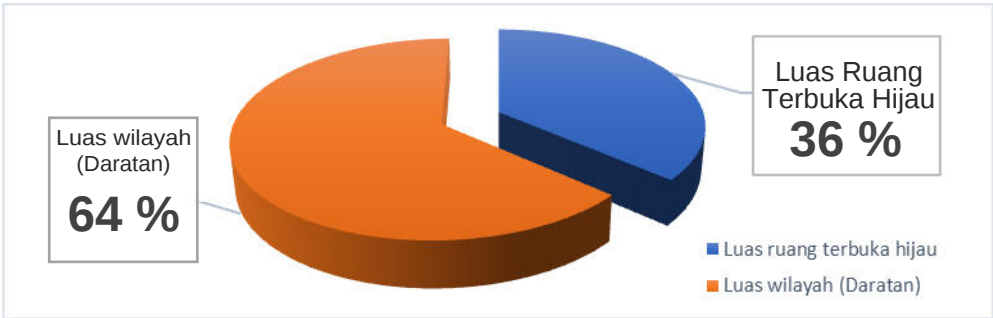
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	18.463,36	14.318	14.318	14.318	16,354.35
Luas irigasi kabupaten (ha)	20.287,99	20.287,99	20.287,99	20.287,99	23,154.13
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (persen)	91,01	70,57	70,57	70,57	70.63

Sumber : LPPD 2017

3) Penataan Ruang

Perhitungan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten, dihitung berdasarkan atas luasan wilayah daratan yakni sebesar 2.726.310,00 KM2 . Sedangkan Luas Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2017 sebesar 987.234,21 KM2

Gambar II-11. Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017



Sumber : LPPD 2017

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan yang sehat telah mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan layanan umum perumahan Kutai Kartanegara 2013-2016.

Tabel 2.18.
Perkembangan Layanan Umum Perumahan

NO	INDIKATOR LAYANAN UMUM PERUMAHAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	40.84	34.49	89.15	89.57	83.70
2	Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	62.41	63.19	68.14		73.00
3	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	29.87	22.56	91.75	91.97	85.29
4	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0.28	5.76	6.33	0.04	0.01
5	Rumah Layak Huni (%)	92.00	88.07	89.53	89.78	90.18

Sumber : LPPD 2017

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan layanan urusan ketentraman dan ketertiban umum, diukur dengan menggunakan pendekatan perhitungan resiko tindak kejahatan per 100.000 penduduk, yang disebut dengan crime rate. Angka Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 menurun dibanding tahun 2015, dengan angka 103,80, dengan interpretasi bahwa dari 100.000 penduduk terdapat 103 orang diantaranya beresiko untuk terkena tindak kejahatan. Oleh karenanya kebijakan-kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban umum terus dilakukan dalam rangka mencegah resiko tindak kejahatan di Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan crime rate Kutai Kartanegara 2013-2016.

Tabel 2.19.
Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2016

URAIAN	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk (Proyeksi BPS)	683,131	700,439	717,788	735,016
Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan (Crime Total)	993	1,099	1,054	763
Crime Rate/100.000 Penduduk	145.36	156.90	146.84	103.80

Sumber : BPS; DDA, 2017

6) Sosial

Masalah kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak faktor yang dapat memunculkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya adalah kemiskinan. Hal tersebut bukan sekedar disebabkan masalah keterampilan dan lapangan kerja, tetapi yang faktor utama seseorang menjadi PMKS adalah masalah sikap mental. Esensi dari permasalahan gelandangan adalah ketiadaan tempat tinggal bagi mereka yang terpaksa harus tinggal di kawasan itu sehubungan dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan disekitar tempat tersebut. Penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat dan dunia usaha juga mempunyai andildan tanggung jawab dalam penanganan PMKS. Data yang bersumber dari LPPD menyebutkan bahwa pada Tahun 2017 penanganan PMKS sebesar 93,72persen dengan total PMKS tertangani sebesar 49.486 orang dari 52.803 orang. Kedepannya Pemerintah dan Dinas Sosial dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi lebih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Salah satu yang dapat dijadikan solusi dalam melakukan penanganan PMKS adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial dengan sistem balai, rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan.

2.3.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah, perluasan lapangan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Angkatan Kerja (AK) Kutai Kartanegara setiap tahun menunjukkan peningkatan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang berfluktuasi dan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Berikut perkembangan AK dan TPAK Kutai Kartanegara 2013-2015.

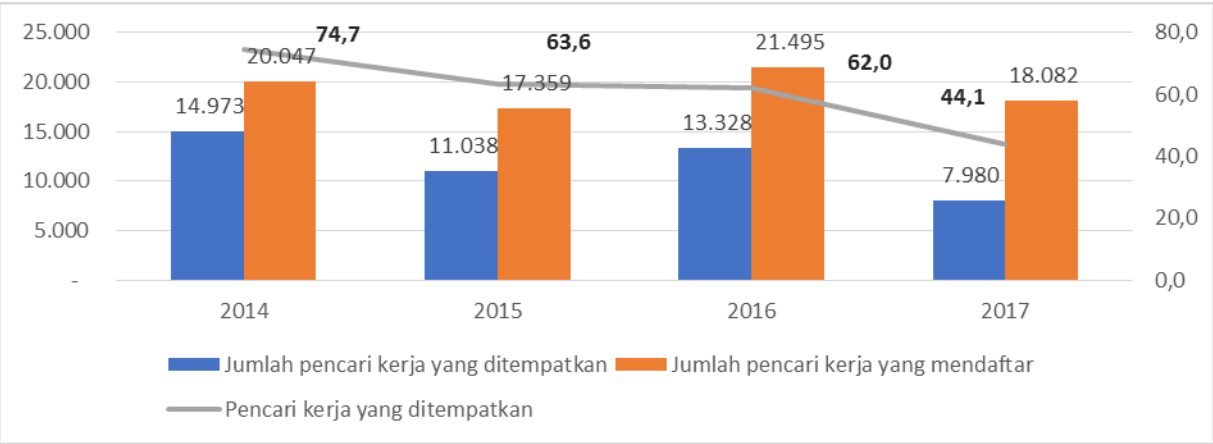
Tabel 2.20.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas

JENIS KELAMIN	2013		2014		2015	
	AK	TPAK	AK	TPAK	AK	TPAK
Laki-Laki	218,037	84.40	221,830	83.00	231,836	85.41
Perempuan	83,191	36.67	96,669	41.00	75,310	31.40
Jumlah Total	01,228	62.08	318,499	64.00	307,146	60.07

Sumber : BPS, 2016

Dari pendekatan pencari kerja yang dilakkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi penurunan persentase daya serap pencari kerja atau pencari kerja yang ditempatkan terus menurun hal ini disebabkan karena kecenderungan menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan pencari kerja yang ditempatkan.

Gambar II-12. Perkembangan pencari kerja yang ditempatkan 2014-2017

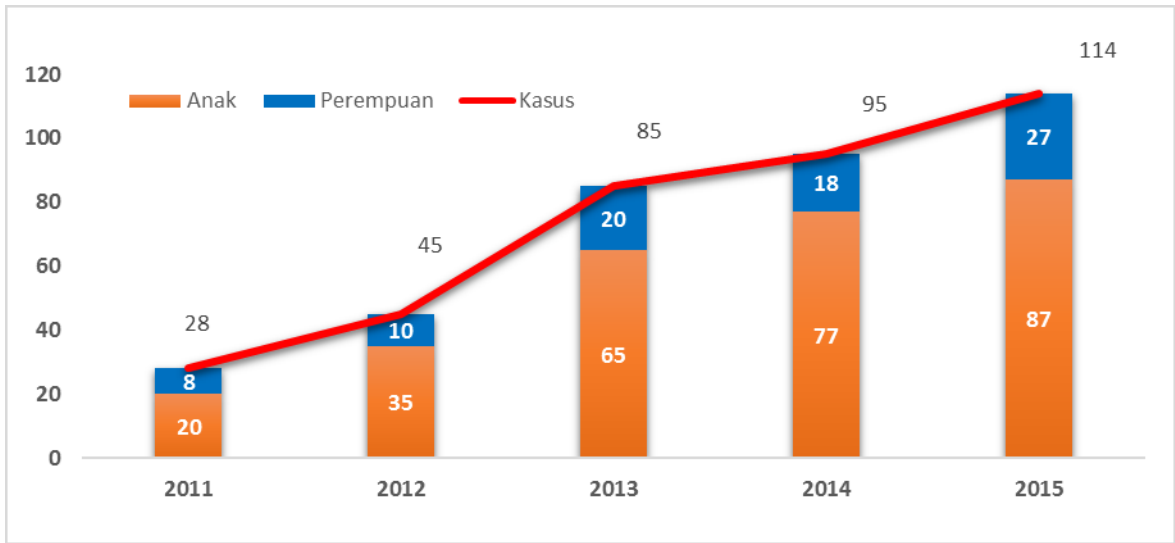


Sumber : LPPD, 2015-2017

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan salah satu gambaran terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan kasus yang dilaporkan pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa kasus kekerasan cenderung meningkat, total kasus tertangani pada periode 2011-2015 sebanyak 367 kasus. Berikut data jumlah kasus tertangani periode 2011-2015.

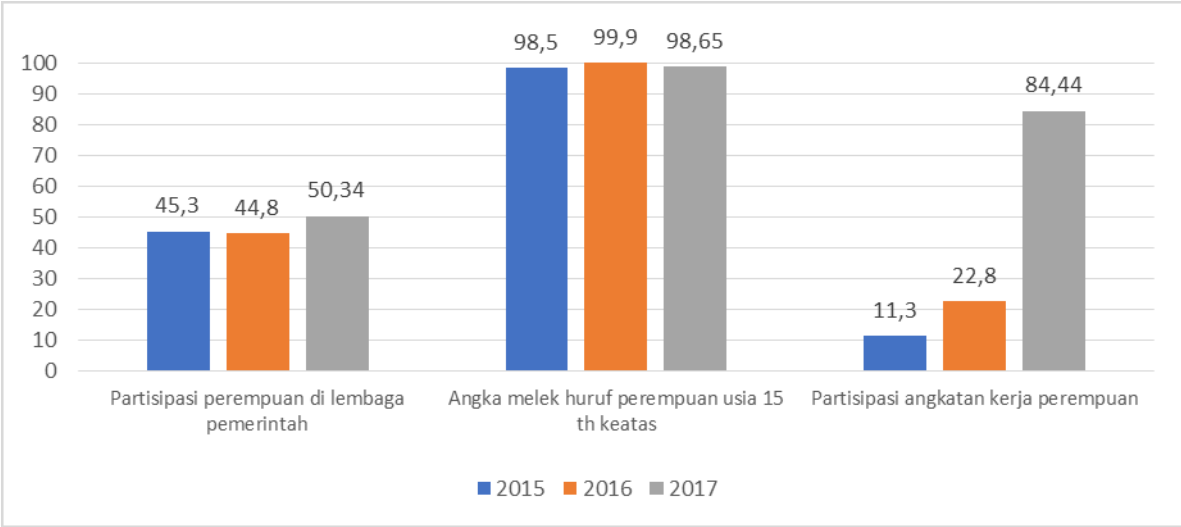
Gambar II-13. Perkembangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : LPPD, 2015-2017

Dalam hal penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, saat ini dapat diindikasikan dari pencapaian tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan partisipasi angkatan kerja, dengan memperhatikan capaian angka melek huruf perempuan, secara umum dari ketiga indikator tersebut sampai dengan tahun 2016, mengalami peningkatan kecuali angka melek huruf perempuan yang sedikit mengalami penurunan, diangka 98,65 %.

Gambar II-14. Perkembangan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara

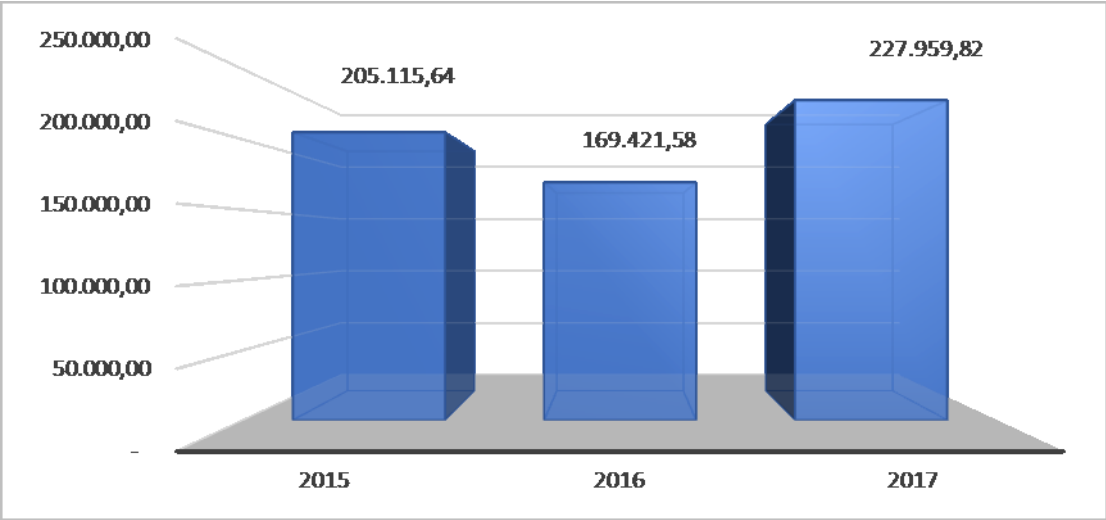


Sumber : LPPD, 2015-2017

c. Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memadai hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan utama (beras) setiap penduduk pertahun cukup besar, pada tahun 2015 sebesar 2015.115,64 kilogram per tahun per penduduk, kemudian mengalami naik turun setiap tahunnya, pada tahun 2016 menurun mencapai 169.421,58 kilogram pertahun per penduduk, dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 227.959,82 kilogram per tahun per penduduk. Berikut perkembangan ketersediaan pangan utama sampai dengan tahun 2017.

Gambar II-15. Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : LPPD, 2015-2017

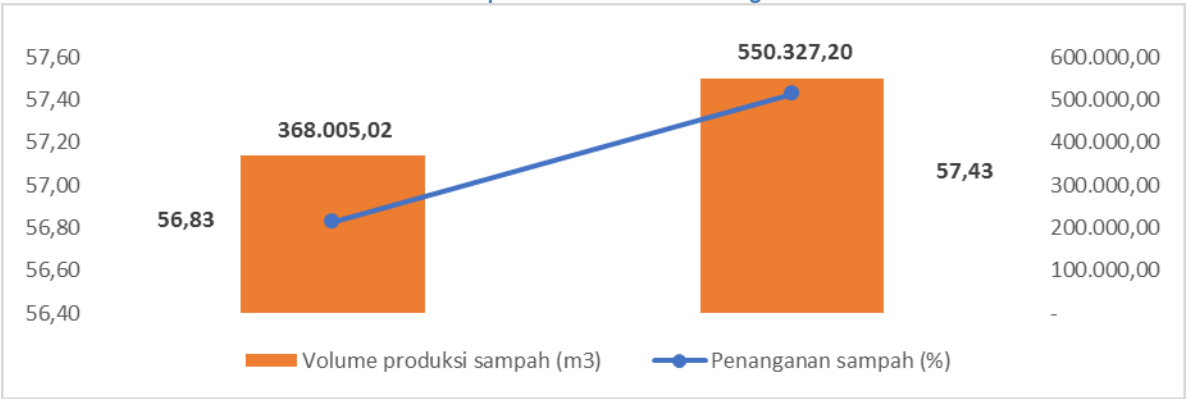
d. Pertanian

Tanda kepemilikan lahan menjadi bagian penting dari tertib hak kepemilikan lahan, persentase luas lahan yang memiliki sertifikat di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2017, sebesar 49.78%, dengan jumlah luas lahan sebesar 34.934.119,23 Ha, terhadap luas lahan yang harus bersertifikat sebesar 70.183.393,18. Sehingga masih terdapat sekitar 50,22% yang belum memiliki sertifikat, hal ini perlu penggalakan kesadaran masyarakat atas legalitas kepemilikan lahan yang lebih kuat. Dalam hal penyelesaian kasus pertanahan dari 13 kasus yang teridentifikasi 9 diantaranya dapat diselesaikan pada tahun 2017 atau 69,23%.

e. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan positif, volume sampah yang tercatat tahun 2016 sebanyak 550.327,20 meter kubik pertahun dan telah tertangani sebesar 57,43%. Kondisi ini meningkat sangat signifikan dari volume sampah pada tahun 2015, yang sebanyak 368.005,02 meter kubik dan tertangani sebesar 56,83%. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Gambar II-16. Perkembangan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : LPPD, 2015-2017

f. Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun terus mengalami perkembangan positif, peningkatan jumlah penduduk dan proporsi kepemilikan KTP menjadi bagian penting dari komitmen pelayanan tertib administrasi kependudukan, hingga tahun 2016 kepemilikan KTP mencapai 95,62%, sedangkan 88% telah memiliki akta kelahiran, kedepan perbaikan sistem pelayanan harus terus dilakukan agar seluruh warga Kutai Kartanegara dapat memiliki KTP dan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.21.
Tingkat Capaian Tertib Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kutai Kartanegara 2015-2017

INDIKATOR KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	2015	2016	2017
Kepemilikan KTP	94.64%	95.62%	89.77%
Jumlah penduduk yang memiliki KTP	382.993	424.919	416.440
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)	404.673	444.364	463.909
Kepemilikan Akta Kelahiran	89%	88%	90.80%
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	581.313	585.717	612.677
Jumlah penduduk	655.167	662.481	674.759

Sumber : LPPD, 2015-2017

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat pemberdayaan masyarakat, dalam pendekatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terbentuk di setiap desa dan kelurahan, dapat diukur melalui tingkat keaktifan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang bertujuan untuk meningkatkan daya kreasi masyarakat di desa/kelurahan dalam menopang perekonomian keluarga. Jumlah PKK yang terbentuk di Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah 256 lembaga, dengan tingkat keaktifan 100%. Selain daripada itu lembaga pemberdayaan yang perlu ditingkatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan (Posyandu), yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing masyarakat desa/kelurahan yang dibantu oleh peugas kesehatan. Keaktifan Posyandu dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pemberdayaan yang telah dilakukan, adapun jumlah posyandu tahun 2017 di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 760, dengan tingkat keaktifan mencapai 100%.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mencapai 3% pertahun, tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut, salah satunya disebabkan karena tingginya angka kelahiran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keluarga Berencana dalam jangka panjang menjadi bagian kebijakan pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk. Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih dalam kategori baik, tahun 2017 Prevalensi peserta KB aktif mencapai 72,64%, kondisi sedikit menurun dibanding tahun 2016, kondisi ini disebabkan karenan keterbatasan tenaga penyuluh KB di setiap desa, Tahun 2017 rasio petugas lapangan hanya sebesar 0.34, atau terdapat beberapa desa/kel yang tidak memiliki tenaga penyuluh KB.

Tabel 2.22.
Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kutai Kartanegara 2014-2016

INDIKATOR KELUARGA BERENCANA	2015	2016	2017
Prevalensi peserta KB aktif	73.87	76.08	72.64
Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB)disetiap desa	3.05	2.90	0.34
Jumlah peserta program KB aktif	97,468	103,386	95,678
Jumlah pasangan usia subur	131,953	135,900	131,719

Sumber : LPPD, 2015-2017

i. Perhubungan

Aksesibilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini secara umum dilalui melalui dua jalur transportasi yakni jalan darat dan perairan, dari aspek kemudahan aksesibilitas jalan darat menjadi pilihan terbaik, mengingat biaya dan waktu tempuh yang lebih singkat, dengan demikian untuk memberikan pelayanan terhadap aksesibilitas masyarakat maka keberadaan angkutan darat menjadi tolok ukur tingkat aksesibilitas masyarakat, jumlah angkutan darat Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2017 mencapai 16.054 angkutan dengan jumlah penumpang sebesar 62.095 orang.

Tabel 2.23.
Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat
Kutai Kartanegara 2015-2017

Indikator Perhubungan Darat	2015	2016	2017
Jumlah angkutan darat	14,918	15,004	16.054
Jumlah penumpang angkutan darat	154,448	141,548	62.095

Sumber : LPPD, 2015-2017

j. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data BPS Kutai Kartanegara terkait dengan hal teknologi dan informasi, diketahui data akses teknologi komunikasi dilakukan melalui telepon rumah, telepon seluler, komputer desktop, dan laptop. Rumah tangga yang memiliki akses telepon rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 sebesar 4,02 persen. Sementara itu rumah tangga yang menggunakan telepon seluler sebesar 96,37 persen. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan komputer desktop dan laptop sebesar 5,46 persen dan 25,25 persen pada tahun yang sama.

Tabel 2.24.
Akses Terhadap Teknologi dan Informasi Kutai Kartanegara 2012-2014

Akses Terhadap Teknologi dan Informasi	2012	2013	2014
Telepon Rumah (%)	4,42	5,18	4,02
Telepon Seluler (%)	96,37	97,14	96,37
PC/Desktop (%)	8,96	6,90	5,46
Laptop/Notebook (%)	20,12	24,46	25,25

Sumber : LPPD, 2015-2017

k. Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM merupakan penyangga perekonomian daerah yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan, proporsi koperasi aktif sampai dengan tahun 2017 sebesar 77,13% dari jumlah total koperasi sebanyak 656 koperasi. Sedangkan perkembangan usaha mikro dan kecil (UKM) hingga tahun 2017 berjumlah 38.805 unit. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Tabel 2.25.
Jumlah UMK dan Koperasi Kutai Kartanegara 2015-2017

Indikator Koperasi Dan Ukm	2015	2016	2017
Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil	38,631	38,361	38,805
Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil Aktif	82.54	100.00	97.82
Jumlah Koperasi Aktif	480	527	506
Jumlah Seluruh Koperasi	597	642	656
Persentase Koperasi Aktif	80.40%	82.09%	77.13%

Sumber : LPPD, 2015-2017

l. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri, hingga akhir tahun 2016 menurun dibanding tahun 2015, yakni hanya mencapai 973 Miliar Rupiah. Sedangkan untuk Investasi Asing lebih baik dibanding tahun 2015 yakni diatas 2 Triliyun US Dollar. Tenaga kerja yang

dapat diserap hingga tahun 2016 bertambah sebanyak 16.713 untuk pekerja Indonesia, dan 68 orang untuk pekerja asing. Berikut perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan daya serap tenaga kerja hingga tahun 2016.

Tabel 2.26.
Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2016

Tahun	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2014	9	6.493.558.100.000	-	-
2015	31	5.492.555.486.386	5.647	24
2016	37	973.606.015.564	1.509	8

Tabel 2.27.
Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2016

Tahun	Jumlah Proyek	Investasi (US\$)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2014	24	2.571.589.532.672	-	-
2015	24	2.199.617.509.403	6.420	55
2016	56	2.272.030.595.825	15.204	60

Sumber : BPS, DDA 2016

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional. Sarana dan prasarana olahraga dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 2.28.
Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara 2017

No	Fasilitas	Jumlah
1	Lapangan Sepakbola	244
2	Lapangan Basket	32
3	Lapangan Volley	433
4	Lapangan Bulu Tangkis	309
5	Kolam Renang	1
6	Lapangan Tennis	11
7	Lapangan Tennis Meja	201
8	Lapangan Sepak Takraw	87
9	Lapangan Futsal	24
10	Gelanggang/Balai Remaja	187

Sumber : LPPD, 2015-2017

n. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran Permendagri No 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti :

1. Buku “Kabupaten Dalam Angka”
2. Buku “PDRB Kabupaten dan PDRB per Triwulan”

Kedua dokumen diatas tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

o. Kebudayaan

Kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam rangka mengedepankan kearifan lokal daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah dan keunikan budaya saat ini menjadi icon kekayaan budaya daerah dan nasional, sehingga upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara terus didorong dengan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta meningkatkan ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah. Berikut perkembangan seni dan budaya Kutai Kartanegara tahun 2015 sampai dengan 2017.

Tabel 2.29.
Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2016

INDIKATOR KEBUDAYAAN	2015	2016	2017
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	75	76	76
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	11	18	18
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Unit)	37	37	37
Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah (Unit)	37	37	39

Sumber : LPPD, 2015-2017

p. Perpustakaan

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator kinerja pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan mutu pendidikan. Data jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dirinci per kunjungan setiap bulannya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.30.
Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017

URAIAN	2015	2016	2017
Jumlah Koleksi Judul Buku Yg Tersedia Di Perpustakaan Daerah	25.197	27.384	28,382
Jumlah Koleksi Jumlah Buku Yg Tersedia Di Perpustakaan Daerah	60.611	62.796	63,796
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Selama 1 Tahun	28.010	256.129	275,257

Sumber : LPPD, 2015-2017

q. Kearsipan

Arsip berfungsi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaaan serta dipergunakan pula dalam penyelenggaraan administrasi negara, sehingga sistem kearsipan harus dapat berjalan dengan baik disetiap penyelenggaran pemerintahan daerah. Salah satu ukuran yang dilakukan adalah penerapan kearsipan secara baku di setiap perangkat daerah, saat ini 40 perangkat daerah telah menerapkan kearsipan secara baku dari 58 perangkat daerah atau 68,97%, kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 61,39%.

Tabel 2.31.
Penerapan Arsip Baku di Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2015-2017

URAIAN	2015	2016	2017
Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	64	62	40
Persentase	58.18	61.39	68.97

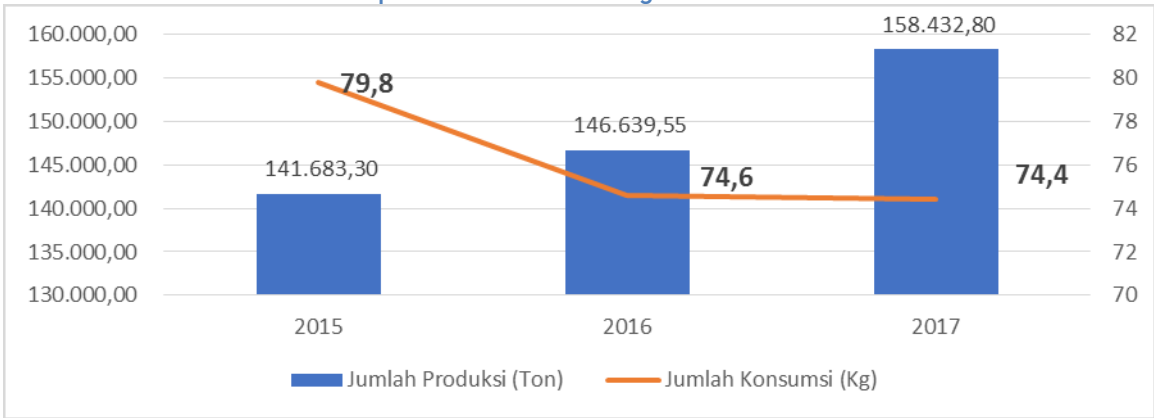
Sumber : LPPD, 2015-2017

2.3.3 Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup melimpah, yang ditunjukkan dengan tingginya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budi daya, hingga tahun 2017 produksi perikanan sebesar 158.432,80 Ton atau tumbuh sebesar 8,04%, sedangkan trend konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 sama dengan tahun 2016, yakni sebesar 74,4 Kg/penduduk. Namun demikian konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara di atas rata-rata konsumsi nasional yakni sekitar 45 Kg/penduduk.

Gambar II-17. Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 - 2017



Sumber : LPPD, 2015-2017

b. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai trigger dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomiterbarukan, kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya. Kunjungan wisatawan pada tahun 2016 terbesar pada destinasi wisata buatan sebesar 63%, disusul wisata budaya 31% dan wisata alam sebesar 6%. Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pulau Kumala dan Ladaya. Berikut proporsi kunjungan wisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan daya tarik wisata.

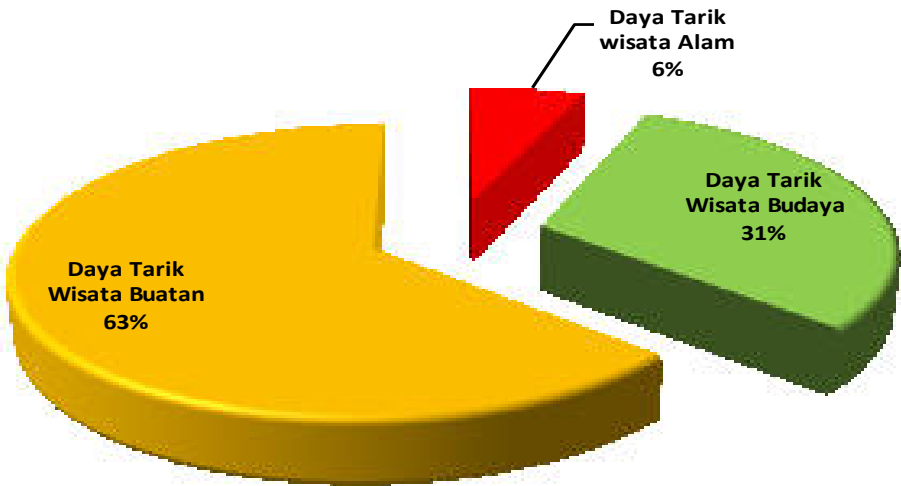
Tabel 2.32. Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

NAMA OBJEK WISATA		JUMLAH KUNJUNGANWISATAWAN TAHUN 2016		JUMLAH (ORANG)
		WISNUS (ORANG)	WISMAN (ORANG)	
Daya Tarik Wisata Alam				
1	Bukit Bengkirai Samboja	34.311	705	35.016
2	Borneo Orang Utan Survival (BOS)	2.142	1.318	3.460
3	Pantai Tanah Merah Samboja	39.800	0	39.800
Daya Tarik Wisata Budaya				
4	Museum Mulawarman	156.892	410	157.302
5	Museum Kayu	18.437	254	18.691
6	Situs Makam Raja Kutai	155.355	0	155.355
7	Situs Sanga sanga			
Daya Tarik Wisata Khusus/Buatan				
8	Waduk Panji Sukarame	38.300	218	38.518
9	Planetarium	31.848	218	32.066
10	Lamin Etam Ambors	68.810	13	68.823
11	Pulau Kumala	377.597	0	377.597
12	Ladaya	277.601	0	277.601

NAMA OBJEK WISATA	JUMLAH KUNJUNGANWISATAWAN TAHUN 2016		JUMLAH (ORANG)
	WISNUS (ORANG)	WISMAN (ORANG)	
2016	1.818.236	4.050	1.822.286
2015	1.368.812	3.730	1.367.542

Sumber : BPS, 2107

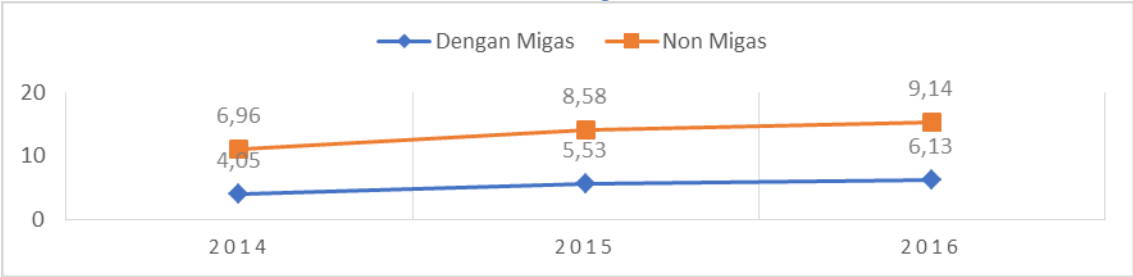
Gambar II-18. Proporasi Kunjungan Wisata Berdasarkan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2014 – 2016



Sumber : BPS, 2107

Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kontribusi pariwisata tahun 2016 sebesar 6,13% dengan migas dan tanpa migas sebesar 9,14% kondisi ini meningkat dibanding tahun 2015. Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian daerah, salah satu kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah sebagai titik point krusial dalam proses pembangunan pariwisata daerah.

Gambar II-19.Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRBKabupaten Kutai Kartanegara 2014 - 2016



Sumber : BPS, 2017

- c. Pertanian
 - 1) Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Sebagai daerah lumbung pangan Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada tantangan yang besar dalam menyediakan pasokan pangan Kalimantan

Timur. Sektor pertanian setiap tahun cenderung meningkat yang ditunjukan dengan pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 2%, lebih lambat dibanding tahun 2015 yang mencapai 7%. Melambatnya pertumbuhan sektor pertanian tersebut salah satunya adalah karena penurunan luas panen, namun disisi lain pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat produksi pertanian berkembang dengan baik, sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga. Komoditas unggulan sektor pertanian yang menjadi perhatian saat ini selain beras adalah jagung dan ubi kayu. Berikut perkembangan komoditas beras, jagung dan ubi kayu di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015.

Tabel 2.33.
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Beras
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

Kecamatan	Januari - Desember 2015		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Semboja	2.337	49,33	11.527
Marang Kayu	2.470	49,44	12.211
Kota Bangun	2.442	50,39	12.305
Sebulu	2.964	48,37	14.336
Muara Kaman	3.410	49,37	16.835
Tenggarong	3.136	53,77	16.861
Loa Kulu	6.703	50,10	33.584
Tenggarong Seberang	7.950	53,13	42.239
JUMLAH	31.412	50,90	159.899

Sumber : BPS, 2017

Tabel 2.34.
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

KECAMATAN	JAGUNG			UBI KAYU		
	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KW/HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KW/HA)	PRODUKSI (TON)
SAMBOJA	177	35	627	26	231	602
MUARA JAWA	-	-	-	19	236	449
SANGA-SANGA	1	33	3	12	213	256
LOA JANAN	-	-	-	15	217	325
LOA KULU	11	34	37	18	228	411
MUARA MUNTAI	-	-	-	65	212	1,381
MUARA WIS	-	-	-	7	209	147
KOTA BANGUN	-	-	-	208	217	4,518
TENGGARONG	-	-	-	64	258	1,649
SEBULU	-	-	-	112	226	2,535
TENGGARONG SEBERANG	-	-	-	25	226	565
ANGGANA	-	-	-	38	231	877
MUARA BADAK	-	-	-	25	230	575
MARANG KAYU	231	39	909	94	248	2,327
MUARA KAMAN	-	-	-	79	215	1,696
KENOHAN	-	-	-	21	211	443
KEMBANG JANGGUT	-	-	-	75	223	1,670
TABANG	-	-	-	55	232	1,274
Rata-Rata 2015	420	38	1,576	958	227	21,700
2014	249	32	834	1,161	199	23,260
2013	413	32	1,342	1,152	183	21,027

Sumber : BPS, 2017

2) Peternakan

Pembangunan peternakan, menjadi bagian penting dalam pencapaian pembangunan pertanian dalam arti luas, peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum terus meningkat, seiring dengan meningkatnya konsumsi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka mendorong swasembada ternak, maka diperlukan upaya-upaya konkrit dan terobosan yang tepat dengan berpegang pada potensi pengembangan peternakan di masing-masing kecamatan. Berikut perkembangan produksi ternak berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

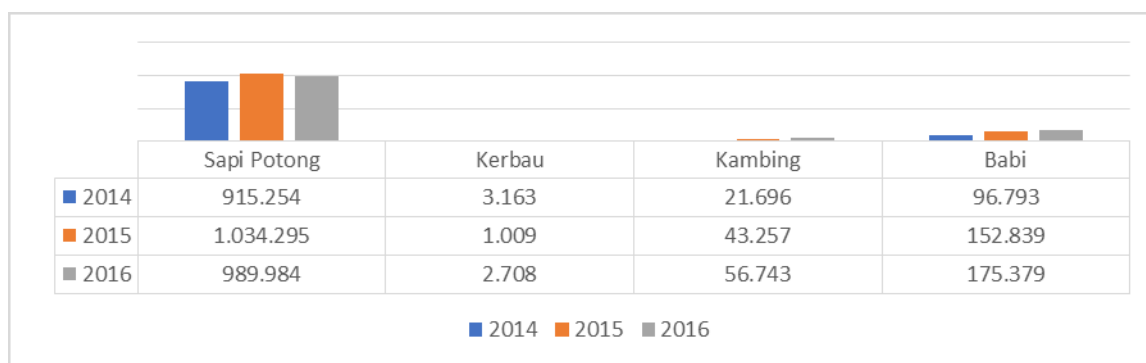
Tabel 2.35.
Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

KECAMATAN	SAPI POTONG	KERBAU	KAMBING	BABI
SAMBOJA	8,661	278	1.308	338
MUARA JAWA	707	14	157	-
SANGA-SANGA	295	0	181	14
LOA JANAN	600	26	252	861
LOA KULU	3,812	38	939	177
MUARA MUNTAI	619	949	33	-
MUARA WIS	923	1.004	66	194
KOTA BANGUN	2,766	247	1.778	89
TENGGARONG	1,475	26	401	255
SEBULU	913	127	440	170
TENGGARONG SEBERANG	2,314	100	1.446	325
ANGGANA	520	18	118	-
MUARA BADAK	944	28	406	554
MARANG KAYU	1,092	151	260	322
MUARA KAMAN	1,475	251	525	-
KENOHAN	1,047	59	40	382
KEMBANG JANGGUT	394	48	39	62
TABANG	411	3	61	1.222
2016	28.968	3.367	8.450	4.965
2015	27,508	3,214	8,066	4,585
2014	26,198	3,061	7,682	4,367
2013	25,640	4,287	6,950	4,878

Sumber : BPS, 2017

Dari sisi produksi daging ternak, daging sapi mengalami penurunan ditahun 2016 dibanding tahun 2015, sedangkan untuk daging kerbau, kambing dan babi menunjukkan kinerja lebih baik daripada tahun 2015. Berikut perkembangan produksi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar II-20.Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2014 - 2016



Sumber : BPS, 2017

3) Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup tinggi yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Sebagian besar komoditas terdapat pada perkebunan rakyat, sedangkan untuk perkebunan besar terdapat komoditas karet, kelapa sawit dan kenaf. Produksi perkebunan hingga tahun 2016 mengalami perbaikan daripada tahun 2015, sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, jumlah rumah tangga petani untuk perkebunan rakyat pada tahun 2016 mencapai 33.311 rumah tangga petani. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan penguatan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sasaran proses transformasi struktur ekonomi daerah.

Tabel 2.36.
Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

Jenis Tanaman	Perkebunan Rakyat			Perkebunan Besar	
	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha)	Petani (ruta)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/ha)
Karet	7.098,03	1.071,57	9.085,00	766,00	514,81
Kelapa	5.452,70	875,50	5.312,00	-	-
Kelapa Sawit	202.931,30	14.937,84	12.849,00	1.738.708,03	12.418,51
Kopi	27,57	220,33	1.900,00	-	-
kakao	33,83	620,66	175,00	-	-
Cengkeh	-	-	-	-	-
Lada	2.541,32	633,86	2.9393,00	-	-
Kapuk	-	-	-	-	-
Vanili	-	-	-	-	-
Kemiri	10,40	185,15	305,00	-	-
Aren	148,60	895,15	746,00	-	-
Jarak	-	-	-	-	-
Kenaf				766,00	514,81
2016	218.243,75	3.582,42	33.311,00	1.739.474,03	9.720,64
2015	265.955.52	25.129.50	32.010.00	1.280.969.87	9.473.35
2014	192.992.04	23.205.00	31.478.00	1.074.753.00	15.899.00
2013	161.769.70	28.887.14	28.426.00	999.854.00	19.146.29

Sumber : BPS, 2017

4) Perdagangan

Urusan perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara jika dilihat dari kinerja Nilai Tambah Bruto Kategori Perdagangan, mengalami pertumbuhan positif hingga tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3% pertahun, pertumbuhan NTB perdagangan ini menjadi

bagian penting dari kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Dalam perspektif pengembangan ekonomi regional nilai ekspor barang dan jasa menjadi bagian penting dari pengukuran tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif komoditi ekspor daerah. Nilai ekspor bersih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 mencapai 68,386,360,320,000 Rupiah, sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp. 66.170.384.000.000, sehingga mengalami peningkatan sebesar 2 Triliyun Rupiah.

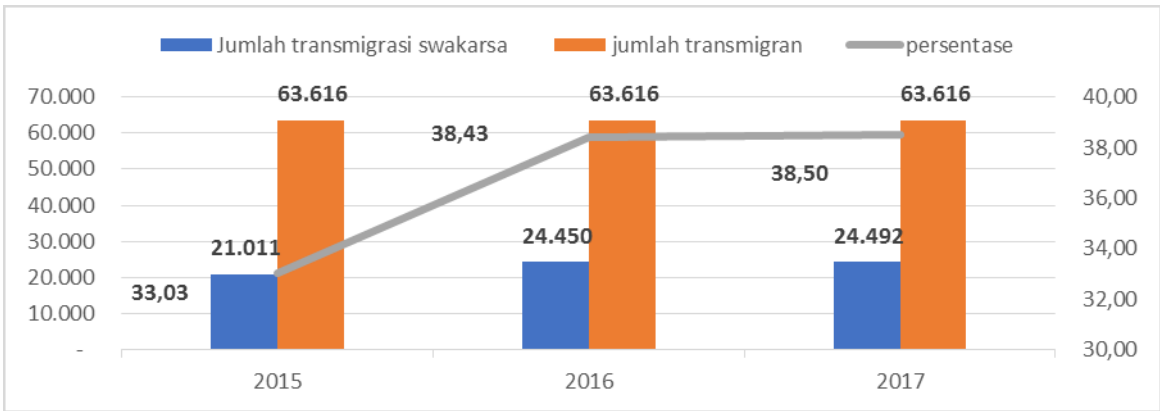
5) Industri

Dalam upaya penguatan struktur ekonomi daerah, sektor industri menjadi fokus pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konteks peningkatan nilai tambah. Perkembangan industri pengolahan tiga tahun terakhir tumbuh positif dengan rata-rata 6% pertahun, tahun 2016 tumbuh sebesar 8,59% dan tertinggi semenjak tahun 2013, berdasarkan atas kondisi ini prospek industri pengolahan di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat baik, kondisi ini seiring dengan pertumbuhan jumlah industri tahun 2017 yang mencapai 2.89% (LPPD, 2017) dengan jumlah sebanyak 8.656 industri lebih baik dibanding tahun 2016 dengan jumlah sebesar 8.406 industri. Dalam upaya mendorong sektor industri bergerak positif, maka dukungan sektor primer khususnya pertanian menjadi perhatian penting.

6) Transmigrasi

Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sebesar 63.616 orang, sedangkan untuk transmigrasi swakarsa setiap tahunnya sekitar 24,4 ribu orang. Transmigrasi swakarsa merupakan transmigrasi yang dilakukan karena keinginan sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal ini menggambarkan bahwa Kutai Kartanegara dianggap cukup baik dalam melakukan pelayanan bagi seluruh transmigran.

Gambar II-21. Perkembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 – 2015



Sumber : LPPD, 2015-2017

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)
- Konsumsi rumah tangga perKapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makan dan bukan makan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit. Seperti dipublikasikan oleh BPS, pada tahun 2017

sebagian besar pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan daripada non makanan (perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain). Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2016 yaitu pengeluaran untuk kebutuhan non makanan lebih besar daripada makanan. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengeluaran penduduk bulanan. Mereka menghabiskan 53.10 persen dari pengeluarannya untuk makanan, dan 46,90 persen untuk non makanan. Sedangkan pada tahun 2015, pengeluaran untuk kebutuhan makanan sebesar 48,98 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 51,02 persen. Berdasarkan tipe daerah, secara umum tingkat pengeluaran penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Di perkotaan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp.1.065.060,- sedangkan di pedesaan sekitar Rp. 1.035.449,-. Sementara rata-rata total pengeluaran secara total di perkotaan dan pedesaan per kapita sebulan mencapai Rp. 1.045.571,-.

Tabel 2.37.
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Daerah Kota dan Pedesaan
Tahun 2014-2016

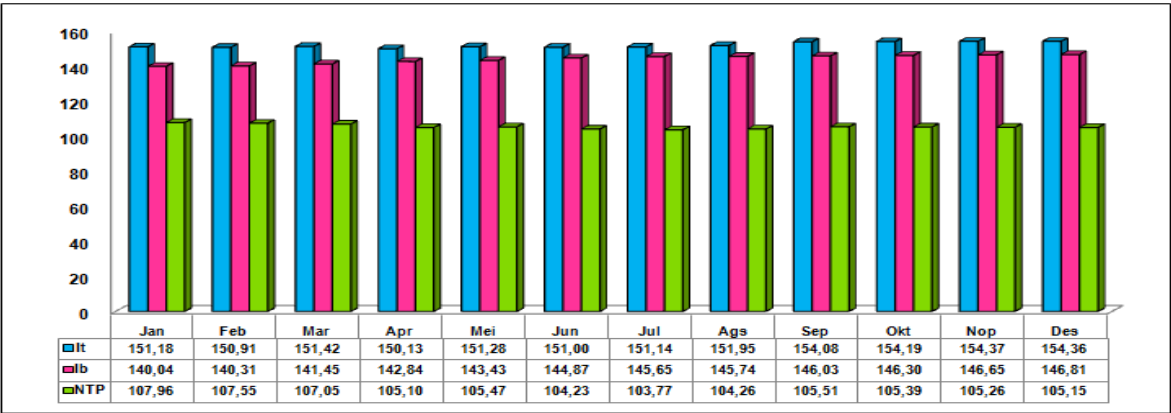
URAIAN			2014		2015		2016	
			RP	%	RP	%	Rp	%
1.	Kota/Urban							
	a.	Makanan/Food	431,195	43.97	484,618	47.18	540,809	50.78
	b.	Bukan Makanan/Non Food	549,468	56.03	542,454	52.82	524,252	49.22
	c.	Jumlah/Total	980,664	100.00	1,027,072	100.00	1,065,060	100.00
2.	Pedesaan/Rural							
	a.	Makanan/Food	415,629	49.65	484,287	49.92	562,671	54.34
	b.	Bukan Makanan/Non Food	421,444	50.35	485,915	50.08	472,777	45.66
	c.	Jumlah/Total	837,073	100.00	970,202	100.00	1,035,449	100.00
3.	Kota + Pedesaan/Urban + Rural							
	a.	Makanan/Food	420,739	47.58	484,397	48.98	555,198	53.10
	b.	Bukan Makanan/Non Food	463,466	52.42	504,600	51.02	490,372	46.90
	c.	Jumlah/Total	884,205	100.00	988,996	100.00	1,045,571	100.00

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka, 2017

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP), yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persen), merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani atau untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (termoftrade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Gambar II-22.Indeks Diterima Petani (It), Indeks Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani



(NTP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Januari-Desember 2015

Sumber : BAPPEDA dan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah folus fasilitas wilayah/infrastruktur. Fokus ini menganalisa upaya penyediaan sarana dan prasaran oleh

pemerintah daerah dalam rangka menarik investor usaha agar berinvestasi dan membuka usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari data yang tersedia untuk menganalisa fokus fasilitas wilayah/infrastruktur diukur dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan lagi pada Jenis, kelas dan jumlah kamar hotel. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan.

- a. Perhubungan
1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 1.584,82 km, Jalan Provinsi sepanjang 353,90 km, dan Jalan Nasional sepanjang 367,55 km. Sehingga jumlah total panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011 adalah sepanjang 2,306.27 km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang sangat cepat yaitu sebesar 235.163 di Tahun 2011 atau hampir 7 kali dari jumlah semula yang hanya 30.809 pada tahun 2010.

Tabel 2.38.
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2011

NO	URAIAN	2009	2010	2011
1	Panjang jalan	2.246,84	2.269,36	2.306,27
2	Jumlah kendaraan	27.086,00	30.809,00	235.163,00
3	Rasio	0,08	0,07	0,01

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

- 2) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga Per Tahun

Transportasi air di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 10 buah dermaga yang tersebar di beberapa kecamatan. Data tahun 2011 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah orang dan barang yang tiba dan berangkat melalui dermaga dengan angkutan sungai dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010 terangkut sebanyak 112.246 orang dan 16.887 barang, sedangkan tahun 2011 terangkut sebanyak 217.883 orang dan 290.717 barang. Data tahun 2012 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.39.
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2010-2011

NO	URAIAN	2010		2011		2012	
		ORANG	BARANG	ORANG	BARANG	ORANG	BARANG
1	Dermaga Hamdil II Muara Jawa	11.329	259	16.860	75.112	16.108	71.631
2	Demaga Sukmawira	19.558	14.463	62.761	190.290	-	-
3	Dermaga Sungai Meriam	21.118	27	19.985	18.034	16.108	74.121
4	Demaga Kota Bangun	4.996	367	13.219	3.815	20.823	31.000
5	Dermaga Muara Muntai	2.358	1.508	3.290	3.161	-	-
6	Dermaga Muara Kaman	148	15	232	4	17.624	1.194
7	Dermaga Pulau Kumala	48.850	-	97.776	-	5.030	2.795
8	Dermaga Tepian Pandan	3.511	-	3.447	3	-	-
9	Dermaga Muara Wis	347	233	280	254	344	-
10	Dermaga Sebulu	31	15	33	44	-	-
	JUMLAH	112.246	16.887	217.883	290.717	76.037	180.741

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2012 dan 2013

- b. Perumahan dan Pemukiman
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air leding, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu daerah. Sesuai data terbaru, jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.40.
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Uraian	2014	2015	2016
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	46,114.00	88,229.00	113,114.00
Jumlah Total Rumah Tangga	175,368.00	180,402.00	196,390.00
Rasio (%)	26.30%	48.91%	57.60%
Penduduk Berakses Air Minum	368,646.00	390,156.00	419,652.00
Jumlah Penduduk	700,439.00	717,789.00	735,016.00
Rasio	52.63%	54.36%	57.09%

Sumber: BPS Kutai Kartanegara

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus terakhir yang dibahas pada aspek daya saing daerah adalah iklim berinvestasi. Fokus iklim berinvestasi melihat kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara apakah kondusif dalam mendukung investasi riil yang masuk ataukah tidak. Penilaian fokus berinvestasi didukung oleh data angka kriminalitas yang dijabarkan dibawah ini. Peluang investasi di Kutai Kartanegara masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti luas) dan potensi investasi sektor energi (batubara dan migas). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kutai Kartanegara.

1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin tidak aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kertanegara semakin aman. Dalam masyarakat semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dimiliki masyarakat, hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim berinvestasi. Dari pendekatan perhitungan angka kriminalitas (crime rate) Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk daerah yang aman mengingat angka kriminalitasnya rendah, tahun 2016 dengan nilai 104 yang artinya resiko tindak kriminal penduduk pertahun sebesar 104 orang dari 100.000 penduduk, perkembangan angka kriminalitas sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.41.
Angka Kriminalitas Selama 1 (satu) Tahun Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Jumlah Kriminalitas	1.087	1.054	763
Jumlah Penduduk (Proyeksi BPS)	700.439	717.789	735.016
Crime Rate	155	147	104

Sumber: BPS, 2017

2) Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja dianalisa dari rasio tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk. Rasio tingkat kelulusan di Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.42.
Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian	2013	2014	2015
XII. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan **	850,791	640,988	654,717
1. Tidak/Belum Sekolah	171,065	130,880	164,539
2. Belum Tamat SD/Sederajat	133,651	103,139	112,238
3. Tamat SD/Sederajat	200,482	149,801	142,169
4. SLTP/Sederajat	128,606	95,105	86,969
5. SLTA/Sederajat	181,990	134,588	123,016
6. Diploma I/II	4,537	3,459	2,938
7. Akademi/Diploma III/S. Muda	7,671	5,704	5,167
8. Diploma IV/Strata I	21,404	17,186	16,627
9. Strata II	1,319	1,083	1,014
10. Strata III	66	43	40

Sumber: SIPD

3) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 mencapai angka 42,31 persen, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 43 orang usia tidak produktif baik itu usia 0-14 tahun dan usia 65 keatas.

Tabel 2.43.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2013-2016

Interval Usia	2013	2014	2015	2016
>15	206.330	152.850	193.121	161.068
15-64	558.150	437.247	398.620	434.715
>65	27.567	23.194	20.179	22.839
Rasio Ketergantungan	41.91	40.26	53.51	42.31

Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan urusan sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Kinerja Daerah Per Urusan 2011-2017

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	1.52	5.49	0.04	-1.08	-7.17	-1.97	1.60
1.02	Tingkat inflasi	%	6,51	5,15	9,79	6,94	4.12	3.60	3.76
1.3a	PDRB ADHB	Juta Rp	124,774	132,095	129,959	156,723	127,151	127,869	148,028
1.3b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	194,435	196,608	190,241	223,750	177,143	173,968	196,822
1.04	Indeks gini	%	0,30	0,30	0,31	0,31	0,29	0,27	0.29
1.05	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	92.79	93.06	92.48	92.58	92.01	92.37	92.43
			7.21	6.94	7.52	7.42	7.99	7.63	7.57
1.06	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	55,93	62,88	55,54	70,47	72,14	67,76	77.39
1.07	Tingkat pengangguran	%	7.68	7.89	7.37	7.65	10.22	7.97	5.72
1.10.a	Jumlah Penduduk (ribu)	Jiwa	648.22	665.49	683.00	700.00	718.00	735.00	752.00
1.10.b	Pertumbuhan Penduduk	%	3,87	2.66	2.63	2.49	2.57	2.37	2.32

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11	Pengeluaran perkapita	Ribu Rp	640,730	644,560	847,318	875,059	899,600	1,045,571	1,126,130
1.12	IPM	%	68,47	69,12	71,71	71,20	71.78	72.19	72.75
II	Fokus Kesejahteraan Sosial								
2.01	Pendidikan								
02.01.02	Angka melek huruf	%	97.57	99.78	99.82	99.86	99.89	99.90	99.93
02.01.03	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.13	8.35	8.41	8.46	8.68	8.71	8.83
2.1.4 a	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	52.99	73.06	46.95	76.8	54.19	56.04	77.50
2.1.4 b	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	106,07	110,18	106,77	111,36	116.92	109.66	108.27
2.1.4 c	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	98,52	94,71	91,5	92,79	94.34	95.34	94.50
2.1.4 d	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	%	70,32	72,46	90	81.223	69.92	75.35	80.06
2.1.5 a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	98,94	92,54	94,81	98,42	95.8	95.70	99.86
2.1.5 b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	82,13	68,8	87,59	90,65	76.5	76.60	93.91
2.1.5 c	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	%	81,76	56,85	80,5	78,08	51.10	51.10	55.70
2.02	Kesehatan								
02.02.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	per 1.000 kelahiran	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.99	0.98
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran	13.00	13.00	15.00	14.00	16.00	13.00	16.00
02.02.02	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,44	71,46	71,48	71,5	71.6	71.64	71,68
02.02.03	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,93	0,74	1,10	0,64	0,87	0,88	0.10
2.03	Pertanahan								
02.03.01	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	-	-	11	5.88	48.89	50.22	8.70
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	-	57.4	76	66.76	70.01	85.70	64.29
	Penyelesaian Izin Lokasi	%	-	55	46.56	64.86	80	100.00	100.00
2.04	Ketenagakerjaan								
02.04.01	Rasio penduduk yang bekerja	%	92,31	92,11	92,63	92,34	89,78	89,78	94.28
02.04.02	Jumlah penduduk yang bekerja	orang	282,659	280,038	279,013	294,118	275,749	275,749	320,865
02.04.03	Jumlah Angkatan Kerja	orang	306,189	304,015	301,228	318,499	307,146	307,146	340,338
III	Fokus Budaya dan Olahraga								
3.01	Kebudayaan								
03.01.01	Jumlah grup kesenian	grup	17	57	106	168	206	252	263
03.01.02	Jumlah gedung kesenian	unit	-	-	-	-	-	-	-
3.02	Pemuda dan Olahraga								
03.02.01	Jumlah klub olahraga	klub	n.a	n.a	n.a	29.00	436.00	436.00	436.00
03.02.02	Jumlah gedung olahraga	unit	n.a	n.a	n.a			662,481	1,342
Aspek Pelayanan Umum									
A	Urusan Pemerintahan Wajib								
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1.01	Urusan Pendidikan								

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. a	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	99,06	93,56	95,28	98,79	98.60	99.85	100,2
1.1.1. b	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTS	%	83,85	70,36	89	91,5	98.51	98.44	94.00
1.1.1. c	Angka Partisipasi Sekolah SLTA/MA/SMK	%	72,96	56,24	80,76	78,25	73.89	83.60	n.a
1.1.2 a	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SLTP/MTs	per 10.000	n.a	181	185	190	191	182.00	176.00
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD / MI	Rasio	1:113	1:131	1:152	1:171	1:192	1:215	1:230
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SMP / MTs	Rasio	1:199	1:228	1:244	1:251	1:263	1:274	1:282
1.1.2 b	Rasio ketersediaan sekolah SLTA/MA/SMK	per 10.000	n.a	181	185	190	215	256.00	267.00
1.1.3 a	Rasio Murid terhadap Guru SD	Per 1 guru	n.a	222	260	222	1 : 14	1 : 17	1 : 14
1.1.3 b	Rasio Murid terhadap Guru SLTP/MTs	Per 1 guru	n.a	n.a	n.a	n.a	1 : 13	1 : 16	1 : 14
1.1.3 c	Rasio Murid terhadap Guru SLTA / MA / SMK	Per 1 guru	n.a	n.a	n.a	n.a	1 : 25	1 : 25	1 : 28
1.1.5 a	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	%	0.22	0.07	0.0060	0.0050	0.0050	0.0040	0.0030
1.1.5 b	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	%	2.38	0.23	0.047	0.014	0.011	0.010	0.009
1.1.5 c	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	3.61	0.33	0.35	0.17	0.14	0.13	n.a
1.1.6 a	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	%	98.61	92.77	100.00	98.20	99.10	100.00	99.12
1.1.6 b	Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	%	n.a	n.a	n.a	95.6	95.26	95.53	95.85
1.1.6 c	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	n.a	n.a	n.a	n.a	90.74	0.91	0.91
1.1.7. a	Angka Melanjutkan SD/MI ke SLTP/MTs	%	95,4	102,39	100,12	100,04	100,02	100.08	100.04
1.1.7. b	Angka Melanjutkan SLTP/MTs ke SLTA/MA/SMK	%	89,16	99,04	99,14	99,39	99,23	99.46	99.67
1.1.8. a	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI	%	89	89	89	89	85	87.20	86.50
1.1.8. b	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs	%	89	89	89	89	90	90.60	92.10
1.1.8. c	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMA/MA/SMK	%	89	89	89	89	96	96.40	97.50
01.01 .09	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	n.a	n.a	n.a	11,79	12,11	12,96	13,24
1.02	Urusan Kesehatan								
01.02 .01	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/Jiwa	1.01	1.05	1.01	0.94	0.97	1.49	1.00
	Jumlah balita	Jiwa	54,305	74,101	70,327	78,006	93,705	54,623	68,713
	Jumlah Posyandu	Unit	678	704	713	732	755	765.00	765.00
01.02 .02	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	Per 10.000 penduduk	n.a	3,09	3,01	3.00	2,93	2,87	2,87
	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Unit	15	15	15	22	22	14	14
	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Unit	15	15	15	10	10	18	18
01.02 .03	Jumlah Poliklinik	Unit	-	71	31	11	40	40	40
	Jumlah Pustu	Unit	170	173	173	173	174	177	177
01.02 .04	Jumlah Penduduk	Jiwa (000)	648	665	683	700	718	735	752

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.05	Jumlah Rumah Sakit (RS Umum Pemerintah dan RS Khusus)	Unit	2	3	3	3	3	3	3
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Unit/Jiwa (per 1.000)	0.0031	0.0045	0.0044	0.0043	0.0042	0.0041	0.0040
01.02.06	Jumlah Dokter Umum	Jiwa	70	136	89	103	115	122	182
	Jumlah Dokter Spesialis		30	32	31	37	44	72	52
	Rasio Dokter per satuan Penduduk	Dokter/Jiwa		4.0	5.7	5.0	4.5	3.79	24.02
01.02.07	Jumlah tenaga medis (Bidan + Perawat)	Jiwa	744	1336	899	643.5	1592	1,654	1,743
	Jumlah Tenaga Medis bidan	Juwa	245	525	249	499	602	617	646
	Jumlah Tenaga Medis Perawat	Jiwa	499	811	650	145	990	1,037	1,097
	Rasio tenaga medis bidan per satuan penduduk	Tenaga Medis/Jiwa	1	0	1	1.09	0.45	0.44	0.43
	Rasio Tenaga Medis Bidan	Per 100.00 Penduduk	38	81.59	79.74	87	83.37	94.18	85.08
	Rasio Tenaga Medis Perawat	Per 100.00 Penduduk	78	126	98	180.89	137	158.28	145.80
01.02.08	Jumlah Kematian Bayi	1/1000 KH	155	178	204	189	212	168.00	166
	Jumlah Kematian Balita	1/1000 KH	8	10	20	19	14	27	29
01.02.09	Jumlah Kematian Ibu	1/100.000 KH	25	27	34	34	29	32	35
01.02.10	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Jiwa	22263	20927	20372	24274	29791	25570	30482
01.02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	52.5	55.5	57.8	62.6	99.79	89.73	105.00
01.02.12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	54.19	59.47	69.6	77.6	73.86	71.30	78.00
01.02.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	37	22.26	44.32	39.03	51.84	45.52	20.20
01.02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00
01.02.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100.00	100.00
01.02.16	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	14.5	45	14.16	100	100	100.00	100.00
01.02.17	Cakupan kunjungan bayi	%	82.1	71.1	73.6	75.4	80	81.90	79.50
01.02.18	Penemuan Kasus HIV	Kasus	-	44	39	50	39	40.00	60.00
01.02.19	Penemuan penderita pneumonia Balita	%	20	23	21	8.8	57.3	37.55	48.10
01.02.20	Penanganan penderita diare	%	89	80	90	80	100	85.44	70.40
1.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
01.03.01	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status								
	Jalan Nasional	Km	367,55	367,55	367,55	367,55	367,55	367,55	360.65
	Jalan Propinsi	Km	353,9	353,9	353,9	353,9	353,9	353,9	222.24
	Jalan Kabupaten	Km	1.511,45	1.543,93	2.276,77	2.276,77	2.276,77	2.892,57	2,193.02
01.03.02	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	n.a	n.a	75.13	81.48	88.40	83.73	83.97
01.03.03	Jumlah Jembatan	Buah				181.00	198.00	198.00	-
01.03.04	Luas Daerah Irigasi Teknis	Ha	9,259.00	8,925.00	18.463,36	14,318.00	14,318.00	15,150.03	14,664.20
01.03.05	Jumlah Bangunan Seluruhnya	Unit						579.00	19.00
1.04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
01.04.01	Rumah tangga pengguna air bersih	%	55,83	33,81	40,84	34.49	89.15	89.57	83.70

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.02	Rumah tangga pengguna listrik	%	52,2	55,21	62,41	63,19	68,14		73.00
01.04.03	Rumah tangga ber sanitasi	%	89,07	33,81	38,41	30,49	25.20	37.56	85.29
01.04.04	Persentase rumah layak huni	%	97,39	97,39	90,52	92	88,07	88.07	90.18
01.03.11	Persentase pemukiman kumuh	%	0,01	1,74	5,93	3,74	3,72	0.037	0.0060
1.05	Urusan Ketenteraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
01.05.01	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	55.93	62.88	55.54	70.47	75	7.11	77.30
01.05.02	Angka Kriminalitas		1,348.00	695.00	1,001.00	1,087.00	1,060.00	1,232	890.00
1.06	Urusan Sosial								
01.06.01	Jumlah penduduk miskin	jiwa	47,300	47,100	52,100	52,981	56,990.00	5,820.00	56,570.00
01.06.02	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	1.87	1.87	15.54	15.36	14.74	69.82	77.42
01.06.03	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	1.36	1.5	11.3	11.44	9.72	42.58	59.45
	Jumlah anak terlantar	orang	50	50	50	50	50	50	120
	Jumlah lanjut usia >60 th	orang	66	66	66	66	66	66	557
	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi	orang	200	200	250	250	0	-	-
	Jumlah penyandang cacat	orang	40	40	127	127	127	75	351
	Jumlah bekas narapidana	orang	102	112	105	52	45	34	35
	Jumlah keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial:	orang	300	300	4,946	4,884	5,162	24,443	24,443
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2.01	Urusan Tenaga Kerja								
02.01.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	60,04	64,53	62,08	64,00	60,07	60,07	62,95
02.01.02	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	100	100	100	100	100	153	110
02.01.03	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,68	7,89	7,73	7,65	10,22	7.97	5.72
02.01.04	Penduduk bekerja	Orang	282,659	280,038	279,013	294,118	275,749	275,749	320,865
02.01.05	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	306,189	304,015	301,228	318,499	307,146	307,146	340,338
2.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
02.02.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	50.73	48.15	94.89	78.21	82.87	50.80	34.37
02.02.02	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%					49.2	49.66	50.00
02.02.03	Rasio KDRT	%	12.5	21.74	15.09	16.67	40.75	23.15	15.27
02.02.04	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	-	-	-
02.02.05	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	0	35.85	34.55	24.29	26.54	85.27	84.44
02.02.06	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	72	78.2	95.4	101.75	142.5	78.85	84.73
2.03	Urusan Pangan								
02.03.01	Ketersediaan Pangan	Kg/Tahun	506	482	57	586	551	475	496
02.03.02	Jumlah produksi padi	Ton	215,233	202,338	203,746	194,501	186,829	147,284	180,110
	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani	Ton	159,631	181.539	184.535	150.092	159.654	169.11	169.11
02.03.03	Ketersediaan pangan daerah	%	125.2	123.36	140.88	143.47	135.04	120.17	119.15
02.03.05	Regulasi ketahanan pangan	-	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi
02.03.08	Ketersediaan Energi dan Protein								

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.8.a	1. Energi	Kal/Kap /Hari	2552	2500	2933	3002	2866	2450	2932
2.3.8.b	2. Protein	Kal/Kap /Hari	76.61	75.86	84.62	85.78	79.69	73.51	75.42
2.04	Urusan Pertanahan								
02.04.01	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0	0	11	5.88	48.89	50.22	8.70
02.04.02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	0	57.4	76	66.76	70.01	85.70	64.29
02.04.03	Penyelesaian izin lokasi	%	0	55	46.56	64.86	80	100.00	100.00
2.05	Urusan Lingkungan Hidup								
02.05.01	Persentase penanganan sampah	%	n.a	20.18	21.35	22.61	27.45	19.88	19.88
02.05.02	Indeks Kualitas udara	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	89.83
02.05.04	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	Ha	n.a	n.a	n.a	n.a	74.1	230.34	233.89
02.05.05	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	n.a	n.a	n.a	n.a	1.03	3.19	3.24
2.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
02.06.01	Jumlah akte lahir yang dikeluarkan	orang	n.a	n.a	n.a	n.a	581.313	585.72	612.68
02.06.02	Kepadatan penduduk	org/ha	25	25	25	26	26	27	27
02.06.03	Laju pertumbuhan penduduk	%	2.57	2.66	2.63	2.49	2.57	2.37	2.31
2.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
02.08.01	Cakupan peserta KB aktif	pasangan	n.a	n.a	n.a	n.a	73.87	76.08	72.71
02.08.02	Ratio petugas lapangan KB/Penyuluh KB	Rasio	n.a	n.a	n.a	n.a	3.05	2.90	0.34
2.09	Urusan Perhubungan								
02.09.01	Jumlah angkutan darat	Unit	79	79	79	79	79	57	57
02.09.02	Jumlah ijin trayek	Trayek	13	13	13	13	13	13	13
2.1	Urusan Komunikasi dan Informatika								
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
02.11.01	Jumlah koperasi aktif	Unit	330	384	435	444	480	488	503
02.11.02	Jumlah koperasi	unit	613	647	582	579	588	603	642
2.12	Urusan Penanaman Modal								
02.12.01	Nilai Investasi	Rp.	n.a	n.a	n.a	n.a	3,475,324,348,814	3,528,235,703,298	3,582,147,057,781
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
02.13.01	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	40	40	41	39	143	143	143
02.13.02	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	42	42	42	42	51	51	51
02.13.03	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	7	7	8	31	21	4	6
02.13.04	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	11	11	11	11	11	9	9
02.13.05	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	187	187	187	187	187	187	187
02.13.06	Lapangan olahraga	Unit	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00
2.14	Urusan Statistik								
02.14.01	Buku Kutai Kartanegara Dalam Angka	-	1	1	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.14.02	Buku PDRB Kutai Kartanegara	-	2	2	2	2	2	2	2
2.15	Urusan Kebudayaan								
02.15.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	n.a.	n.a.	n.a.	107	75	76	76
02.15.02	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	n.a.	n.a.	n.a.	6	11	18	18
02.15.03	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	n.a.	n.a.	n.a.	37	37	37	94
2.16	Urusan Perpustakaan								
02.16.01	Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan	%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.16	4.77	814.42	7.47
2.17	Urusan Kearsipan								
02.17.01	Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,00
B	Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
1.01	Nilai ekspor perikanan	Rp.	n.a.	90,919,196,558	90,919,196,558	344,565,185,832	365,725,395,513	430,246,244,470	430,313,131,047
1.02	Produksi Ikan	Ton	121,820.80	119,811.00	123,505.90	134,373.60	141,683.30	151,958.70	158,011.00
2	Urusan Pariwisata								
2.01	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	481,479	477,448	762,801	1,153,021	1,367,542	1,822,286	1,795,245
02.01.01	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	0.59	-0.84	59.77	51.16	18.61	33.25	-1.48
02.01.02	Tingkat hunian hotel	Orang	n.a.	31.55	21.85	28.16	29.18	23.47	25.00
3	Urusan Pertanian								
3.01	Produksi padi	ton	213,233.00	202,337.63	203,745.77	194,501.00	186,829.00	147,284.00	182,951.00
4	Urusan Kehutanan								
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
5.01	Pangkalan Minyak Tanah	Unit	-	-	-	-	-	-	-
5.02	Agen LPG	Unit	-	-	5	11	8	6.00	8
5.03	Pangkalan Gas	Unit	42	42	49	49	49	49.00	49
5.04	SPBU	Unit	10	10	10	9	9	11.00	12
5.05	APMS	Unit	11	11	11	22	20	10.00	10
6	Urusan Perdagangan								
6.01	Prasarana Pasar		25	25	29	39	39	39	40
6.02	Cakupan bina kelompok pedagang (%)	%	0	0	0	14.28	14.28	9.52	14.28
6.03	Ketersediaan lokasi PKL	wilayah	4	4	4	4	4	4	4
7	Urusan Perindustrian								
7.01	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	2.01	1.95	2.18	2.56	3.36	3.90	4.00
7.02	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	2.52	5.82	6.23	5.45	4.91	8.59	4.24
7.03	Jumlah IKM	IKM	n.a.	669	628	815	8,998	8,656	8,916

Bab



Gambaran Keuangan Daerah

Bagian ini mengemukakan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang memuat tentang pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021

Kondisi kesehatan keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang efisien dan efektif. Jika pemerintah daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan.

Sejauh manakah kesehatan keuangan suatu daerah, sebenarnya dapat ditelusuri dari kondisi anggarannya, *"The budget should be a financial mirror of society's and social choices"*. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sudah selayaknya memberikan jaminan bagi peningkatan pelayanan serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai literatur dan best practice mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah *"a key instrument"* dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara *"revenue dan expenditure"*. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan ketentuan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

Komponen Pendapatan:

- 1) *Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;*
- 2) *Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta*
- 3) *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.*

Komponen Belanja:

- 1) *Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan*

- Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan*
- 2) *Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal*

Komponen Pembiayaan:

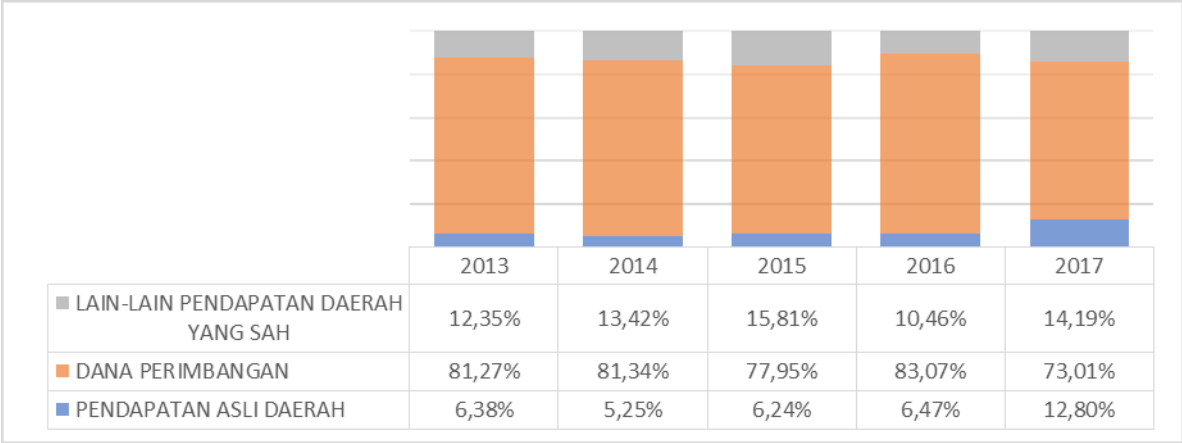
- 1) *Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;*
- 2) *Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta*
- 3) *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan*

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan trend yang menurun, hal ini disebabkan karena tingginya ketergantungan pendapatan terhadap dana perimbanganpusat dan daerah, terlebih komoditas perimbangan didominasi oleh pertambangan migas dan batu bara, yang cenderung fluktuatif dan dipengaruhi oleh harga komoditas pasar global. Kondisi ini dapat terlihat dari realisasi proporsi pendapatan tahun 2013 sampai dengan 2017, dana perimbangan mendapat proporsiantara 73-83%, berikut proporsi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Gambar III-1.Proporsi Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2017



Berdasarkan atas perhitungan rata-rata pertumbuhan APBD Kutai Kartanegara periode 2013-2017, hanya komponen pendapatan asli daerah yang menunjukkan trend positif, sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi seiring dengan trend realisasi dana perimbangan, dengan proporsi penurunan sebesar -14,23%, maka berimplikasi terhadap penurunan belanja daerah rata-rata sebesar 14.79%. Berikut data nilai realiasi APBD Kutai Kartanegara dan rata-rata pertumbuhan 2013-2017.

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2017

(Dalam Juta Rupiah)

Kode	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	5,950,667.48	6,458,980.09	5,079,535.21	4,130,498.98	3,402,599.17	-12.28%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	379,729.23	338,775.29	316,938.08	267,214.03	435,513.16	7.52%

Kode	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	73,443.03	55,718.14	61,812.43	52,277.18	93,648.55	12.63%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,484.60	10,326.43	7,890.03	12,546.46	7,285.49	13.18%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37,368.61	53,553.69	41,892.65	27,003.67	37,858.51	6.55%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	262,432.99	219,177.03	205,342.96	175,386.73	296,720.61	7.95%
4.2	DANA PERIMBANGAN	4,836,034.41	5,253,423.33	3,959,745.51	3,431,406.94	2,484,379.61	-14.23%
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4,633,092.52	5,072,141.52	3,959,745.51	3,100,024.93	1,975,800.91	-17.61%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	150,245.86	127,010.98	-	111,881.56	141,994.12	-29.52%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	52,696.03	54,270.83	-	219,500.45	366,584.58	-10.00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	734,903.84	866,781.48	802,851.62	431,878.00	482,706.39	-5.97%
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	417,762.48	395,121.55	341,522.58	218,705.78	294,347.78	-5.09%
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174,493.91	164,600.23	328,981.34	117,458.73	161,651.63	16.88%
4.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	142,647.45	307,059.70	132,347.70	95,713.49	26,706.98	-10.35%
5	BELANJA	7,382,595.06	6,443,107.58	6,775,373.06	3,950,852.80	3,559,088.80	-14.79%
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,156,135.68	2,304,135.06	2,600,425.41	2,274,734.04	2,016,701.03	-1.04%
5.1.1	Belanja Pegawai	1,359,225.96	1,675,197.02	1,744,774.03	1,854,231.35	1,617,467.51	5.23%
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
5.1.3	Belanja Subsidi	10,372.76	11,475.04	17,786.54	5,400.32	-	-26.00%
5.1.4	Belanja Hibah	264,197.54	86,727.27	206,430.52	76,984.54	24,128.10	-15.13%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	40,562.37	55,843.48	31,571.12	3,971.20	2,974.85	-29.58%
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	470,959.05	474,892.25	596,755.07	333,198.40	369,356.69	-1.70%
5.1.7	Belanja Tak Terduga	10,818.00	-	3,108.13	948.22	2,773.88	7.68%
5.2	BELANJA LANGSUNG	5,226,459.38	4,138,972.52	4,174,947.65	1,676,118.76	1,542,387.77	-21.94%
5.2.1	Belanja Pegawai	382,832.24	150,585.92	121,910.22	87,952.67	71,158.16	-31.66%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,427,584.84	1,405,982.16	1,232,535.49	989,443.66	923,205.40	-10.07%
5.2.3	Belanja Modal	3,416,042.30	2,582,404.43	2,820,501.94	598,722.43	548,024.21	-25.61%
6	PEMBIAYAAN	3,346,629.61	1,915,202.03	1,913,036.85	206,334.21	394,839.30	-10.19%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	3,449,352.20	1,915,202.03	1,931,074.54	216,834.21	394,839.30	-12.58%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3,447,898.78	1,914,702.03	1,931,074.54	216,834.21	394,839.30	-12.57%
6.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1,000.00	500.00	-	-	-	-75.00%
6.1.5	Penerimaan atas Investasi Non Permanen	453.42	-	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	102,722.59	-	18,037.70	10,500.00	-	-80.60%
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100,000.00	-	5,000.00	10,500.00	-	-30.00%
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	2,722.59	-	13,037.70	-	-	-
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	1,914,702.03	1,931,074.54	217,199.00	385,980.39	238,349.66	-12.11%

3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang

harus disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Kutai kartanegara pada peri-ode tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa Aset dan Ekuitas Daerah mengalami mengalami penurunan yang mencapai sebesar minus 1.05% persen pertahun. Selanjutnya gambaran perkembangan masing-masing pos neraca daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu tahun 2013-2017, disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	(1.05)
1.1	ASET LANCAR	(17.75)
1.1.1	Kas di Kas Daerah	(12.94)
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	(65.89)
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.06
1.1.4	Kas di BLUD	12.33
1.1.5	Kas di Bendahara BOS	0.00
1.1.6	Kas Lainnya	79.64
1.1.7	Setara Kas	0.00
1.1.8	Investasi Jangka Pendek	0.00
1.1.9	Piutang Pendapatan	222.02
1.1.10	Piutang Lainnya	94.54
1.1.11	Penyisihan Piutang	111.46
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka	(39.15)
1.1.13	Persediaan	1.00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	9.41
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0.00
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00
1.2.1.4	Dana Bergulir	0.00
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0.00
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	(3.39)
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.85
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0.00
1.3	ASET TETAP	0.64
1.3.1	Tanah	4.85
1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.77
1.3.3	Gedung dan Bangunan	3.41
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.33
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	96.19
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(19.58)
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	18.94
1.4	DANA CADANGAN	0.00
1.4.1	Dana Cadangan	0.00
1.5	ASET LAINNYA	37.02
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	1.73

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	(5.20)
1.5.4	Aset Lain-lain	71.77
2	KEWAJIBAN	164.48
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	164.48
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	118.03
2.1.2	Utang Bunga	0.00
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	(1.14)
2.1.5	Utang Beban	26.86
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	86.91
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0.00
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00
3	EKUITAS	(2.52)
3.1	EKUITAS	(2.52)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		(1.05)

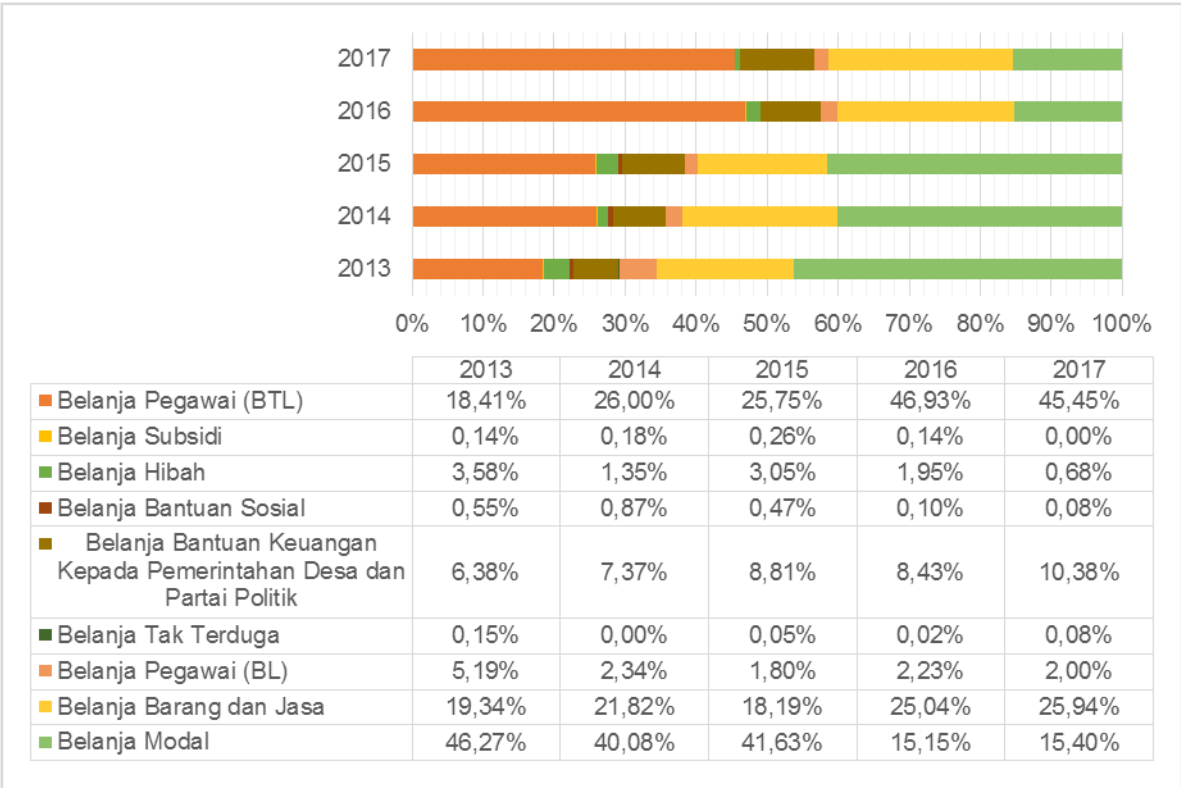
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung (BTL) mengalami trend proporsi yang cenderung meningkat, kondisi karena implikasi dari menurunnya pendapatan daerah sedangkan belanja pegawai dipahami sebagai belanja wajib dan mengikat untuk dipenuhi setiap tahunnya;
- 2) Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial mendapat proporsi penurunan sampai tahun 2017 dibawah 1%;
- 3) Belanja Modal tetap dialokasikan sebagai penyediaan pelayanan pada masyarakat yang bersifat jangka panjang sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan invetasi pemerintah dalam proses pembangunan daerah, tahun 2016 dan 2017 mendapat proporsi belanja dikisaran 15% sedangkan tahun 2013-20215 cukup tinggi yakni dikisaran 40%.

Gambar III-2.Proporsi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2017



Berdasarkan data realisasi APBD Kutai Kartanegara 2014 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan proporsi khususnya pada tahun 2016 mencapai 51,12% sedangkan pada tahun 2017 mendapat proporsi sebesar 46,04%. Analisis proporsi ini digunakan sebagai acuan dalam kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode perencanaan, berikut data analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur 2014-2017

Tabel 3.3.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2017

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2014	1,287,139,872,031.00	8,358,309,604,046.29	15.40
2	Tahun Anggaran 2015	2,179,235,882,263.38	8,688,409,902,266.11	25.08
3	Tahun Anggaran 2016	2,125,231,127,547.95	4,157,187,002,443.84	51.12
4	Tahun Anggaran 2017	1,820,214,681,246.55	3,953,928,099,122.05	46.04

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan mau-pun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghi-tungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu tahun 2015 s.d 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 - 2017

NO	URAIAN	TAHUN 2015 (Rp.)	TAHUN 2016 (Rp.)	TAHUN 2017 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5,079,535,208,132.89	4,130,498,173,422.77	3,402,599,166,648.75
	<i>Dikurangi realisasi:</i>	-	-	-
2	Belanja Daerah	6,775,373,055,593.97	3,950,852,795,167.25	3,559,088,801,513.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18,037,697,901.00	10,500,000,000.00	-
	Surplus/Defisit riil	(1,713,875,545,362.08)	169,145,378,255.52	(156,489,634,864.25)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami surplus pada tahun 2016 dan mengalami defisit pada tahun 2015 dan 2017.

3.3 Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2017, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mendatang.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan menganalisis pola pos pendapatan daerah selama periode 2015 sampai dengan 2017, Perubahan APBD 2018 dan Proyeksi RKPD Tahun 2019, selanjutnya dijadikan sebagai analisis dasar dalam penetapan proyeksi tahun 2020 dan tahun 2021. Secara umum pendapatan dan belanja daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 (Dalam Juta)

Uraian	Rata-rata Pertumbuhan % (2013-2017)	Realisasi APBD		APBD		Proyeksi	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	-0.12	4,130,498.98	3,402,599.17	4,165,973.28	5,002,311.15	4,454,315.09	4,548,963.79
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0.08	267,214.03	435,513.16	351,773.71	377,030.64	519,630.50	581,716.26
Pendapatan Pajak Daerah	0.13	52,277.18	93,648.55	56,052.50	56,052.50	62,627.58	65,758.96
Hasil Retribusi Daerah	0.13	12,546.46	7,285.49	12,389.01	12,189.72	20,620.22	30,930.33
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.07	27,003.67	37,858.51	36,113.59	37,050.00	118,173.18	133,847.16

Uraian	Rata-rata Pertumbuhan % (2013-2017)	Realisasi APBD		APBD		Proyeksi	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.08	175,386.73	296,720.61	247,218.61	271,738.42	318,209.52	351,179.81
DANA PERIMBANGAN	-0.14	3,431,406.94	2,484,379.61	3,169,285.70	3,902,216.74	3,588,296.78	3,590,296.78
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-0.18	3,100,024.93	1,975,800.91	2,542,772.01	3,185,887.82	3,281,160.83	3,283,160.83
Dana Alokasi Umum	-0.30	111,881.56	141,994.12	249,562.94	307,135.95	307,135.95	307,135.95
Dana Alokasi Khusus	-0.10	219,500.45	366,584.58	376,950.76	409,192.97	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-0.06	431,878.00	482,706.39	644,913.87	723,063.77	346,387.82	376,950.76
Pendapatan Hibah		-	-	111,272.67	95,084.20	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-0.05	218,705.78	294,347.78	346,387.82	343,032.80	346,387.82	376,950.76
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.17	117,458.73	161,651.63	159,509.38	185,361.77	-	-
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-0.10	95,713.49	26,706.98	27,744.00	99,585.00	-	-
BELANJA	-0.15	3,950,852.80	3,559,088.80	4,399,322.94	5,105,955.65	4,473,931.64	4,663,963.79
BELANJA TIDAK LANGSUNG	-0.01	2,274,734.04	2,016,701.03	2,272,250.42	2,511,191.12	2,270,692.74	2,020,856.29
Belanja Pegawai	0.05	1,854,231.35	1,617,467.51	1,804,399.29	1,823,297.22	1,596,031.20	1,595,911.00
Belanja Bunga		-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-0.26	5,400.32	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	-0.15	76,984.54	24,128.10	31,210.55	39,888.10	164,162.00	34,045.55
Belanja Bantuan Sosial	-0.30	3,971.20	2,974.85	3,138.00	2,912.00	3,138.00	3,138.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	-0.02	333,198.40	369,356.69	428,502.58	640,093.81	502,361.55	502,641.55
Belanja Tak Terduga	0.08	948.22	2,773.88	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
BELANJA LANGSUNG	-0.22	1,676,118.76	1,542,387.77	2,127,072.52	2,594,764.53	2,203,238.89	2,523,107.49
Belanja Pegawai	-0.32	87,952.67	71,158.16	110,697.55	120,786.19	102,560.68	117,450.56
Belanja Barang dan Jasa	-0.10	989,443.66	923,205.40	1,282,008.81	1,343,293.05	1,140,602.73	1,306,196.66
Belanja Modal	-0.26	98,722.43	548,024.21	734,366.17	1,130,685.29	960,075.48	1,099,460.28
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	-0.13	216,834.21	394,839.30	238,349.66	108,144.50	24,616.55	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-0.13	216,834.21	394,839.30	238,349.66	108,144.50	24,616.55	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-0.75	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-1.00	-	-	-	-	-	-
Penerimaan atas Investasi Non Permanen		-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-0.81	10,500.00	-	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-0.30	10,500.00	-	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00
Pembayaran Pokok Utang	-1.00	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	-0.10	206,334.21	394,839.30	233,349.66	103,644.50	19,616.55	115,000.00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-0.12	385,980.39	238,349.66	-	-	-	-

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dalam rangka untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannnya. Kapasitas riil kamampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan atas proyeksi pendapatan dan asumsi SiLPA dikurangkan dengan Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut perhitungan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah untuk tahun 2018-2021.

Tabel 3.8.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	Kerangka Pendanaan				
		2017(Realisasi)	2018(APBD)	2019 (APBD)	2020	2021
1	Pendapatan	3,402,599,166,648.75	4,165,973,280,109.57	5,002,311,146,451.00	4,454,315,091,342.62	4,548,963,790,358.84
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	394,839,297,609.05	238,349,662,744.80	108,144,503,849.33	0.00	0.00
	Total Penerimaan	3,797,438,464,257.80	4,404,322,942,854.37	5,110,455,650,300.33	4,454,315,091,342.62	4,548,963,790,358.84

Dikurangi :						
4	Belanja Tidak Langsung	2,016,701,026,790.55	2,272,250,420,249.73	2,511,191,124,750.00	2,246,076,197,676.62	2,020,856,295,521.85
5	Pengeluaran Pembiayaan	0	5,000,000,000.00	4,500,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,780,737,437,467.25	2,127,072,522,604.64	2,594,764,525,550.33	2,203,238,893,666.00	2,523,107,494,836.99

Tabel 3.9.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 – 2021

N O	URAIAN	PROYEKSI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	1,780,737,437,467.25	2,132,072,522,604.64	2,594,764,525,550.33	2,203,238,893,667.00	2,523,107,494,838.99
P. 1	PRIORITAS 1	759,456,401,244.14	723,762,629,560.10	486,521,596,850.67	586,771,360,726.00	586,771,360,726.00
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	542,259,355,046.14	485,185,990,250.10	293,227,906,208.67	297,602,182,555.00	297,602,182,555.00
1	PENDIDIKAN	117,989,659,296.00	89,147,949,667.00	88,591,974,592.00	108,289,315,613.00	108,289,315,613.00
2	KESEHATAN	191,154,336,807.14	161,913,866,633.00	148,511,712,234.67	130,151,218,481.00	130,151,218,481.00
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	166,884,718,163.00	179,685,893,146.10	4,875,700,000.00	4,316,359,000.00	4,316,359,000.00
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	56,717,927,052.00	37,292,489,445.00	32,543,516,493.00	34,687,931,580.00	34,687,931,580.00
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7,617,010,587.00	13,847,096,645.00	16,191,393,789.00	17,443,749,221.00	17,443,749,221.00
6	SOSIAL	1,895,703,141.00	3,298,694,714.00	2,513,609,100.00	2,713,608,660.00	2,713,608,660.00
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	101,451,873,620.00	48,149,208,578.00	43,676,759,867.00	64,170,854,500.00	64,170,854,500.00
7	TENAGA KERJA	1,054,406,847.00	1,494,178,988.00	1,556,831,169.00	3,139,471,195.00	3,139,471,195.00
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	654,736,138.00	1,075,601,787.00	1,341,053,800.00	1,314,110,880.00	1,314,110,880.00
9	PANGAN	770,623,032.00	760,173,098.00	821,417,593.00	1,507,888,000.00	1,507,888,000.00
10	PERTANAHAN	879,393,225.00	1,111,157,227.00	1,553,330,505.00	3,173,286,115.00	3,173,286,115.00
11	LINGKUNGAN HIDUP	2,960,298,358.00	1,532,293,089.00	2,029,923,489.00	4,072,455,699.00	4,072,455,699.00
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,045,800,356.00	2,938,603,427.00	3,333,628,844.00	3,533,626,000.00	3,533,626,000.00
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1,463,097,542.00	1,665,702,213.00	1,886,045,560.00	2,436,045,000.00	2,436,045,000.00
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,713,003,837.00	2,303,306,934.00	3,068,290,053.00	4,535,020,160.00	4,535,020,160.00
16	PERHUBUNGAN	71,750,775,748.00	12,345,622,364.00	5,264,283,319.00	14,703,255,280.00	14,703,255,280.00
18	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,711,031,969.00	7,129,639,909.00	7,807,736,855.00	6,783,015,200.00	6,783,015,200.00
19	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	886,526,526.00	1,655,188,623.00	2,453,732,908.00	2,817,885,720.00	2,817,885,720.00
20	PENANAMAN MODAL	1,449,152,745.00	2,168,617,811.00	4,319,285,956.00	4,577,110,560.00	4,577,110,560.00
21	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7,787,136,091.00	9,447,686,059.00	6,733,179,900.00	7,969,914,530.00	7,969,914,530.00
24	KEARSIPAN	1,325,891,206.00	2,521,437,049.00	1,508,019,916.00	3,607,770,161.00	3,607,770,161.00
III	URUSAN PILIHAN	20,567,180,466.00	28,529,508,416.00	28,847,256,331.00	46,752,589,000.00	46,752,589,000.00

N O	URAIAN	PROYEKSI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,675,448,723.00	2,288,843,292.00	4,375,000,000.00	6,150,000,000.00	6,150,000,000.00
26	PARIWISATA	4,051,381,169.00	3,544,190,685.00	3,524,988,000.00	4,224,987,000.00	4,224,987,000.00
27	PERTANIAN	7,485,811,707.00	12,302,327,192.00	12,242,487,952.00	23,604,295,000.00	23,604,295,000.00
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4,007,275,545.00	4,776,802,575.00	1,585,110,120.00	2,285,107,000.00	2,285,107,000.00
31	PERINDUSTRIAN	3,347,263,322.00	5,617,344,672.00	7,119,670,259.00	10,488,200,000.00	10,488,200,000.00
IV	URUSAN UNSUR PENUNJANG	95,177,992,112.00	161,897,922,316.00	120,769,674,444.00	178,245,734,671.00	178,245,734,671.00
	33 UNSUR PENUNJANG FUNGSI PERENCANAAN	4,957,750,265.00	4,520,208,287.00	7,405,983,517.00	10,200,738,937.00	10,200,738,937.00
	34 UNSUR PENUNJANG FUNGSI KEUANGAN	10,748,148,555.00	11,818,483,010.00	17,790,497,746.00	16,075,179,752.00	16,075,179,752.00
	35 UNSUR PENUNJANG FUNGSI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1,929,813,220.00	1,750,773,241.00	2,487,803,086.00	5,702,225,265.00	5,702,225,265.00
	36 UNSUR PENUNJANG FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	810,872,869.00	1,113,440,647.00	1,603,623,000.00	3,024,696,441.00	3,024,696,441.00
	37 UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	2,208,860,053.00	1,996,323,471.00	2,360,476,160.00	3,761,546,240.00	3,761,546,240.00
	38 UNSUR STAF PENDUKUNG KEPALA DAERAH	38,653,856,237.00	37,533,330,107.00	36,284,174,984.00	78,735,354,267.00	78,735,354,267.00
	39 UNSUR STAF PENDUKUNG DPRD	14,592,131,146.00	19,511,428,814.00	23,161,239,730.00	18,534,115,254.00	18,534,115,254.00
	40 UNSUR KOORDINASI KEWILAYAHAN	21,276,559,767.00	83,653,934,739.00	29,675,876,221.00	42,211,878,515.00	42,211,878,515.00
	P. 2 PRIORITAS 2	370,532,289,548.00	470,821,913,875.50	1,272,853,056,234.13	615,924,200,256.00	615,924,200,256.00
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	170,878,068,009.00	249,627,278,470.00	920,827,226,267.05	423,564,906,807.00	423,564,906,807.00
1	PENDIDIKAN	54,021,222,721.00	79,112,145,109.00	228,548,146,481.00	175,741,969,387.00	175,741,969,387.00
2	KESEHATAN	28,422,876,444.00	84,097,703,904.00	129,274,966,467.00	95,606,888,000.00	95,606,888,000.00
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	87,363,599,344.00	83,987,684,147.00	546,375,578,519.05	46,379,810,000.00	46,379,810,000.00
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	287,562,100.00	0.00	3,275,000,000.00	88,388,016,420.00	88,388,016,420.00
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	782,807,400.00	2,429,745,310.00	7,510,688,800.00	12,352,691,000.00	12,352,691,000.00
6	SOSIAL	0.00	0.00	5,842,846,000.00	5,095,532,000.00	5,095,532,000.00
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	6,687,009,393.00	15,104,183,934.00	73,996,094,467.08	53,592,208,456.00	53,592,208,456.00
7	TENAGA KERJA	65,488,900.00	101,243,200.00	2,030,420,600.00	3,058,357,805.00	3,058,357,805.00
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	275,804,031.00	267,413,200.00	600,000,000.00	1,576,940,120.00	1,576,940,120.00
9	PANGAN	0.00	0.00	0.00	1,775,000,000.00	1,775,000,000.00
10	PERTANAHAN	0.00	0.00	0.00	850,000,000.00	850,000,000.00
11	LINGKUNGAN HIDUP	479,230,350.00	2,038,905,661.00	16,452,342,050.00	10,810,713,340.00	10,810,713,340.00
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,952,128,534.00	4,208,832,250.00	3,740,798,000.00	1,734,931,101.00	1,734,931,101.00
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	343,592,400.00	691,850,800.00	2,734,818,752.00	5,078,148,000.00	5,078,148,000.00
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,665,340,050.00	4,782,050,663.00	850,000,000.00	828,267,840.00	828,267,840.00
16	PERHUBUNGAN	726,211,000.00	2,562,063,841.00	37,724,838,818.00	11,430,000,000.00	11,430,000,000.00
18	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	138,086,703.00	256,408,444.00	2,948,560,053.11	8,875,967,000.00	8,875,967,000.00
19	KOPERASI, USAHA KECIL DAN	480,072,050.00	0.00	1,878,995,755.97	2,217,810,000.00	2,217,810,000.00

N O	URAIAN	PROYEKSI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	MENENGAH					
20	PENANAMAN MODAL	313,755,600.00	195,415,875.00	1,455,473,124.00	2,980,000,000.00	2,980,000,000.00
22	KEBUDAYAAN	0.00	0.00	3,322,691,314.00	0.00	0.00
23	PERPUSTAKAAN	247,299,775.00	0.00	257,156,000.00	1,175,040,000.00	1,175,040,000.00
24	KEARSIPAN	0.00	0.00	0.00	1,201,033,250.00	1,201,033,250.00
III	URUSAN PILIHAN	19,231,297,180.00	21,967,137,716.50	53,177,655,377.00	111,432,010,000.00	111,432,010,000.00
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	0.00	0.00	0.00	21,201,100,000.00	21,201,100,000.00
26	PARIWISATA	5,891,213,280.00	6,595,632,761.00	21,802,764,699.00	18,507,190,000.00	18,507,190,000.00
27	PERTANIAN	9,705,885,500.00	10,437,764,200.00	19,843,858,860.00	49,733,720,000.00	49,733,720,000.00
28	KEHUTANAN	0.00	0.00	1,406,258,000.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0.00	75,834,700.00	1,200,000,000.00	860,000,000.00	860,000,000.00
30	PERDAGANGAN	3,378,871,900.00	4,430,950,405.50	7,229,773,818.00	14,230,000,000.00	14,230,000,000.00
31	PERINDUSTRIAN	255,326,500.00	426,955,650.00	1,695,000,000.00	5,550,000,000.00	5,550,000,000.00
IV	URUSAN UNSUR PENUNJANG	173,735,914,966.00	184,123,313,755.00	224,852,080,123.00	27,335,074,993.00	27,335,074,993.00
33	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PERENCANAAN	0.00	0.00	4,089,850,000.00	5,139,850,000.00	5,139,850,000.00
34	UNSUR PENUNJANG FUNGSI KEUANGAN	10,731,030,870.00	8,349,351,700.00	17,051,822,500.00	14,009,489,618.00	14,009,489,618.00
35	UNSUR PENUNJANG FUNGSI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1,004,953,350.00	1,880,159,371.00	4,921,563,120.00	6,585,735,375.00	6,585,735,375.00
36	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,739,805,467.00	551,023,836.00	3,005,356,400.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
37	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	344,627,520.00	180,720,538.00	250,000,000.00	0.00	0.00
38	UNSUR STAF PENDUKUNG KEPALA DAERAH	159,915,497,759.00	173,162,058,310.00	195,533,488,103.00	0.00	0.00
P. 3	PRIORITAS 3	571,989,538,924.31	566,249,332,129.86	1,032,372,291,368.53	1,001,223,332,681.00	1,001,223,332,681.00
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	417,342,057,401.31	398,190,248,727.86	689,418,890,134.53	743,115,989,671.00	743,115,989,671.00
1	PENDIDIKAN	93,239,238,800.77	0.00	90,584,200,000.00	0.00	0.00
2	KESEHATAN	230,816,473,648.54	173,895,177,949.55	302,506,735,843.00	346,426,710,740.00	346,426,710,740.00
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	82,010,923,115.00	210,215,626,982.31	279,338,135,766.53	378,706,460,931.00	378,706,460,931.00
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	4,645,303,955.00	1,048,399,697.00	2,884,289,000.00	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	687,545,700.00	7,613,172,080.00	11,795,667,800.00	10,527,818,000.00	10,527,818,000.00
6	SOSIAL	5,942,572,182.00	5,417,872,019.00	2,309,861,725.00	3,705,000,000.00	3,705,000,000.00
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	17,363,975,822.00	46,040,769,929.00	119,069,483,000.00	103,786,745,426.00	103,786,745,426.00
7	TENAGA KERJA	0.00	239,231,500.00	881,000,000.00	0.00	0.00
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,022,233,255.00	324,480,627.00	1,635,000,000.00	1,722,357,000.00	1,722,357,000.00
9	PANGAN	1,726,778,000.00	477,707,931.00	5,471,470,000.00	1,369,998,600.00	1,369,998,600.00
10	PERTANAHAN	354,719,150.00	11,391,101,402.00	35,094,959,455.00	43,200,000,000.00	43,200,000,000.00
11	LINGKUNGAN HIDUP	472,971,300.00	1,000,809,730.00	5,715,067,445.00	500,000,000.00	500,000,000.00
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	0.00	414,896,975.00	5,810,986,500.00	19,126,821,900.00	19,126,821,900.00

N O	URAIAN	PROYEKSI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	PENCATATAN SIPIL					
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1,626,397,413.00	261,283,400.00	6,952,651,000.00	0.00	0.00
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	295,264,600.00	269,533,700.00	7,541,073,000.00	2,880,000,000.00	2,880,000,000.00
15	PERHUBUNGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	STATISTIK	746,643,000.00	0.00	1,362,409,800.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
18	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	840,776,575.00	0.00	4,897,200,000.00	8,805,000,000.00	8,805,000,000.00
19	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	75,000,000.00	211,232,000.00	1,953,815,000.00	1,615,000,000.00	1,615,000,000.00
20	PENANAMAN MODAL	509,360,100.00	803,368,995.00	0.00	0.00	0.00
21	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9,072,873,429.00	27,932,452,904.00	38,932,683,000.00	17,417,567,926.00	17,417,567,926.00
22	KEBUDAYAAN	375,059,400.00	2,714,670,765.00	0.00	5,650,000,000.00	5,650,000,000.00
24	KEARSIPAN	245,899,600.00	0.00	2,821,167,800.00	0.00	0.00
III	URUSAN PILIHAN	31,321,167,211.00	22,164,953,891.00	104,638,501,764.00	46,986,954,064.00	46,986,954,064.00
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,892,707,550.00	3,136,592,925.00	37,500,848,954.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
26	PARIWISATA	0.00	0.00	265,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00
27	PERTANIAN	16,326,142,840.00	9,184,572,502.00	48,645,009,644.00	19,708,498,000.00	19,708,498,000.00
28	KEHUTANAN	0.00	11,594,400.00	0.00	0.00	0.00
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10,934,310,944.00	9,270,824,718.00	15,593,112,000.00	21,782,036,064.00	21,782,036,064.00
30	PERDAGANGAN	107,835,877.00	236,276,896.00	357,894,166.00	0.00	0.00
31	PERINDUSTRIAN	60,170,000.00	0.00	1,646,637,000.00	0.00	0.00
32	TRANSMIGRASI	0.00	325,092,450.00	630,000,000.00	1,171,420,000.00	1,171,420,000.00
IV	URUSAN UNSUR PENUNJANG	105,962,338,490.00	99,853,359,582.00	119,245,416,470.00	107,333,643,520.00	107,333,643,520.00
33	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PERENCANAAN	8,903,353,017.00	7,087,637,406.00	5,150,000,000.00	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
34	UNSUR PENUNJANG FUNGSI KEUANGAN	885,589,262.00	3,172,358,335.00	7,978,947,544.00	3,927,742,717.00	3,927,742,717.00
35	UNSUR PENUNJANG FUNGSI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1,896,831,626.00	2,306,026,187.00	4,035,000,000.00	3,310,000,000.00	3,310,000,000.00
36	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00
37	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	3,889,657,874.00	3,894,800,276.00	3,925,000,000.00	7,675,000,000.00	7,675,000,000.00
38	UNSUR STAF PENDUKUNG KEPALA DAERAH	19,921,415,156.00	12,094,718,953.00	21,826,419,000.00	1,657,716,296.00	1,657,716,296.00
39	UNSUR STAF PENDUKUNG DPRD	33,168,855,933.00	33,485,956,772.00	34,961,873,245.00	37,178,855,735.00	37,178,855,735.00
40	UNSUR KOORDINASI KEWILAYAHAN	37,296,635,622.00	37,811,861,653.00	41,068,176,681.00	49,884,328,772.00	49,884,328,772.00

Bab IV

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan daerah dalam jangka menengah.

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan di awal adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah melalui pendalaman masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1 Permasalahan Pembangunan

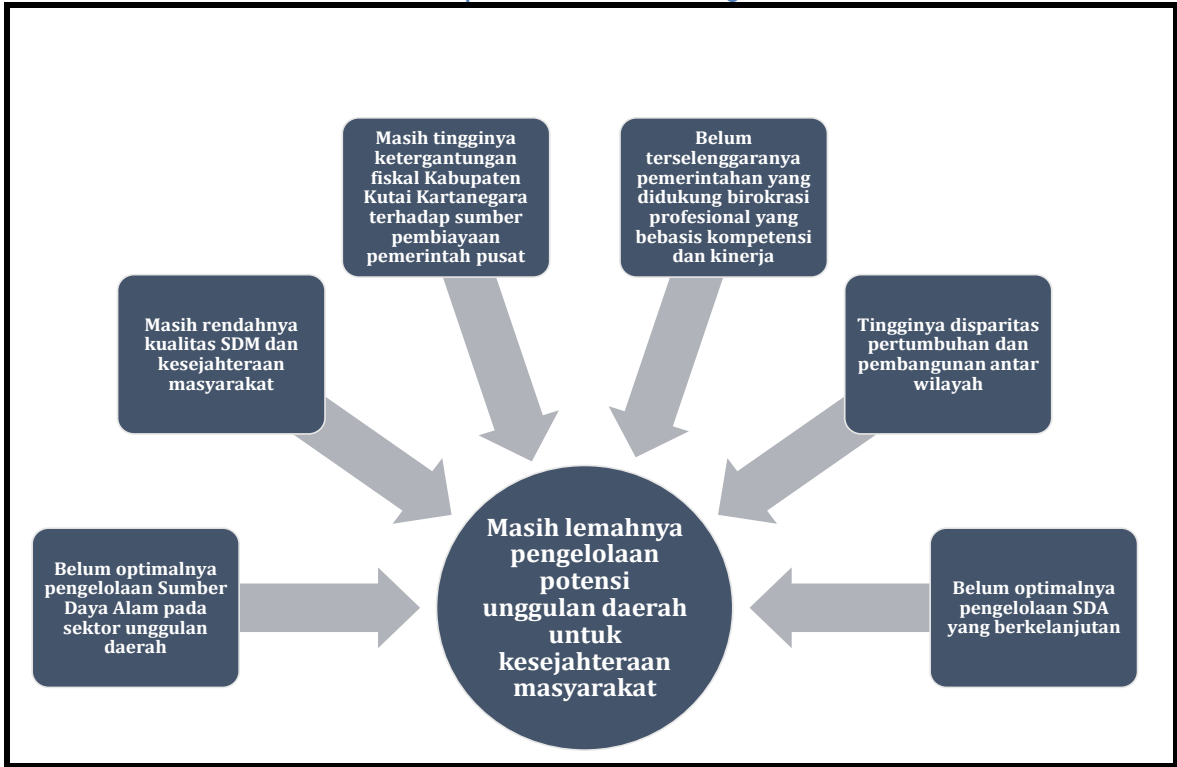
Permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “Masih lemahnya pengelolaan potensi unggulan daerah untuk kesejahteraan masyarakat”. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Belum terselenggaranya pemerintahan yang didukung birokrasi profesional yang berbasis kompetensi dan kinerja;
2. Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
3. Masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap sumber pembiayaan pemerintah pusat;
4. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam pada sektor unggulan daerah;
5. Tingginya disparitas pertumbuhan dan pembangunan antar wilayah; dan
6. Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi pengejawantahan sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi

sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan permasalahan utama Kabupaten Kutai Kartanegara:

Gambar IV-1. Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



Permasalahan pokok pembangunan daerah pada gambar 4.1 diatas akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

1. Belum terselenggaranya pemerintahan yang didukung birokrasi profesional yang berbasis kompetensi dan kinerja

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peranserta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat. Dari masalah utama belum terselenggaranya pemerintahan yang didukung birokrasi profesional yang berbasis kompetensi dan kinerja, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:

a. Masih Rendahnya kualitas layanan publik

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan isu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Kendala utama penerapan SPM di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan serta kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur daerah yang belum memadai. Disamping itu, penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada OPD yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah serta masih sangat rendahnya skil dan kemampuan Aparatur sipil negara dibidang tertentu serta belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, pelayanan publik masih sangat kurang terutama yang berhubungan kesehatan, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana dan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran. Hal ini terlihat dengan jumlah KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat setiap tahunnya. Perkembangan Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun terus mengalami perkembangan positif, peningkatan jumlah penduduk dan proporsi kepemilikan KTP menjadi bagian penting dari komitmen pelayanan tertib administrasi kependudukan, hingga tahun 2017 kepemilikan KTP mencapai 89.77%, sedangkan 90.80% telah memiliki akta kelahiran, kedepan perbaikan sistem pelayanan harus terus dilakukan agar seluruh warga Kutai Kartanegara dapat memiliki KTP dan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.1.
Tingkat Capaian Tertib Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2015-2017

INDIKATOR KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	2015	2016	2017
Kepemilikan KTP	94.64%	95.62%	89.77%
Jumlah penduduk yang memiliki KTP	382.993	424.919	416.440
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)	404.673	444.364	463.909
Kepemilikan Akta Kelahiran	89%	88%	90.80%
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	581.313	585.717	612.677
Jumlah penduduk	655.167	662.481	674.759

Sumber : LPPD, 2015-2017

Kemudian masih terbatasnya implementasi pelaksanaan *E-Government* dan penerapan penggunaan sarana dan prasarana informatika dilingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini menjadi salah satu pemicu lambatnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan juga masih lemah.

b. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Peningkatan kinerja aparatur daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah merupakan tantangan dan permasalahan utama kurun waktu lima tahun kedepan. Permasalahan lainnya adalah terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi, sangat memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Walaupun demikian, berdasarkan realitas yang ada, pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain terlihat dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara

yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkan antara lain adalah masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas sumberdaya aparatur daerah yang masih terbatas dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian belum optimalnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan sebagaimana yang diharapkan.

Terkait dengan kinerja SDM aparatur, melihat penyelenggaraan pemerintah sekurang ini belum bekerja dengan maksimal. Selain itu distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan belum sesuai dengan skill yang dimiliki oleh aparatur.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah daerah secara bertahap memperbaiki kondisi sumberdaya manusia melalui berbagai Diklat, workshop, dan lain-lain. Tantangan dan permasalahan lainnya yang cukup strategis berkaitan dengan pembinaan disiplin aparatur daerah yang belum optimal. Disamping itu, penataan administrasi asset daerah juga masih memerlukan penanganan yang lebih professional. Hal ini terlihat dengan Predikat

c. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD merupakan salah satu pengawasan pada bidang keuangan daerah. Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga hasil pengawasan dan audit dapat dipertanggungjawabkan secara relevan. Pengawasan terhadap audit internal terhadap APBD Kabupaten Kutai Kartanegara belum dilakukan sebagai mana mestinya sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara belum optimal. Sistem pengelolaan keuangan yang belum dilakukan sesuai aturan terbukti memperlambat jalannya pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa tahun ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan yang paling dominan dalah pengelolaan asset yang masih belum optimal dan sistem penetausahaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun sistem-sistem yang lainnya. Dengan pengelolaan keuangan yang handal diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu memanfaatkan sebaik-baiknya segala aset daerah untuk dikelola dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Berdasarkan beberapa uraian permasalahan diatas, maka akar masalah pemicu dari permasalahan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini. dari Opini BPK pada tahun 2014 mendapat predikat WTP, Tahun 2015 mendapat predikat WTP, Tahun 2016 mendapat predikat WTP

Tabel 4.2.
Rumusan Permasalahan dan akar masalah dari Permasalahan Pokok
“Belum terselenggaranya pemerintahan yang didukung birokrasi profesional yang berbasis kompetensi dan kinerja”

Permasalahan		Akar Masalah
1	Masih Rendahnya kualitas layanan publik	1. Belum adanya standar, pedoman yang jelas dalam layanan publik 2. Masih terbatasnya kemampuan profesional dan etos kerja aparatur di daerah 3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat 4. Manajemen, penataan dan pengembangan SDM aparatur yang kurang optimal 5. Masih terbatasnya implementasi pelaksanaan <i>E-Government</i> dilingkungan pemerintah Kabupaten 6. Masih rendahnya sarana dan prasarana informatika
2	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan belum optimal 2. Masih belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> sebagaimana yang diharapkan 3. Belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada birokrasi pemerintah Kabupaten Kutai

Permasalahan		Akar Masalah
		Kartanegara 4. Distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan 5. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah
3	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif 2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa 3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 4. Belum optimalnya pemahaman aparat desa terhadap peraturan perundangan tentang desa

2. Masih rendahnya kualitas daya saing SDM dan Kesejahteraan Masyarakat

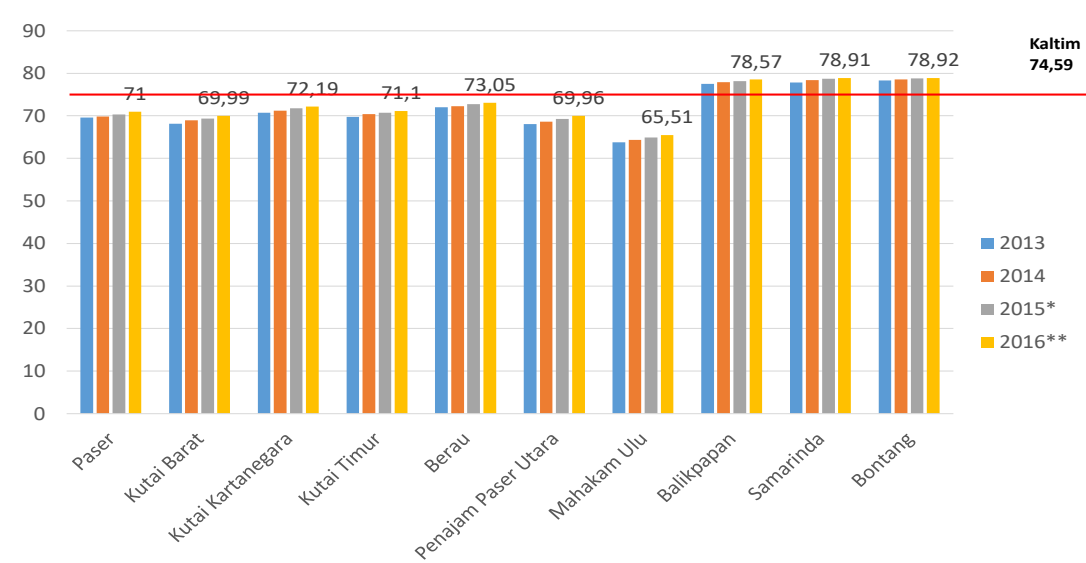
Pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Mengurai dari bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut. Dari masalah utama rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:

a. Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat dan pelayanan pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pada Kabupaten Kutai Kartanegara kualitas pendidikan masih relatif rendah, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam mencapai pendidikan yang berkualitas yang diharapkan akan mencetak SDM daerah yang berdaya saing tinggi. Dengan segala keterbatasan yang ada untuk menempuh pendidikan adalah dikarenakan masih sulitnya aksesibilitas terhadap sekolah antar wilayah kecamatan, hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah.

Salah satu rangkaian dalam pelayanan pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Melihat kondisi saat ini, sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata tersedia pada seluruh sekolah. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Selain itu kualitas tenaga pendidik dan pendistribusian yang tepat merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kualitas manajemen pendidikan pada sekolah untuk mampu membentuk sistem pendidikan yang sesuai dan tepat dalam menerapkan pembelajar pada siswa. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa indikator makro yang mampu menunjukkan kualitas SDM adalah IPM, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah. Merujuk hal tersebut, IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 72.19 pada tahun 2016. Angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara di posisi ke 5 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, Kota Samarinda menduduki posisi kedua dengan nilai IPM sebesar 78,91. Sedangkan kabupaten Mahakam Ulu mempunyai nilai IPM paling rendah di kabupaten/kota di Kalimantan Timur yaitu sebesar 65,61 pada tahun 2016. Tabel berikut memperlihatkan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Gambar IV-2. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2016



- Dari 10 kab/kota di Kaltim, hanya ada 3 yang berada di atas IPM Kaltim yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, sedangkan 7 kabupaten lain masih di bawah rata-rata

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur dalam angka 2017

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan.pada tahun 2016 RLS Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 8,71 yang meningkat dari tahun sebelumnya 8,68 di tahun 2015. Angka ini berarti bahwa penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah selama 8,7 tahun atau Kelas 2 SMP semester dua.

b. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat belum masih belum optimal, hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, Selain itu keterbatasan akses menambah kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan. Selain itu pendistribusian tenaga medis belum mampu merata pada seluruh lapisan wilayah Kab.Kutai Kartanegara, memengaruhi dalam pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Angka harapan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya yakni mencapai 71,64 tahun yang berarti setiap bayi yang baru lahir hidup pada tahun 2016 memiliki harapan hidup hingga mencapai usia 71 tahun. Perkembangan nilai AHH dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

Tabel 4.3.
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen Penyusunnya
Kabupaten Kutai Kartanegara , 2014-2016

Unsur Pembentuk IPM	2014	2015	2016
---------------------	------	------	------

Unsur Pembentuk IPM	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,50	71,60	71,64
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,24	13,25	13,26
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,46	8,68	8,71
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan (ribuan)	9.984	10.250	10.593
IPM	71,20	71,78	72,19
Peringkat IPM Dalam Provinsi Kalimantan Timur	5	5	5

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2018)

c. Belum maksimalnya kualitas pembangunan berbasis gender

Perempuan dan anak tidak jarang menjadi target yang rentan mengalami tindakan yang tidak menyenangkan berbasis gender. Dengan hal ini perlu perhatian pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu pemberdayaan akan kaum perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam mencapai pembangunan daerah. Berdasarkan data yang ada prioritas penduduk pekerja Kab.Kutai Kartanegara adalah laki-laki, jika diperbandingkan nilainya memupai *range* yang cukup jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan gender yang relatif cukup kuat. Sehingga perempuan-perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang cukup sebagai bekal peningkatan produktivitas diri. Melihat hal ini prioritas pemerintah adalah melakukan penanganan dan pencegahanserta advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberdayaan, terutama pemberdayaan ekonomi perempuan, dan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan dan subjek dalam pembangunan nasional konflik kekerasan menjadi saat ini.

Angkatan Kerja (AK) Kutai Kartanegara setiap tahun menunjukkan peningkatan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang berfluktuasi dan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Berikut perkembangan AK dan TPAK Kutai Kartanegara 2013-2015.

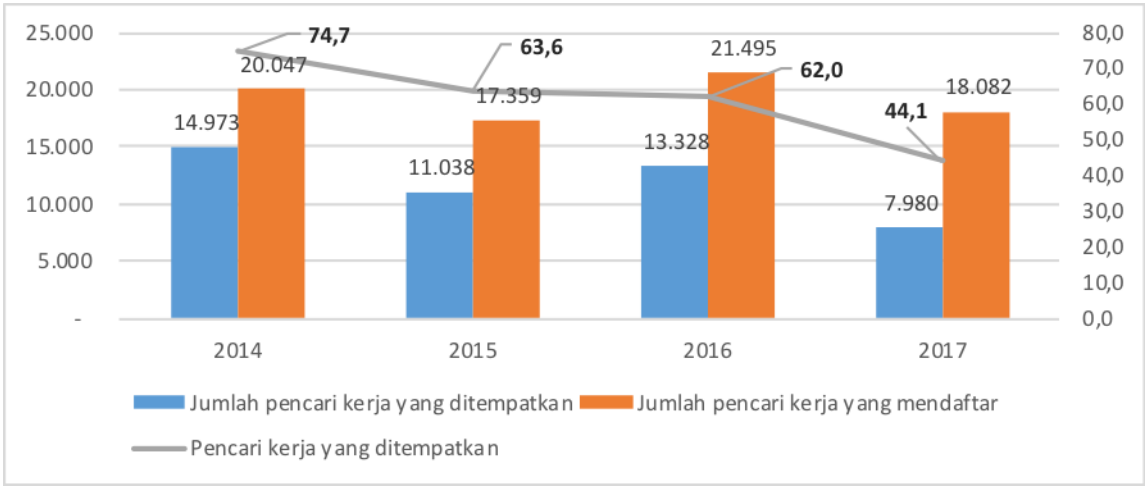
Tabel 4.4.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas

JENIS KELAMIN	2013		2014		2015	
	AK	TPAK	AK	TPAK	AK	TPAK
Laki-Laki	218,037	84.40	221,830	83.00	231,836	85.41
Perempuan	83,191	36.67	96,669	41.00	75,310	31.40
Jumlah Total	01,228	62.08	318,499	64.00	307,146	60.07

Sumber : BPS, 2016

Dari pendekatan pencari kerja yang dilakkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi penurunan persentase daya serap pencari kerja atau pencari kerja yang ditempatkan terus menurun hal ini disebabkan karena kecenderungan menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan pencari kerja yang ditempatkan.

Gambar IV-3. Perkembangan pencari kerja yang ditempatkan 2014-2017



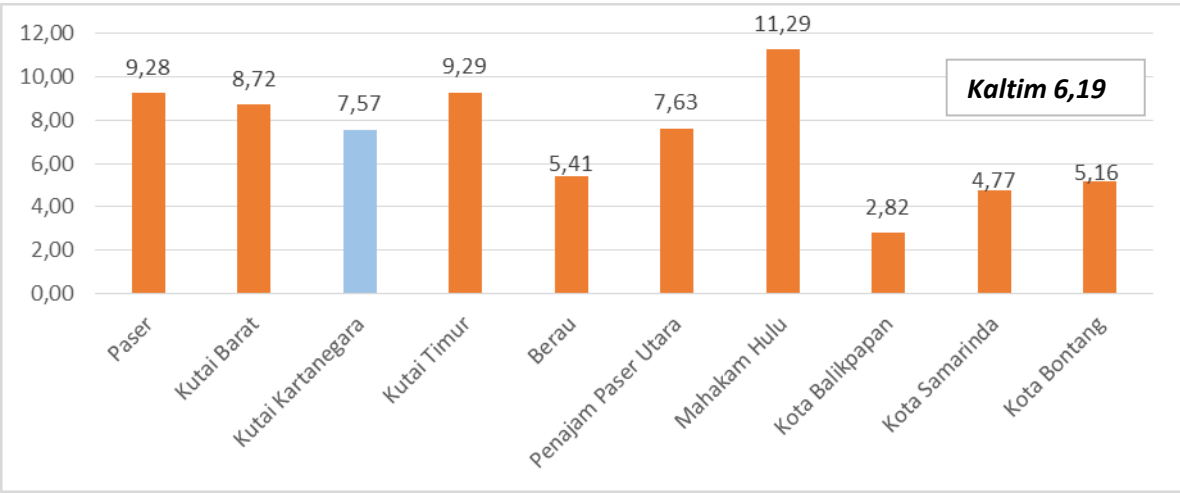
Dengan melihat tabel diatas perbandingan pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, perempuan yang bekerja mempunyai produktifitas yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat perlindungan perempuan dan anak, rendahnya pemberdayaan perempuan dan anak, minimnya kualitas pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan. Dengan ini diperlukan fasilitasi yang lebih dari pemerintah daerah untuk mengajak dan memberdayakan perempuan agar lebih memiliki kegiatan produktif. Sehingga dengan adanya peran perempuan dalam pembangunan diharapkan akan memberikan sumbangsih dalam mencetak generasi-generasi penerus yang berkualitas.

Pembangunan yang merata keseluruh daerah merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan daerah dan meningkatkan produktivitas daerah. Dengan pemerataan pembangunan dalam berbagai sektor perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing dan masyarakat yang produktif. Sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera.

d. Belum optimalnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikasi dan cermin dari capain pembangunan yang berorientasikan pada kesehateraan masyarakat. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan besaran 11,29 persen, sedangkan yang terendah adalah Kota Balikpapan dengan 2.82 persen. Kemiskinan menjadi permasalahan semua daerah, namun demikian dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara saat iin tertinggi dengan jumlah sebesar 56.570 orang teritnggi di Kalimantan Timur sehingga diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan pembaharuan sosial ekonomi untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar IV-4.Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



e. Masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja

Salah satu faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah tentang pekerjaan. Kualitas daya saing tenaga kerja sangat mempengaruhi bagaimana, macam dan jenis pekerjaan masyarakat yang kemudian akan memberi dampak pada penghasilan masyarakat dan kesejahteraannya. Melihat hal tersebut maka kualitas daya saing tenaga kerja merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan oleh pemerintah bersama masyarakat agar masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat hidup dengan lebih layak dan sejahtera. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki trend fluktuatif naik turun dalam setiap periodenya. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 7,37 persen kemudian naik di tahun 2014 sebesar 7,65 persen dan 10,22 ditahun 2015.

Tabel 4.5.
Tingkat Pengangguran
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015
Paser	9,25	6,69	9,06
Kutai Barat	8,03	6,84	11,7
Kutai Kartanegara	7,37	7,65	10,22
Kutai Timur	6,09	5,65	5,14
Berau	5,85	10,05	5,72
Penajam Pasir Utara	7,97	7,52	7,28
Mahakam Ulu**	**	**	4,75
Balikpapan	7,95	7,56	5,95
Samarinda	8,57	7,56	5,61
Bontang	11,19	9,38	12,07
Kalimantan Timur	7,94	7,38	7,50

- Tingkat pengangguran Kota Bontang menjadi yang tertinggi pada tahun 2013 dan 2015 se-Kaltim, pada tahun 2014 Kab. Berau menjadi yang tertinggi se-Kaltim
 - Pada tahun 2015 ada 6 kab/kota yang berada di bawah tingkat pengangguran Kaltim, sedangkan 4 kab/kota lain berada di atas rata-rata

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2017

Pada Tahun 2015 Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara masuk kategori rendah dengan peringkat kedua terendah di Kab/Kota se-Kalimantan Timur mayoritas penduduk Kutai Kartanegara bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan, dan pertambangan dan industri.

Dengan berbagai penjabaran permasalahan diatas, beberapa akar masalah yang memicu adanya permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6.
Tabel Rumusan Permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok
“Masih rendahnya kualitas daya saing SDM dan Kesejahteraan Masyarakat”

Permasalahan		Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan	1. Terbatasnya pendidikan keterampilan berbasis keunggulan lokal 2. Masih sulitnya aksesibilitas terhadap sekolah antar wilayah kecamatan, dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah 3. Masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan 4. Masih belum meratanya penyebaran guru antar kecamatan 5. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi yang

Permasalahan		Akar Masalah
		dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta 6. Rendahnya kualitas manajemen pendidikan pada tiap sekolah 7. Masih rendahnya partisipasi sekolah pada anak usia dini (PAUD). 8. Rendahnya minat baca masyarakat karena belum tertanamnya budaya gemar membaca 9. Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah
2	Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan 2. Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 3. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat berpendapatan rendah 4. Pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan relatif rendah 5. Cakupan Layanan asuransi /jaminan kesehatan bagi masyarakat belum optimal 6. Kurang optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 7. Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata 8. Kurang sehatnya lingkungan dan pola hidup masyarakat yang sehingga rentan terhadap penyebaran penyakit
3	Belum maksimalnya kualitas pembangunan berbasis gender	1. Masih rendahnya tingkat perlindungan perempuan dan anak 2. Rendahnya pemberdayaan perempuan dan anak 3. Minimnya kualitas pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan 4. Rendahnya komitmen terhadap Kota Layak Anak 5. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai peserta Keluarga Berencana
4	Belum optimalnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan	1. Belum optimalnya pelayanan sosial terhadap PMKS 2. Relatif tingginya masyarakat penyandang masalah sosial 3. Bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin belum optimal dan tepat sasaran
5	Masih rendahnya kualitas daya saing tenagakerja	1. Masih terbatasnya peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga terdidik dan terampil 2. Terbatasnya lapangan pekerjaan belum mampu menampung jumlah pencari kerja 3. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja 4. Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru 5. Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha 6. Masih tingginya ketergantungan usia produktif

3. Masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap sumber pembiayaan pemerintah pusat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satu modal yang terpenting adalah keuangan daerah, yang menjadi sumber dari pembangunan dan pembiayaan daerah. Berdasarkan asas desentralisasi di lakukan atas beban APBD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama

dengan Pemerintah Daerah. Kondisi saat ini Pemerintah daerah Kutai Kartanegara sangat bergantung pada Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan daripada mengupayakan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah yang berasal dari Realisasi Dana Perimbangan menunjukkan trend menurun dari tahun ke tahun sedangkan pemerintah Kutai Kartanegara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pengelolaan keuangan daerah sebaiknya diikuti dengan peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu cara mengoptimalkan belanja secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan. Pelayanan publik dapat dilihat dari besarnya belanja pemerintah di suatu daerah yang juga menggambarkan posisi fiskal suatu daerah. Posisi fiskal yang lebih kuat akan meningkatkan layanan kota dan membuat siklus pengembangan terus bergerak maju. Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi modal dalam aktiva tetap, seperti: peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan lokal untuk sarana dan prasarana. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aktiva tetap dalam belanja modal adalah kunci untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah membawa dampak yang luasterhadap akuntansi pemerintah daerah.

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, diharapkan tingkat kemandirian pemerintah daerah semakin meningkat dan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah pusat. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi (share) Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Dengan adanya peningkatan (pertumbuhan) meningkatnya pemberian pelayanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat pula sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi semakin tinggi. Kontribusi pemerintah pusat semakin menurun, seiring dengan meningkatnya kemampuan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Kinerja keuangan pemerintah sesudah dilaksanakannya otonomi seharusnya mengalami perbaikan yang ditandai dengan semakin baiknya nilai rasio-rasio kinerja keuangan. Hal tersebut disebabkan oleh semakin luasnya kesempatan yang diberikan kepada daerah untuk menggali potensi – potensi yang daerah miliki. Dengan berbagai penjabaran permasalahan diatas, beberapa akar masalah yang memicu adanya permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7.
 Rumusan Masalah dan akar masalah dari Permasalahan Pokok
 “Masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap sumber pembiayaan pemerintah pusat”

Masalah	Akar Masalah
1 Belum kondusifnya iklim investasi dan pengembangan dunia usaha	1 Belum optimalnya penerapan regulasi terkait kemudahan investasi daerah 2 Belum optimalnya pemberian bantuan modal terhadap pengusaha UMKM 3 Masih lambatnya kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan 4 Belum maksimalnya pengelolaan pendapatan dan asset-asset daerah

4. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah

Setiap daerah mempunyai potensi kekhasan dan karakteristik tersendiri terhadap sumberdaya lokal daerah. Dengan adanya potensi sumber daya lokal daerah yang dikelola dengan optimal maka akan memberikan dampak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal Kab.Kutai Kartanegara dikarenakan adanya keterbatasan dalam mengembangkan

dan meningkatkan nilai jual produk unggulan daerah, kemudian kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk lokal daerah.

A. Belum optimalnya pengelolaan pada sektor pertanian dan pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara

a. Sektor pertanian

Pada tahun 2016, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebagai sektor ekonomi andalan. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalan sangat medominasi perekonomian Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 79,23 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara. Peranan aktivitas tambang batubara di Kutai Timur memberikan kontribusi sebesar 71,58 persen terhadap total PDRB wilayah tersebut. Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalan juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 71,31 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara, hingga mencapai 66,06 persen dari total PDRB Kabupaten Paser. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kertanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,68 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya, dengan masing-masing kontribusi yang diberikan terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 32,80 persen, 29,04 persen, dan 2,75 persen.

Tabel 4.8.

Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	71,31	Pertanian	12,56	Industri	4,51
Kubar	Pertambangan	46,95	Pertanian	15,20	Konstruksi	12,20
Kukar	Pertambangan	64,68	Pertanian	12,70	Konstruksi	8,23
Kutim	Pertambangan	79,23	Pertanian	8,67	Industri	2,98
Berau	Pertambangan	60,36	Pertanian	11,38	Transportasi	5,91
Penajam PU	Pertambangan	29,78	Pertanian	21,42	Industri	16,57
Mahulu	Pertanian	77,23	Pertambangan	7,68	Konstruksi	5,26
Balikpapan	Industri	47,62	Konstruksi	15,10	Transportasi	11,97
Samarinda	Konstruksi	20,14	Perdagangan	15,77	Pertambangan	12,45
Bontang	Industri	83,96	Konstruksi	4,80	Perdagangan	2,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Sebagai daerah lumbung pangan Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada tantangan yang besar dalam menyediakan pasokan pangan Kalimantan Timur. Sektor pertanian setiap tahun cenderung meningkat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 2%, lebih lambat dibanding tahun 2015 yang mencapai 7%. Melambatnya pertumbuhan sektor pertanian tersebut salah satunya adalah karena penurunan luas panen, namun disisi lain pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat produksi pertanian berkembang dengan baik, sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga. Komoditas unggulan sektor pertanian yang menjadi perhatian saat ini selain

beras dalah jagung dan ubi kayu. Berikut perkembangan komoditas beras, jagung dan ubi kayu di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015.

Tabel 4.9.
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Beras Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

Kecamatan	Januari - Desember 2015		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
Semboja	2.337	49,33	11.527
Marang Kayu	2.470	49,44	12.211
Kota Bangun	2.442	50,39	12.305
Sebulu	2.964	48,37	14.336
Muara Kaman	3.410	49,37	16.835
Tenggarong	3.136	53,77	16.861
Loa Kulu	6.703	50,10	33.584
Tenggarong Seberang	7.950	53,13	42.239
JUMLAH	31.412	50,90	159.899

Sumber : BPS, 2017

Tabel 4.10.
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

Kecamatan	JAGUNG			UBI KAYU		
	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KW/HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KW/HA)	PRODUKSI (TON)
Samboja	177	35	627	26	231	602
Muara Jawa	-	-	-	19	236	449
Sanga-Sanga	1	33	3	12	213	256
Loa Janan	-	-	-	15	217	325
Loa Kulu	11	34	37	18	228	411
Muara Muntai	-	-	-	65	212	1,381
Muara Wis	-	-	-	7	209	147
Kota Bangun	-	-	-	208	217	4,518
Tenggarong	-	-	-	64	258	1,649
Sebulu	-	-	-	112	226	2,535
Tenggarong Seberang	-	-	-	25	226	565
Anggana	-	-	-	38	231	877
Muara Badak	-	-	-	25	230	575
Marang Kayu	231	39	909	94	248	2,327
Muara Kaman	-	-	-	79	215	1,696
Kenohan	-	-	-	21	211	443
Kembang Janggut	-	-	-	75	223	1,670
Tabang	-	-	-	55	232	1,274
Rata-Rata 2015	420	38	1,576	958	227	21,700
2014	249	32	834	1,161	199	23,260
2013	413	32	1,342	1,152	183	21,027

Sumber : BPS, 2017

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat mulai melemahnya sektor pertanian pada Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sektor ini membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah daerah untuk memperbaiki dengan upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas. Hal ini cukup penting dikarenakan sektor pertanian arti luas ini merupakan tempat masyarakat yang sebagian besar berpendapatan rendah, selain itu untuk mencukupi kebutuhan pokok makanan masyarakat. Pertumbuhan sektor pertanian belum berkembang secara optimal dikarenakan masih rendahnya pengembangan olahan

produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Potensi perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup tinggi yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Sebagian besar komoditas terdapat pada perkebunan rakyat, sedangkan untuk perkebunan besar terdapat komoditas karet, kelapa sawit dan kenaf. Produksi perkebunan hingga tahun 2016 mengalami perbaikan daripada tahun 2015, sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, jumlah rumah tangga petani untuk perkebunan rakyat pada tahun 2016 mencapai 33.311 rumah tangga petani. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan penguatan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sasaran proses transformasi struktur ekonomi daerah.

Tabel 4.11.
Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

Jenis Tanaman	Perkebunan Rakyat			Perkebunan Besar	
	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha)	Petani (ruta)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/ha)
Karet	7.098,03	1.071,57	9.085,00	766,00	514,81
Kelapa	5.452,70	875,50	5.312,00	-	-
Kelapa Sawit	202.931,30	14.937,84	12.849,00	1.738.708,03	12.418,51
Kopi	27,57	220,33	1.900,00	-	-
kakao	33,83	620,66	175,00	-	-
Cengkeh	-	-	-	-	-
Lada	2.541,32	633,86	2.9393,00	-	-
Kapuk	-	-	-	-	-
Vanili	-	-	-	-	-
Kemiri	10,40	185,15	305,00	-	-
Aren	148,60	895,15	746,00	-	-
Jarak	-	-	-	-	-
Kenaf				766,00	514,81
2016	218.243,75	3.582,42	33.311,00	1.739.474,03	9.720,64
2015	265.955.52	25,129.50	32,010.00	1,280,969.87	9,473.35
2014	192,992.04	23,205.00	31,478.00	1,074,753.00	15,899.00
2013	161,769.70	28,887.14	28,426.00	999,854.00	19,146.29

Sumber : BPS, 2017

Pengembangan produk mentah menjadi barang jadi merupakan suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal daerah. Selain itu adanya keterbatasan sarpras pendukung aktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi kendala dalam kegiatan petani/pekebun dan petenak untuk melakukan aktivitasnya. Pada umumnya petani, peternak dan pekebun berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga SDM pertanian sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan yang rendah(setingkat SD/ sederajat). Dengan ini para petani, pekebun dan peternak mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan wawasan serta menerapkan teknologi tepat guna dalam mengembangkan tanaman pangan. Hal ini diperparah dengan belum maksimalnya pelatihan teknis produksi dan manajerial bagi umkm terkait agribisnis, kemudian belum ada dukungan serius (kebijakan pemerintah) tentang pengembangan industri pengolahan pertanian di daerah, dalam sektor perikanan belum optimalnya pengelolaan hasil perikanan tangkap dan budidaya dan belum siapnya pengembangan pertanian menuju agribisnis. Hal ini harus disikapi oleh pemerintah daerah secara serius, mengingat bahwa transformasi ekonomi untuk mengembangkan sektor pembangunan hijau sudah harus diupayakan semaksimal mungkin. Mengetahui hal ini maka pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan SDM petani dengan adanya penyuluhan-penyuluhan pada petani, pekebun dan peternak diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas. Sehingga pengembangan produk lokal daerah dalam sektor pertanian dalam dikembangkan dengan lebih optimal.

b. Sektor pariwisata

Melihat potensi daerah Kab.Kutai Kartanegara sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup banyak. Namun Pemerintah daerah belum mengembangkan sektor pariwisata sehingga objek-objek wisata masih banyak yang belum dioptimalkan dan dikelola dengan baik. Berikut ini adalah potensi wisata di Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya. Kunjungan wisatawan pada tahun 2016 terbesar pada destinasi wisata buatan sebesar 63%, disusul wisata budaya 31% dan wisata alam sebesar 6%. Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pulau Kumala dan Ladaya. Berikut proporsi kunjungan wisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan daya tarik wisata.

Tabel 4.12.
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

Nama Objek Wisata		Jumlah KunjunganWisatawan Tahun 2016		Jumlah (Orang)
		Wisnus (Orang)	Wisman (Orang)	
Daya Tarik Wisata Alam				
1	Bukit Bengkirai Samboja	34.311	705	35.016
2	Borneo Orang Utan Survival (BOS)	2.142	1.318	3.460
3	Pantai Tanah Merah Samboja	39.800	0	39.800
Daya Tarik Wisata Budaya				
4	Museum Mulawarman	156.892	410	157.302
5	Museum Kayu	18.437	254	18.691
6	Situs Makam Raja Kutai	155.355	0	155.355
7	Situs Sanga sanga			
Daya Tarik Wisata Khusus/Buatan				
8	Waduk Panji Sukarame	38.300	218	38.518
9	Planetarium	31.848	218	32.066
10	Lamin Etam Ambors	68.810	13	68.823
11	Pulau Kumala	377.597	0	377.597
12	Ladaya	277.601	0	277.601
2016		1.818.236	4.050	1.822.286
2015		1.368.812	3.730	1.367.542

Sumber : BPS, 2017

B. Lambatnya aktivitas perekonomian daerah

Melambatnya perkembangan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi yang dihadapi daerah tersebut. Permasalahan ekonomi suatu daerah dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang mana pada akhirnya dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan kondisi daerah yang sangat tergantung pada SDA untuk menggerakkan perekonomiannya, maka pada saat terjadi bencana alam ataupun penurunan jumlah produksi atau harga pangsa pasar yang tidak menentu, maka akan memberikan *impact* perekonomian daerah tersebut yang akan mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kualitas tenaga kerja, penduduk, barang modal, tingkat teknologi serta sistem dan sikap masyarakat juga berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kendala yang di hadapi sebuah daerah ketika masih tergantung pada modal dan investasi pihak luar dalam menunjang kegiatan ekonominya adalah ketika modal yang ditanamkan berkurang atau investasi dialihkan ke daerah lain, maka hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terjadi.Perlambatan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi di Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan batu bara. Kenaikan harga tersebut menyebabkan harga barang pokok lain ikut naik. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi berkurang dan terjadi penurunan kegiatan ekonomi masyarakat. Terutama untuk daerah yang mengandalkan sumber daya alam tak terbarukan sebagai penyumbang utama dalam pembentukan PDRB daerah seperti Kutai Kartanegara.

Oleh karena itu, pemerintah daerah Kutai Kartanegara perlu mencari terobosan/inovasi dalam mengembangkan sektor lapangan usaha baru, yang sekiranya dapat menggerakkan perekonomian masyarakatnya dan membangkitnya usaha kecil

mikro. Pada kondisi saat ini salah satu alternatif lapangan usaha yang dapat dipertimbangkan di Kutai Kartanegara untuk dikembangkan adalah sektor pariwisata, dan sektor pertanian dikarenakan merupakan industri padat karya dimana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan modal atau peralatan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Sehingga hal ini dapat memicu berkembangnya pembangunan regional, di mana struktur perekonomian regional sangat penting untuk menyesuaikan dan menentukan dampak ekonomis dari pariwisata. Melalui potensi wilayah dan objek yang menarik, jika dikelola dengan fokus maka bisa berkembang dan menjadi salah satu devisa daerah. Selain itu, dengan pengembangan objek wisata maka akan membawa banyak perubahan bagi daerah sekitarnya. Hal ini perlu ditunjang dengan akses jalan dan fasilitas umum, transportasi, akomodasi serta restoran dan penyedia makanan akan berkembang di daerah sekitar tempat wisata.

Melalui sektor pariwisata secara tidak langsung membangkitkan kegiatan berbasis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan peningkatan penanaman modal baik PMDN ataupun PMA. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan satu-satunya sektor yang memerlukan keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* terkait. Dengan pelaku UKM yang memiliki sarana pemasaran bagi produk yang dihasilkan. Sehingga kemajuan di sektor pariwisata akan mampu mendorong perkembangan UKM. Namun demikian, keberadaan UKM juga tetap harus memperhatikan dan mampu memelihara kearifan budaya lokal. Peran serta pemerintah juga harus tetap ada, salah satunya menyangkut hak cipta produk UKM dan hak *merk* bagi pelaku kuliner.

Keberadaan UKM di suatu daerah bukan sesuatu hal yang dapat dipandang sebelah mata dalam pembangunan perekonomian. Selain UKM juga sangat membantu suatu daerah dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan dan unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga kerja baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga daerah setempat melalui peluang investasi, peluang kerja dan peluang berusaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidaknya-tidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan daripada non makanan (perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain). Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2016 yaitu pengeluaran untuk kebutuhan non makanan lebih besar daripada makanan. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengeluaran penduduk bulanan. Mereka menghabiskan 53.10 persen dari pengeluarannya untuk makanan, dan 46,90 persen untuk non makanan. Sedangkan pada tahun 2015, pengeluaran untuk kebutuhan makanan sebesar 48,98 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 51,02 persen. Berdasarkan tipe daerah, secara umum tingkat pengeluaran penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Di perkotaan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp.1.065.060,- sedangkan di pedesaan sekitar Rp. 1.035.449,-. Sementara rata-rata total pengeluaran secara total di perkotaan dan pedesaan per kapita sebulan mencapai Rp. 1.045.571,-.

Tabel 4.13.
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Daerah Kota dan Pedesaan
Tahun 2014-2016

URAIAN		2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Kota/Urban						
	a. Makanan/Food	431,195	43.97	484,618	47.18	540,809	50.78
	b. Bukan Makanan/Non Food	549,468	56.03	542,454	52.82	524,252	49.22
	c. Jumlah/Total	980,664	100.00	1,027,072	100.00	1,065,060	100.00
2.	Pedesaan/Rural						
	a. Makanan/Food	415,629	49.65	484,287	49.92	562,671	54.34

URAIAN			2014		2015		2016	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
	b.	Bukan Makanan/Non Food	421,444	50.35	485,915	50.08	472,777	45.66
	c.	Jumlah/Total	837,073	100.00	970,202	100.00	1,035,449	100.00
3.	Kota + Pedesaan/Urban + Rural							
	a.	Makanan/Food	420,739	47.58	484,397	48.98	555,198	53.10
	b.	Bukan Makanan/Non Food	463,466	52.42	504,600	51.02	490,372	46.90
	c.	Jumlah/Total	884,205	100.00	988,996	100.00	1,045,571	100.00

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka, 2017

Salah satu pendukung perekonomian untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah adalah melalui penanaman modal. Penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa potensi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup baik. Hal ini terlihat bahwa jumlah pemodal asing dan jumlah pemodal dalam negeri yang cukup banyak. Pemodal tersebut sebagian besar berinvestasi di sektor pertambangan. Perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri, hingga akhir tahun 2016 menurun dibanding tahun 2015, yakni hanya mencapai 973 Miliar Rupiah. Sedangkan untuk Investasi Asing lebih baik dibanding tahun 2015 yakni diatas 2 Triliyun US Dollar. Tenaga kerja yang dapat diserap hingga tahun 2016 bertambah sebanyak 16.713 untuk pekerja Indonesia, dan 68 orang untuk pekerja asing. Berikut perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan daya serap tenaga kerja hingga tahun 2016.

Tabel 4.14.
Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2016

Tahun	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2014	9	6.493.558.100.000	-	-
2015	31	5.492.555.486.386	5.647	24
2016	37	973.606.015.564	1.509	8

Tabel 4.15.
Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2016

Tahun	Jumlah Proyek	Investasi (US\$)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2014	24	2.571.589.532.672	-	-
2015	24	2.199.617.509.403	6.420	55
2016	56	2.272.030.595.825	15.204	60

Sumber : BPS, DDA 2016

Proporsi koperasi aktif sampai dengan tahun 2017 sebesar 77,13% dari jumlah total koperasi sebanyak 656 koperasi. Sedangkan perkembangan usaha mikro dan kecil (UKM) hingga tahun 2017 berjumlah 38.805 unit. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Tabel 4.16.
Jumlah UMK dan Koperasi Kutai Kartanegara 2015-2017

Indikator Koperasi dan UKM	2015	2016	2017
Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil	38,631	38,361	38,805
Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil Aktif	82.54	100.00	97.82
Jumlah Koperasi Aktif	480	527	506
Jumlah Seluruh Koperasi	597	642	656
Persentase Koperasi Aktif	80.40%	82.09%	77.13%

Sumber : LPPD, 2015-2017

Menindaklanjuti beberapa pernyataan permasalahan diatas, dipicu oleh beberapa akar masalah yang tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.17.
Rumusan Permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok
“Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan daerah”

Permasalahan		Akar Masalah
1. Belum optimalnya pengelolaan pada sektor pertanian dan pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara	a. Sektor Pertanian	1 Potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan yang banyak yang belum tergarap dengan baik 2 Irigasi pertanian tidak berjalan optimal atau banyak luasan lahan produktif yang belum mempunyai irigasi 3 Belum dkembangkannya pasca panen produk sumber karbohidrat non beras 4 Belum terbentuknya pasar produk pasca panen sumber karbohidrat non beras 5 Rendahnya pelatihan teknis produksi dan manajerial bagi umkm terkait agribisnis 6 Belum ada dukungan serius (kebijakan pemerintah) tentang pengembangan industri pengolahan pertanian di daerah 7 Belum optimalnya pengelolaan hasil perikanan tangkap dan budidaya 8 Belum siapnya pengembangan pertanian menuju agribisnis
	b. Sektor Pariwisata	1 Belum maksimalnya pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan 2 Masih sedikitnya penyelenggaraan wisata kebudayaan daerah 3 Belum adanya inovasi penyelenggaraan kebudayaan yang diintegrasikan dengan pariwisata secara terpadu
2. Lambatnya aktivitas perekonomian daerah		1 Belum maksimalnya pengelolaan manajemen kelembagaan koperasi 2 Belum optimalnya pengembangan iklim usaha perdagangan yang kondusif dan memadai 3 Lambatnya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan industri kreatif

5. Tingginya disparitas pertumbuhan dan pembangunan antar wilayah

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sedang dalam *on progress* dikerjakan. Dengan hal ini kedepannya pemerintah harus lebih memerhatikan kondisi infrastruktur dari berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Belum meratanya pembangunan dan layanan infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas; jalan negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten, panjang jalan kabupaten sampai tahun 2016 mencapai 2,193.02 Km, dengan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 48,36%, jalan sedang 15,20%, jalan rusak sebesar 20,18% dan jalan rusak berat sebesar 16,27%. Kondisi ini menjadi gambaran pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama pada daerah/kecamatan yang dipinggiran agar lebih terakses. Sehingga pengembangan wilayah baik sektor ekonomi, sosial, budaya dapat lebih cepat direalisasikan.

Tabel 4.18.
Panjang Jalan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	STATUS JALAN	PANJANG JALAN (KM)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	

NO.	STATUS JALAN	PANJANG JALAN (KM)						2016
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jalan Negara	367.55	367.55	367.55	367.55	367.55	367.55	367.55
2	Jalan Provinsi	353.90	353.90	353.90	353.90	353.90	353.90	353.90
3	Jalan Kabupaten	1.511,45	1,543.93	1.547.110	2.276,77	2.276,77	2.276,77	2.193,02

Sumber : BPS; DDA, 2017

Tabel 4.19.
Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	KONDISI JALAN	KONDISI JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN JALAN (KM)					JUMLAH 2016
		ASPAL	KERIKIL	BATU	TANAH	BETON	
1	Baik	192.13	289.48	-	196.67	382.27	1,060.55
2	Sedang	60.37	90.96	-	61.80	120.11	333.24
3	Rusak	80.16	120.77	-	82.05	159.48	442.46
4	Rusak Berat	64.63	97.38	-	66.16	128.60	356.77
	2016	397.29	598.59	-	406.68	790.46	2.193,02
	2015	452.69	551.94	260.57	735.17	892.20	2,892.57
	2014	444.62	483.18	258.84	727.00	690.54	2,604.17
	2013	412.75	279.52	247.74	681.04	356.96	1,978.01

Sumber : BPS; DDA, 2017

b. Belum terpenuhinya layanan transportasi yang berkualitas

Pembangunan daerah dapat lebih cepat dilaksanakan jika didukung dengan akses kendaraan yang lancar, nyaman dan tersedia segala kebutuhan dalam pergerakan arus barang dan manusia. Aksesibilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini secara umum dilalui melalui dua jalur transportasi yakni jalan darat dan perairan, dari aspek kemudahan aksesibilitas jalan darat menjadi pilihan terbaik, mengingat biaya dan waktu tempuh yang lebih singkat, dengan demikian untuk memberikan pelayanan terhadap aksesibilitas masyarakat maka keberadaan angkutan darat menjadi tolok ukur tingkat aksesibilitas masyarakat, jumlah angkutan darat Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2017 mencapai 16.054 angkutan dengan jumlah penumpang sebesar 62.095 orang.

Tabel 4.20.
Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat Kutai Kartanegara 2015-2017

Indikator Perhubungan Darat	2015	2016	2017
Jumlah angkutan darat	14,918	15,004	16.054
Jumlah penumpang angkutan darat	154,448	141,548	62.095

Sumber : LPPD, 2015-2017

Dengan transportasi yang masih sangat kurang mengakibatkan lambannya pembangunan daerah. Segala aktivitas sangat dipengaruhi oleh arus transportasi untuk mendukung pergerakan pembangunan disegala sektor. Hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Menindaklanjuti hal tersebut, beberapa permasalahan dan akar masalah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.21.
Rumusan masalah dan Akar Masalah dari Permasalahan Pokok "Tingginya disparitas pertumbuhan dan pembangunan antar wilayah"

Permasalahan		Akar Masalah
1	Belum Meratanya Pembangunan Dan Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektifitas Wilayah	1. Kondisi Jalan Yang Sebagian Besar Masih Buruk 2. Masih Minimnya Jembatan Yang Menghubungkan Antardesa 3. Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun 4. Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat 5. Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan 6. Masih Rendahnya Cakupan Layanan Air Bersih Dan Sanitasi 7. Masih Minimnya Kapasitas Dan Ketersediaan Sumberdaya Tenaga Listrik Di Daerah Terpencil 8. Masih Terbatasnya Sumber Air Bersih Dan Air Minum Pedesaan

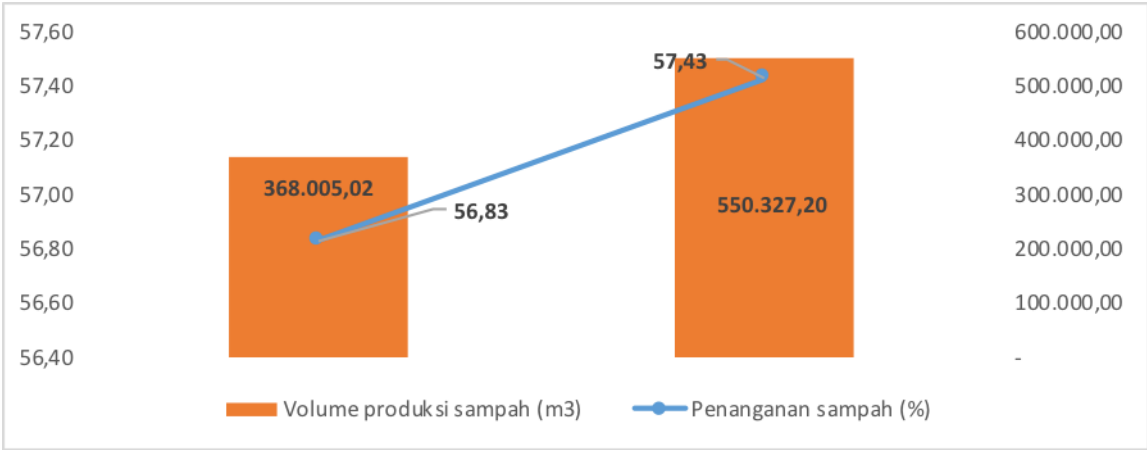
Permasalahan		Akar Masalah
2	Belum Terpenuhinya Layanan Transportasi Yang Berkualitas	1. Terbatasnya Tingkat Pelayanan Jaringan Transportasi Antar Dan Intra Wilayah 2. Sarana Komunikasi Belum Memadai Di Daerah Terpencil 3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan 4. Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten

6. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan karena belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan. Ketidakjelasan tata batas kawasan ini memberikan ancaman pada pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi yang menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis. Ketidakjelasan kawasan hutan juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta alih fungsi kawasan hutan untuk penggunaan lain di luar kehutanan yang tidak terkendali selain itu masih tingginya kawasan hutan berstatus ‘*open access*’ juga merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Namun, disini lain muncul permasalahan baru, yakni masih terjadi penebangan kayu dan pembakaran untuk dijadikan lahan pertanian dan peruntukan lainnya.

Belum ditetapkan zona untuk pemanfaatan hutan menyebabkan terjadinya pembalakan liar yang merusak hutan sehingga hutan tidak mampu menampung debit air hujan yang turun dan menyebabkan banjir. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan masalah persampahan, khususnya berkaitan dengan cara-cara penanganan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum ada. Permasalahan lainnya mencakup upaya-upaya yang terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan potensi kelautan, perikanan dan ekowisata dalam prinsip pengelolaan sumber daya dan rehabilitasi tambang tambang rakyat, sumber daya air, konservasi biodiversitas secara terpadu. Disamping itu, terdapat tantangan yang dihadapi saat ini yakni terkait dengan upaya mewujudkan pengelolaan sampah secara terintegrasi berbasis kearifan lokal.

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan positif, volume sampah yang tercatat tahun 2016 sebanyak 550.327,20 meter kubik pertahun dan telah tertangani sebesar 57,43%. Kondisi ini meningkat sangat signifikan dari volume sampah pada tahun 2015, yang sebanyak 368.005,02 meter kubik dan tertangani sebesar 56,83%. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.



Gambar IV-5. Penanganan Sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016

Sumber : LPPD, 2015-2017

Berdasarkan urian di atas dan data informasi yang di kaji dan di analisis, maka akar permasalahan dari permasalahan daerah “Belum optimalnya pengelolaan dan

pelestarian lingkungan hidup” di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.22.
Rumusan Permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup”

Permasalahan		Akar Masalah	
1	Belum optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	1	Kualitas penanganan sampah dan sanitasi masih rendah
		2	volume sampah yang tidak diimbangi kinerja pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir mengakibatkan pencemaran aliran sungai
		3	Adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan
		4	Belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan, lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup
		5	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di segala strata kehidupan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
		6	Lemahnya pengawasan dan pengendalian kerusakan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tinggi tingkat pelanggaran dan perusakan lingkungan
		7	Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
		8	Belum optimlanya pengelolaan sampah secara terpadu
		9	Masih tingginya tingkat pencemaran tanah, pencemaran tanah diakibatkan oleh pengelolaan sampah (padat) parsial, terutama pada wilayah-wilayah lokasi TPA
		10	Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur untuk menjaga hutan
		11	Perambahan liar untuk tujuan pembukaan lahan pertanian/perkebunan
		12	Rendahnya pengetahuan teknologi ramah lingkungan
		13	Rendahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan tambang

4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.2.1 Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Isu strategis pada tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Kutai Kartanegaraantara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), ancaman krisis ekonomi global, globalisasi ekonomi dunia, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, demokratisasi, serta Hak Asasi Manusia (HAM).

- a. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 23. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 23 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan awal tahun 2017, tidak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena "Brexit" atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, propoganda Korea Utara, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

c. Globalisasi Ekonomi Dunia

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Betapa mengglobalnya dunia saat ini khususnya mengenai pergerakan orang, barang dan jasa semakin tanpa mengenal batas wilayah, pertimbangan ekonomi adalah alasannya.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah contoh dimana Indonesia tidak bisa lagi mengelak bahwa sebagai bagian dari dunia internasional mau tidak mau harus ikut bergabung demi kelangsungan perjalanan sebuah bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) merupakan aliansi ekonomi antara negara-negara ASEAN dimana Indonesia adalah salahsatu anggotanya. Kebijakan – kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri negara – negara yang menjadi anggota aliansi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada arah kebijakan ditingkat nasional dan pada gilirannya akan beresonansi ketingkat daerah termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena ketika merumuskan isu strategis Kabupaten Selatan itulah patut memperhatikan dan memperhitungkannya sehingga masyarakat kedepannya akan siap beradaptasi.

d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Semakin Pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

f. Demokratisasi

Demokratisasi saat ini sudah menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Proses demokratisasi harus diikuti oleh regulasi dan tatanan yang dapat melindungi semua orang, karena dampak demokratisasi tidak selalu baik jika tidak dilakukan dengan

cara-cara yang demokratis. Namun demikian prosesnya harus dilakukan secara baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang justru tidak sesuai dengan makna demokratisasi itu sendiri. Penyelenggaraan pemilu yang luber di Indonesia menjadi contoh banyak negara berkembang untuk menerapkan pola dan cara-cara Indonesia menjalankan proses demokratisasi.

Indonesia sampai saat ini terhitung sebagai negara yang sukses dalam melakukan proses demokratisasi sehingga tercatat sebagai negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Pencapaian itu terjadi karena prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai di level nasional, regional maupun pada tingkat lokal melalui kebijakan otonomi daerah.

g. Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara alamiah sebenarnya setiap manusia begitu terlahir di dunia telah memiliki hak-hak dasar sebagai manusia. Delapan belas anggota PBB kemudian membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Pada tanggal 1 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris keluarlah *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 3 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Penerapan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4.2.2 Isu Atau Kebijakan Nasional

a. RPJMN 2015-2019 dan Rancangan Teknokratik RPJMN (2020-2024)

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

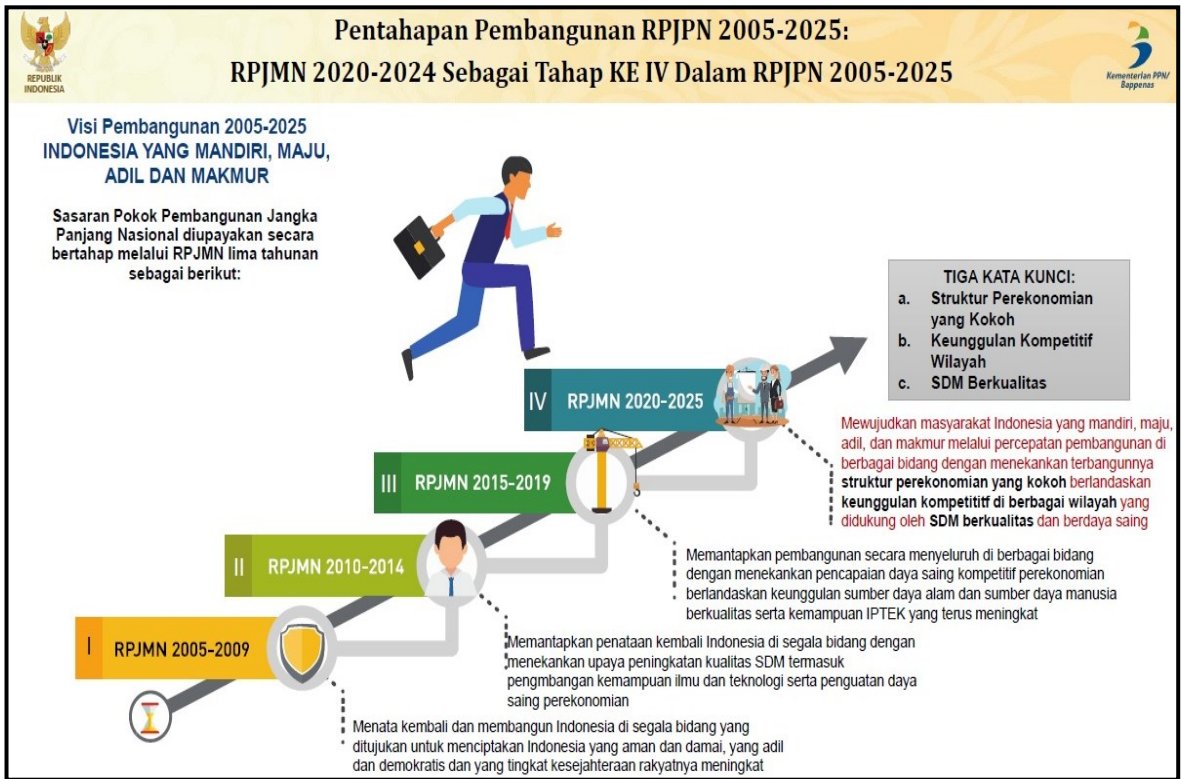
1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sumatera , Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai satu kesatuan Negara yang berkeadilan.

Pencapaian keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata.

Pada tahun 2019, dengan selesainya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode 2014-2019 maka pemerintahan akan bergulir dengan pemerintahan pada periode baru yaitu 2020-2024 sehingga pada tahun ini dimulailah merancang perencanaan pembangunan nasional (RPJMN 2020-2024). Dengan berpedoman pada RPJPN maka RPJMN 2020-2024 memasuki pada tahap ke empat dalam tahapan RPJPN yaitu memiliki fokus pembangunan pada struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah dan SDM yang berkualitas, seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini:

Gambar IV-6. Rancangan RPJMN Teknokratik 2020 - 2025



Selanjutnya berdasarkan tema/fokus pembangunan dan capaian pembangunan selama periode 2014-2019 maka perencanaan pembangunan untuk periode 2020-2024 mempunyai tema pembangunan “Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang sejahtera, Adil dan berkesinambungan. Dengan fokus pembangunan yang ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar IV-7. Tema RPJMN 2020-2024



Dengan menindaklanjuti tema tersebut kerangka pembangunan rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 fokus dan pengarusutamaan pembangunan nasional pada pembangunan manusia, pembangunan sektor ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, seperti yang tersaji pada gambar berikut.

Gambar IV-8.Kerangka Pembangunan Teknokratis RPJMN 2020-2024



b. Pemilihan Presiden Tahun 2019

Dengan adanya undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 201 menyatakan bahwa akan diadakannya pemungutan suara serentak Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diseluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan pada bulan

November 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa dimungkinkan akan terjadi gejolak politik yang cukup luar biasa dampaknya karena seluruh wilayah Indonesia mengadakan pemungutan suara serentak. Dalam paradigma pemerintahan sekarang ini tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik yang cukup panas. Pemilihan Kepala Daerah yang telah dilakukan pada tahun 2018 mampu menumbuhkan semangat demokrasi yang cukup tinggi dalam masyarakat Indonesia. Dengan tahun politik yang cukup panas ini perlu menjadi isu yang krusial yang harus dicermati oleh setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Terlebih pada tahun 2019 akan diadakan pemilihan presiden 2019 yang secara tidak langsung dimungkinkan akan terjadi pergolakan kebijakan – kebijakan pusat yang berimbas pada kebijakan dalam pemerintah daerah. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mewaspadaai dan mempertimbangkan segala aspek dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan adanya pergerakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

4.2.3 Isu Atau Kebijakan Nasional

Isu strategis daerah (Provinsi dan Kabupaten) merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain telaahan terhadap Dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025.

a. Telaahan Draft Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur (2018-2023)

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun, bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan kebijakan-kebijakan Provinsi yang selaras dan bisa di acu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat memberikan sumbangsing positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun memiliki visi pembangunan sebagai berikut:

Gambar IV-9.Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023



Untuk mencapai visi maka dilakukan upaya-upaya yang disebut misi. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur (2018-2023) adalah sebagai berikut:

- 1 Misi 1 Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur dengan penerapan pendidikan agama dan moral dalam system pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing

- 2 Misi 2 Berdaulat dalam penerapan regulasi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mendorong lahirnya industri hilir yang menghasilkan banyak manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur;
- 3 Misi 3 Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, jasa dan pariwisata dengan memberikan pendampingan teknis, pemberian modal usaha dan bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah yang mandiri dan padat karya
- 4 Misi 4 Berdaulat dalam pengelolaan dan penyelamatan lingkungan dengan penanganan banjir, kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan hidup lainnya
- 5 Misi 5 Berdaulat dalam mewujudkan Kalimantan timur swasembada pangan (Beras, daging dan ikan) dengan pengembangan komoditas unggulan agroindustri, kemaritiman dan ketercukupan sandang dan papan
- 6 Misi 6 Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan bersih dan pengelolaan keuangan yang transparan dan profesional serta penegakan hukum demi terwujudnya keadilan sosial;
- 7 Misi 7 Berdaulat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di seluruh daerah Kalimantan timur untuk menjamin inter-koneksi antar daerah kabupaten/kota se Kalimantan timur sehingga menjamin iklim investasi daerah yang lebih baik
- 8 Misi 8 Berdaulat dalam pemberdayaan perempuan dan pemuda serta peningkatan prestasi olah raga dan seni budaya Kalimantan timur hingga tingkat internasional

b. Telaahan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan memperhatikan potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama, modal dasar pembangunan pada lebih dari 20 tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan yang ingin diwujudkan, serta kemutlakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005–2025 ditetapkan sebagai berikut.

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”

Visi Kutai Kartanegara Tahun 2005–2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik di masa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi diatas dapat dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Misi**

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditempuh melalui 5(lima) misi pembangunan daerah jangka panjang, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju melalui penerapan prinsip-prinsip good governance dan re-inventing government; memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peranan masyarakat sipil; meningkatkan kualitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan pemerintah daerah; memperbaiki kualitas layanan publik; meningkatkan budaya tertib hukum; menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil dan memihak pada rakyat kecil.
2. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang mandiri melalui pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat; peningkatan ketersediaan energi untuk masyarakat dan dunia usaha; peningkatan jumlah dan kualitas moda transportasi darat, laut, dan udara; peningkatan kemandirian keuangan daerah. peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan; peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; meningkatkan kualitas lingkungan hidup; meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan lptek; pengoptimalan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati; mempersiapkan sektor-sektor berbasis sumberdaya yang dapat diperbarui (renewable resources) sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi; mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.
3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat; peningkatan pemerataan pembangunan dan pendapatan; mengurangi kemiskinan secara menyeluruh, peningkatan kinerja sektor pertanian dan perkebunan; peningkatan kinerja sektor pariwisata; peningkatan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, dan wilayah/daerah yang masih lemah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang serasi; peningkatan pembangunan daerah kecamatan dan desa; membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sampai ke perdesaan; peningkatan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat; mengembangkan jiwa kewirausahaan; peningkatan ketersediaan pasokan energi.

Dalam mewujudkan Visi dan misi Pembangunan tersebut ditempuh dengan kebijakan yang fokus pada Prioritas dan Arah Pembangunan RPJMD Ke-3 (2016 – 2020) dijabarkan sebagai berikut.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, maka RPJMD ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerah yang

berbasis kerakyatan dan lestari. Di samping itu pembangunan diarahkan pula untuk pengembangan 3 (tiga) sektor unggulan (pendidikan, pertanian dalam artian luas, dan kepariwisataan).

Sasaran pembangunan pada RPJMD ke-3 adalah: 1) Meningkatnya kinerja sektor pertanian yang ditunjukkan oleh: a) sektor pertanian sebagai leading sector pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki daya saing tinggi, b) meningkatnya produksi dan kualitas produk hasil pertanian, c) semakin beranekaragamnya produk pertanian dengan memanfaatkan bahan baku pangan lokal, d) meningkatnya daya saing produk hasil pertanian dipasar lokal, nasional, dan internasional; e) semakin berkembangnya industri berbasis pertanian; f) semakin berkembangnya komoditi pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi (high value crops); dan g) semakin meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani dan pekerja di sektor pertanian. 2) Meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang berbasis wisata alam dan budaya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan asing dan domestik, serta terpeliharanya kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. 3) Meningkatnya APS, meningkatnya kelulusan dalam UAN, dan meningkatnya masyarakat melek aksara. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Pengembangan pertanian dan perkebunan dalam artian luas, 3) Peningkatan kepariwisataan. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain: 1) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mental spiritual, 2) Melakukan revitalisasi pertanian, 3) Pengembangan potensi dan promosi wisata.

c. Isu Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah maka isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah

Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kab.Kutai Kartanegara merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

2. Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik di tata pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah perubahan *mindset* dan *cultureset* serta pengembangan budaya kerja yang berintegritas. Pemerintah yang

bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Hal ini memberikan harapan yang besar kepada masyarakat pada pemerintah, agar pemerintah dapat bekerja secara maksimal serta mampu membentuk pemerintahan yang bersih. Sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel.

3 Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Dan Kesejahteraan Masyarakat

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki *values* dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan masyarakat dapat bekerja pada sektor yang berpendapatan tinggi sehingga bisa mengangkat derajat dan martabat keluarga serta mampu meminimalisir terjadinya kemiskinan. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan *crucial problem*. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan masyarakat sehingga kesejahteraan dapat terwujud pada seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4 Peningkatan Pengelolaan PAD Dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah

Kemampuan pembiayaan pembangunan daerah merupakan salah satu faktor paling penting dalam menilai serta menyatakan kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, dan melaksanakan pembangunan daerahnya. Kemampuan pembiayaan merupakan variabel penting dalam menilai kemampuan otonomi, dimana kondisi kemampuan pembiayaan yang sangat rendah dapat menyebabkan ketergantungan antara pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini yang sedang terjadi pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri. Meskipun begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Pemberian dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan yang optimal yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun dalam realisasinya pemerintah daerah kerap lengah dalam mengelola pembiayaan daerah. Dengan hal ini pemerintah daerah dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri. Usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memerhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

5 Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan

Beberapa sektor yang berkembang dengan baik dan menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor pariwisata. Sektor-sektor ini merupakan potensi unggulan sumber daya daerah Kutai Kartanegara. Dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam, pemerintah daerah harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dari terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Hal ini merupakan peluang yang besar bagi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera meningkatkan produksi dan mengembangkan berbagai inovasi agar hasil pertanian dapat dikelola untuk meningkatkan nilai tambah produk. Dengan mempercepat pergerakan perekonomian daerah maka perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan percepatan pembangunan sektor pertanian arti luas diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi mengembangkan produk unggulan daerah. Sehingga dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil/dimanfaatkan. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampaidimasa yang akan datang.

Bab V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dalam Bab ini akan menjelaskan tentang keadaan yang ingin dicapai oleh daerah dalam periode tahun 2016-2021 sesuai dengan isu strategis yang mengemuka serta janji yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2016-2021

5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan RPJMD 2010-2015 melalui *Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja)* telah membawa Kutai Kartanegara kini lebih baik. Pencapaian selama ini tetap menjadi bagian menentukan visi dan misi 5 (lima) tahun ke depan, yakni meningkatkan hal-hal yang telah di capai dan memaksimalkan yang belum menunjukkan hasil yang baik. Secara umum hasil pencapaian selama lima tahun ini kita syukuri, dan sebagian telah melampaui apa yang di rencanakan. Berbagai bentuk prestasi dan apresiasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terus mengalir, meningkat dan semakin baik. Berbekal dari keberhasilan dan pembelajaran pada pelaksanaan pembangunan Gerbang Raja 2010 - 2015 menambah keyakinan dan tekad untuk terus melaksanakan pembangunan aktualisasi Gerbang Raja 5 (lima) tahun ke depan periode 2016-2021. Gerbang Raja merupakan inovasi pembangunan di Kutai Kartanegara akan dijadikan parameter visi dan misi pembangunan selama lima tahun ke depan (2016 - 2021). Ini berarti Kutai Kartanegara memiliki kesempatan untuk merencanakan pembangunan secara mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian aktualisasi Gerbang Raja melalui visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan akan lebih fokus, spesifik dan menjagkau seluruh komponen pembangunan.

Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

MAJU	: Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
MANDIRI	: Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi,

sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

SEJAHTERA : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah.Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN :Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

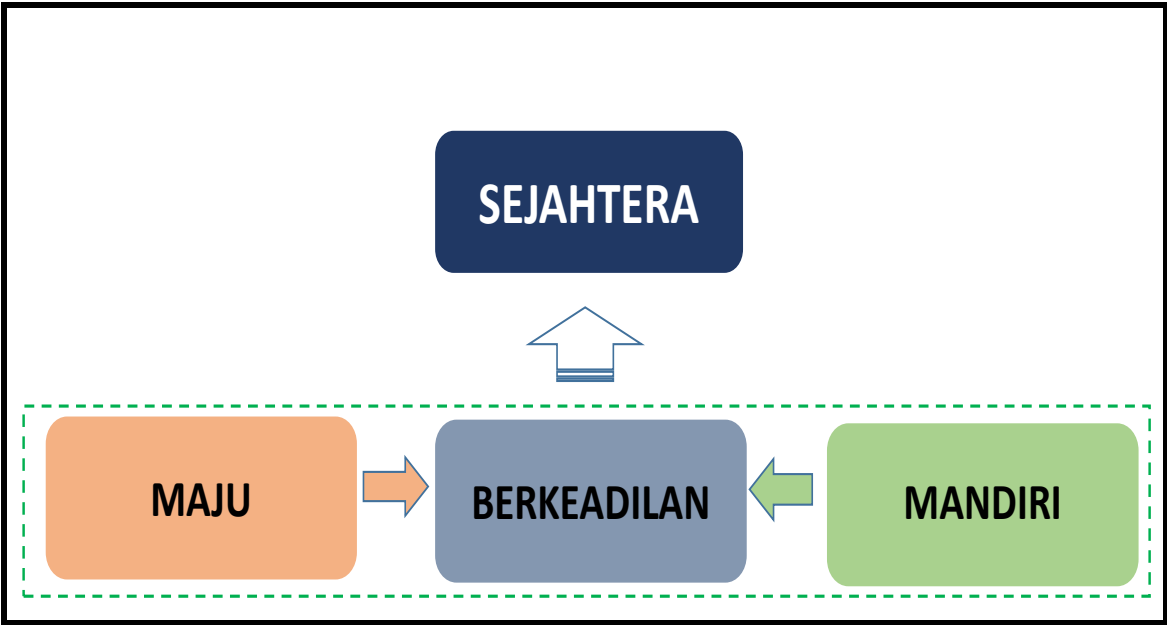
Visi Kutai Kartanegara 2016-2021 tersebut di dasari pada upaya pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berorientasi pada 3 (tiga) hal pokok yakni pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan mengoptimalkan segenap sumberdaya yang di miliki (potensi daerah) didasarkan atas prinsip keterpaduan antara pedekatan sektoral dan kewilayahan. Berikut diagram *Paradigma Gerbang Raja 2016-2021*.

Gambar V-1.Paradigma Gerbang Raja



Dalam visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara diatas mempunyai elemen visi yang memiliki keterkaitan yang tidak secara langsung menjadi harapan dari pencapaian pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu 5 tahun kedepan. Keempat elemen visi Kabupaten Kutai Kartanegara ini tidak dapat berdiri sendiri, keempat elemen ini mempunyai hubungan yang cukup erat yaitu dengan pembangunan yang maju akan tercipta kemandirian dalam segala aspek pembangunan, sehingga pembangunan akan adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dan akan terwujud masyarakat yang sejahtera. Berikut keterkaitan antar elemen visi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar V-2.Keterkaitan antar elemen Visi



5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021, Misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. *Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;*
- 2. *Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;*
- 3. *Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;*
- 4. *Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;*
- 5. *Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;*
- 6. *Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;*
- 7. *Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.*

GERBANG RAJA menjadi tekad Bersama masyarakat Kutai Kartanegara untuk maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, segenap daya upaya da potensi sumberdaya yang ada harus kita kerahkan mensukseskan program tersebut, untuk menghantarkan Rakyat Kutai Kartanegara Menuju Kejayaan Kutai Kartanegara 2016-2021.

Keterkaitan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

VISI	POKOK-POKOK VISI	MISI
Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan	Maju	Misi 1: Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
	Mandiri	Misi 3: Meningkatkan pembiayaan pembangunan

VISI	POKOK-POKOK VISI	MISI
		daerah
		Misi 4: Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
		Misi 5: Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah
		Misi 6: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
	Sejahtera	Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
	Berkeadilan	Misi 7: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak

Berikut penjabaran dan penjelasan dari tiap masing-masing misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021:

1 Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat

Birokrasi merupakan sistem yang memiliki posisi dan peran sangat strategis, terutama untuk proses pemberdayaan masyarakat yang akan mendukung segala aspek pembangunan daerah. Birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai belum bekerja dengan efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan di berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi dasar, dan lainnya. Reformasi birokrasi dapat dilihat dengan banyaknya kasus korupsi, rendahnya pelayanan masyarakat, dan rendahnya akuntabilitas kinerja organisasi. Dengan hal ini perlu adanya upaya pembenahan dan pemantapan dalam menjalankan reformasi birokrasi dengan manajemen pemerintahan yang berkualitas.

Untuk membentuk manajemen birokrasi yang berkualitas, perlu didorong oleh SDM yang berkualitas. Pemantapan reformasi birokrasi dipandang sebagai faktor pengungkit dan pendukung penting dalam pembangunan suatu daerah. Pemantapan reformasi birokrasi ini disebabkan karena tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, sejalan dengan dinamika masyarakat.Pemantapan reformasi birokrasi akan berdampak langsung kepada perbaikan kualitas kebijakan publik berdasarkan kondisi nyata di lapangan (*evidence based*), adanya transparansi untuk kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi ini tentu akan mendorong terlaksananya pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Kutai Kartanegara, Di samping itu, terlaksananya reformasi birokrasi dinilai juga akan menarik investor untuk ikut serta berinvestasi demi kemajuan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten

Sumber Daya Manusia merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah. Maju dan tidaknya suatu daerah dapat ditentukan dari kualitas SDM daerah. Dengan hal ini maka perlu adanya peningkatan kualitas SDM agar masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan SDM yang berasal dari daerah lain. Sumber Daya Manusia yang kompeten sangat diperlukan, yaitu SDM yang memiliki kompetensi tertentu yang meliputi aspek pengetahuan (*knowledge, science*), keterampilan (*skill, technology*), dan sikap perilaku (*attitude*) yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kompetensi tenaga kerja dan sertifikasi profesi merupakan solusi dalam upaya

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja merupakan variabel kunci untuk memenangkan persaingan antar individu, antar industri, antar sektor, antar daerah. Pelatihan kompetensi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bekal kompetensi bagi angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan rendah. Pelatihan ini dilakukan di lakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Dengan konsep ini, pelatihan yang diterima masyarakat memiliki kesesuaian (link and match) dengan perkembangan dunia usaha dan industri. Upaya itu dilakukan tidak lain agar SDM lokal bisa bersaing dengan tenaga kerja yang masuk kedaerah.

3 Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah

Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kinerja keuangan pemerintah. Pemerintah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini harus mendapat perhatian bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat menafaatkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan dan asset dari daerah sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat. Sehingga akan tercipta daerah yang berdikari dengan menciptakan peluang-peluang usaha dan investasi bagi masyarakat dan menarik investor untuk menanamkan modal dalam mengelola potensi unggulan daerah Kutai Kartanegara. Diharapkan pembiayaan pembangunan daerah dapat meningkat dan pendapatan serta asset daerah dapat terkelola dengan maksimal sehingga menghasilkan PAD yang cukup untuk membiayai segala kegiatan pembangunan daerah.

4 Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah

Dengan melihat struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara potensi unggulan yaitu pada sektor pertambangan yang kemudian disusul dengan sektor pertanian. Sektor pertambangan ini merupakan usaha mengeksploitasi dan memanfaatkan hasil-hasil SDA yang tidak bisa diperbaharui. Sehingga sektor ini mempunyai dampak ekonomi yang tinggi namun kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Sehingga perlu adanya transformasi struktur ekonomi daerah, agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengeksploitasi SDA saja namun juga dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu transformasi struktur ekonomi daerah ini diartikan sebagai pergeseran pembangunan, yaitu pembangunan pada sektor pertanian yang mengutamakan pembangunan berorientasi pada pembangunan hijau. Sehingga struktur ekonomi daerah tidak sektor pertambangan lagi yang menjadi produk unggulan daerah namun yang lebih pada produk unggulan dari sektor pertanian dalam arti luas.

Selanjutnya dengan melihat potensi wisata dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara mampu dapat menjadi salah satu pendongkrak dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini didukung dengan adanya obyek wisata budaya yang mempunyai ciri dan kekhasan daerah Kutai Kartanegara. Selain itu dengan potensi wisata dan budaya dapat memicu munculnya industri kecil, menengah padat karya yang dilakukan oleh masyarakat, dan merambah pada peningkatan aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat. Diharapkan dengan ini pendapatan masyarakat dapat bertambah dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin. Selain itu, sektor pariwisata mampu mengundang dan membuka lebar peluang

investasi masuk dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian sektor pertanian dan pariwisata dapat menjadi sektor unggulan dalam struktur perekonomian daerah demi mendukung percepatan transformasi perekonomian daerah.

5 Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi daerah.

Ketimpangan pembangunan berawal dari pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat pusat (nasional) dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri. Akibatnya daerah menjadi sangat tertinggal dalam pembangunan Infrastruktur. Melalui pembangunan infrastruktur maka kebutuhan dan kemudahan akses transportasi, informasi, pendistribusian orang dan barang akan terpenuhi. Sehingga pergerakan ekonomi daerah dari daerah terpencil dan pinggiran dapat dilakukan dengan mudah. Dengan hal ini diharapkan ketimpangan pembangunan semakin kecil dan pemerataan pembangunan dapat terus dilakukan sehingga meningkatkan kualitas daya saing daerah pada seluruh aspek pembangunan masyarakat.

6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada alam sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Sumber daya alam memiliki beberapa karakteristik tertentu sehingga berdasarkan pada karakter tersebut sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis sumber daya alam, berdasarkan sifat pembaharuan, dan juga berdasarkan penggunaannya. Sumber daya alam akan benar-benar berguna apabila pemanfaatannya lebih menyangkut kebutuhan manusia. Pengelolaan yang kurang menyangkut kebutuhan manusia disamping akan merusak lingkungan sekitarnya juga akan menjadi bumerang bagi manusia sendiri. Maka dari itu dalam pengelolaan sumber daya alam harus berdasarkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berwawasan lingkungan artinya mempertimbangkan kelestarian dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Berkelanjutan artinya pengolahan sumber daya alam jangan sampai terhenti perlu dilakukan secara terus-menerus. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini merupakan upaya untuk mendukung transformasi struktur perekonomian daerah. Hal ini diartikan bahwa SDA yang dieksploitasi mampu dimanfaatkan secara bijak. Misal dalam melakukan aktivitas penambangan lahan-lahan yang tergerus harus dilakukan rehabilitasi/tutupan lahan. Sehingga masyarakat diperbolehkan mengambil dan memanfaatkan SDA namun harus tetap menjaga keseimbangan alam.

7 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak

Perempuan memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun bangsa. Dari perempuanlah generasi-generasi penerus bangsa dilahirkan. Jika perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan peran perempuan dalam pembangunan dapat diakomodasi dengan baik sehingga akan terwujud pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga pada akhirnya akan tercipta generasi yang berkualitas. Dalam pemberdayaan perempuan sering kali ada stereotip dan

merendahkan harkat dan martabat perempuan. Dengan melalui pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan menjadi faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan. Perempuan juga harus diberikan kesempatan melakukan kontrol terhadap proses pembangunan. Dengan demikian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Anak-anak cikal bakal generasi manusia sebagai penerus bangsa. Dengan adanya kasus eksploitasi anak, tindakan kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak dan penguatan perlindungan anak-anak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Kutai Kartanegara dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode pelaksanaan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani
- 2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia
- 3. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi
- 4. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah
- 5. Menurunkan kesenjangan pem-bangunan antar wilayah
- 6. Meningkatkan daya saing potensi SDA yang berkelanjutan
- 7. Meningkatkan peran serta per-empuan dalam pembangunan

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di atas dan keberlanjutan kinerja pembangunan jangka panjang maka ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi Indikator makro Daerah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT			
T1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66.78)	BB (70.2)
MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BEROMPETEN			
T2: Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing	IPM	72,19	73,75

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
dan berakhlak mulia			
MISI 3 : MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
T3: Menuju kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi	Derajat Otonomi Fiskal	6.08%	11.34%
MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH			
T4: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah	LPE (Non Migas dan Batu Bara)	1,73	6,11
MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH			
T5: Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	0,33	0,26
MISI 6 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
T6: Meningkatkan daya saing potensi SDA yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.79	69.67
MISI 7 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK			
T7: Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	IPG	77.88%	80.09%

Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

1. Tujuan pertama: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani

Pencapaian tujuan pertama ini tidak lepas dari upaya Kabupaten Kartanegara memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*. Upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan reformasi birikrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan melalui beberapa upaya yaitu, program BEKIAS (*Bebaya Etam Kuatkan Kinerja Aparatur Sipil*). Perubahan *mindset* dan *culturset* aparatur dengan konsep “KERJA ADALAH IBADAH” yang diawali dengan niat, sikap dan perilaku yang baik dengan “memanusiakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja” sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan pegawai. Dengan spirit “*Kantor adalah sajadah, kerja adalah ibadah*”, Desentralisasi kecamatan dengan *memperkuat fungsi pemerintah kecamatan* melalui pengalokasian dana *per kecamatan* untuk membangun infrastruktur dan fasilitasi wilayah sesuai dengan prioritas pembangunan (seiring dengan Nawa Cita “Membangun Indonesia dari Pinggiran”); M’PeKAT Keroan Kampong, adalah gerakkan yang megembalikan semangat Musyawarah dan Gotong Royong, dalam menentukan arah pembangunan desa/kelurahan serta kecamatan dengan menekankan pada peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dengan spirit “Datanglah Kepada rakyat dan Rencanakan Bersama rakyat”; Integrasi Sistem e-Government, memperkuat akuntabilitas dan transparasi dengan meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui keterpaduan sistem pendataan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi berbasis On-Line; Reformasi Belanja Daerah, melaksanakan reformasi belanja daerah untuk *mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran* serta melakukan pengurangan *overhead cost* (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik. Tercapainya pada tujuan pertama ini tidak lepas dari pencapaian indeks reformasi birokrasi pada tahun 2021 sebesar 70.2 (BB)

Tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkuaitas dan melayani dicapai melalui Sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, dapat terwujud

- dengan predikat akuntabilitas kinerja pada tahun 2021 meningkat menjadi "A"
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dapat terwujud dengan nilai indeks persepsi korupsi pada tahun 2021 meningkat sebesar 6.90
- c. Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah, dapat terwujud dengan nilai persepsi kualitas pelayanan pada tahun 2021 meningkat menjadi 8.75

2. Tujuan kedua: Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia

Sumberdaya manusia (SDM) yang berkompeten yakni SDM yang sehat, berpendidikan, berketerampilan, berakhlak dan berperilaku mulia. Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hanya dengan Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Paralel dengan pembangunan kesehatan, secara integral pembangunan bidang kesehatan merupakan syarat utama setiap orang dalam beraktifitas. Pembangunan kesehatan tidak saja diarahkan pada perbaikan mutu kesehatan saja, tetapi juga kesehatan dalam arti luas yang meliputi kesehatan lingkungan. Keberhasilan pada tujuan ini dilihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 meningkat sebesar 73.75

Tujuan mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia diwujudkan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat, dapat terwujud dengan kenaikan angka harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 13.91 dan rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 9.41.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dapat terwujud dengan meningkatkan angka harapan hidup pada tahun 2021 sebesar 71.83.
- c. Menurunnya jumlah pengangguran dapat terwujud dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 4.96%.
- d. Menurunnya pengentasan kemiskinan, dapat terwujud dengan menurunkan persentase tingkat kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 6.63%.

3. Tujuan ketiga: Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi

Pembiayaan pembangunan daerah merupakan input dalam proses pembangunan, yang bersumber dari pemerintah dan non pemerintah. Saat ini struktur penerimaan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan, atas dasar tersebut dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, maka perlu peningkatan sumber pembiayaan dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Skema pembiayaan pembangunan yang di rancang ke depan adalah memperkuat potensi PAD dan meningkatkan peran serta dunia usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana sektor publik yang dilakukan melalui prinsip *win-win-win*, yakni menguntungkan bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dari derajat otonomi fiskal meningkat pada tahun 2021 sebesar 11.34%

Tujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya Tarik investasi diwujudkan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya saing investasi daerah, dapat terwujud dengan menekan tingkat pertumbuhan nilai investasi (PMA dan PMDN) pada tahun 2021 sebesar 1.98%.
- b. Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan, dapat terwujud dengan meningkatkan pertumbuhan PAD pada tahun 2021 sebesar 10.61%

4. Tujuan keempat: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah

Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dilakukan dengan

meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah, melalui semangat transformasi dari *unrenewable resources* menjadi *renewable resources*, Kutai Kartanegara dihadapkan pada kondisi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor ekstraktif (pertambangan dan penganggalan). Dalam konteks perwujudan pembangunan berkelanjutan potensi pertanian dan pariwisata memiliki potensi yang kuat sebagai *leading sector* perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Seiring dengan hal tersebut, pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara Bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan koperasi.

Pembangunan pertanian masih jalan di tempat, dan belum bisa meningkatkan kesejahteraan bagi palaku produksi, seperti petani, pekebun, pembudidaya ikan, peternak dan palaku terkait lainnya. Ke depan penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia dan kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah non migas dan batu bara pada tahun 2021 sebesar 6.11%.

Tujuan mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan dapat diwujudkan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas, dapat terwujud dengan kenaikan PDRB sektor pertanian (pertumbuhan sektor pertanian) pada tahun 2021 sebesar 7.16%
- b. Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah, dapat terwujud dengan kenaikan pertumbuhan PDRB sektor pariwisata pada tahun 2021 sebesar 7.97%
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat, dapat terwujud dengan menurunkan indeks gini pada tahun 2021 sebesar 0.269

5. Tujuan kelima: Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah

Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dilakukan dengan meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah. pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. Infrastruktur dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga mengatasi kesenjangan antar wilayah. Selaian itu, infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani untuk menunjang ekoomi pertanian sebagian mengalami kerusakan. Tantangan ke depan, bagaimana memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, faktanya peran pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih sangat dominan, sedangkan peran swasta masih sangat kecil sehingga perlu di tingkatkan. Keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dari meningkatnya Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas) pada tahun 2021 sebesar 0.262.

Tujuan menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat diwujudkan melalui sasaran Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah yang diwujudkan melalui peningkatan cakupan aksesibilitas antar wilayah pada tahun 2021 sebesar 77.00%

6. Tujuan keenam: Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sumberdaya lam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. telah dipahami

Bersama bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan masyarakat di masa yang akan datang. Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh.

Ke depan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mendayagunakan sumberdaya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan kesimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dari meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 sebesar 69.67%.

Tujuan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di wujudkan melalui Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat yang diwujudkan melalui penurunan status pencemaran air sungai pada tahun 2021 sebesar 56.78 ; status pencemaran udara pada tahun 2021 sebesar 95.48 ;dan tutupan lahan pada tahun 2021 sebesar 59.99.

7. Tujuan ketujuh: Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta perlindungan anak, tidak dapat dipungkiri bahwa era modern saat ini perempuan telah banyak memberikan kontribusi dan inspirasi dalam proses kemajuan peradaban dunia, hal ini tentunya menjadi bagian penting dari proses pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana keberadaan perempuan menjadi asset yang harus dilindungi, dikembangkan dan dioptimalkan sebagai bagian dari pemangku kepentingan dari proses pembangunan daerah yang lebih membumi, yang dapat dimulai dari partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan baik dibidang politik, ekonomi dan sosial.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk pembentukan karakter, menjamin dan melindungi serta pemenuhan hak-hak agar dapat hidup layak, tumbuh, berkembang, berprestasi dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dari peningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2021 sebesar 80.09

Tujuan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan diwujudkan melalui Sasaran Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dapat terwujud dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2021 sebesar 63.90

Berikut hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran beserta indikator dan targetnya dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartangera.

Tabel 5.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN										
TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR DAERAH		Realisa si	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021	
MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT										
Meningkatkan penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas dan melayani	1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A	
	2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Korupsi	5,93	6.00	6,30	6,60	6,90	

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN										
TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR DAERAH		Realisasi	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021	
	3	Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	3	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	8.17	8.19	8.24	8.50	8.75	
MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN										
Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia	4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	4	Rata-Rata Lama Sekolah	8.83	8.98	9.12	9.26	9.41	
			5	Harapan Lama Sekolah	13,56	13,60	13,70	13,81	13,91	
	5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	71,68	71,71	71,75	71,79	71,83	
	6	Menurunkan jumlah pengangguran	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.72%	5,55%	5,25%	5,08%	4.96%	
	7	Meningkatnya pengentasan kemiskinan	8	Persentase tingkat Kemiskinan	7.57%	7.65%	7.46%	6,87%	6,63%	
MISI 3 : MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi	8	Meningkatnya daya saing investasi daerah	9	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	1.50 %	1.48%	1.21%	1.40%	1.98%	
	9	Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan	10	Tingkat Pertumbuhan PAD	33.66%	7.18%	13.56 %	11.62%	10.61%	
MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH										
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah	10	Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	11	PDRB sektor pertanian (Pertumbuhan Sektor Pertanian)	5.52%	6.64%	6.92%	7.06%	7.16%	
	11	Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	12	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,33%	6,81%	6,53%	7,25%	7,97%	
	12	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	13	Indeks Gini	0.290	0.280	0.276	0.273	0.269	
MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH										
Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	13	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	14	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	75.00%	75.20 %	75.80 %	76.70 %	77.00 %	
MISI 6 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN										
Meningkatkan daya saing potensi SDA yang berkelanjutan	14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	15	Status pencemaran air sungai	56.15	56.25	56.37	56.46	56.78	
			16	Status pencemaran udara	89.83	90.96	92.10	93.26	95.48	
			17	Tutupan Lahan	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN										
TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR DAERAH		Realisa si	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021	
MISI 7 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK										
Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	1 5	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	1 8	Indek Pemberdaya an Gender (IDG)	55.07	57.95	59.93	61.92	63.90	

Bab VI

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini akan menjelaskan tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan berimplikasi pada pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati

Strategi merupakan rumusan kebijakan pembangunan sebagai langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi menjadi prioritas pembangunan daerah. Kemudian arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan menyelaraskan antara apa yang akan dicapai dengan berbagai identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dengan mengagendakan berbagai kebijakan pembangunan yang mendukung dan menciptakan perbaikan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah peningkatan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD untuk menjabarkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) berbagai kebijakan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan jangka Menengah.

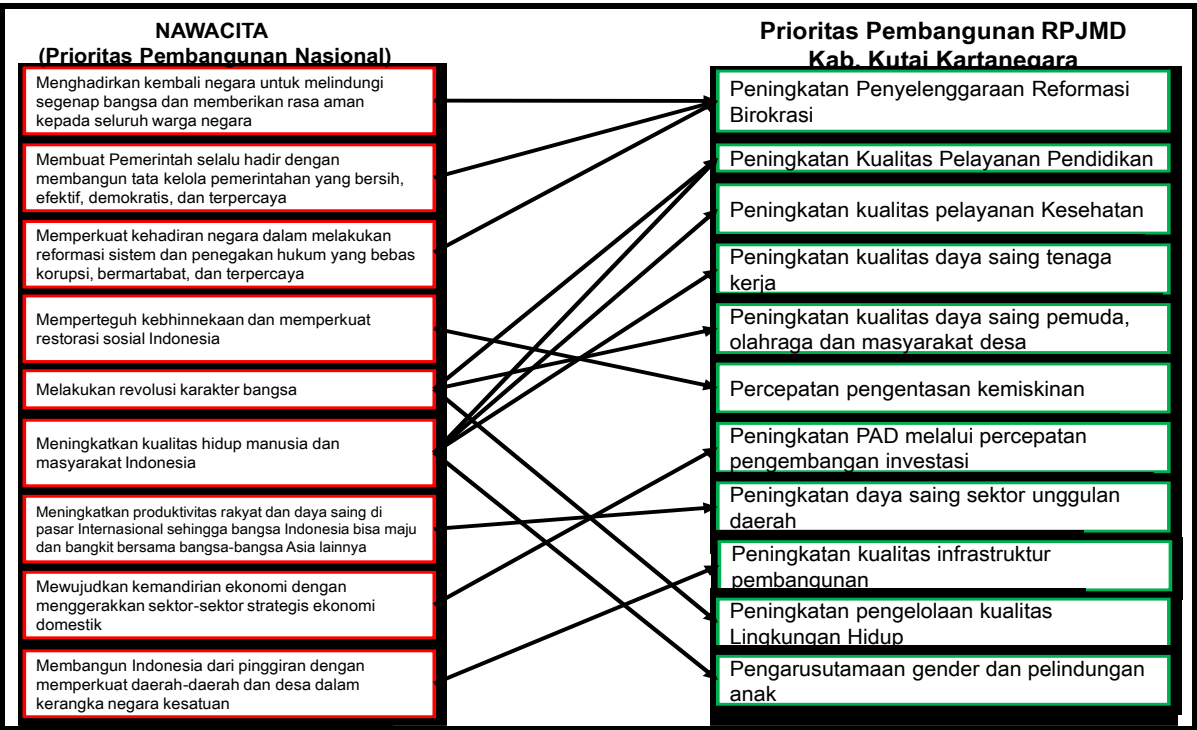
Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan

6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Guna menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 maka strategi atau prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional (Nawacita) harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan pusat dan daerah seperti yang tersaji pada Error! Reference source not found. berikut.

Gambar VI-1.Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Kutai Kartanegara



Setelah melalui pertemuan panjang yang melibatkan berbagai pihak dan hasil FGD dengan para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam kertas kerja yang telah dirumuskan pada gambar di atas, maka di sepakati *grand strategy* pembangunan untuk medujukan kesejahteraan rakyat yang lebih nyata. Konsep itu kemudian di sebut dengan Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja), dengan titik berat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kutai Kartanegara yang di refleksikan dalam kata HARUS (Hak Rakyat Untuk Sejahtera), yang kemudian di jabarkan dalam bentuk strategi-strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1.
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran		Strategi/Prioritas Pembangunan
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	S1:Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Sasaran		Strategi/Prioritas Pembangunan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	
3	Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	S2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S3: Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan
6	Menurunkan jumlah pengangguran	S4: Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja
7	Meningkatnya pengentasan kemiskinan	S5: Percepatan pengentasan kemiskinan
8	Meningkatnya daya saing investasi daerah	S6: Peningkatan PAD melalui percepatan pengembangan investasi
9	Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan	
10	Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	S7: Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah
11	Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	
12	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	
13	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	S8: Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S9: Peningkatan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup
15	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	S10: Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Berdasarkan tabel 6.1 di atas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik untuk mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Penjelasan masing-masing prioritas pembangunan sebagai berikut:

1) S1:Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Perkembangan tata pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang ini belum terlaksana dengan maksimal, dengan hal ini maka dirumuskan sasaran untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Beberapa poin penting yang perlu reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur dilakukan dalam mengelola dan mengatur pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan meningkatkan kualitas kinerja SDM aparatur, meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar, terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perkantoran. Upaya-upaya diatas jika dilakukan dengan baik dan maksimal maka pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih profesional, tertata dan terjaga dengan baik. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal dan dampaknya pelaksanaan pembangunan akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi prioritas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menuju pemerintah yang baik (*good governance*) dan aparatur yang bersih (*clean government*).

2) S2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Rendahnya mutu dan layanan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas dan akses layanan pendidikan yang belum memadai. Dengan ini perlu upaya Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses layanan pendidikan. Hal ini dilakukan agar pendidikan lebih mudah diperoleh masyarakat, sehingga pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas pendidikan daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengupayakan peningkatan kualitas mutu dan akses layanan pendidikan secara lebih mendalam dan merata, agar pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kutai Kartanegara. Sehingga melalui hal ini kualitas SDM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan martabat masyarakat.

3) S3: Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus pembangunan sektor kesehatan ialah pada peningkatan akses dan mutu layanan di bidang kesehatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting dimasa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di bidang ini secara mendasar. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan dimana disediakan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas dalam setiap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan yang komprehensif dapat dilakukan melalui upaya dari strategi ini diharapkan kualitas kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara akan menjadi lebih baik dan berkualitas pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

4) S4: Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja

Tenaga kerja Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki angka pengangguran yang relatif lebih kecil jika dibandingkan Kab/Kota sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa SDM Kutai Kartanegara tidak banyak yang menganggur, hanya saja bekerja pada lapangan pekerjaan yang berpendapatan rendah. Hal ini harus menjadi cambukan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas daya saing skill tenaga kerja. Agar tenaga kerja Kutai kartanegara tidak kalah dengan kualitas SDM yang berasal dari luar daerah maupun luar negeri. Selain itu kurangnya atau terbatasnya akses masyarakat untuk dapat merambah ke sektor lapangan kerja yang baru membuat SDM terasa kurang gesit dan lincah dibandingkan dengan SDM yang ini. Dengan lapangan kerja yang bertambah luas, maka akan memberi peluang untuk masyarakat menghasilkan pendapatan yang lebih baik maningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga dengan kebijakan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pendapatan, daya beli masyarakat dan angka pengangguran dapat menurun. Dengan adanya perluasan lapangan kerja ini, diharapkan masyarakat akan lebih produktif dan sejahtera.

5) S5: Percepatan pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dalam pembangunan di Indonesia maupun di daerah. Kemiskinan tidak berasal dari satu permasalahan saja namun bisa dua ataupun tiga. Terbatasnya akses dan pelayanan pendidikan sangat bisa menjadi pemicu utama kemiskinan, terbatasnya akses dan pelayanan kesehatan juga bisa menjadi pemicu utama kemiskinan, kurangnya kemampuan SDM dalam bersaing dengan SDM juga dapat memicu terjadinya kemiskinan. Kemiskinan merupakan bentuk langsung dari ketidakstabilan ekonomi (*unstabilished economic*). Fakta ini kemudian turut memengaruhi pola hubungan sosial masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Meningkatnya kriminalitas, dekadensi moral dan etika, ketidakpercayaan diri secara massal, serta lemahnya

produktivitas dan kreativitas masyarakat adalah buah dari kemiskinan, meski terdapat beberapa hal lain yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan. Dengan hal ini perlu upaya pemerintah untuk mengupayakan dalam mengatasi dan menanggulangi kemiskinan, salah satunya dengan adanya perluasan lapangan kerja.

6) S6: Peningkatan PAD melalui percepatan pengembangan investasi

Reformasi sektor publik disertai adanya tuntutan untuk lebih demokratis merupakan suatu fenomena global. Tuntutan ini mengharuskan setiap pemerintahan lebih transparan dan lebih memiliki akuntabilitas yang baik. Kedua aspek ini menjadi sangat penting dalam menjalankan pemerintahan terutama di bagian pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah daerah sangat bergantung pada Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum daripada mengupayakan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah yang berasal dari Selisih Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun sedangkan penerimaan yang berasal dari Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun semakin menurun. Pemerintah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

7) S7: Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah

Pengembangan potensi unggulan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menggali berbagai potensi ekonomi masyarakat dalam sektor-sektor strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, dalam menumbuhkan-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis masyarakat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian masyarakat. Upaya pengembangan daya saing sumberdaya lokal perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah. Salah satu upaya dalam menyiasati strategi ini yakni dengan mengupayakan pengembangan ekonomi lokal daerah. Dengan pengembangan ekonomi lokal daerah maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertangguh perekonomian daerah.

Seni budaya lokal daerah khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan aset pembangunan yang jika dikembangkan akan memberikan dukungan yang cukup kuat dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan pendapatan asli daerah dan investasi daerah. Dengan adanya pelestarian seni budaya lokal selain budaya asli daerah, maka khasanah budaya lokal dapat terjaga. Selain itu pelestarian seni budaya ini akan menarik wisatawan untuk datang sehingga beberapa peluang aktivitas sosial dan ekonomi akan terbuka lebar. Dengan hal ini akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kemudian dengan pengembangan seni budaya, diharapkan akan memperkaya seni dan budaya bangsa dan lebih bermakna apabila dapat diintegrasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung seni, budaya dan pariwisata memiliki daya tarik dan potensi yang sama, dengan mempunyai kekhasan dan keunikan tersendiri. Dengan pengembangan seni budaya lokal yang diintegrasikan pengembangan sektor pariwisata, akan memberikan perpaduan yang akan mampu mengundang wisatawan dan investor untuk berkunjung dan berinvestasi.

Sehingga pergerakan perekonomian masyarakat berpotensi mengembangkan sektor selain pertanian yaitu sektor perdagangan, melalui perdagangan akan terjadi aktivitas yang lebih produktif dalam masyarakat. Selain perdagangan, Kabupaten Kutai Kartanegara perlu

mengembangkan sektor jasa yang cukup memberikan kontribusi yang tinggi jika dikembangkan dengan baik. Melihat potensi yang ada pada Kabupaten Kutai Kartanegara pemerintah perlu berupaya untuk mengembangkan pusat-pusat pengelolaan hasil pertanian dan pariwisata, agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah.

8) S8: Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan

Kesenjangan ketersediaan infrastruktur akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun kehidupan yang layak. Upaya peningkatan aksesibilitas dan layanan infrastruktur dasar dan pemerintahan yang berkualitas diharapkan menjadi penunjang dan penghubung pusat-pusat ekonomi serta pendukung pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan. Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar dan penunjang menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah pinggiran. Pembangunan aksesibilitas wilayah yang berkualitas di Kutai Kartanegara dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat lebih mudah mencapai berbagai fasilitas pelayanan infrastruktur dasar seperti sekolah, fasilitas kesehatan, akses pemerintahan dan sarana dan prasarana pemerintahan dan sebagainya. Selain itu, keuntungan peningkatan aksesibilitas wilayah juga berdampak pada sektor perekonomian dimana jaringan infrastruktur yang efektif akan meningkatkan keterkaitan antar sektor dalam pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Infrastruktur merupakan fasilitas yang dibangun untuk mendukung, membantu, dan mempermudah segala bentuk aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan dari hasil uang rakyat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak disebut dengan infrastruktur publik. Beberapa contoh infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah yaitu jalan raya, dermaga, dan berbagai macam infrastruktur publik lainnya. Belum meratanya pelayanan dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kebutuhan utama pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9) S9: Peningkatan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup

Isu-isu mengenai lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat semua negara di dunia. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya penuh dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan mengedepankan kelestarian alam. Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa perlu adanya peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup agar lingkungan alam sekitar tetap terjaga.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilakukan salah satunya dengan pengelolaan sampah perkotaan, hal ini dilakukan demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Perlu disadari bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. Dengan ini pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat didukung dengan penerapan konsep strategi pembangunan ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan akan berdampak pada kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup.

10) S10: Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Dengan upaya integrasi perpektif gender dalam segala aspek pembangunan tidaklah mudah. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan pembangunan gender menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan (bidang politik, ekonomi dan sosial) yang berdampak dalam pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Tidak hanya memiliki peran domestik untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, perempuan juga sebagai penggerak roda pembangunan.

Pencapaian dalam pembangunan gender adalah dengan adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan esensi yang perlu diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dalam hal kesetaraan gender, di tengah kondisi masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan. Berbagai bentuk hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses pembangunan bagi perempuan harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif dengan meningkatkan kualitas hidup. Sehingga pembangunan gender dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah penjabaran strategi dalam mencapai sasaran RPJMD serta jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Dengan demikian, arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. Untuk itu, arah kebijakan harus dapat merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar VI-2. Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang terjadi saat ini dan hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016–2021.

Strategi pembangunan Gerbang Raja, akan dilaksanakan pendekatan baru yang merupakan terobosan, melalui konsep “Membangun Kabupaten dari Kecamatan”. Secara garis besar konsep yang akan didorong adalah memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis pemerataan kewilayahan dan juga penguatan peran masing-masing stakeholder yang ada. Adapun strategi pendekatan kewilayahan diharapkan mampu memberikan efek percepatan atau akselerasi pembangunan, sebagai pemicu dalam mempercepat pembangunan kewilayahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan hal ini pembangunan dilaksanakan dengan memprioritaskan pada wilayah/kecamatan yang paling terluar/perbatasan. Sehingga pembangunan dilaksanakan tidak hanya di “tengah-tengah Kab/Kota” namun diawali dengan pembangunan dari daerah pinggiran.

Selain pendekatan kewilayahan akan dilaksanakan Strategi pendekatan sektoral (Infrastruktur dan tata ruang, ekonomi, SDM dan kesejahteraan rakyat) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan (growth) melalui multiplier-effect yang diciptakan dari proses pembangunan sektoral di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan uraian di atas, adapun Tahapan dan Prioritas Pembangunan tiap tahun dirumuskan sebagai berikut:

1. Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016

Tahap pembangunan Tahun 2016 diarahkan untuk “Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Terpadu Antar Sektor Antar Wilayah”. Tahap ini menyiapkan landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan prioritas sebagai berikut:

1. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM aparatur, manajemen, dan budaya kerja birokrasi;
2. Penataan perangkat daerah yang berorientasi pelayanan publik;
3. Optimalisasi pelayanan publik;
4. Memperkuat peran kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kewilayahan secara terpadu lintas sektor;
6. Meningkatkan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat.

2. Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Tahap pembangunan Tahun 2017 diarahkan untuk “Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Terpadu Antar Sektor Antar Wilayah”. Tahap ini menyiapkan landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pemantapan dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM aparatur, manajemen, dan budaya kerja birokrasi;
2. Optimalisasi pelayanan publik;
3. Memperkuat peran kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
4. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kewilayahan secara terpadu lintas sektor;
5. Meningkatkan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat.

3. Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Tahap pembangunan Tahun 2018 diarahkan untuk “Pengembangan Ekonomi Produktif dan Ekonomi Kreatif dengan Daya Dukung Pemerataan Infrastruktur dan Pemanfaatan Potensi Daerah secara Terpadu”. Tahap ini memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan prioritas sebagai berikut.

1. Pengembangan potensi unggulan daerah lintas sektor dan dari hulu-hilir;
2. Penguatan peran usaha kecil dalam mendukung perekonomian daerah;
3. Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai

sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat.

4. Pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung sentra produksi, daerah potensi unggulan daerah, dan infrastruktur pendukung perekonomian daerah;
 5. Mengembangkan interkoneksi antar wilayah khususnya antar desa antar kecamatan.
4. Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

Arah kebijakan pada tahun 2019, pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2018, tahun 2019 pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara mulai fokus pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 adalah “Peningkatan perekonomian yang berdaya saing daerah menuju transformasi ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera”.

Kabupaten Kutai Kartanegara melayani ini, dilakukan pembangunan pada beberapa aspek bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan pemerintahan. Namun pada tahun 2019 ini penyelenggaraan pembangunan menitikberatkan pada pembenahan tata kelola pemerintahan. Sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan performa terbaik untuk melayani masyarakat Kutai Kartanegara.

Beberapa kebijakan tahun 2019 yang terkait dengan lingkungan akan dilakukan dengan beberapa upaya yaitu perlindungan hutan dan kawasan lindung, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan, perluasan ruang publik yang berkualitas. Kemudian pada bidang pendidikan yang dilakukan pada tahun ini adalah peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal. Selain itu pembangunan dibidang kesehatan juga terus ditingkatkan dengan beberapa upaya yaitu optimalisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan akses layanan puskesmas dan rumah sakit yang terjangkau, peningkatan kualitas dan pemerataan jumlah tenaga medis dan paramedis, dan Perluasan akses jaminan kesehatan masyarakat. Pembenahan internal pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik melalui beberapa upaya seperti Pengembangan dan penerapan SOP, serta peningkatan pelayanan publik berbasis kewilayahan, peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada publik, peningkatan kualitas manajemen, penataan kelembagaan dan pengembangan SDM aparatur, peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja serta pengelolaan aset daerah. Kemudian pada bidang ekonomi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator dan pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan pengawasan perdagangan dan iklim usaha perdagangan, peningkatan efektifitas bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, mengembangkan obyek daya tarik wisata (odtw).

Dengan fokus pada pembenahan tata kelola pemerintahan pada tahun 2019 di harapkan manajemen organisasi internal Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan lebih optimal dan profesional, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

5. Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

Arah kebijakan pada tahun 2020, pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan prima yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2020 beberapa kebijakan tersebut masih akan dilanjutkan pada tahun 2020, di samping fokus pembangunan di tahun 2020 itu sendiri. Pada tahun 2020 pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara menitikberatkan pada pembangunan untuk mengembangkan potensi-potensi Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 adalah “Transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam beberapa aspek pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara maka akan dilakukan beberapa upaya yaitu penguatan fungsi lembaga koperasi dan keuangan mikro, pengembangan produk olahan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, pengembangan potensi sektor pertanian dalam arti luas, Pemantapan pengembangan agribisnis pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan, penyediaan kebutuhan barang/komoditas dari lokal, pemberdayaan ekonomidan peningkatan keterampilan dan permodalan masyarakat, Peningkatan kapasitas

dan pengelolaankoperasi dan UMKM, Pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat, kondusif yang didukung sarana yang memadai, Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan, Peningkatan kualitas sarana prasarana dan pelayanan perhubungan, Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan, Peningkatan dan perbaikan infrastruktur air bersih bagi masyarakat, Pengembangan industri pengolahan sektor unggulan daerah, Pengembangan potensi kepariwisataan daerah, Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan daerah. Peningkatan kualitas penanganan persampahan, Peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan, Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih produktif diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

6. Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Arah kebijakan pada tahun 2020, pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Di samping fokus pembangunan di tahun 2021 itu sendiri. Pada tahun 2021 pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang lebih luas, Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 adalah “Pemantapan transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”.

Sesuai tema pembangunan tahun 2021, pembangunan Kutai Kartanegara dilakukan pada beberapa aspek kehidupan masyarakat. Dengan capaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu meningkatkan daya saing pada beberapa aspek yaitu sektor pertanian dan pariwisata serta perdagangan sebagai langkah konkrit untuk memantapkan transformasi ekonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing terutama pada bidang ekonomi, maka peningkatan kualitas dan kuantitas produk perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan upaya peningkatan daya saing dan pemasaran produk industri lokal. Peningkatan produksi pertanian pangan, Pengembangan hasil perikanan tangkap dan budidaya, Pemantapan pengembangan agribisnis

Selain itu untuk meningkatkan daya saingnya perlu dilakukan beberapa inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dengan upaya pengembangan industri kreatif pada sektor pariwisata. Untuk mendukung pergerakannya dalam rantai ekonomi (perdagangan) akan dilakukan upaya penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan industri berbasis kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa. Kemudian diperkuat dengan upaya penyediaan kebutuhan barang/komoditas dari lokal. Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan Perluasan kesempatan kerja, Implementasi kebijakan pembangunan Ketenagakerjaan, pengembangan kualitas karakter generasi muda melalui olahraga. Dalam bidang lingkungan hidup upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas penanganan persampahan, peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan, Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi daerah Kutai Kartanegara dapat lebih berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan ini pada tahun 2021 ini, diharapkan infrastruktur pembangunan dasar sudah tersedia bagi masyarakat, pembangunan yang telah dilakukan pada berbagai sektor, terutama sektor pertanian dan pariwisata diharapkan dapat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berkembang dengan pesat. Sehingga sektor pertanian dan pariwisata dapat *upgrade* sebagai pendukung utama dan berkontribusi yang besar dalam PDRB dan perekonomian daerah. Agar pemerintah semakin mantap dalam melaksanakan transformasi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Mengingat RPJMD periode 2016-2021 Kabupaten Kutai Kartanegara ini telah dilaksanakan melalui RKPD tahun 2017 dan 2018 yang selanjutnya akan dilaksanakan dalam

RKPD 2019. Berikut ini disajikan keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019-2021.

Tabel 6.2.
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

Strategi	Arah Kebijakan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
S1:Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1	Penerapan dan pemantapan reformasi birokrasi				√	√	√
	2	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur				√	√	√
	3	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah				√	√	√
	4	Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran				√	√	√
	5	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan				√	√	√
	6	Penerapan arsip secara baku di seluruh perangkat daerah secara bertahap				√	√	√
	7	Pemberdayaan pemerintah desa terkait tertib administrasi kependudukan masyarakat				√	√	
	8	Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat				√	√	
	9	Pengembangan dan pemerataan jaringan komunikasi dan informasi				√	√	√
	10	Peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam				√	√	√
S2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	11	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar				√	√	√
	12	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pendidik				√	√	√
	13	Peningkatan manajemen pengawasan dan pelayanan pendidikan				√	√	
	14	Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat				√	√	
S3: Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan	15	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan				√	√	√
	16	Pemerataan sarana dan prasarana serta ketersediaan perbekalan kesehatan				√	√	√
	17	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sehat				√	√	√
	18	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak				√	√	√
	19	Peningkatan kualitas gizi masyarakat				√	√	√
S4: Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja	20	Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial				√	√	
	21	Perluasan kesempatan kerja				√	√	√
	22	Implementasi kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan				√	√	√
	23	Pengembangan kualitas karakter generasi muda dan olah raga				√	√	
S5: Percepatan pengentasan kemiskinan	24	Pembangunan Desa Berketahanan Sosial				√	√	
	25	Peningkatan pengelolaan manajemen perekonomian pedesaan				√	√	√
	26	Pemantapan standar pelayanan kesejahteraan sosial				√		
	27	Pemantapan penanggulangan kemiskinan				√	√	√
S6: Peningkatan PAD melalui percepatan	28	Peningkatan iklim dan promosi investasiserta pembangunan				√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
pengembangan investasi		kemitraan dengan dunia usaha						
	29	Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan				√	√	√
	30	Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan asset daerah				√	√	√
S7: Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah	31	Peningkatan produksi pertanian pangan				√	√	√
	32	Pengembangan hasil perikanan tangkap dan budidaya				√	√	√
	33	Pemantapan pengembangan agribisnis				√	√	
	34	Pengembangan potensi kepariwisataan daerah				√	√	√
	35	Integrasi budaya dan pariwisata				√	√	√
	36	Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan daerah				√	√	√
	37	Peningkatan kapasitas dan pengelolaankoperasi dan UMKM				√	√	√
	38	Pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat, kondusif yang didukung sarana yang memadai				√	√	√
	39	Pengembangan industri pengolahan sektor unggulan daerah				√	√	√
S8: Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan	40	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan				√	√	√
	41	Peningkatan kualitas sarana prasarana dan pelayanan perhubungan				√	√	
	42	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan				√	√	√
	43	Peningkatan dan perbaikan infrastruktur air bersih bagi masyarakat				√	√	√
S9: Peningkatan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup	44	Peningkatan kualitas penanganan persampahan				√	√	
	45	Peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan				√	√	√
	46	Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan				√	√	√
S10: Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	47	Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				√	√	√

6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan RTRW

Dalam pengembangan kawasan-kawasannya kabupaten kawasan strategis. Berikut penjabaran pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas :

a. Kawasan Strategis Nasional;

b. Kawasan Strategis Provinsi; Dan

c. Kawasan Strategis Kabupaten.

 A. Kawasan Strategis Nasional meliputi:

a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda – Loa Janan – Sanga-Sanga – Muara Jawa – Samboja – Balikpapan (Sasamba).

b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berupa Kawasan *Heart Of Borneo*.

- B. Kawasan Strategis Provinsi Meliputi:
- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi Berupa Kawasan Tertinggal Pesisir;
 - Kawasan Strategisdari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Terdiri Dari:
 - ✓ Koridor Sungai Mahakam Hingga Ke Hulu; Dan
 - ✓ Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, Dan Bukit Bangkirai.
 - Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
 - ✓ Kawasan Delta Mahakam; Dan
 - ✓ Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran Dan Sekitarnya.
- C. Kawasan Strategis Kabupaten Berupa Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi.
- Kawasan Segitiga Kekembangan Meliputi: Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, Dan Kecamatan Tabang.
 - Kawasan Tenggarong Dan Tenggarong Seberang.

6.4 Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui arah kebijakan diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam pendukung pencaian indikator dan target sasaran yang di tetapkan. Keberhasilan capaian suatu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Melalui rumusan arah kebijakan, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya.

Setelah arah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. *Urgensi* lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Bupati terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Program pembangunan daerah merupakan program-program yang secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah, sesuai dengan strategi dan arah kebijakan. Program yang dimaksud merupakan penerjemahan program unggulan Gerbang Raja II yang merupakan janji kampanye kepala daerah.

Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait. Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan.

Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dengan berbagai faktor internal, eksternal dan dinamika politik yang sedang terjadi pelaksanaan pembangunan daerah mengalami gejolak. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi hasil capaian pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penyelarasan kebijakan dengan kondisi dan tantangan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian perlu adanya penajaman terhadap kebijakan dan program prioritas dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan Arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusun program-program pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2016-2021.

Mengingat RPJMD periode 2016-2021 Kabupaten Kutai Kartanegara ini telah dilaksanakan melalui RKPD tahun 2017 dan 2018 yang selanjutnya akan dilaksanakan dalam RKPD 2019. Dalam RPJMD perubahan ini berfokus pada perencanaan untuk tahun 2020 dan 2021 Berikut disajikan program-program sebagai perumusan penjabaran langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

PROGRAM		INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	Nilai Rata-Rata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	75	80	85	90	Sekretariat Daerah (Bagian Ortal)
		Tingkat Ketepatan Struktur dan Ukuran Organisasi	94.83	96.55	77.59	96.55	98.28	
		Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat A	9%	17%	25%	43%	52%	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis fungsional dan sertifikasi	60%	62%	65%	70%	75%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Tingkat pengembangan kompetensi ASN	0%	7%	23%	39%	54%	
3	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian antara RPJMD-RKPD	0%	0%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD	0%	0%	98%	99%	99%	
4	Program Penelitian Umum	Cakupan Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan	29%	33%	43%	71%	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Cakupan Penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	15%	23%	38%	69%	100%	
		Cakupan Penelitian dibidang Pemerintahan	7%	14%	43%	71%	100%	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	20%	0%	0%	0%	0%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Penerbitan SP2D tepat Waktu	90%	90%	90%	90%	90%	
		Penetapan APBD dan APBD Perubahan	20%	0%	0%	0%	0%	
6	Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	0%.	75%	80%	85%	90%	Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)

PROGRAM		INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB
7	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Penurunan Kasus Korupsi	66%	40%	35%	33%	25%	Inspektorat
8	Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	Persentase OPD yang menerapkan Arsip secara baku	0%	0%	0%	80%	82%	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Jumlah dokumen arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	0	0	0	10867	10866	
		Cakupan PD yang terkoneksi dengan sistem informasi kearsipan	0	0	0	2	69	
9	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan KTP Elektronik	90.00%	94.00%	96.00%	98.00%	99.00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah	73%	78%	83%	86%	88%	
		Persentase Pelayanan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	91%	95%	97%	98%	99%	
10	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penanganan konflik	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan penanganan gejolak masyarakat	0%	100%	100%	100%	100%	
11	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik	20%	40%	60%	80%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Parpol yang tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Ormas yang tertib administrasi	70%	75%	80%	90%	100%	
12	Program Pembinaan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Cakupan penegakan produk Hukum Daerah	100%	100%	40%	60%	80%	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Program pemberdayaan Masyarkat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan pemberdayaan masyarakat Di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	0%	0%	30%	60%	90%	Satuan Polisi Pamong Praja
14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Sistem Informasi yang terintegrasi	6.85%	10.96%	23.68%	36.84%	48.72%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan	72.55	72.55	74.51	90.20	100	
		Cakupan Sistem Informasi E-Government yang aktif	94.52	94.67	97.37	100.00	100.00	
		Penerapan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa	100%	56.9%	100%	100%	100%	
		Cakupan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	0%	0%	37.93%	62%	100%	
15	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	23%	30%	35%	40%	45%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	6	6	12	16	20	
		Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	2%	2%	4%	6%	8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM		INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB
17	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partispasi Kasar PAUD	77.50	77.85%	77.90%	78%	78.10%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Persetase sekolah PAUD terakreditasi	18%	20%	50%	67%	80%	
		Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0	0	2.5	3	3.2	
18	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		APK SMP/MTs	94.5	95	95.5	96.75	96.8	
		APM SD/MI	99.86	99.96	99.69	99.7	99.71	
		APM SMP/MTs	93.91	93.92	92.25	92.5	92.75	
		Indeks Mutu Pendidikan SD	4.4	4.8	5.2	5.5	5.8	
		Indeks Mutu Pendidikan SMP	4.3	4.6	5	5.4	5.6	
19	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	99.93	99.94	99.47	99.61	99.75	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Cakupan Penanganan Putus Sekolah	0%	0%	0%	50%	60%	
		Cakupan penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup yang aktif	30.3%	30.3%	30.3%	60.61%	84.85%	
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.97	4.11	4.56	5.1	5.8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
21	Program Manajemen Layanan Pendidikan	Sekolah Terakreditasi	94	95	96	0	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Sistem informasi manajemen pendidikan terpadu (SIMPEDU)	11	13	15	0	0	
22	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun	0.57	0.57	0.58	0.59	0.60	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Persentase perpustakaan desa / taman baca yang aktif	13.70	15.00	25.00	35.00	50.00	
23	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang melaksanakan pelayanan yang terakreditasi	19%	24%	32%	32%	32%	Dinas Kesehatan
		Cakupan puskesmas terakreditasi Utama	0%	0%	4%	11%	18	
		Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
24	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya	0%	0%	0%	0%	0%	
25	Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis	Cakupan Ketersediaan Peralatan Medis Sesuai Standard (RSUD Parikesit)	-	-	-	89	90	RSUD A.M. Parikesit
		Dokumen Perencanaan Operasional Pengembangan Layanan	0	1	0	0	0	
		Dokumen Review Perencanaan Operasional Pengembangan Layanan	0	0	1	1	1	
26	Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis	Cakupan Ketersediaan Peralatan Medis Sesuai Standard (RSUD ABADI)	70	72	75	78	80	RSUD Abadi

PROGRAM		INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Penurunan Komplain	-3	-3	-3	-3	-3	
		Cakupan Sarana Prasarana dan Alat Medis dan Penunjang Medis Dalam Kondisi Baik	70	80	85	95	100	
27	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	75	0	100	100	100	RSUD Dayaku Raja
28	Program obat dan perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat generik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	95.06	96.66	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0	0	75	80	85	
29	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah	100	100	100	0	0	Dinas Kesehatan
30	Program Pengawasan Obat dan makanan	Persentase IPRT yang memenuhi standar	0	0	50	60	70	Dinas Kesehatan
		Persentase Apotek/Toko Obat yang memiliki izin	0	0	50	60	70	
31	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kualitas sanitasi dasar	45	58	75	100	100	Dinas Kesehatan
		Jmlh desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	24%	26%	28%	79%	79%	
32	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB	84.4	93.3	95	96	97	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita HIV-AIDS	46.2	67.5	70	80	85	
33	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa siaga aktif	65	67	77	80	80	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan balita ke posyandu (D/S)	44	45	69	75	80	
34	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	89	91	93	95	97	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	93	93.8	94.4	95	95.6	
35	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	84.5	82.5	95	95	97	
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita	46.9	49.6	88.6	90	91.4	
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	95.94	98.7	99	99.5	100	
36	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Kurus	9	0	10	9	9	
		Prevalensi Balita Stunting	30	0	28	28	27	
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	23	16	17.44	17	16.56	
		Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	
		Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT	48	97	92	95	97	
37	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan	0	3	3	3	3	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga

PROGRAM		INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB
		pelatihan						Kerja
		Persentase pemanfaatan sistem informasi pasar kerja	0	0	1	1	1	
38	Program pembinaan pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0	0	9,526	9,891	57.411	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya rasio kesempatan kerja	0	0	91.2	91.57	91.85	
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka TPT	0	0	8.4	8.43	8.15	
39	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100	100	100	100	100	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek	100	100	100	100	100	
40	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda Yang Menjadi Wirausaha	3%	3%	4%	2%	2%	Dinas Pemuda dan Olahraga
41	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase PKK Aktif	0	0	60	75	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Posyandu aktif	0	0	100	100	100	
		Prosentase LPM Berprestasi	0	0	40	50	60	
		Prosentase KPM Aktif	30	40	50	70	80	
		Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	0	0	0	75	85	
42	Program Pengembagan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase Perkembangan BUMDes aktif	34	36	52	75	85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	45	57	120	160	200	
		Jumlah Pengurus pengelola pasar desa yang aktif	20	40	60	65	155	
43	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Dinas Sosial
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0	0	0	3	3	
44	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Dinas Sosial
		Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
45	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktiv dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	0	0	20	20	20	Dinas Sosial

PROGRAM		INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	12	10	10	10	10	
		Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan	100	100	100	100	100	
		Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial.	0	0	0	26	26	
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	0	0	20	20	20	
46	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	0	0	5	5	6	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
47	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian	Cakupan petani miskin yang mendapat bantuan modal usaha	11.0	17.0	23.0	26.0	30.0	Dinas Pertanian & Peternakan
48	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan	0	0	72	72	72	Dinas Perkebunan
49	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB Mandiri	40.1	40.3	40.5	40.6	40.7	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Cakupan Keluarga Anggota BKB yang ber-KB	84.46	85.18	86.18	87.15	90.18	
		Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB	89.19	90.59	92.09	93.59	95.05	
		Cakupan Keluarga Anggota BKL yang ber-KB	84.46	85.18	86.18	87.15	90.18	
50	Program Bedah Rumah	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang di Renovasi	54.85	64.45	65.34	66.94	68.54	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
51	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani	80	85	90	90	90	Dinas Sosial
52	Program Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang patuh melaporkan realisasi investasi secara periodik (LKPM)	0	0	35	50	50	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
53	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMDN/PMA	38	40	42	44	48	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
54	Program Peningkatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan	1.12	1.08	1.04	1	0.97	
55	Program Pengembangan sistem Evaluasi dan Advokasi Layanan	Penilaian Kepuasan masyarakat dan pelaku dunia usaha terhadap pelayanan	86.55	86.61	83	85	87	
56	Program Peningkatan PAD	Pertumbuhan Pajak Daerah	79%	-40%	0%	12%	13%	Badan Pendapatan Daerah
		Pertumbuhan Retribusi Daerah	-42%	70%	1%	65%	23%	

PROGRAM		INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB
57	Program Peningkatan Kelayakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor	Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
58	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Pangan	Prosentase Ketersediaan pangan (Beras) %	0%	0%	0%	133,29%	135,04%	Dinas Ketahanan Pangan
		Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV) <10%	0	0	0	10	10	
		Penguatan Cadangan Pangan (beras)	0	0	0	25	50	
		Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	0	0	0	3	6	
59	Program Revolusi Jagung	Pertumbuhan Produksi tanaman jagung	70% (3.349 Ton)	70% (5.688 Ton)	75% (9.555 Ton)	75% (17.421 Ton)	75% (30.486 Ton)	Dinas Pertanian & Peternakan
		Produktivitas Jagung (kw/ha)	39,40 Kw./Ha. (3 %)	40,99 Kw./Ha. (3 %)	42,22 Kw./Ha. (3 %)	43,49 Kw./Ha. (3 %)	44,79 Kw./Ha. (3 %)	
60	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:						Dinas Pertanian & Peternakan
		<i>Padi Sawah (Kwt/Ha)</i>	0	0	0	57.13	58.63	
		<i>Padi Ladang (Kwt/Ha)</i>	0	0	0	37.13	38.87	
		<i>Kedelai (Kwt/Ha)</i>	0	0	0	14.85	14.99	
		<i>Kacang Tanah (Kwt/Ha)</i>	0	0	0	13.01	13.03	
		<i>Ubi Kayu (Kwt/Ha)</i>	0	0	0	309	349.49	
		<i>Ubi Jalar (Kwt/Ha)</i>	0	0	0	118.51	118.53	
		<i>Tanaman Buah (Ton)</i>	0	0	0	62.16	0	
		<i>Tanaman Sayuran Dataran Rendah(Ton)</i>	0	0	0	30.03	0	
		Luas Panen padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
		<i>Padi Sawah (Ha)</i>	0	0	0	4.34	4.42	
		<i>Padi Ladang(Ha)</i>	0	0	0	500	519.99	
		<i>Kedelai (Ha)</i>	0	0	0	36.57	38.69	
		<i>Kacang tanah (Ha)</i>	0	0	0	463	0	
		<i>Ubi Kayu (Ha)</i>	0	0	0	21.7	0	
		<i>Ubi Jalar (Ha)</i>	0	0	0	5.21	0	
		Rasio Ketersediaan Alsintan (%)	0	0	0	70% (Jumlah 3.539 Buah)	72,38% (Jumlah 3.619 Buah)	
61	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara	10	15	20	25	30	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi	68.98	70.75	74.25	78.25	82.5	
62	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat KP	Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan	18 Kelompok	1 Kelompok	20 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
63	Program Peningkatan Produksi & Produktifitas Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	72,533	73,000	76,540	80,213	84,070	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	92,000	104,000	107,120	112,630	118,415	
64	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Peternakan	Pertumbuhan Nilai pemasaran komoditi pertanian (%)	-	-	-	12.45	12.51	Dinas Pertanian & Peternakan
		Cakupan Usaha Pengolahan Hasil Produk Peternakan 15%/tahun (klp)	32.00	37.00	43.00	49.00	57.00	
65	Program peningkatan produksi perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	2,002,838	2,054,870	2,147,863	2,270,682	2,576,843	Dinas Perkebunan

PROGRAM		INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB
		PAD Kebun Dinas Perkebunan	0	0	0	415,000,000	460,000,000	
66	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Harga Pasar Komoditi Perkebunan	1246	954	1000	1050	1150	Dinas Perkebunan
67	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase derajat Kesehatan Ternak Sapi potong pada Masyarakat 35%/tahun	35.00	35.00	35.00	-	-	Dinas Pertanian & Peternakan
68	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	pertumbuhan populasi ternak sapi Potong (ekor)	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	Dinas Pertanian & Peternakan
		Pertumbuhan Produksi daging ternak	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
		Pertumbuhan Produksi telur	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
69	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata	9	9	10	11	12	Dinas Pariwisata
		Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	20	13	15	17	19	
70	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	1.9	1.96	2.02	2.2	2.51	Dinas Pariwisata
		Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata	10	11	12	12	13	
		Jumlah analisis pasar pariwisata	2	1	1	1	1	
71	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	90.00	99.00	105.00	110.00	110.00	Dinas Pariwisata
		Jumlah Aktifitas Ekoonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek	8.00	6.00	8.00	10.00	10.00	
		Jumlah Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	
72	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Mitra Kelompok	12	20	36	41	45	Dinas Pariwisata
73	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisataaan	Jumlah sarana prasarana kepariwisataaan	0	1	1	1	1	Dinas Pariwisata
74	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Perlindungan Karya Seni	0	0	10	12	12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Misi Kesenian Daerah yang di adakan	0	0	1	1	1	
		Cakupan fasilitasi seni budaya	-	-	78.00	80.00	80.00	
		Cakupan Gelar Seni	-	-	81.00	82.00	82.00	
		Jumlah grup kesenian	0	0	95	97	97	
		Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	76	78	80	82	84	
		Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya	18	20	22	24	26	
75	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Museum yang dikelola	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Jumlah Benda, Situs, Cagar Budaya yang dikelola	94.11	95.00	95.10	96.00	98.00	
76	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan Koperasi Melakukan RAT	28.46	29.16	30.05	31	31.5	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
		Cakupan Koperasi Berprestasi	23	28	38	43	48	
		Cakupan Bina Koperasi	0	2.89	3.13	3.64	5.26	
77	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan Bina UMKM	11%	15%	20%	25%	30%	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi	25	28	31	33	35	
78	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro (%)	2,89	2,84	3,06	3,28	3,60	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
		Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%)	2	2	3	3.2	3.6	

PROGRAM		INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB
79	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekspor	2	3	2	2	2	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Produktifitas sektor perdagangan Besar dan Eceran	2%	2%	2%	3%	3%	
		Persentase Realisasi kerjasama	-	-	30%	40%	30%	
80	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar	Indeks Kualitas Pasar	n.a.	n.a.	n.a.	80.15	80.80	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar	n.a.	n.a.	n.a.	76.00	100.00	
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar	n.a.	n.a.	n.a.	51.75	29.85	
81	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Yang Tertib Niaga	9.7	1.51	3.23	3.13	3.03	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
82	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan IKM	2.81	1.86	8.90	4.49	0	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Jumlah Sentra IKM	-	-	-	-	1.00	
		Cakupan Sertifikasi produk IKM	-	-	13.00	27.00	40.00	
		Pertumbuhan Omzet IKM	11.11	6.25	1.18	7.21	0	
83	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola	30	33.6	35.65	38	40.6	Dinas Pekerjaan Umum
84	Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	781.78	727.08	680.9	620.9	560.9	Dinas Pekerjaan Umum
		Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun	1	2	8	9	5	
85	Program Pengendalian Banjir	Luas Wilayah Banjir Yang direduksi	0	200	200	325	250	
86	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Perencanaan umum dan terinci Tata Ruang yang disusun	0	45	90	100	100	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
		Persentase Kecamatan yang memiliki RDTR	0	45	90	100	100	
		Ada Tidaknya Dokumen RTRW	0	45	90	100	100	
87	Program peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	60	62	78	80	100	Dinas Perhubungan
88	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	Prosentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	41	48	81	90	100	
89	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	31%	41%	69%	90%	100%	
90	Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	74	74.14	83.14	97.14	100	
91	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	1.62	8.75	15.00	15.69	35.00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
92	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum	80.04	84.88	87.38	89.88	92.38	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		Rumah Tangga Bersanitasi	81.98	86.49	87.51	89.2	91.35	
93	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	57.43	59.16	61.4	61.4	65.2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
94	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	0	73	80	75	74	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	0	18	20	22	24	
95	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan-	0	96	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

PROGRAM		INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	PENANGGUNG JAWAB
		undangan lingkungan hidup						
		Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	100	100	100	100	100	
		Indeks emisi GRK	0	2	2	2	2	
		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	100	100	100	100	100	
		Jumlah rekomendasi izin	40	60	75	85	95	
		Persentase kualitas air dan udara sesuai baku mutu	0	50	51	52	53	
		Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa	0	0	750	1500	2250	
		Peningkatan kader/keompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup	107	110	120	125	130	
96	Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya dan Pelestarian Lingkungan	Jumlah kampung iklim Kutai Kartanegara	0	1	1	20	20	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
97	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan EBT	2.78	3.33	6.00	7.00	8.00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
98	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	24.79	25.25	25.55	26.24	29.99	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
99	Program Pemenuhan hak - hak anak	Kecamatan Layak Anak	-	16.7	38.9	55.6	72.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
100	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan	3.7	5.08	6.96	8.84	10.72	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Bab VIII

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan

Dalam perspektif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, kerangka pendanaan menjadi bagian penting dalam mengukur kekuatan daerah dalam pencapaian visi, misi dan target pembangunan daerah, oleh karenanya diperlukan kebijakan perencanaan dalam bentuk program perangkat daerah sebagai wujud komitmen dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang lebih fokus dan terukur.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Kerangka Pendanaan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2017-2021, dirumuskan berdasarkan atas data-data realisasi dan asumsi APBD periode 2017-2019 dan proyeksi kapasitas keuangan 2020-2021 berdasarkan trend pendapatan daerah. Berdasarkan atas analisis kapasitas riil berdasarkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 sampai dengan 2021, selanjutnya dialokasikan pada belanja langsung program disetiap perangkat daerah. Berikut Kerangka Pendanaan Pembangunan Kutai Kartanegara tahun 2017-2021.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara (dalam juta)

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Realisasi	Proyeksi			
		2017*	2018**	2019***	2020	2021
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	1,780,737.44	2,127,072.52	1,423,219.34	1,815,370.46	1,895,029.70
2.	BELANJA	3,559,088.80	4,399,322.94	3,331,080.04	3,737,794.75	3,817,653.98
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,016,701.03	2,272,250.42	1,907,860.69	1,922,424.28	1,922,624.28
2.1.1	Belanja Pegawai	1,617,467.51	1,804,399.29	1,596,031.20	1,596,031.20	1,596,031.20
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	24,128.10	31,210.55	34,045.55	34,045.55	34,045.55
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,974.85	3,138.00	3,138.00	3,138.00	3,138.00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	369,356.69	428,502.58	269,645.95	284,209.53	284,409.53
2.1.7	Belanja Tak Terduga	2,773.88	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1,542,387.77	2,127,072.52	1,423,219.34	1,815,370.46	1,895,029.70
2.2.1	Belanja Pegawai	71,158.16	110,697.55	69,717.01	88,926.70	92,828.84
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	923,205.40	1,282,008.81	547,160.71	697,924.32	728,549.54
2.2.3	Belanja Modal	548,024.21	734,366.17	806,341.62	1,028,519.44	1,073,651.31

*) Realisasi APBD 2017 **) Perubahan APBD 2018 ***) Asumsi RKPD 2019

7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi rencana program prioritas, merupakan wujud dari komitmen pemerintahan daerah dalam menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan pelaksanaan visi dan misi daerah, yang disusun berdasarkan atas tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disertai dengan indikator keberhasilan.

Program yang disajikan adalah program yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, dianggarkan pada tahun 2018, direncanakan dalam dokumen RKPD pada tahun 2019, dan

dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tugas dan fungsi pada tahun 2020 dan 2021. Berikut tabel indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021.

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	Rp	7	8	Rp	9	10	Rp	11	12	Target	Rp	13	14	Target	Rp	15	16	Target	Rp	17	18
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					1.730.983.161.659,45 1.130.275.810.106,45			1.785.176.648.878,46 1.135.876.537.753,96			2.811.828.322.087,33 1.886.869.022.610,25				2.203.238.893.667,00 1.465.173.079.037,00			2.523.107.494.838,99 1.760.551.844.230,99			11.117.385.916.971,20 7.377.996.293.738,65				
1.01	PENDIDIKAN					265.250.120.817,77			168.260.094.776,00			407.724.321.073,00				284.031.285.000,00			297.190.531.150,00			1.422.456.352.816,77			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					265.250.120.817,77			168.260.094.776,00			407.724.321.073,00				284.031.285.000,00			297.190.531.150,00			1.422.456.352.816,77			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					173.079.810.017,00			168.260.094.776,00			317.140.121.073,00				284.031.285.000,00			297.190.531.150,00			1.239.701.842.016,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	75.947.518.888,00	100		79.727.776.219,00	100		82.785.474.592,00	100			90.564.835.613,00	100		90.724.835.613,00	100		419.750.440.925,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	20	20	140.820.400,00	20		519.485.227,00	30		4.306.500.000,00	40			5.407.480.000,00	45		4.884.480.000,00	45		15.258.765.627,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0,11%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,07			0,00	0,03		0,00	0,03		0,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	82	82	81.668.000,00	84		375.694.924,00	87		700.000.000,00	89			1.420.000.000,00	93		1.420.000.000,00	93		3.997.362.924,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 100 3) 80	1) 100 2) 100 3) 80	41.819.652.008,00	1) 100 2) 100 3) 100		8.524.993.297,00	1) 100 2) 100 3) 100		800.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100			10.897.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100		8.047.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100		70.088.645.305,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1) Angka Partisipasi Kasar PAUD; 2) Persentase sekolah PAUD terakreditasi; 3) Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	1) Persen; 2) Persen; 3) skors;	1) 77,44 2) 16 3) 0	1) 77,5; 2) 20; 3) 0;	667.216.800,00	1) 77,85; 2) 20; 3) 0;		909.113.400,00	1) 77,9; 2) 50; 3) 2,5;		5.307.100.000,00	1) 78; 2) 67; 3) 3;			17.285.414.000,00	1) 78,1; 2) 80; 3) 3,2;		18.210.414.000,00	1) 78,1; 2) 80; 3) 3,2;		42.379.258.200,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1) Angka Partisipasi Kasar SD/MI; 2) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs; 3) Angka Partisipasi Murni SD/MI; 4) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs; 5) Indeks Mutu Pendidikan SD; 6) Indeks Mutu Pendidikan SMP.	1) persen; 2) persen; 3) persen; 4) persen; 5) skor; 6) skor.	1) 109,66 2) 95,34 3) 95,70 4) 76,60 5) 4,1 6) 4	1) 100; 2) 94,5; 3) 99,86; 4) 93,91; 5) 4,4; 6) 4,3.	43.380.357.386,00	1) 100; 2) 95; 3) 99,96; 4) 93,92; 5) 4,8; 6) 4,6.		74.870.427.109,00	1) 100; 2) 95,5; 3) 99,69; 4) 92,25; 5) 5,2; 6) 5.		212.152.288.481,00	1) 100; 2) 96,75; 3) 99,71; 4) 92,5; 5) 5,8; 6) 5,4.			145.397.655.387,00	1) 100; 2) 96,8; 3) 99,71; 4) 92,75; 5) 5,8; 6) 5,6.		160.844.901.537,00	1) 100; 2) 96,8; 3) 99,71; 4) 92,75; 5) 5,8; 6) 5,6.		636.645.629.900,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA	Persen	79,64	79,64	1.068.928.000,00															79,64		1.068.928.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	1) Angka Melek Huruf; 2) Cakupan Penanganan Putus Sekolah; 3) Cakupan penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup yang aktif;	1) persen; 2) persen; 3) persen;	1) 99,92; 2) 0; 3) 30,3;	1) 99,93; 2) 0; 3) 30,3;	0,00	1) 99,94; 2) 0; 3) 30,3;		1.845.223.000,00	1) 99,47; 2) 0; 3) 30,3;		6.308.758.000,00	1) 99,61; 2) 50; 3) 60,61;			6.040.000.000,00	1) 99,75; 2) 90; 3) 84,85;		6.040.000.000,00	1) 99,75; 2) 90; 3) 84,85;		20.233.981.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1) Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Skor	3,9	3,97	8.550.427.973,00	4,11		0,00	4,56		1.455.000.000,00	5,10			7.018.900.000,00	5,80		7.018.900.000,00	5,80		24.043.227.973,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1) Sekolah Terakreditasi 2) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terpadu (SIMPEDU) 3) Persentase Siswa Penerima Beasiswa KUKAR CERDAS	1)Bersen 2)Bersen 3)Bersen	1) 93 2) 10 3) 11	1)B4 2)B1 3)B2	1.423.220.562,00	1)B5 2)B3 3)B3		1.487.381.600,00	1)B6 2)B5 3)B4		3.325.000.000,00	1)B7 2)B7 3)B5			0,00	1)B8 2)B8 3)B6		0,00	1)B8 2)B8 3)B6		6.235.602.162,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 02	SEKOLAH DASAR					66.799.377.283,29		0,00	100,00	65.451.200.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	0,00		100,00	0,00		132.250.577.283,29			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23	Program Bantuan Operasional Sekolah	Persentase Sekolah yang mendapat BOS	Persen	100	100	66.799.377.283,29	100	0,00	100	65.451.200.000,00	100	0,00	100	0,00		100	0,00		100,00	0,00		100,00	132.250.577.283,29			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01 . 1.01.01 . 03	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA					25.370.933.517,48		0,00	100,00	25.133.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	0,00		100,00	0,00		50.503.933.517,48			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23	Program Bantuan Operasional Sekolah	Persentase Sekolah yang mendapat BOS	Persen	100	100	25.370.933.517,48	100	0,00	100	25.133.000.000,00	100	0,00	100	0,00		100	0,00		100,00	0,00		100,00	50.503.933.517,48			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02	KESEHATAN					450.393.686.899,68		419.906.748.486,55		580.293.414.544,67		572.184.817.221,00		561.008.696.946,00		2.583.787.364.097,90									DINAS KESEHATAN, RSUD. AM. PARIKESIT, RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI, RSUD. DAYAKU RAJA	
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN					147.484.653.010,14		164.437.832.895,00		238.104.221.884,67		201.962.980.004,00		190.462.980.005,00		942.452.667.798,81									DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 01	DINAS KESEHATAN					115.927.372.584,00		164.437.832.895,00		213.672.947.108,00		201.962.980.004,00		190.462.980.005,00		886.464.112.596,00									DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	26.365.917.950,00	100,00		27.820.792.915,00	100,00		35.528.000.000,00	100			40.327.999.999,00	100		41.421.137.600,00	100		171.463.848.464,00			DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	70,00	70,00	146.711.000,00	75,00		570.264.964,00	80,00		3.843.043.775,00	85,00			2.700.000.000,00	90,00		8.150.000.000,00	90,00		15.410.019.739,00			DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	100	10	0,00	9		0,00	8		479.000.000,00	8			529.000.000,00	7		529.000.000,00	7		1.537.000.000,00			DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	82	84	58.074.400,00	82		102.340.000,00	83		2.108.650.000,00	84			2.608.650.000,00	85		2.608.650.000,00	85		7.486.364.400,00			DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 100 3) 80	1) 100 2) 100 3) 80	8.666.624.634,00	1) 100 2) 100 3) 80		46.477.662.624,00	1) 100 2) 100 3) 80		3.254.200.000,00	1) 100 2) 100 3) 90			3.650.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 90		2.950.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 90		64.998.487.258,00			DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1) Persentase penggunaan obat generik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); 2) Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);	1) persen; 2) persen;	1)38,54 2)0	1)B5.06 2)B	1.297.149.975,00	1)B6.66 2)B		1.412.044.630,00	1)B00 2)B5		7.383.205.000,00	1)B00 2)B0			6.800.000.000,00	1)B00 2)B5		10.753.500.001,00	1)B00 2)B5		27.645.899.606,00			DINAS KESEHATAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1) Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang melaksanakan pelayanan yang terakreditasi ; 2) Cakupan puskesmas terakreditasi Utama; 3) Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah;	1) persen; 2) persen; 3) persen;	1) 5; 2) 2; 3) 100;	1) 19; 2) 0; 3) 100;	16.369.383.926,00	1) 24; 2) 0; 3) 100;	28.014.002.815,00	1) 32; 2) 4; 3) 100;	42.864.937.059,00	1) 32; 2) 11; 3) 100;	17.527.658.000,00	1) 32; 2) 18; 3) 100;	21.927.658.000,00	1) 32; 2) 18; 3) 100;	126.703.639.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1) Persentase IPRT yang memenuhi standar; 2) Persentase Apotek/Toko Obat yang memiliki izin;	1) persen; 2) persen;	1) 0; 2) 0;	1) 0; 2) 0;	10.605.000,00	1) 0; 2) 0;	70.742.000,00	1) 80 2) 80	550.000.000,00	1) 80 2) 80	650.000.000,00	1) 80 2) 80	650.000.000,00	1) 80 2) 80	1.931.347.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1) Desa siaga aktif; 2) Cakupan kunjungan balita ke posyandu (D/S);	1) persen; 2) persen;	1) 65; 2) 44;	1) 65; 2) 44;	132.225.000,00	1) 67; 2) 45;	264.797.500,00	1) 77; 2) 69;	1.524.190.000,00	1) 80; 2) 75;	1.676.250.000,00	1) 80; 2) 80;	1.676.250.000,00	1) 80; 2) 80;	5.273.712.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1) Prevalensi Balita Gizi Kurang; 2) Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 3) Prevalensi Balita Stunting; 4) Prevalensi Balita Kurus; 5) Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT ;	1) persen; 2) persen; 3) persen; 4) persen; 5) persen;	1) 16,09 2) 24 3) 0; 4) 0; 5) 15,01;	1) 23; 2) 100; 3) 30; 4) 9; 5) 48;	315.946.767,00	1) 16; 2) 100; 3) 0; 4) 0; 5) 97;	259.326.759,00	1) 17,44; 2) 100; 3) 28; 4) 10; 5) 92;	2.809.856.225,00	1) 17; 2) 100; 3) 28; 4) 9; 5) 95;	3.659.856.000,00	1) 16,56; 2) 100; 3) 27; 4) 9; 5) 97;	3.659.856.000,00	1) 16,56; 2) 100; 3) 27; 4) 9; 5) 97;	10.704.841.751,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1) Kualitas sanitasi dasar; 2) Jlh desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);	1) persen; 2) persen;	1) 0 2) 55;	1) 45; 2) 24;	826.536.940,00	1) 58; 2) 26;	184.164.831,00	1) 75; 2) 28;	757.100.000,00	1) 100; 2) 79;	4.179.200.000,00	1) 100; 2) 79;	4.119.200.000,00	1) 100; 2) 79;	10.066.201.771,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB; 2) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita HIV-AIDS;	1) persen; 2) persen;	1) 100; 2) 0;	1) 84,4; 2) 46,2;	198.026.365,00	1) 93,3; 2) 67,5;	176.199.540,00	1) 95; 2) 70;	1.211.085.000,00	1) 96; 2) 80;	1.750.000.000,00	1) 97; 2) 85;	1.750.000.000,00	1) 97; 2) 85;	5.085.310.905,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1) Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang melaksanakan pelayanan yang terakreditasi; 2) Cakupan puskesmas terakreditasi Utama; 3) Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah;	1) persen; 2) persen; 3) persen;	15,63	1) 19; 2) 0; 3) 100;	2.754.058.683,00	1) 24; 2) 0; 3) 100;	1.607.895.719,00	1) 32; 2) 4; 3) 100;	5.548.650.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 100;	1.714.310.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 100;	1.614.310.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 100;	13.239.224.402,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya	persen	40	40	5.068.247.688,00	80	48.219.757.590,00	85	58.478.943.183,00	85	49.873.614.000,00	90	24.401.736.400,00	90	186.042.298.861,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah	Persen	67	100	51.960.326.976,00	100	4.771.414.168,00	100	29.684.628.000,00	100	29.684.628.000,00	100	29.684.628.000,00	100	145.785.625.144,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	persen	64,90	64,90	0,00	43,68	58.964.300,00	45	150.000.000,00	48	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	508.964.300,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33	Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	1) Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi > 80%; 2) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%;	1) persen; 2) persen;	1) 81,4; 2) 71,3;	1) 83,3; 2) 77,6;	48.118.100,00	1) 77,5; 2) 100;	109.103.621,00	1) 90; 2) 100;	2.474.688.000,00	1) 91; 2) 100;	2.129.780.000,00	1) 92; 2) 100;	1.929.780.000,00	1) 92; 2) 100;	6.691.469.721,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi; 2) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus; 3) Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif; 4) Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	1) persen; 2) persen; 3) persen; 4) persen;	1) 0; 2) 0; 3) 0; 4) 0;	1) 20,6; 2) 25,2; 3) 15,5; 4) 100;	69.272.800,00	1) 27,8; 2) 39,4; 3) 19,6; 4) 100;	123.050.699,00	1) 40; 2) 50; 3) 45; 4) 100;	4.918.380.000,00	1) 55; 2) 65; 3) 55; 4) 100;	3.200.000.000,00	1) 65; 2) 70; 3) 65; 4) 100;	3.200.000.000,00	1) 65; 2) 70; 3) 65; 4) 100;	11.510.703.499,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 35	Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah	Persentase desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan < 24 jam	persen	100	100	46.354.000,00	100	75.367.800,00	100	1.092.630.866,00	100	900.000.000,00	100	700.000.000,00	100	2.814.352.666,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	1) Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil; 2) Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin;	1) persen; 2) persen;	1) 87; 2) 83;	1) 89; 2) 93;	1.450.696.100,00	1) 91; 2) 93,8;	3.714.904.520,00	1) 93; 2) 94,4;	7.997.000.000,00	1) 95; 2) 95;	2.431.000.000,00	1) 97; 2) 95,6;	2.131.000.000,00	1) 97; 2) 95,6;	17.724.600.620,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	1) Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir; 2) Cakupan pelayanan kesehatan Balita; 3) Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	1) persen; 2) persen; 3) persen;	1) 67; 2) 82; 3) 54;	1) 84,5; 2) 46,9; 3) 95,94;	0,00	1) 82,5; 2) 49,6; 3) 98,7;	173.868.000,00	1) 95; 2) 88,6; 3) 99;	150.000.000,00	1) 95; 2) 90; 3) 99,5;	275.000.000,00	1) 97; 2) 91,4; 3) 100;	275.000.000,00	1) 97; 2) 91,4; 3) 100;	873.868.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase UPTD Dinas Kesehatan yang menerapkan sistem manajemen informasi kesehatan	persen	85	100	143.096.280,00	100	231.167.900,00	100	864.760.000,00	100	1.114.760.000,00	100	1.750.000.000,00	100	4.103.784.180,00	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan BLUD	persen	75							100	24.431.274.005,00	100	24.431.274.004,00	100	48.862.548.009,00	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 02	PUSKESMAS BADAK BARU (BLUD)					870.990.120,00		0,00	95,00	443.696.767,11	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.314.686.887,11	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021						
1	2	3	4	5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	18		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	870.990.120,00	95,00	0,00	95,00	443.696.767,11	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.314.686.887,11	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 03	PUSKESMAS HANDIL BARU (BLUD)					1.006.871.601,00		0,00		595.150.662,24		0,00		0,00		1.602.022.263,24	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 03 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.006.871.601,00	95,00	0,00	95,00	595.150.662,24	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.602.022.263,24	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 04	PUSKESMAS JONGGON JAYA (BLUD)					640.078.806,00		0,00		818.085.081,60		0,00		0,00		1.458.163.887,60	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 04 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	640.078.806,00	95,00	0,00	95,00	818.085.081,60	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.458.163.887,60	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 05	PUSKESMAS KAHALA (BLUD)					648.911.006,00		0,00		494.537.099,17		0,00		0,00		1.143.448.105,17	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 05 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	648.911.006,00	95,00	0,00	95,00	494.537.099,17	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.143.448.105,17	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 06	PUSKESMAS KEMBANG JANGGUT (BLUD)					1.531.551.217,05		0,00		962.750.880,90		0,00		0,00		2.494.302.097,95	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.531.551.217,05	95,00	0,00	95,00	962.750.880,90	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	2.494.302.097,95	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 07	PUSKESMAS KOTA BANGUN (BLUD)					1.362.803.558,00		0,00		962.195.205,54		0,00		0,00		2.324.998.763,54	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.362.803.558,00	95,00	0,00	95,00	962.195.205,54	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	2.324.998.763,54	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 08	PUSKESMAS LOA DURI (BLUD)					1.051.054.373,00		0,00		1.025.354.794,05		0,00		0,00		2.076.409.167,05	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.051.054.373,00	95,00	0,00	95,00	1.025.354.794,05	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	2.076.409.167,05	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 09	PUSKESMAS LOA IPUH (BLUD)					1.488.884.061,00		0,00		1.143.794.629,73		0,00		0,00		2.632.678.690,73	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 09 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.488.884.061,00	95,00	0,00	95,00	1.143.794.629,73	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	2.632.678.690,73	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 10	PUSKESMAS LOA KULU (BLUD)					1.384.077.592,70		0,00		1.102.764.786,90		0,00		0,00		2.486.842.379,60	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 10 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.384.077.592,70	95,00	0,00	95,00	1.102.764.786,90	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	2.486.842.379,60	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 11	PUSKESMAS MANGKURAWANG (BLUD)					1.603.377.031,00		0,00		1.048.360.887,22		0,00		0,00		2.651.737.918,22	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 11 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.603.377.031,00	95,00	0,00	95,00	1.048.360.887,22	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	2.651.737.918,22	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 12	PUSKESMAS MUARA JAWA (BLUD)					1.443.276.622,39		0,00		1.351.994.941,60		0,00		0,00		2.795.271.563,99	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.443.276.622,39	95,00	0,00	95,00	1.351.994.941,60	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	2.795.271.563,99	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 13	PUSKESMAS MUARA MUNTAI (BLUD)					543.451.616,00		0,00		416.750.852,87		0,00		0,00		960.202.468,87	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 13 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	543.451.616,00	95,00	0,00	95,00	416.750.852,87	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	960.202.468,87	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 14	PUSKESMAS PRANGAT (BLUD)					453.450.475,36		0,00		444.153.600,37		0,00		0,00		897.604.075,73	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 14 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	453.450.475,36	95,00	0,00	95,00	444.153.600,37	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	897.604.075,73	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 15	PUSKESMAS RAPAK MAHANG (BLUD)					1.751.084.585,70		0,00		1.420.605.447,12		0,00		0,00		3.171.690.032,82	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.751.084.585,70	95,00	0,00	95,00	1.420.605.447,12	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	3.171.690.032,82	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 16	PUSKESMAS RIMBA AYU (BLUD)					774.242.445,00		0,00		595.003.390,82		0,00		0,00		1.369.245.835,82	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	774.242.445,00	95,00	0,00	95,00	595.003.390,82	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.369.245.835,82	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 17	PUSKESMAS SAMBOJA (BLUD)					1.277.498.076,00		0,00		1.319.092.355,44		0,00		0,00		2.596.590.431,44	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.277.498.076,00	95,00	0,00	95,00	1.319.092.355,44	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	2.596.590.431,44	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 18	PUSKESMAS SANGA-SANGA (BLUD)					976.472.095,00		0,00		767.234.799,78		0,00		0,00		1.743.706.894,78	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 18 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	976.472.095,00	95,00	0,00	95,00	767.234.799,78	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.743.706.894,78	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 19	PUSKESMAS SEBULU 2 (BLUD)					887.633.156,00		0,00		1.091.738.631,28		0,00		0,00		1.979.371.787,28	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	887.633.156,00	95,00	0,00	95,00	1.091.738.631,28	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.979.371.787,28	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 20	PUSKESMAS SUNGAI MERIAM (BLUD)					1.516.744.288,40		0,00		1.437.525.423,65		0,00		0,00		2.954.269.712,05	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 20 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.516.744.288,40	95,00	0,00	95,00	1.437.525.423,65	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	2.954.269.712,05	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 21	PUSKESMAS TELUK DALAM (BLUD)					1.122.978.143,15		0,00		769.017.149,67		0,00		0,00		1.891.995.292,82	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.122.978.143,15	95,00	0,00	95,00	769.017.149,67	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.891.995.292,82	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 22	PUSKESMAS TABANG (BLUD)					598.100.100,00		0,00		228.720.000,31		0,00		0,00		826.820.100,31	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	598.100.100,00	95,00	0,00	95,00	228.720.000,31	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	826.820.100,31	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 23	PUSKESMAS RITAN (BLUD)					99.251.884,00		0,00		112.161.665,90		0,00		0,00		211.413.549,90	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	99.251.884,00	95,00	0,00	95,00	112.161.665,90	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	211.413.549,90	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 24	PUSKESMAS LOA JANAN (BLUD)					1.004.074.120,00		0,00		974.594.864,47		0,00		0,00		1.978.668.984,47	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 24 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.004.074.120,00	95,00	0,00	95,00	974.594.864,47	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.978.668.984,47	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 25	PUSKESMAS MUARA BADAQ (BLUD)					1.587.539.847,00		0,00		911.657.395,43		0,00		0,00		2.499.197.242,43	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.587.539.847,00	95,00	0,00	95,00	911.657.395,43	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	2.499.197.242,43	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 26	PUSKESMAS MARANG KAYU (BLUD)					833.386.381,00		0,00		513.385.069,70		0,00		0,00		1.346.771.450,70	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 26 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	833.386.381,00	95,00	0,00	95,00	513.385.069,70	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.346.771.450,70	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 27	PUSKESMAS MUARA KAMAN (BLUD)					1.481.663.976,00		0,00		532.983.477,13		0,00		0,00		2.014.647.453,13	DINAS KESEHATAN		
1.02 . 1.02.01 . 27 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.481.663.976,00	95,00	0,00	95,00	532.983.477,13									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	421.102.644,00	95,00	0,00	95,00	208.714.375,03	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	629.817.019,03	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 29	PUSKESMAS BATUAH (BLUD)					382.349.197,34		0,00		437.174.111,11		0,00		0,00		819.523.308,45	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	382.349.197,34	95,00	0,00	95,00	437.174.111,11	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	819.523.308,45	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 30	PUSKESMAS SUNGAI MERDEKA (BLUD)					1.110.052.939,00		0,00		554.336.995,71		0,00		0,00		1.664.389.934,71	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	1.110.052.939,00	95,00	0,00	95,00	554.336.995,71	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.664.389.934,71	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 31	PUSKESMAS SEBULU 1 (BLUD)					837.448.080,05		0,00		850.070.058,49		0,00		0,00		1.687.518.138,54	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	837.448.080,05	95,00	0,00	95,00	850.070.058,49	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.687.518.138,54	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 32	PUSKESMAS BUNGA JADI (BLUD)					345.947.667,00		0,00		375.812.474,59		0,00		0,00		721.760.141,59	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	345.947.667,00	95,00	0,00	95,00	375.812.474,59	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	721.760.141,59	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 33	PUSKESMAS SEPARI 3 (BLUD)					520.932.722,00		0,00		521.856.901,76		0,00		0,00		1.042.789.623,76	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	n.a	95,00	520.932.722,00	95,00	0,00	95,00	521.856.901,76	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	1.042.789.623,76	DINAS KESEHATAN	
1.02 . 1.02.02	RSUD AM. PARIKESIT					167.127.893.671,54		155.155.278.784,55		212.328.343.454,00		248.305.679.497,00		248.629.559.221,00		1.031.546.754.628,09	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 01	RSUD AM. PARIKESIT					59.284.506.607,00		48.061.148.453,00	188,00	41.328.343.454,00	100,00	35.413.787.762,00	100,00	35.737.667.486,00		219.825.453.762,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	39.381.649.886,00	100	34.346.189.638,00	100	28.527.005.100,00	100	35.413.787.762,00	100	30.663.787.762,00	100	168.332.420.148,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen												0,00	0,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen												0,00	0,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	92,00	92,00	1.438.719.148,00									100	1.438.719.148,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	12.179.538.408,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1.725.327.319,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	13.904.865.727,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
	Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis (RSUD AM Parikesit)	1) Cakupan Ketersediaan Peralatan Medis Sesuai Standard; 2) Dokumen Perencanaan Operasional Pengembangan Layanan; 3) Dokumen Review Perencanaan Operasional Pengembangan Layanan;	1) Persen; 2) Dokumen; 3) Dokumen;	n.a											0	0,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD AM PARIKESIT)	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan	Indeks	0	100	119.987.200,00									100	119.987.200,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	persen	99,16	99,16	186.083.400,00									99,16	186.083.400,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSUD. AM. PARIKESIT)	Cakupan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	persen	83,33	83,33	5.673.672.062,00	75,00	11.989.631.496,00	88,00	12.801.338.354,00				5.073.879.724,00	88,00	35.538.521.636,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSUD. AM. PARIKESIT)	Cakupan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	persen	100	100	304.856.503,00									100	304.856.503,00	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 02	RSUD AM. PARIKESIT (BLUD)					107.843.387.064,54		107.094.130.331,55	85,00	171.000.000.000,00	87,00	212.891.891.735,00	89,00	212.891.891.735,00		811.721.300.866,09	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 00	Non Program					62.164.668.497,67										62.164.668.497,67	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 40	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (RSUD AM. Parikesit)	Capaian Hasil Penilaian Kinerja BLUD (RSUD AM. Parikesit)	Nilai		80,59	45.678.718.566,87	89,00	107.094.130.331,55	85,00	171.000.000.000,00	87,00	212.891.891.735,00	89,00	212.891.891.735,00	89,00	749.556.632.368,42	RSUD. AM. PARIKESIT	
1.02 . 1.02.03	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI					83.789.497.821,00		57.183.142.140,00		71.031.966.854,00		65.356.227.720,00		65.356.227.720,00		342.717.062.255,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
1.02 . 1.02.03 . 01	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI					43.595.753.479,00		36.319.919.475,00	586,00	35.837.589.619,00		30.161.850.720,00		30.161.850.720,00		176.076.964.013,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	18.492.847.754,00	100	21.365.092.116,00	100	22.024.846.020,00	100	16.379.850.720,00	100	16.379.850.720,00	100	94.642.487.330,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	65	70	124.403.908,00	75	806.411.665,00	80	874.799.300,00	90	1.062.000.000,00	100	1.062.000.000,00	100	3.929.614.873,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	10	20		10		5		5	800.000.000,00	5	800.000.000,00	5	1.600.000.000,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	78	80	1.096.379.534,00	82	1.191.248.359,00	85	1.170.000.000,00	85	300.000.000,00	85	300.000.000,00	85	4.057.627.893,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	14.204.782.200,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1.388.284.675,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	210.962.800,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	150.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	150.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	16.104.029.675,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat	Paket	n.a							1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	1.200.000.000,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (RSUD ABADI)	Cakupan Pelayanan (Penemuan dan Penanganan) HIV, AIDS, TB Paru dan Malaria	Persen	60,00	60,00	0,00	70,00	0,00	80,00	150.000.000,00					80,00	150.000.000,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02 . 1.02.03 . 01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD ABADI)	Tingkat Akreditasi RSUD	Jumlah Bintang		3	247.043.570,00	5	145.064.465,00	5	310.448.800,00	5	6.400.000.000,00	5	6.400.000.000,00	5	13.502.556.835,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1.02 . 1.02.03 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD ABADI)	Terlaksananya edukasi tentang pelayanan kesehatan yang akan diberikan	Persen	60,00	65,00	0,00	75,00	175.337.282,00	80,00	166.774.400,00					80,00	342.111.682,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSUD ABADI)	Persentase Kesesuaian Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Permenkes dan Akreditasi	Persen	55,00	60,00	8.595.147.352,00	65,00	10.046.615.508,00	70,00	9.470.738.899,00					70,00	28.112.501.759,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1.02 . 1.02.03 . 01 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSUD ABADI)	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar Akreditasi	Persen	50,00	60,00	835.149.161,00	70,00	1.201.865.405,00	80,00	1.379.019.400,00					80,00	3.416.033.966,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1.02 . 1.02.03 . 01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (RSUD ABADI)	Terlaksananya Kerjasama dokter Spesialis	Jumlah Dokter Spesialis	n.a					1	80.000.000,00					1	80.000.000,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
	Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis (RSUD ABADI)	1) Persentase Penurunan Komplain; 2) Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Medis Sesuai Standard; 3) Cakupan Sarana Prasarana dan Alat Medis dan Penunjang Medis Dalam Kondisi Baik;	1) persen; 2) persen; 3) persen;	1) -3; 2) 70; 3) 70;	1) -3; 2) 70; 3) 70;	0,00	1) -3; 2) 72; 3) 80;	0,00	1) -3; 2) 78; 3) 80;		1) -3; 2) 80; 3) 95;	4.470.000.000,00	1) -3; 2) 80; 3) 100;	4.470.000.000,00	1) -3; 2) 80; 3) 100;	8.940.000.000,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1.02 . 1.02.03 . 02	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI (BLUD)					40.193.744.342,00		20.863.222.665,00		35.194.377.235,00		35.194.377.000,00		35.194.377.000,00		166.640.098.242,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1.02 . 1.02.03 . 02 . 00	Non Program					35.965.681.036,00										35.965.681.036,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1.02 . 1.02.02 . 02 . 40	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (RSUD ABADI)	Pertumbuhan Pendapatan BLUD	Persen	5	5	4.228.063.306,00	5	20.863.222.665,00	5	35.194.377.235,00	5	35.194.377.000,00	5	35.194.377.000,00	5	130.674.417.206,00	RSUD. AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1.02 . 1.02.04	RSUD DAYAKU RAJA					51.991.642.397,00		43.130.494.667,00		58.828.882.352,00		56.559.930.000,00		56.559.930.000,00		267.070.879.416,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01	RSUD DAYAKU RAJA					51.991.642.397,00		43.130.494.667,00		53.828.882.352,00		51.559.930.000,00		51.559.930.000,00		252.070.879.416,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	21.584.150.173,00	100	21.468.810.328,00	100	24.659.930.463,00	100	24.029.930.000,00	100	24.029.930.000,00	100	115.772.750.964,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	3.191.710.605,00	75	901.541.000,00	70	500.000.000,00	70	1.000.000.000,00	70	1.000.000.000,00	70	6.593.251.605,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur ASN	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	75	75	624.324.388,00	75	3.010.864.091,00	78	600.000.000,00	80	1.000.000.000,00	85	1.000.000.000,00	85	6.235.188.479,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 100 3) 80	1) 100 2) 100 3) 80	12.041.222.393,00	1) 100 2) 100 3) 80	739.036.939,00	1) 100 2) 100 3) 80	300.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 90	200.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 90	200.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 90	13.480.259.332,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	Tersedianya logistik RS tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	Persen	40	40	6.014.572.570,00	100	4.850.808.550,00	100	7.000.000.000,00	100	7.500.000.000,00	100	7.500.000.000,00	100	32.865.381.120,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD DAYAKU RAJA)	Tingkat kepuasan Pasien	Persen	75	75	178.500.000,00	75	279.250.000,00	100	400.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	1.457.750.000,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Persen	75	75	395.064.380,00	60	748.823.475,00	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	4.443.887.855,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSUD DAYAKU RAJA)	Persentase peralatan sesuai standar rumah sakit kelas C	Persen	40	40	4.423.166.716,00	60	9.707.341.069,00	75	12.168.951.889,00	70	8.950.000.000,00	70	8.950.000.000,00	70	44.199.459.674,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSUD DAYAKU RAJA)	Cakupan Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang dipelihara	Persen	75	75	1.351.591.800,00	75	1.424.019.215,00	80	4.700.000.000,00	80	4.980.000.000,00	80	4.980.000.000,00	80	17.435.611.015,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	Cakupan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Persen	75	75	2.187.339.372,00	75	0,00	100	2.400.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	9.587.339.372,00	RSUD. DAYAKU RAJA
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (RSUD DAYAKU RAJA)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Persen	n.a					70		80	0,00	90	0,00	90	0,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 02	RSUD DAYAKU RAJA (BLUD)					0,00		0,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		15.000.000.000,00	RSUD. DAYAKU RAJA
1.02 . 1.02.04 . 02 . 40	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (DAYAKU RAJA)	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas	Persen	100	100	0,00	100	0,00	100	5.000.000.000,00	100	5.000.000.000,00	100	5.000.000.000,00	100	15.000.000.000,00	RSUD. DAYAKU RAJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					336.055.570.272,00		476.762.224.581,41		814.084.414.285,58		430.292.629.935,00		701.932.629.932,00		2.758.377.469.005,99	DINAS PEKERJAAN UMUM, KECAMATAN TENGGARONG, KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG, KECAMATAN LOA KULU, KECAMATAN LOA JANAN, KECAMATAN MUARA BADAK, KECAMATAN MARANG KAYU, KECAMATAN MUARA JAWA, KECAMATAN SAMBOJA, KECAMATAN SEBULU, KECAMATAN MUARA KAMAN, KECAMATAN KOTA BANGUN, KECAMATAN MUARA MUNTAI, KECAMATAN KENOHAN, KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KECAMATAN TABANG, KECAMATAN MUARA WIS, KECAMATAN SANGA-SANGA, KECAMATAN ANGGANA
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM					280.514.175.907,00		365.036.036.857,41		678.705.892.469,05		366.567.985.004,00		483.492.985.000,00		2.174.317.075.237,46	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM					280.514.175.907,00		365.036.036.857,41		678.705.892.469,05		366.567.985.004,00		483.492.985.000,00		2.174.317.075.237,46	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	2.603.286.699,00	100	3.060.139.364,00	100	3.430.700.000,00	100	3.351.359.000,00	100	3.351.359.000,00	100	15.796.844.063,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	215.210.108,00	100	726.214.900,00	100	815.000.000,00	100	365.000.000,00	100	365.000.000,00	100	2.486.425.008,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	25	25	0,00	20,00	0,00	15,00		10,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	80,00	80,00	0,00	81,00	0,00	82,00	375.000.000,00	83,00	500.000.000,00	85,00	500.000.000,00	85,00	1.375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 100	164.066.221.356,00	1) 100 2) 100 3) 100	175.899.538.882,10	1) 100 2) 100 3) 100	255.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	100.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	100.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	340.420.760.238,10	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	1) Prosentase Terhubungnya Antar Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2) Panjang Jalan Kolektor yang Terbangun 3) Panjang Jalan Menuju Pelabuhan Perikanan	1) Persen 2) Km 3) Km	1) 83.34 2) 1.782 3) 0	1) 83.34 2) 2.193 3) 0	0,00	1) 83.34 2) 2.193 3) 0	19.526.740.511,00	1) 83.34 2) 2.193 3) 0	85.750.707.000,00					1) 83.34 2) 2.193 3) 0	105.277.447.511,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Drainase / Gorong Gorong Dalam Kondisi Baik	Meter	n.a	1405,00	223.266.875,00	300,00	457.663.700,00	1.550,00	7.144.836.250,00					3255	7.825.766.825,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan Tindak Lanjut Permasalahan Kebinamargaan yang mendesak	Persen	n.a			100,00	1.400.306.725,00							100,00	1.400.306.725,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PU	1) Jumlah Peralatan PU yang diadakan/dipelihara; 2) Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM	1) unit; 2) Orang.	1) 0; 2) 0.							1) 2; 2) 20;	2.300.000.000,00	1) 2; 2) 20;	2.300.000.000,00	1) 2; 2) 20;	4.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.04.01 . 01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					2.001.535.125,00		19.841.944.189,31		80.277.349.000,00					0	102.120.828.314,31	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 4.01.06 . 01 . 43	Program pembangunan turap/talud/bronjong terbangun	Panjang turap / talud / bronjong yang terbangun	Meter	n.a	437	874.871.075,00	0,00	0,00	832	2.078.812.000,00					1269	2.953.683.075,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 36	Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian	Persentasi irigasi dalam kondisi baik	Persen	n.a	70,63	7.808.848.832,00	71,09	5.793.134.975,00	75,25	12.352.720.961,00					75,25	25.954.704.768,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 37	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola	Persen	30,00	30,00	705.334.425,00	33,60	1.149.906.000,00	35,65	14.700.000.000,00	38,00	5.000.000.000,00	40,60	6.200.000.000,00	40,60	27.755.240.425,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1) Persentase Luas cakupan irigasi yang dialiri; 2) Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara.	1) Persen; 2) Persen.	1) 68,98; 2) 10.							1) 74,25; 2) 25.	17.454.810.000,00	1) 82,5; 2) 30.	23.454.810.000,00	1) 82,5; 2) 30.	40.909.620.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat; 2) Kondisi Jembatan yang dibangun/ditingkatkan;	1) Kilometer; 2) Unit;	1) 781.78; 2) 1;							1) 620.9; 2) 9;	243.732.424.004,00	1) 560.9; 2) 5;	315.307.424.000,00	1) 560.9; 2) 5;	559.039.848.004,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Jembatan yang dipelihara;	1) Kilometer; 2) Unit;	1) 1081.53; 2) 0;							1) 1267.56; 2) 0;	7.500.000.000,00	1) 1337.56; 2) 0;	7.500.000.000,00	1) 1337.56; 2) 0;	15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.04.01 . 01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi sedang; 2) Jumlah Jembatan yang direhabilitasi/dipelihara secara berkala.	1) Kilometer; 2) Unit;	1) 329.72; 2) 0;					1) 314,56; 2) 3.	269.867.000,00	1) 304,56; 2) 2.	32.200.000.000,00	1) 294,56; 2) 4.	75.400.000.000,00	1) 294,56; 2) 4.	107.869.867.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
1	2	3	4	5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	1) Cakupan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik 2) Cakupan Jalan dan Jembatan Kepariwisataa Dalam Kondisi Baik 3) Cakupan Jalan dan Jembatan Pendidikan Dalam Kondisi Baik 4) Cakupan Jalan dan Jembatan Kesehatan Dalam Kondisi Baik 5) Cakupan Jalan dan Jembatan Industri Dalam Kondisi Baik	1) Persen 2) Persen 3) Persen 4) Persen 5) Persen	1) 83.75 2) n.a 3) n.a 4) n.a 5) n.a	1) 83.75 2) n.a 3) n.a 4) n.a 5) n.a	78.849.416.087,00	1) 85.55 2) n.a 3) n.a 4) n.a 5) n.a	57.517.902.661,00	1) 93.40 2) n.a 3) n.a 4) n.a 5) n.a	425.572.150.558,05					1) 93.40 2) n.a 3) n.a 4) n.a 5) n.a	561.939.469.306,05	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 40	Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara	1) Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan; 2) Tersedianya data Rekomendasi Teknis Pembangunan Gedung di 18 kecamatan; 3) Tersedianya data standart harga dan bahan bangunan gedung pemerintah, peraturan tentang kebijakan pembangunan gedung pemerintah.	1) Unit; 2) Dokumen; 3) Buku.	1) n.a; 2) n.a; 3) n.a	1) 19; 2) n.a; 3) n.a	23.166.185.325,00	1) 7; 2) 5; 3) 1.	76.635.505.300,00	1) 16; 2) 20; 3) 1.	32.183.749.700,00	1) 30; 2) 25; 3) 1.	32.439.392.000,00	1) 7; 2) 30; 3) 1.	34.939.392.000,00	1) 79; 2) 30; 3) 1.	199.364.224.325,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.04 . 1.03.01 . 01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	presentasi ketersediaan lahan untuk jalan dan jembatan	Ha	n.a			3,35	3.013.550.075,00							3,35	3.013.550.075,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28	Program Pengendalian Banjir	Luas wilayah banjir yang direduksi	Ha	n.a					200,00	5.000.000.000,00	150,00	5.125.000.000,00	100,00	5.125.000.000,00	100	15.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisataa	Jumlah bangunan kepariwisataan dalam kondisi baik	Unit	n.a			0,00	13.489.575,00	3,00	7.000.000.000,00					3,00	7.013.489.575,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Jumlah Rekomendasi Teknis yang Dikeluarkan	Dokumen	n.a					15,00	1.500.000.000,00					15,00	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 50	Program Pengembangan Infrastruktur Daerah	jumlah data perencanaan, hasil evaluasi dan data laporan infrastruktur DPU	Dokumen	n.a							3,00	2.500.000.000,00	3,00	2.500.000.000,00	3	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 51	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara	jumlah bangunan/gedung negara yang direhabilitasi/dipelihara	Unit	n.a							2,00	14.000.000.000,00	2,00	6.450.000.000,00	4	20.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03 . 4.01.06	KECAMATAN TENGGARONG					13.354.763.575,00		15.265.897.450,00		46.912.205.800,00		10.943.315.981,00		37.383.315.981,00		123.859.498.787,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 01	KECAMATAN TENGGARONG					13.354.763.575,00		15.265.897.450,00		46.912.205.800,00		10.943.315.981,00		37.383.315.981,00		123.859.498.787,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	50,00	50,00	360.873.000,00	50,00	1.240.100.450,00							50,00	1.600.973.450,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	n.a					55,00	2.108.652.880,00	60,00	5.791.007.080,00	65,00	7.271.007.080,00	65,00	15.170.667.040,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	Cakupan Panjang Jalan dalam kondisi baik	Persen	n.a					75,00	33.779.555.140,00	80,00	5.152.308.901,00	80,00	29.047.308.901,00	80,00	67.979.172.942,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 01 . 42	Program Pembangunan/ Pemeliharaan/ Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	Persen	n.a					0,00	8.256.196.850,00						8.256.196.850,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap Kecamatan	Cakupan pembangunan turap	Persen	0,00			50,00	0,00	50,00	2.767.800.930,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2.767.800.930,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Persen	n.a	70,00	1.245.272.700,00	53,00	393.104.600,00						600.000.000,00	53,00	2.238.377.300,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	40,00	44,00	8.300.860.625,00	53,00	10.019.315.900,00								18.320.176.525,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan drainase dalam kondisi baik & Cakupan gorong-gorong dalam kondisi baik	Persen	n.a	0,00	780.239.000,00	0,00	2.490.916.300,00						465.000.000,00	0,00	3.736.155.300,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.06 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	Persen	n.a	0,00	2.667.518.250,00	0,00	1.122.460.200,00								3.789.978.450,00	KECAMATAN TENGGARONG
1.03 . 4.01.07	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG					3.391.233.900,00		9.529.692.900,00		4.273.000.000,00		2.841.312.000,00		17.286.312.000,00		37.321.550.800,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 4.01.07 . 01	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG					3.391.233.900,00		9.529.692.900,00		4.273.000.000,00		2.841.312.000,00		17.286.312.000,00		37.321.550.800,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 4.01.07 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Infrastruktur di wilayah Kecamatan	Persen	n.a			65,00	347.164.600,00							65,00	347.164.600,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	90,00	91,00	0,00	94,00	0,00	95,00	450.000.000,00	96,00	0,00	100,00	50.000.000,00	100,00	500.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 4.01.07 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1). Cakupan Panjang Jalan dalam kondisi baik 2). Cakupan Jembatan dalam kondisi baik	1). Persen 2). Persen	1). 35 2). 35	1). 35 2). 35	0,00	1). 35 2). 35	0,00	1). 40 2). 40	3.083.000.000,00	1). 45 2). 45	2.841.312.000,00	1). 50 2). 50	17.236.312.000,00	1). 50 2). 50	23.160.624.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 4.01.07 . 01 . 42	Program Pembangunan/ Pemeliharaan/ Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Cakupan Drainase / Gorong-gorong dalam kondisi baik;	1) Meter; 2) Unit;	1). n.a 2). n.a					1). 0 2). 0	295.000.000,00					1). 0 2). 0	295.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03 . 4.01.07 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap Kecamatan	Cakupan Pembangunan Turap	Persen	n.a	73,00	0,00	75,00	0,00	80,00	150.000.000,00					80,00	150.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 4.01.07 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	n.a	50,00	940.469.700,00	60,00	6.409.101.000,00							60,00	7.349.570.700,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 4.01.07 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	1) Cakupan Drainase dalam kondisi baik; 2) Cakupan Gorong-gorong dalam kondisi baik;	Persen	1). 40 2). 40	1). 40 2). 40	1.956.044.300,00	1). 45 2). 45	2.178.823.800,00	1). 50 2). 50	295.000.000,00	1). 55 2). 55	0,00	1). 60 2). 60	0,00	1). 60 2). 60	4.429.868.100,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 4.01.07 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/ Talut/ Bronjong Kecamatan/ Kelurahan Dalam Kondisi Baik	Cakupan Turap/ Talud/ Bronjong Kecamatan/ Kelurahan Dalam Kondisi Baik	Persen	n.a	40,00	494.719.900,00	40,00	594.603.500,00								1.089.323.400,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1.03 . 4.01.08	KECAMATAN LOA KULU					8.915.731.400,00		17.163.540.750,00		2.430.000.000,00		2.902.050.000,00		22.972.050.000,00		54.383.372.150,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.08 . 01	KECAMATAN LOA KULU					8.915.731.400,00		17.163.540.750,00		2.430.000.000,00		2.902.050.000,00		22.972.050.000,00		54.383.372.150,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.08 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Unit	n.a	5,00	818.278.000,00	5,00	713.534.800,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1.531.812.800,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	Jumlah Unit	n.a					77,85	410.000.000,00	77,87	773.880.000,00	77,88	2.533.880.000,00	77,88	3.717.760.000,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.08 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Meter ² ; 2) Unit. 3) Persen 4) Persen	1) 0 meter; 2) 0 Unit. 3) 0 Persen 4) 0 Persen					1) 2000 meter; 2) 1 Unit. 3) 0 Persen 4) 0 Persen	1.620.000.000,00			1) 0 meter; 2) 0 Unit. 3) 25 Persen 4) 30 Persen	20.438.170.000,00	1) 2000 meter; 2) 1 Unit. 3) 0 Persen 4) 0 Persen	22.058.170.000,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.08 . 01 . 42	Program Pembangunan/ Pemeliharaan/ Peningkatan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kecamatan	Cakupan Drainase / Gorong-gorong dalam kondisi baik;	Persen	n.a					104,00	400.000.000,00					104,00	400.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.08 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Persen	n.a	100	947.775.000,00	100	2.909.679.900,00							100,00	3.857.454.900,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.08 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen		0,00	6.198.713.100,00	0,00	12.405.629.200,00	77,85	0,00	77,87	2.128.170.000,00	77,88	0,00	77,88	20.732.512.300,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.08 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan saluran Drainase/ Gorong-gorong yang dibangun	Persen	10,00	10,00	153.110.600,00	15,00	610.446.050,00	20,00	0,00	25,00	0,00	30,00	0,00	15	763.556.650,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.08 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/ Talut/ Bronjong Kecamatan/ Kelurahan	Pembangunan Turap	Meter ²	76	76,00	797.854.700,00	77,81	343.872.800,00							77,81	1.141.727.500,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.08 . 01 . 17	Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	cakupan turap/ talud/ bronjong	Persen	n.a	0,00	0,00		180.378.000,00								180.378.000,00	KECAMATAN LOA KULU
1.03 . 4.01.09	KECAMATAN LOA JANAN					3.900.358.600,00		11.159.756.000,00		1.970.000.000,00		1.990.000.000,00		12.065.000.000,00		31.085.114.600,00	KECAMATAN LOA JANAN
1.03 . 4.01.09 . 01	KECAMATAN LOA JANAN					3.900.358.600,00		11.159.756.000,00		1.970.000.000,00		1.990.000.000,00		12.065.000.000,00		31.085.114.600,00	KECAMATAN LOA JANAN
1.03 . 4.01.09 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	45	50,00	324.785.500,00	50,00	939.850.000,00							50,00	1.264.635.500,00	KECAMATAN LOA JANAN
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan											420.000.000,00		4.070.000.000,00		4.490.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
1.03 . 4.01.09 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Persen	n.a	346,00	64.227.200,00	346	361.935.600,00						1.900.000.000,00	346	2.326.162.800,00	KECAMATAN LOA JANAN
1.03 . 4.01.08 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Meter ² ; 2) Unit.	1) n.a ; 2) n.a.	1) 0 meter; 2) 0 Unit.	2.819.824.000,00	1) 0 meter; 2) 0 Unit.	7.920.649.400,00	1) 776,70 meter; 2) 1 Unit.	1.970.000.000,00	1) 2000 meter; 2) 1 Unit.	1.570.000.000,00	1) 2000 meter; 2) 1 Unit.	6.095.000.000,00	1) 2000 meter; 2) 1 Unit.	20.375.473.400,00	KECAMATAN LOA JANAN
1.03 . 4.01.09 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Drainase/ Gorong-gorong yang dibangun	Persen	60,00	60,00	422.178.400,00	65,00	1.241.257.400,00							65,00	1.663.435.800,00	KECAMATAN LOA JANAN
1.03 . 4.01.09 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/ Talut/ Bronjong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Turap/ Talut/ Bronjong Kecamatan/ Kelurahan	Persen	60,00	65,00	269.343.500,00	65,00	696.063.600,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	965.407.100,00	KECAMATAN LOA JANAN
1.03 . 4.01.10	KECAMATAN MUARA BADAK					995.908.900,00		5.097.915.950,00		2.716.147.000,00		750.000.000,00		4.200.000.000,00		13.759.971.850,00	KECAMATAN MUARA BADAK
1.03 . 4.01.10 . 01	KECAMATAN MUARA BADAK					995.908.900,00		5.097.915.950,00		2.716.147.000,00		750.000.000,00		4.200.000.000,00		13.759.971.850,00	KECAMATAN MUARA BADAK
1.03 . 4.01.10 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastruktur Kecamatan /kelurahan dalam kondisi baik	Persen	50,00	70,30	329.850.600,00	70,30	1.174.523.800,00							70,30	1.504.374.400,00	KECAMATAN MUARA BADAK
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	1) Meter 2) Persen	n.a					1) 1262 2) 0	1.132.147.000,00	1) 0 2) 50	750.000.000,00	1) 0 2) 52	1.450.000.000,00	1) 1262 2) 0	3.332.147.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
1.03 . 4.01.10 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Cakupan Aksesibilitas antar Wiliyah Kecamatan Muara Badak	Persen	90	100,00	0,00	100,00	791.755.600,00	100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	791.755.600,00	KECAMATAN MUARA BADAK
1.03 . 4.01.10 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	n.a	2001	150.466.800,00	1760,00	1.700.653.450,00								1.851.120.250,00	KECAMATAN MUARA BADAK
1.03 . 4.01.10 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	Cakupan Aksesibilitas antar Wiliyah Kecamatan Muara Badak	Persen	n.a	100,00		100,00	0,00	100	1.408.000.000,00	100,00	0,00	100,00	2.750.000.000,00	100	4.158.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	1) Cakupan Drainase dalam kondisi baik; 2) Cakupan Gorong-gorong dalam kondisi baik;	1) Meter; 2) Unit;	1) meter; 2) Unit.	1) 840 meter; 2) Unit.	515.591.500,00	1) 1.116 meter; 2) Unit.	779.791.400,00							1) 1.116 meter; 2) Unit.	1.295.382.900,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	CakupanTurap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Persen	n.a			650,00	651.191.700,00	124	176.000.000,00					124	827.191.700,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
1.03 . 4.01.10 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	CakupanTurap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Meter	n.a											0	0,00	KECAMATAN MUARA BADAK	
1.03 . 4.01.11	KECAMATAN MARANG KAYU					2.511.503.740,00		4.891.829.050,00		2.150.000.000,00		1.980.000.000,00		6.070.000.000,00		17.603.332.790,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.11 . 01	KECAMATAN MARANG KAYU					2.511.503.740,00		4.891.829.050,00		2.150.000.000,00		1.980.000.000,00		6.070.000.000,00		17.603.332.790,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	CakupanTurap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Persen	n.a					50,00	455.000.000,00						455.000.000,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastruktur Kecamatan /kelurahan dalam kondisi baik	Persen	50,00	50,00	761.477.800,00	55,00	929.391.300,00								1.690.869.100,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana dan Prasarana umum dalam kondisi baik	Unit						0,00	215.000.000,00	3,00	540.000.000,00	3,00	2.030.000.000,00	3	2.785.000.000,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Cakupan Aksesibilitas antar Wiliyah Kecamatan	Persen		0,00	8.283.800,00		597.449.200,00								605.733.000,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	64,00	64,00	837.415.940,00	66,00	2.069.099.400,00							66	2.906.515.340,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Cakupan Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan jembatan dalam Kondisi Baik.	1) Meter; 2) Unit.	1) 0; 2) 0;					1) 0; 2) 0;	1.265.000.000,00	1) 3000; 2) 3;	1.440.000.000,00	1) 3000; 2) 3;	4.040.000.000,00	1) 3000; 2) 3;	6.745.000.000,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	cakupan drainase dalam kondisi baik dan cakupan gorong-gorong dalam kondisi baik	Persen	n.a	100,00	734.437.600,00	100,00	746.080.750,00	100,00	0,00					100	1.480.518.350,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 42	Program Pembangunan/ Pemeliharaan/ Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	1) Cakupan Drainase dalam kondisi baik; 2) Cakupan Gorong-gorong dalam kondisi baik;	1) Meter; 2) Unit;	1) 0; 2) 0;						215.000.000,00						215.000.000,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.11 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	CakupanTurap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Persen			169.888.600,00		549.808.400,00								719.697.000,00	KECAMATAN MARANG KAYU	
1.03 . 4.01.12	KECAMATAN MUARA JAWA					4.614.852.725,00		6.616.567.389,00		22.640.000.000,00		9.313.190.000,00		35.893.190.000,00		79.077.800.114,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.12 . 01	KECAMATAN MUARA JAWA					4.614.852.725,00		6.616.567.389,00		22.640.000.000,00		9.313.190.000,00		35.893.190.000,00		79.077.800.114,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.12 . 01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	CakupanTurap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Persen	n.a					50,00	220.000.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	220.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.12 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pembangunan Infrastruktur	Persen	50,00	50,00	98.835.000,00	50,00	1.122.551.100,00							50,00	1.221.386.100,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan sarana / Prasarana Umum dalam Kondisi Baik	Persen	n.a					60,00	1.525.000.000,00	70,00	2.277.776.000,00	80,00	5.867.776.000,00	80	9.670.552.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.12 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Cakupan panjang jalan dan jembatan yang dibangun	Persen	n.a			53,75	124.085.725,00						885.000.000,00	53,75	1.009.085.725,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.12 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	Cakupan Jalan dalam Kondisi baik	Persen	n.a					63,76	16.445.000.000,00	73,75	7.035.414.000,00	83,75	29.140.414.000,00	83,75	52.620.828.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.12 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	1) Cakupan Drainase dalam Konsisi baik 2) Cakupan Gorong-gorong dralam kondisi baik	1) Persen 2) Persen	1) 43,75 2) 0	1) 43,75 2) 25	0,00	1) 53,75 2) 33	1.755.883.414,00	1) 63,75 2) 45	4.450.000.000,00	1) 73,75 2) 60	0,00	1) 80 2) 70	0,00	1) 53,75 2) 33	6.205.883.414,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.12 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	43,75	43,75	2.015.452.050,00	53,75	3.465.065.250,00							53,75	5.480.517.300,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.12 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	Meter	43,75	43,75	2.500.565.675,00									43,75	2.500.565.675,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.12 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan turap/talud/bronjong kecamatan/kelurahan dalam kondisi baik	Persen				50,00	148.981.900,00							50	148.981.900,00	KECAMATAN MUARA JAWA	
1.03 . 4.01.13	KECAMATAN SAMBOJA					6.854.941.525,00		16.144.099.600,00		33.276.124.000,00		18.886.932.000,00		44.501.932.000,00		119.664.029.125,00	KECAMATAN SAMBOJA	
1.03 . 4.01.13 . 01	KECAMATAN SAMBOJA					6.854.941.525,00		16.144.099.600,00		33.276.124.000,00		18.886.932.000,00		44.501.932.000,00		119.664.029.125,00	KECAMATAN SAMBOJA	
1.03 . 4.01.13 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	Persen		100,00	482.285.500,00	100,00	1.899.631.700,00							100,00	2.381.917.200,00	KECAMATAN SAMBOJA	
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	Persen						100,00	4.080.624.000,00	100,00	10.707.017.940,00	100,00	13.722.017.940,00	100,00	28.509.659.880,00	KECAMATAN SAMBOJA	
1.03 . 4.01.13 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Cakupan Aksesbilitas Antar Wilayah Kecamatan Samboja	Persen		60,00	432.104.825,00	70,00	974.160.000,00		70,00	4.523.500.000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	70,00	5.929.764.825,00	KECAMATAN SAMBOJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03 . 4.01.13 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik			0,00	4.447.941.200,00		7.397.399.000,00							0,00	11.845.340.200,00	KECAMATAN SAMBOJA
1.03 . 4.01.13 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	Cakupan Aksesblitas Antar Wilayah Kecamatan Samboja	Persen		70,00	0,00	80,00	0,00	80,00	14.301.000.000,00	90,00	8.179.914.060,00	90,00	30.779.914.060,00	90,00	53.260.828.120,00	KECAMATAN SAMBOJA
1.03 . 4.01.13 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan drainase dalam kondisi baik & Cakupan gorong-gorong dalam kondisi baik	Persen		60,00	1.089.878.900,00	70,00	4.292.146.600,00	70,00	8.656.000.000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	70,00	14.038.025.500,00	KECAMATAN SAMBOJA
1.03 . 4.01.13 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan pembangunan turap	Persen		50,00	402.731.100,00	50,00	1.580.762.300,00	60,00	1.715.000.000,00	60,00	0,00	70,00	0,00	60,00	3.698.493.400,00	KECAMATAN SAMBOJA
1.03 . 4.01.14	KECAMATAN SEBULU					1.325.297.400,00		7.382.027.190,00		5.596.224.000,00		2.682.224.000,00		4.837.224.000,00		21.822.996.590,00	KECAMATAN SEBULU
1.03 . 4.01.14 . 01	KECAMATAN SEBULU					1.325.297.400,00		7.382.027.190,00		5.596.224.000,00		2.682.224.000,00		4.837.224.000,00		21.822.996.590,00	KECAMATAN SEBULU
1.03 . 4.01.14 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Persen	n.a	59,00	149.797.300,00	60,00	396.580.400,00							60,00	546.377.700,00	KECAMATAN SEBULU
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	Unit	65					70,00	335.000.000,00	73,00	199.224.000,00	75,00	379.224.000,00	75,00	913.448.000,00	KECAMATAN SEBULU
1.03 . 4.01.14 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah panjang Jalan dan Jembatan	Meter dan Unit	48,3			0,00	1.240.420.800,00			75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	1.240.420.800,00	KECAMATAN SEBULU
1.03 . 4.01.14 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	46,4	50,00	1.175.500.100,00	60,00	5.340.055.590,00							60,00	6.515.555.690,00	KECAMATAN SEBULU
1.03 . 4.01.13 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Meter²; 2) Unit.	50					0,00	5.261.224.000,00	0,00	2.483.000.000,00	0,00	4.458.000.000,00	0,00	12.202.224.000,00	KECAMATAN SEBULU
1.03 . 4.01.14 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	1) Cakupan Drainase dalam kondisi baik; 2) Cakupan Gorong-gorong dalam kondisi baik;	1) Meter; 2) Unit;	48,6			60,00	316.585.600,00							60,00	316.585.600,00	KECAMATAN SEBULU
1.03 . 4.01.14 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan pembangunan turap	Persen	n.a				88.384.800,00								88.384.800,00	KECAMATAN SEBULU
1.03 . 4.01.15	KECAMATAN MUARA KAMAN					1.590.892.900,00		2.641.285.400,00		305.000.000,00		105.000.000,00		7.880.000.000,00		11.772.178.300,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
1.03 . 4.01.15 . 01	KECAMATAN MUARA KAMAN					1.590.892.900,00		2.641.285.400,00		305.000.000,00		105.000.000,00		7.880.000.000,00		11.772.178.300,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
1.03 . 4.01.15 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastruktur di Wialayah Kecamatan	Persen	n.a		249.798.700,00	20,00	99.433.800,00								349.232.500,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	n.a					0,00	305.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	2.455.000.000,00	0,00	2.865.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
1.03 . 4.01.15 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah panjang Jalan dan Jembatan	Meter dan Unit	n.a			35,00	374.547.000,00							0,00	374.547.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
1.03 . 4.01.15 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen											4.675.000.000,00		4.675.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
1.03 . 4.01.15 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	n.a	35	941.972.400,00	40,00	1.967.496.100,00							0,00	2.909.468.500,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
1.03 . 4.01.15 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Persen	n.a	35	399.121.800,00	35								35	399.121.800,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
1.03 . 4.01.15 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan turap/talud/bronjong kecamatan/kelurahan dalam kondisi baik	Meter	883 meter			40,00	199.808.500,00							40,00	199.808.500,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
1.03 . 4.01.05 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap Kecamatan	Cakupan pembangunan turap	Persen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	750.000.000,00	50,00	750.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
1.03 . 4.01.16	KECAMATAN KOTA BANGUN					1.707.823.500,00		3.004.674.000,00		864.350.213,53		0,00		4.980.000.001,00		10.556.847.714,53	KECAMATAN KOTA BANGUN
1.03 . 4.01.16 . 01	KECAMATAN KOTA BANGUN					1.707.823.500,00		3.004.674.000,00		864.350.213,53		0,00		4.980.000.001,00		10.556.847.714,53	KECAMATAN KOTA BANGUN
1.03 . 4.01.16 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Infrastruktur di wilayah Kecamatan	Persen	0			0,00	246.145.000,00							0,00	246.145.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	Unit	na					45,00	123.478.699,22	50,00	0,00	55,00	750.000.001,00	0,00	873.478.700,22	KECAMATAN KOTA BANGUN
1.03 . 4.01.16 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah panjang Jalan dan Jembatan	Meter dan Unit	40	40	546.380.000,00	45	886.735.500,00							45	1.433.115.500,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
1.03 . 4.01.16 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	50	50,00	1.134.033.000,00	50,00	1.204.979.500,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2.339.012.500,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
1.03 . 4.01.13 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Meter²; 2) Unit. 1) Persen 2) Persen	1) Meter²; 2) Unit. 1) Persen 2) Persen					1) 0 meter; 2) 0 Unit. 1) 46 2) 45	617.392.815,09			1) 0 meter; 2) 0 Unit. 1) 46 2) 46	4.230.000.000,00	1) 0 meter; 2) 0 Unit. 1) 46 2) 46	4.847.392.815,09	KECAMATAN KOTA BANGUN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03 . 4.01.16 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	Meter	50	50,00	9.470.000,00	50,00	666.814.000,00	50,00	123.478.699,22	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	799.762.699,22	KECAMATAN KOTA BANGUN
1.03 . 4.01.16 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan turap/talud/bronjong kecamatan/kelurahan dalam kondisi baik	Meter	50	50,00	17.940.500,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.940.500,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
1.03 . 4.01.17	KECAMATAN MUARA MUNTAI					814.954.000,00		2.711.353.720,00		987.548.000,00		200.000.000,00		1.100.000.000,00		5.813.855.720,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
1.03 . 4.01.17 . 01	KECAMATAN MUARA MUNTAI					814.954.000,00		2.711.353.720,00		987.548.000,00		200.000.000,00		1.100.000.000,00		5.813.855.720,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
1.03 . 4.01.17 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Infrastruktur di wilayah Kecamatan	Persen	0,00			50,00	739.440.720,00							50,00	739.440.720,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	Persen	n.a			50,00	0,00	50,00	67.548.000,00	55,00	200.000.000,00	60,00	200.000.000,00	60,00	467.548.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
1.03 . 4.01.17 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah panjang Jalan dan Jembatan	Meter dan Unit	n.a	45,00	149.725.000,00	50,00	183.514.000,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	200.000.000,00	50,00	533.239.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
1.03 . 4.01.17 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	n.a	40,00	665.229.000,00	45,00	1.788.399.000,00							45,00	2.453.628.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
1.03 . 4.01.13 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Meter ² ; 2) Unit. 1) Persen 2) Persen	1) Meter ² ; 2) Unit. 1) Persen 2) Persen					1) 0 meter; 2) 0 Unit. 1) 45 2) 43	920.000.000,00			1) 0 meter; 2) 0 Unit. 1) 45,9 2) 43,7	700.000.000,00	1) 0 meter; 2) 0 Unit. 1) 45,9 2) 43,7	1.620.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
1.03 . 4.01.18	KECAMATAN KENOHAN					0,00		1.069.249.600,00		1.800.000.000,00		1.790.000.000,00		2.230.000.000,00		6.889.249.600,00	KECAMATAN KENOHAN
1.03 . 4.01.18 . 01	KECAMATAN KENOHAN					0,00		1.069.249.600,00		1.800.000.000,00		1.790.000.000,00		2.230.000.000,00		6.889.249.600,00	KECAMATAN KENOHAN
1.03 . 4.01.18 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Infrastruktur di wilayah Kecamatan	Persen	0,00			30,00	295.074.000,00							30,00	295.074.000,00	KECAMATAN KENOHAN
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	Persen	n.a			35,00	0,00	40,00	600.000.000,00	50,00	375.000.000,00	55,00	375.000.000,00	55,00	1.350.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
1.03 . 4.01.18 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah panjang Jalan dan Jembatan	Meter dan Unit	n.a			40,00	293.157.900,00							40,00	293.157.900,00	KECAMATAN KENOHAN
1.03 . 4.01.18 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen				35,00	324.026.900,00							35,00	324.026.900,00	KECAMATAN KENOHAN
1.03 . 4.01.13 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Meter ² ; 2) Unit.	1) meter; 2) Unit.			50,00	0,00	50,00	1.200.000.000,00	50,00	1.415.000.000,00	50,00	1.855.000.000,00	50,00	4.470.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
1.03 . 4.01.18 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	Meter	n.a			50,00	156.990.800,00								156.990.800,00	KECAMATAN KENOHAN
1.03 . 4.01.19	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT					251.885.800,00		882.195.800,00		2.566.010.553,00		0,00		0,00		3.700.092.153,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.03 . 4.01.19 . 01	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT					251.885.800,00		882.195.800,00		2.566.010.553,00		0,00		0,00		3.700.092.153,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.03 . 4.01.19 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastrukturu Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	n.a											0,00	0,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.03 . 4.01.06 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	Persen	n.a					40,00	1.366.816.454,00	42,00	0,00	44,00	0,00	40,00	1.366.816.454,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.03 . 4.01.19 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah panjang Jalan dan Jembatan	Meter dan Unit	n.a	35,00	149.892.000,00	40,00	599.634.800,00							40,00	749.526.800,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.03 . 4.01.19 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	45,00	50,00	101.993.800,00	55,00	282.561.000,00							55,00	384.554.800,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.03 . 4.01.13 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Meter ² ; 2) Unit. 1) Persen 2) Persen	1) Meter ² ; 2) Unit. 1) Persen 2) Persen					1) 0 meter; 2) 0 Unit. 1) 65 2) 0	989.355.281,00	1) 0 meter; 2) 0 Unit. 1) 70 2) 40	0,00	1) 0 meter; 2) 0 Unit. 1) 75 2) 50	0,00	1) 0 meter; 2) 0 Unit. 1) 65 2) 0	989.355.281,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.03 . 4.01.19 . 01 . 42	Program Pembangunan/ Pemeliharaan/ Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Persen	n.a					50,00	209.838.818,00					50,00	209.838.818,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.03 . 4.01.20	KECAMATAN TABANG					199.471.500,00		1.655.602.700,00		800.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		3.855.074.200,00	KECAMATAN TABANG
1.03 . 4.01.20 . 01	KECAMATAN TABANG					199.471.500,00		1.655.602.700,00		800.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		3.855.074.200,00	KECAMATAN TABANG
1.03 . 4.01.19 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	n.a				198.120.500,00								198.120.500,00	KECAMATAN TABANG
1.03 . 4.01.20 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	Persen	n.a					35,00	800.000.000,00	35,00	200.000.000,00	35,00	200.000.000,00	35,00	1.200.000.000,00	KECAMATAN TABANG
1.03 . 4.01.20 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah panjang Jalan dan Jembatan	Meter dan Unit	n.a												0,00	KECAMATAN TABANG
1.03 . 4.01.20 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	0		199.471.500,00		1.257.588.700,00								1.457.060.200,00	KECAMATAN TABANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03 . 4.01.13 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Meter 2) Persen	1) 0 2) 0							1) 0 2) 0	400.000.000,00	1) 0 2) 0	400.000.000,00	1) 0 2) 0	800.000.000,00	KECAMATAN TABANG
1.03 . 4.01.20 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Persen				33,00	199.893.500,00								199.893.500,00	KECAMATAN TABANG
1.03 . 4.01.21	KECAMATAN MUARA WIS					1.790.571.400,00		2.036.073.525,00		1.088.000.000,00		764.000.000,00		1.464.000.000,00		7.142.644.925,00	KECAMATAN MUARA WIS
1.03 . 4.01.21 . 01	KECAMATAN MUARA WIS					1.790.571.400,00		2.036.073.525,00		1.088.000.000,00		764.000.000,00		1.464.000.000,00		7.142.644.925,00	KECAMATAN MUARA WIS
1.03 . 4.01.21 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	30,00	45,00	348.107.600,00		745.664.200,00								1.093.771.800,00	KECAMATAN MUARA WIS
1.03 . 4.01.20 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	Persen	50,00			57,00	0,00	58,00	360.000.000,00	59	250.000.000,00	59	450.000.000,00	59,00	1.060.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
1.03 . 4.01.21 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah panjang Jalan dan Jembatan	Meter dan Unit	n.a	3937 dan 15	945.586.200,00	75,00	371.846.825,00					75	350.000.000,00	75,00	1.667.433.025,00	KECAMATAN MUARA WIS
1.03 . 4.01.21 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	n.a	0,00	298.056.700,00		769.863.200,00								1.067.919.900,00	KECAMATAN MUARA WIS
1.03 . 4.01.21 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Panjang Jalan dalam kondisi baik; 2) Cakupan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Meter ² ; 2) Unit.	1) meter; 2) Unit.			54,00	0,00	55,00	728.000.000,00	56,00	475.000.000,00	56,00	625.000.000,00	56,00	1.828.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjnin dan non perjnin	Persen	n.a					100,00	0,00	100,00	39.000.000,00	100,00	39.000.000,00	100,00	78.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
1.03 . 4.01.21 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Persen	n.a			56,00	148.699.300,00							56,00	148.699.300,00	KECAMATAN MUARA WIS
1.03 . 4.01.21 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan turap/talud/bronjong kecamatan/kelurahan dalam kondisi baik	Meter	n.a	0,00	198.820.900,00										198.820.900,00	KECAMATAN MUARA WIS
1.03 . 4.01.22	KECAMATAN SANGA-SANGA					18.737.000,00		960.510.700,00		3.656.414.250,00		6.045.758.950,00		7.995.758.950,00		18.677.179.850,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.03 . 4.01.22 . 01	KECAMATAN SANGA-SANGA					18.737.000,00		960.510.700,00		3.656.414.250,00		6.045.758.950,00		7.995.758.950,00		18.677.179.850,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.03 . 4.01.22 . 01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Cakupan saluran drainase/gorong-gorong	Persen							200.000.000,00					-	200.000.000,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.03 . 4.01.22 . 01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Cakupan turap/talud/bronjong kecamatan/kelurahan dalam kondisi baik	Meter	n.a						350.000.000,00					-	350.000.000,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.03 . 4.01.22 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	30,00											-	0,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.03 . 4.01.20 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik;	1) Persen;						1) 0;	681.414.250,00	1) 0;	956.234.600,00	1) 0;	1.751.234.600,00	1) 0;	3.388.883.450,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.03 . 4.01.22 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah panjang Jalan dan Jembatan	Meter dan Unit	n.a		2.361.000,00									-	2.361.000,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.03 . 4.01.22 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	n.a		16.376.000,00		574.944.400,00							-	591.320.400,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.03 . 4.01.22 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Panjang Jalan;						1) 0;	2.425.000.000,00	1) 0;	5.089.524.350,00	1) 0;	6.244.524.350,00	1) 0;	13.759.048.700,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.03 . 4.01.22 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Persen					385.566.300,00							-	385.566.300,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.03 . 4.01.23	KECAMATAN ANGGANA					3.302.466.500,00		3.513.916.000,00		1.347.498.000,00		1.930.862.000,00		6.980.862.000,00		17.075.604.500,00	KECAMATAN ANGGANA
1.03 . 4.01.23 . 01	KECAMATAN ANGGANA					3.302.466.500,00		3.513.916.000,00		1.347.498.000,00		1.930.862.000,00		6.980.862.000,00		17.075.604.500,00	KECAMATAN ANGGANA
1.03 . 4.01.23 . 01 . 34	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	n.a	45,00	304.235.200,00	55,00	826.111.100,00							55,00	1.130.346.300,00	KECAMATAN ANGGANA
1.03 . 4.01.20 . 01 . 34	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	1) Cakupan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik;	1) Persen;	1) 78;	1) 78;		1) 79;	0,00	1) 79;	52.498.000,00	1) 82;	715.431.000,00	1) 82;	1.015.431.000,00	1) 82;	1.783.360.000,00	KECAMATAN ANGGANA
1.03 . 4.01.23 . 01 . 35	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah panjang Jalan dan Jembatan	Meter dan Unit	70,00	70,00	748.146.400,00	70,00	3.000.000,00							70,00	751.146.400,00	KECAMATAN ANGGANA
1.03 . 4.01.23 . 01 . 41	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	70,00	70,00	1.498.445.800,00	80,00	2.385.177.300,00							80,00	3.883.623.100,00	KECAMATAN ANGGANA
1.03 . 4.01.23 . 01 . 41	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1) Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik;	1) Persen;	1) 70;	1) 70;		1) 80;	0,00	1) 80;	945.000.000,00	1) 85;	1.215.431.000,00	1) 85;	5.565.431.000,00	1) 85;	7.725.862.000,00	KECAMATAN ANGGANA
1.03 . 4.01.23 . 01 . 42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Persen	0,00			50,00	299.627.600,00	70,00	0,00	75,00	0,00	76,00	200.000.000,00	50,00	499.627.600,00	KECAMATAN ANGGANA
1.03 . 4.01.23 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap Kecamatan	Cakupan Pembangunan Turap Kecamatan	Persen	60,00	60,00		70,00	0,00	75,00	350.000.000,00	75,00	0,00	80,00	200.000.000,00	80,00	550.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
1.03 . 4.01.23 . 01 . 43	Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Persen	55,00	55,00	751.639.100,00									55,00	751.639.100,00	KECAMATAN ANGGANA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	18
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					61.650.793.107,00		38.340.889.142,00		38.602.805.493,00		126.825.948.000,00		145.856.587.321,99		411.277.023.063,99	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					61.650.793.107,00		38.340.889.142,00		38.602.805.493,00		126.825.948.000,00		145.856.587.321,99		411.277.023.063,99	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 . 1.04.01 . 01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					61.650.793.107,00		38.340.889.142,00		38.602.805.493,00		126.825.948.000,00		145.856.587.321,99		411.277.023.063,99	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	26.499.210.195,00	100,00	26.397.049.420,00	100,00	28.944.560.380,00	100,00	29.975.931.580,00	100,00	29.975.931.580,00	100,00	141.792.683.155,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	60,00	63,85	1.217.923.275,00	63,85	1.992.690.250,00	65,70	3.028.664.493,00	68,00	3.700.000.000,00	72,00	3.700.000.000,00	72,00	13.639.278.018,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	4,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	Nilai	82,43	82,43	0,00	83,44	68.419.100,00	84,40	50.000.000,00	85,30	750.000.000,00	86,00	750.000.000,00	86,00	1.618.419.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) n.a; 2) 100; 3) 100.	1) n.a; 2) 100; 3) 100.	29.000.793.582,00	1) n.a; 2) 100; 3) 100.	8.834.330.675,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	520.291.620,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	162.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	162.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	38.679.415.877,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	89,78	89,83	287.562.100,00	90,36	0,00	90,74	1.925.000.000,00	91,12	24.997.278.000,00	91,49	29.667.278.000,00	91,49	56.877.118.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	n.a	1,62	4.638.584.355,00	15,69	1.048.399.697,00	21,49	2.884.289.000,00				1.500.000.000,00	21,49	10.071.273.052,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	jumlah makam	n.a	56,79	6.719.600,00									56,79	6.719.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1) Persentase penduduk berakses air minum; 2) Rumah tangga bersanitasi	1) persen; 2) persen.	1) 80,04; 2) 81,98	1) 80,04; 2) 81,98	0,00	1) 84,88; 2) 86,49	0,00	1) 87,38; 2) 87,51	0,00	1) 89,88; 2) 89,2	57.140.738.420,00	1) 92,38; 2) 91,35	68.651.377.741,99	1) 92,38; 2) 91,35	125.792.116.161,99	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	Program Bedah Rumah	Cakupan rumah tidak layak huni yang direnovasi	Persen	n.a	54,85	0,00	64,45	0,00	65,34	1.250.000.000,00	66,34	2.000.000.000,00	68,54	2.000.000.000,00	68,54	5.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.05 . 1.04.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	n.a	57,43	0,00	59,16	0,00	61,40	0,00	61,40	4.250.000.000,00	65,20	4.250.000.000,00	65,20	8.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.05 . 1.04.01 . 01 . 24	Program Ruang Terbuka Hijau	Prosentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	Persen	3,24	3,24	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00	3,35	3.000.000.000,00	3,35	4.350.000.000,00	3,35	7.350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Pengembangan Data / Informasi Perumahan dan kawasan Permukiman	Cakupan data yang tersedia	Persen	n.a							30,00	750.000.000,00	30,00	750.000.000,00	30,00	1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					9.087.363.687,00		23.890.014.035,00		35.497.750.389,00		40.324.258.221,00		41.874.258.221,00		150.673.644.553,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05 . 1.05.03	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT					1.813.762.759,00		3.254.269.074,00		3.465.814.891,00		5.280.625.601,00		6.480.625.601,00		20.295.097.926,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
1.05 . 1.05.03 . 01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT					1.813.762.759,00		3.254.269.074,00		3.465.814.891,00		5.280.625.601,00		6.480.625.601,00		20.295.097.926,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	699.192.009,00	100,00	683.957.364,00	100,00	741.959.691,00	100,00	1.221.958.001,00	100,00	1.221.958.001,00	100	4.569.025.066,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	83	83	120.263.250,00	80,00	42.367.000,00	83,00	85.000.000,00	85,00	115.000.000,00	88,00	115.000.000,00	88	477.630.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
1.05 . 1.05.03 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	7	7	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	85,95	86,89	0,00	87,14	0,00	87,14	50.000.000,00	87,39	100.000.000,00	87,39	100.000.000,00	87,39	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 100	18.229.400,00	1) 100 2) 100 3) 100	26.355.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	145.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	195.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	195.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	579.584.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1) Cakupan penanganan konflik; 2) Cakupan penanganan gejala masyarakat.	1) Persen; 2) Persen;	1) 100 2) n/a	1) 100 2) n/a	118.827.400,00	1) 100 2) 100	183.581.900,00	1) 100 2) 100	700.000.000,00	1) 100 2) 100	300.000.000,00	1) 100 2) 100	300.000.000,00	1) 100 2) 100	1.602.409.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1) Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang; 2) Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud.	1) Persen; 2) Persen;	1) 20 2) n.a	1) 20 2) n.a	98.846.300,00	1) 40 2) n.a	94.660.500,00	1) 60 2) 0	490.000.000,00	1) 80 2) 50	1.318.667.600,00	1) 100 2) 100	2.518.667.600,00	1) 100 2) 100	4.520.842.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase tingkat pencegahan pemberantasan penyakit masyarakat	Persen	20,00	20,00	94.424.400,00	40,00	73.517.400,00	60,00	73.517.400,00	80,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100	481.459.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	1) Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik; 2) Persentase parpol yang tertib administrasi; 3) Persentase ormas yang tertib administrasi.	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 0 2) 100 3) 70	1) 20 2) 100 3) 70	663.980.000,00	1) 40 2) 100 3) 75	2.149.829.910,00	1) 60 2) 100 3) 80	1.180.337.800,00	1) 80 2) 100 3) 90	1.910.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	1.910.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	7.814.147.710,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					7.273.600.928,00		6.319.423.226,00		14.637.841.338,00		16.554.439.620,00		16.554.439.620,00		61.339.744.732,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05 . 1.05.01 . 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					7.273.600.928,00		6.319.423.226,00		14.637.841.338,00		16.554.439.620,00		16.554.439.620,00		61.339.744.732,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	6.506.862.408,00	100,00	5.936.574.642,00	100,00	6.782.624.000,00	100,00	7.048.391.620,00	100,00	7.048.391.620,00	100,00	33.322.844.290,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	94	97	224.584.720,00	97,00	198.802.380,00	96,00	473.670.338,00	95,00	885.457.000,00	94,00	885.457.000,00	94,00	2.667.971.438,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Pelanggaran Disiplin	Persen	5,33	2,96	0,00	2,96	0,00	2,37	961.646.000,00	1,78	350.000.000,00	1,18	350.000.000,00	1,18	1.661.646.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	86,41	86,31	47.878.800,00	87,00	0,00	87,50	644.550.000,00	88,00	110.000.000,00	88,50	110.000.000,00	88,50	912.428.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 61 2) 100 3) 100	1) 70 2) 100 3) 100	0,00	1) 75 2) 100 3) 100	184.046.204,00	1) 90 2) 100 3) 100	249.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	360.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	360.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	1.153.046.204,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persen	100	100	394.285.000,00	85,00	0,00	90,00	275.000.000,00	95,00	400.000.000,00	95,00	400.000.000,00	95,00	1.469.285.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pemberdayaan masyarakat Di dalam menjaga ketertiban dan ketertiban	Persen	n.a					30,00	4.757.760.000,00	60,00	3.900.000.000,00	90,00	3.900.000.000,00	90,00	12.557.760.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten. 2) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	1) Persen; 2) Persen;	1) n.a 2) 100	1) 100 2) 100	99.990.000,00									1) 100 2) 100	99.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05 . 1.05.01 . 01 . 29	Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah	Cakupan penegakan produk Hukum Daerah	Persen	n.a					40,00	493.591.000,00	60,00	568.591.000,00	80,00	568.591.000,00	80,00	1.630.773.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	Persentase kompetensi Satpol PP, Linmas dan Banpol PP	Persen	n.a					10,17	0,00	21,87	2.932.000.000,00	33,58	2.932.000.000,00	33,58	5.864.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.04 . 1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					0,00		14.316.321.735,00		17.394.094.160,00		18.489.193.000,00		18.489.193.000,00		69.038.801.895,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.04 . 1.05.02 . 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					0,00		14.316.321.735,00		17.394.094.160,00		18.489.193.000,00		18.489.193.000,00		69.038.801.895,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.04 . 1.05.02 . 01 . 18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Cakupan verifikasi pendataan pasca bencana	Persen	100	100	0,00	100,00	299.814.300,00							100,00	299.814.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	0,00	100	3.485.190.533,00	100,00	4.069.043.760,00	100,00	4.480.043.000,00	100,00	4.480.043.000,00	100,00	16.514.320.293,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	30	30	0,00	65	1.559.355.622,00	65	1.098.000.000,00	65	1.691.000.000,00	65	1.691.000.000,00	65,00	6.039.355.622,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	5	5	0,00	5	732.566.200,00	5	175.000.000,00	5		5	0,00	5	907.566.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	75	75	0,00	76	59.796.000,00	78	190.000.000,00	80	175.000.000,00	85	175.000.000,00	85	599.796.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 50; 2) 100; 3) 100	1) 50; 2) 100; 3) 100	0,00	1) 50; 2) 100; 3) 100	938.085.700,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	525.900.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	711.899.600,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	711.899.600,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	2.887.784.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1) Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; 2) Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	1) desa/kel; 2) persen	1) 2; 2) 100	1) 2; 2) 100	0,00	1) 2; 2) 100	96.333.500,00	1) 4; 2) 100	179.000.000,00	1) 6; 2) 100	1.565.000.000,00	1) 8; 2) 100	1.565.000.000,00	1) 8; 2) 100	3.405.333.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	0,00	100,00	2.026.807.530,00	100,00	1.925.000.000,00	100,00	1.263.000.000,00	100,00	1.263.000.000,00	100	6.477.807.530,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05 . 1.05.02 . 01 . 25	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persen	100	100	0,00	100,00	0,00	100,00	200.000.000,00					100	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05 . 1.05.02 . 01 . 27	Program Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Cakupan layanan Pemulihan sarana dan prasarana Pasca Bencana	Persen	100	100	0,00	100,00	0,00	100,00	300.000.000,00					100	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05 . 1.05.02 . 01 . 26	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1) Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); 2) Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran); 3) Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;	1) Persen; 2) Balakarcana; 3) persen;	1) 23; 2) 6; 3) 100;	1) 23; 2) 6; 3) 100;	0,00	1) 30; 2) 6; 3) 100;	25.000.000,00	1) 35; 2) 12; 3) 100;	644.000.000,00	1) 40; 2) 16; 3) 100;	1.938.000.000,00	1) 45; 2) 20; 3) 100;	2.288.000.000,00	1) 45; 2) 20; 3) 100;	4.895.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan layanan Pemulihan sarana dan prasarana Pasca Bencana	Persen	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	777.100.000,00	100,00	777.100.000,00	100,00	1.554.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.04 . 1.05.02 . 01 . 25	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1) Persentase Penanganan Lahan dan Hutan terbakar; 2) Jumlah kelompok masyarakat peduli api (MPA) yang aktif;	1) persen; 2) kelompok	1) 0; 2) 0;			1) 100; 2) 5;	5.093.372.350,00	1) 100; 2) 11;	8.088.150.400,00	1) 100; 2) 13;	5.888.150.400,00	1) 100; 2) 15;	5.888.150.400,00	1) 100; 2) 15;	24.957.823.550,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06	SOSIAL					7.838.275.323,00		8.716.566.733,00		10.666.316.825,00		11.514.140.660,00		12.689.140.660,00		51.424.440.201,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL					7.838.275.323,00		8.716.566.733,00		10.666.316.825,00		11.514.140.660,00		12.689.140.660,00		51.424.440.201,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01	DINAS SOSIAL					7.838.275.323,00		8.716.566.733,00		10.666.316.825,00		11.514.140.660,00		12.689.140.660,00		51.424.440.201,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.250.161.851,00	100,00	1.103.629.016,00	100,00	1.392.706.440,00	100,00	1.621.556.440,00	100,00	1.621.556.440,00	100	6.989.610.187,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	60	75	467.796.090,00	80,00	236.614.110,00	85,00	820.902.660,00	90,00	663.752.660,00	95,00	663.752.660,00	95	2.852.818.180,00	DINAS SOSIAL
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur ASN	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	84	85	69.570.000,00	85,00		85,00	100.000.000,00	86,00	178.299.560,00	86,00	178.299.560,00	86	526.169.120,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) persen; 2) persen; 3) persen	1) 100; 2) 100; 3) 0	1) 100; 2) 100; 3) 0	108.175.200,00	1) 100; 2) 100; 3) 0	1.958.451.588,00	1) 100; 2) 100; 3) 0	200.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	250.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	250.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	2.766.626.788,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	persentase pemberdayaan sosial bagi PMKS	Persen	68,2	70,00	0,00	85,00	89.083.600,00							85,00	89.083.600,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase rehabilitasi sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan dan perlakuan salah	Persen	50	60,00	421.988.300,00	70,00	319.294.500,00							70,00	741.282.800,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase pembinaan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma	Persen	30	43,00	492.134.977,00	60,00	379.950.059,00							60,00	872.085.036,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	100	100,00	1.295.618.874,00	100,00	1.167.675.713,00	100,00	1.015.000.000,00	100,00	1.015.000.000,00	100,00	1.165.000.000,00	100,00	5.658.294.587,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial	Persen	35	50,00	204.539.000,00	65,00	232.881.600,00							65,00	437.420.600,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	15	24,00	33.659.400,00	39,00	206.983.400,00							39,00	240.642.800,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22	Program Bena Kampung Etam (Desa Berketahanan Sosial)	Persentase desa berketahanan sosial	Persen	21	41,00	120.800.000,00	60,00	168.097.800,00							60,00	288.897.800,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23	Program Bantuan dan jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial	Persen	100	100,00	2.972.074.431,00	100,00	2.617.129.547,00							100,00	5.589.203.978,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial	Cakupan penyuluhan sosial	Kali	20	20,00	0,00	41,00	73.000.000,00							41,00	73.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 25	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Presentase pelestarian nilai-nilai keprintisan dan kesetiakawanan sosial	Persen	100	100,00	401.757.200,00	100,00	163.775.800,00							100,00	565.533.000,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 27	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	1) Persentase PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1) Persen 2) Persen	1) 100 2) 100					1) 100 2) 100	1.880.000.000,00	1) 100 2) 100	2.120.000.000,00	1) 100 2) 100	2.420.000.000,00	1) 100 2) 100	6.420.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 29	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; 2) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat	1) persen; 2) persen	1) 100 2) 100					1) 100; 2) 100	3.412.846.000,00	1) 100; 2) 100	2.000.000.000,00	1) 100; 2) 100	2.300.000.000,00	1) 100; 2) 100	7.712.846.000,00	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06 . 1.06.01 . 01 . 30	Program Pemberdayaan Sosial	1) Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2) Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3) Persentase jumlah veteran dan janda veteran yang memperoleh santunan; 4) Persentase pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	1) persen; 2) persen; 3) persen; 4) persen	1) 0 2) 12; 3) 100; 4) 0					1) 20; 2) 10; 3) 100; 4) 0	550.000.000,00	1) 20; 2) 10; 3) 100; 4) 26	975.532.000,00	1) 20; 2) 10; 3) 100; 4) 26	1.400.532.000,00	1) 20; 2) 10; 3) 100; 4) 26	2.926.064.000,00	DINAS SOSIAL
1.06 . 1.06.01 . 01 . 28	Program Penanganan Fakir Miskin	Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani	Persen	80					90,00	1.294.861.725,00	90,00	2.690.000.000,00	90,00	2.690.000.000,00	90	6.674.861.725,00	DINAS SOSIAL
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					125.502.858.835,00		109.289.912.441,00		236.370.862.334,08		221.549.808.382,00		226.344.629.480,00		919.058.071.472,08		
2.01	TENAGA KERJA					1.119.895.747,00		1.834.653.688,00		4.468.251.769,00		6.197.829.000,00		6.197.829.000,00		19.818.459.204,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.01 . 2.01.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					1.119.895.747,00		1.834.653.688,00		4.468.251.769,00		6.197.829.000,00		6.197.829.000,00		19.818.459.204,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.01 . 2.01.01 . 01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					1.119.895.747,00		1.834.653.688,00		4.468.251.769,00		6.197.829.000,00		6.197.829.000,00		19.818.459.204,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	899.392.185,00	100,00	953.738.263,00	100,00	1.225.727.200,00	100,00	1.625.725.031,00	100,00	1.625.725.031,00	100	6.330.307.710,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	70	70	155.014.662,00	75,00	87.412.475,00	78,00	56.103.969,00	80,00	1.138.746.164,00	85,00	1.138.746.164,00	85,00	2.576.023.434,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	85,95	85,95	0,00	86,39	0,00	87,59	100.000.000,00	88,25	100.000.000,00	88,50	100.000.000,00	88,5	300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 98;	1) 100; 2) 100; 3) 98;	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 98;	453.028.250,00	1) 100; 2) 100; 3) 98;	175.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 98;	275.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	275.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	1.178.028.250,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	3,00	3,00	0,00	3,00	239.231.500,00	3,00	881.000.000,00					3,00	1.120.231.500,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1) Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 2) Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek	1) Persen 2) Persen	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100	65.488.900,00	1) 100 2) 100	101.243.200,00	1) 100 2) 100	150.000.000,00	1) 100 2) 100	475.000.000,00	1) 100 2) 100	475.000.000,00	1) 100 2) 100	1.266.732.100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	0,15							3,00	1.993.357.805,00	3,00	1.993.357.805,00	3	3.986.715.610,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21	Program Pembinaan Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Cakupan pencari kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen	20,50					25,00	1.880.420.600,00	27,00	590.000.000,00	30,00	590.000.000,00	30,00	3.060.420.600,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.952.773.424,00		1.667.495.614,00		3.576.053.800,00		4.613.408.000,00		5.263.408.000,00		17.073.138.838,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 . 2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.952.773.424,00		1.667.495.614,00		3.576.053.800,00		4.613.408.000,00		5.263.408.000,00		17.073.138.838,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 . 2.02.01 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.952.773.424,00		1.667.495.614,00		3.576.053.800,00		4.613.408.000,00		5.263.408.000,00		17.073.138.838,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	593.741.410,00	100,00	714.987.812,00	100,00	829.833.850,00	100,00	967.610.880,00	100,00	967.610.880,00	100	4.073.784.832,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	61,00	61,00	60.994.728,00	61,00	98.162.275,00	80,00	161.219.950,00	81,00	146.500.000,00	85,00	146.500.000,00	85,00	613.376.953,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	85,00	85,03	0,00	85,05	0,00	85,10	100.000.000,00	85,50	100.000.000,00	86,00	100.000.000,00	86,00	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 71.42	0,00	1) 100 2) 100 3) 62.5	262.451.700,00	1) 100 2) 100 3) 62.5	250.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 71.42	100.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 71.42	100.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 71.42	712.451.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1) Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPD; 2) Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif.	1) Persen; 2) Persen.	1)76,85 2) 0,00	1)84,73 2) 2,53	314.326.955,00	1) 100 2) 6,75	275.733.527,00	1) 100 2) 15,19	1.360.000.000,00	1) 100 2) 23,63	1.172.357.000,00	1) 100; 2) 32,07	1.172.357.000,00	1)100 2) 32,07	4.294.774.482,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1) Persentase OPD yang melaksanakan ARG; 2) Persentase PD yang memiliki data gender.	1) Persen; 2) Persen.	1) 68,97; 2) n.a.	1) 74,14 2) 18,97	604.819.200,00	1) 81,03 2) 27,83	0,00	1) 86,21 2) 77,59	0,00	1) 89,66 2) 86,21	550.000.000,00	1) 93,1 2) 93,1	550.000.000,00	1) 93,1 2) 93,1	1.704.819.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di lembaga legislatif dan Eksekutif	Persen	n.a	24,79	79.539.400,00	25,25	38.350.000,00	25,55	200.000.000,00	26,24	150.000.000,00	29,99	700.000.000,00	29,99	1.167.889.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di Bina	Organisasi perempuan	n.a	1	103.087.100,00	3	48.747.100,00	3	275.000.000,00					3	426.834.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19	Program Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak	Persen	16,67	16,67	55.664.631,00	16,67	116.533.200,00	38,89	150.000.000,00	55,56	1.085.000.000,00	72,22	1.085.000.000,00	72,22	2.492.197.831,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan	Persen	n.a	3,7	140.600.000,00	5,08	112.530.000,00	6,96	250.000.000,00	8,84	341.940.120,00	10,72	441.940.120,00	10,72	1.287.010.240,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.03	PANGAN					2.497.401.032,00		1.237.881.029,00		6.292.887.593,00		4.652.886.600,00		4.652.886.600,00		19.333.942.854,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2.03 . 2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN					2.497.401.032,00		1.237.881.029,00		6.292.887.593,00		4.652.886.600,00		4.652.886.600,00		19.333.942.854,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2.03 . 2.03.01 . 01	DINAS KETAHANAN PANGAN					2.497.401.032,00		1.237.881.029,00		6.292.887.593,00		4.652.886.600,00		4.652.886.600,00		19.333.942.854,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	760.213.032,00	100,00	646.554.598,00	100,00	676.417.593,00	100,00	1.136.893.000,00	100,00	1.136.893.000,00	100,00	4.356.971.223,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	70	75	10.410.000,00	80,00	25.000.000,00	85,00	25.000.000,00	90,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	110.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	Nilai	80,00	82,00	0,00	86,40	0,00	87,40	35.000.000,00	88,40	100.000.000,00	89,40	100.000.000,00	89,40	235.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	88.618.500,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	85.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	245.995.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	245.995.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	665.608.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1) Penguatan Kebijakan/ Program/Kegiatan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi Lintas Sektor (Cakupan Regulasi Ketahanan Pangan); 2) Prosentase Ketersediaan pangan utama Beras; 3) Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras); 4) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan); 5) Penanganan Daerah Rawan Pangan (Penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%/tahun); 6) Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (PPH) Konsumsi (Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi); 7) Cakupan Keamanan Pangan segar (%)	1) Regulasi; 2) persen; 3) persen; 4) skor; 5) persen; 6) skor; 7) persen	1) 1; 2) 128.73; 3) 19.83; 4) 87.28; 5) 1; 6) 91.30; 7) n.a	1) 1; 2) 130; 3) 21; 4) 92; 5) 1; 6) 91; 7) 84	1.726.778.000,00	1) 1; 2) 131; 3) 22; 4) 94; 5) 1; 6) 92; 7) 85	477.707.931,00	1) 1; 2) 132; 3) 23; 4) 95; 5) 1; 6) 92; 7) 86	5.471.470.000,00					1) 1; 2) 132; 3) 23; 4) 95; 5) 1; 6) 92; 7) 86	7.675.955.931,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Pangan	1) Prosentase Ketersediaan pangan (Beras); 2) Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV) <10%; 3) Penguatan Cadangan Pangan (beras); 4) Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	1) persen; 2) persen; 3) ton; 4) kelompok	1) 128; 2) <10; 3) n.a; 4) 0							1) 133; 2) <10; 3) 25; 4) 3;	1.775.000.000,00	1) 135; 2) <10; 3) 50; 4) 6;	1.775.000.000,00	1) 135; 2) <10; 3) 75; 4) 9;	3.550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	Program Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Masyarakat	1) Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi; 2) Cakupan Keamanan Pangan segar	1) skor; 2) persen	1) 91.30; 2) 85							1) 92,8; 2) 87	1.369.998.600,00	1) 93; 2) 88	1.369.998.600,00	1) 93; 2) 88	2.739.997.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2.04	PERTANAHAN					1.234.112.375,00		12.502.258.629,00		36.648.289.960,00		47.223.286.115,00		53.783.286.115,00		151.391.233.194,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
2.04 . 2.04.01	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG					1.234.112.375,00		12.502.258.629,00		36.648.289.960,00		47.223.286.115,00		53.783.286.115,00		151.391.233.194,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
2.04 . 2.04.01 . 01	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG					1.234.112.375,00		12.502.258.629,00		36.648.289.960,00		47.223.286.115,00		53.783.286.115,00		151.391.233.194,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	n.a	100	844.875.125,00	100	858.954.327,00	100	1.357.111.044,00	100	1.964.337.500,00	100	1.964.337.500,00	100	6.989.615.496,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	n.a	68	34.518.100,00	72	28.485.000,00	85	70.000.000,00	90	748.278.615,00	95	748.278.615,00	95	1.629.560.330,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.470.000,00	0,00	157.470.000,00	0,00	314.940.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
1	2	3	4	5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai SKP Seluruh ASN	Nilai	n.a	76,00	0,00	78,20	0,00	80,00	0,00	82,00	227.000.000,00	85,00	227.000.000,00	85,00	454.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) n.a 2) n.a 3) 33.34	1) 37.50 2) 100 3) 100	0,00	1) 62.50 2) 100 3) 100	223.717.900,00	1) 100 2) 100 3) 100	126.219.461,00	1) 100 2) 100 3) 100	76.200.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	76.200.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	502.337.361,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Cakupan tertib administrasi Penguasaan Tanah	Persen	n.a			1) 50;	273.932.940,00	1) 75;	141.744.015,00					1) 75;	415.676.955,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat; 2) Persentase Tertib Administrasi Pertanahan; 3) Persentase Penyelesaian Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 8.7; 2) 19.7; 3) 100;	1) 8.7; 2) 75; 3) 100;	354.719.150,00	1) 12.37; 2) 53.84; 3) 95;	11.065.436.362,00	1) 65; 2) 80; 3) 100;	34.853.215.440,00	1) 75; 2) 85; 3) 100;	41.900.000.000,00	1) 100; 2) 90; 3) 100;	40.500.000.000,00	1) 100; 2) 90; 3) 100;	128.673.370.952,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang Terfasilitasi;	Persen	100	64,00	0,00	87,50	51.732.100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	1.651.732.100,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Program Perencanaan Tata Ruang	1) Persentase Rencana Detail yang Telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah 2) Rasio kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit atau survei foto udara terhadap luasan rencana Tata Ruang	1) Persen 2) Persen	n.a					1) 50 2) 0	0,00	1) 80 2) 0	850.000.000,00	1) 100 2) 0	3.750.000.000,00	1) 100 2) 0	4.600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Kecamatan yang Memanfaatkan RTRW / RDTR;	Persen	n.a					50		70	550.000.000,00	100	5.610.000.000,00	100	6.160.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.05	LINGKUNGAN HIDUP					3.912.500.008,00		4.572.008.480,00		24.197.332.984,00		15.383.169.039,00		15.510.171.037,00		63.575.181.548,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					3.912.500.008,00		4.572.008.480,00		24.197.332.984,00		15.383.169.039,00		15.510.171.037,00		63.575.181.548,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					3.912.500.008,00		4.572.008.480,00		24.197.332.984,00		15.383.169.039,00		15.510.171.037,00		63.575.181.548,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.679.900.508,00	100	1.422.456.389,00	100	1.654.923.489,00	100	2.482.455.655,00	100	2.782.455.655,00	100	10.022.191.696,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	35	40	0,00	45	29.942.000,00	50	30.000.000,00	55	55.000.000,00	60	55.000.000,00	60	169.942.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN	Nilai	75	75	17.629.600,00	80	0,00	82	55.000.000,00	85	525.000.021,00	90	225.000.021,00	90	822.629.642,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 90; 2) 100; 3) 94.4.	1) 100; 2) 100; 3) 87.5;	1.262.768.250,00	1) 100; 2) 100; 3) 93;	79.894.700,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	290.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	1.010.000.023,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	1.085.000.021,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	3.727.662.994,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1) Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 2) Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 3) Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen	1) n.a; 2) n.a; 3) 100	1) n.a; 2) n.a; 3) 100	161.922.750,00	1) 73; 2) 18; 3) 100	1.452.022.249,00	1) 80; 2) 20; 3) 100	14.912.342.050,00	1) 75; 2) 22; 3) 100	5.770.713.000,00	1) 74; 2) 24; 3) 100	5.822.715.000,00	1) 74; 2) 24; 3) 100	28.119.715.049,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1) Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan; 2) Indeks emisi GRK; 3) Jumlah rekomendasi izin; 4) Persentase kualitas air dan udara sesuai baku mutu; 5) Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa; 6) Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup; 7) Jumlah masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup. 8) Persentase Ruang Terbuka Hijau	1) Persen; 2) Persen; 3) Rekomendasi; 4) Persen; 5) Ha; 6) Persen; 7) Orang; 8) Persen	1) 100; 2) 0; 3) 40; 4) 0; 5) 0; 6) 0; 7) 107; 8) n.a	1) 100; 2) 0; 3) 40; 4) 0; 5) 0; 6) 0; 7) 107; 8) n.a	317.307.600,00	1) 100; 2) 2; 3) 60; 4) 50; 5) 0; 6) 96; 7) 110; 8) n.a	586.883.412,00	1) 100; 2) 2; 3) 75; 4) 51; 5) 750; 6) 100; 7) 120; 8) n.a	1.540.000.000,00	1) 100; 2) 2; 3) 85; 4) 52; 5) 1500; 6) 100; 7) 125; 8) 20	5.040.000.340,00	1) 100; 2) 2; 3) 95; 4) 53; 5) 2250; 6) 100; 7) 130; 8) 20	5.040.000.340,00	1) 100; 2) 2; 3) 95; 4) 53; 5) 2250; 6) 100; 7) 592; 8) 20	12.524.191.692,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Cakupan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	31.974.400,00							100,00	31.974.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	100	100	50.432.600,00	100	206.225.800,00	100	2.226.025.200,00					100	2.482.683.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 1.04.01 . 01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Cakupan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persen	5	7,00	422.538.700,00	10,00	181.331.700,00	12,00	901.858.740,00					12,00	1.505.729.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25	Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	3	3,00	0,00	3,00	139.471.881,00							3,00	139.471.881,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	18
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Persen	100	100	0,00	100	99.408.200,00							100,00	99.408.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27	Program Rehabilitasi Lahan Kritis	Jumlah luasan lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar	n.a			23,00	342.397.749,00	23,00	2.587.183.505,00	23,00	500.000.000,00	23,00	500.000.000,00	23,00	3.929.581.254,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.997.928.890,00		7.562.332.652,00		12.885.413.344,00		24.395.379.001,00		16.603.198.101,00		68.444.251.988,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					6.997.928.890,00		7.562.332.652,00		12.885.413.344,00		24.395.379.001,00		16.603.198.101,00		68.444.251.988,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.06 . 2.06.01 . 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					6.997.928.890,00		7.562.332.652,00		12.885.413.344,00		24.395.379.001,00		16.603.198.101,00		68.444.251.988,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100,00	1.124.720.840,00	100,00	1.763.421.633,00	100,00	1.900.634.344,00	100,00	2.692.973.160,00	100,00	2.692.973.160,00	100	10.174.723.137,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	80	89,28	3.921.079.516,00	89,99	1.059.311.351,00	90,75	1.174.415.500,00	91,45	532.073.840,00	92,15	532.073.840,00	92	7.218.954.047,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur ASN	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN	Nilai	80,00	86,42	0,00	86,32	0,00	86,52	100.000.000,00	86,63	100.000.000,00	86,71	100.000.000,00	86,71	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 60; 2) 100; 3) 100;	1) 73; 2) 100; 3) 100;	0,00	1) 94; 2) 100; 3) 100;	115.870.443,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	158.579.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	208.579.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	208.579.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	691.607.443,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1) Cakupan KTP Elektronik; 2) Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah; 3) Persentase Pelayanan Akta Kematian; 4) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen; 4) Persen;	1) 86,18 2) 68,00 3) 0 4) 88,41	1) 90; 2) 73; 3) 100; 4) 91;	1.952.128.534,00	1) 94; 2) 78; 3) 100; 4) 95;	4.208.832.250,00	1) 96; 2) 83; 3) 100; 4) 97;	3.740.798.000,00	1) 98; 2) 86; 3) 100; 4) 98;	1.734.931.101,00	1) 99; 2) 88; 3) 100; 4) 99;	1.734.931.101,00	1) 99; 2) 88; 3) 100; 4) 99;	13.371.620.986,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	1) Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi Teknis Kependudukan; 2) Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan;	1) Persen; 2) Persen;	1) 8,73 2) 0	1) 17; 2) 100;	0,00	1) 21; 2) 100;	414.896.975,00	1) 40; 2) 100;	5.810.986.500,00	1) 72; 2) 100;	19.126.821.900,00	1) 100; 2) 100;	11.334.641.000,00	1) 100; 2) 100;	36.687.346.375,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					3.433.087.355,00		2.618.836.413,00		11.573.515.312,00		7.514.193.000,00		7.514.193.000,00		32.653.825.080,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.433.087.355,00		2.618.836.413,00		11.573.515.312,00		7.514.193.000,00		7.514.193.000,00		32.653.825.080,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.433.087.355,00		2.618.836.413,00		11.573.515.312,00		7.514.193.000,00		7.514.193.000,00		32.653.825.080,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persen;	100	100	1.244.424.501,00	100	1.185.207.837,00	100	0,00	100	1.867.624.480,00	100	1.867.624.480,00	100	6.164.881.298,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik;	Persen;	25	25	112.028.141,00	25	9.800.000,00	35	1.536.045.560,00	50	168.420.520,00	75	168.420.520,00	75	1.994.714.741,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	10,00	0,00	5,00	0,00	5,00	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai kinerja SKP;	Persen;	85,00	85,10	0,00	85,15	143.667.100,00	85,20	100.000.000,00	85,25	200.000.000,00	85,50	200.000.000,00	85,50	643.667.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 90 2) 100 3) 100	1) 90 2) 100 3) 100	106.644.900,00	1) 70 2) 100 3) 100	327.027.276,00	1) 90 2) 100 3) 100	200.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	200.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	200.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	1.033.672.176,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1) Persentase PKK Aktif; 2) Persentase Posyandu Aktif; 3) Persentase LPM Berprestasi; 4) Persentase KPM Aktif;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen; 4) Persen;	1) 100; 2) 100; 3) 0; 4) 30;	1) 100; 2) 100; 3) 0; 4) 30;	73.596.600,00	1) 100; 2) 100; 3) 0; 4) 30;	691.850.800,00	1) 100; 2) 100; 3) 40; 4) 50;	1.684.818.752,00	1) 100; 2) 100; 3) 50; 4) 70;	2.222.500.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 60; 4) 80;	2.222.500.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 60; 4) 80;	6.895.266.152,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1) Persentase Perkembangan BUMDes aktif; 2) Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat; 3) Jumlah Pengurus Pengelola Pasar Desa yang aktif;	1) Persen; 2) Kelompok; 3) Kelompok;	1) 34; 2) 45; 3) 20;	1) 34; 2) 45; 3) 20;	269.995.800,00	1) 36; 2) 57; 3) 40;	0,00	1) 52; 2) 120; 3) 60;	1.050.000.000,00	1) 75; 2) 160; 3) 65;	1.007.500.000,00	1) 85; 2) 200; 3) 155;	1.007.500.000,00	1) 85; 2) 200; 3) 155;	3.334.995.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 27	Program pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase tata administrasi pemerintahan desa yang baik	Persen;	n.a							89,00	903.148.000,00	93,00	903.148.000,00	93,00	1.806.296.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 28	Program Pendayagunaan sarana prasarana, sumber daya alam dan Teknologi tepat guna	1) Persentase Desa Pengguna Manfaat TTG; 2) Skor kualitas pemukiman desa;	1) Persen; 2) Persen;	1) n.a 2) n.a							1) 50; 2) 0.7;	945.000.000,00	1) 60; 2) 0.75;	945.000.000,00	1) 60; 2) 0.75;	1.890.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Persen	n.a	40,00	406.654.100,00	40,00	0,00	40,00	400.000.000,00					40,00	806.654.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persen	7,00	40,00	620.750.200,00	40,00	261.283.400,00	53,00	5.652.651.000,00					53,00	6.534.684.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07 . 2.07.01 . 01 . 23	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1) Jumlah Posyantekdes yang aktif 2) Jumlah pengguna manfaat teknologi tepat guna	1) Unit; 2) Orang;	1) 16 2) 45	1) 16 2) 48	339.652.500,00	1) 16 2) 48	0,00	1) 16 2) 55	500.000.000,00					1) 16 2) 55	839.652.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 24	Program Desa Pemberdayaan Masyarakat	1) Persentase Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Desa/Kel 2) Jumlah Desa dan Kelurahan yang mengelola potensi Sumber Daya Alam	1) Persen; 2) Desa/kel;	1) 100 2) 20	1) 100 2) 20	259.340.613,00	1) 100 2) 20	0,00	1) 100 2) 25	400.000.000,00					1) 100 2) 25	659.340.613,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.673.608.487,00		7.354.891.297,00		11.459.363.053,00		8.243.288.000,00		8.243.288.000,00		38.974.438.837,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.673.608.487,00		7.354.891.297,00		11.459.363.053,00		8.243.288.000,00		8.243.288.000,00		38.974.438.837,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.673.608.487,00		7.354.891.297,00		11.459.363.053,00		8.243.288.000,00		8.243.288.000,00		38.974.438.837,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	1.327.465.637,00	100,00	1.380.521.134,00	100,00	2.039.290.053,00	100,00	2.260.020.160,00	100,00	2.260.020.160,00	100,00	9.267.317.144,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	80,00	336.128.600,00	80,00	345.587.000,00	85,00	700.000.000,00	85,00	1.690.000.000,00	90,00	1.690.000.000,00	90,00	4.761.715.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	N.a	N.a	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	80,00	82,00	49.409.600,00	83,00	0,00	85,00	200.000.000,00	87,00	250.000.000,00	89,00	250.000.000,00	89,00	749.409.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 70 2) 80 3) 80	1) 70 2) 80 3) 80	0,00	1) 80 2) 80 3) 80	577.198.800,00	1) 90 2) 80 3) 80	129.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	300.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	300.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	1.306.198.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15	Program Keluarga Berencana	1) Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; 2) Cakupan pelayanan KB baru;	1) Persen; 2) Persen;	n.a	1) 72.71; 2) 15.01;	1.665.340.050,00	1) 73.29; 2) 15.12;	4.782.050.663,00	1) 74.4; 2) 15.25;	850.000.000,00	1) 74.9; 2) 15.57;	828.267.840,00	1) 75.4; 2) 15.65;	828.267.840,00	1) 75.4; 2) 15.65;	8.953.926.393,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Cakupan kelompok remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE;	Persen	n.a	20,00	73.850.400,00	40,00	0,00	60,00	0,00	80,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100	223.850.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01 . 27	Program Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah	Persentase akseptor KB dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang mendapatkan pelayanan ber KB	Persen	n.a	7,50	96.381.000,00	8,60	97.121.000,00							8,60	193.502.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01 . 29	Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi	1) Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Informasi; 2) Persentase Kampung Keluarga Berencana yang bernilai Baik;	1) Kegiatan; 2) Persen;	n.a	1) 1; 2) 10;	125.033.200,00	1) 3; 2) 20;	89.656.500,00	1) 3; 2) 50;	365.000.000,00	1) 3; 2) 80;	450.000.000,00	1) 3; 2) 100;	450.000.000,00	1) 3; 2) 100;	1.479.689.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01 . 30	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB Mandiri; 2) Cakupan Keluarga Anggota BKB yang ber-KB; 3) Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB; 4) Cakupan Keluarga Anggota BKL yang ber-KB;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen; 4) Persen;	n.a	1) 40.1; 2) 84.46; 3) 89.19; 4) 84.46;	0,00	1) 40.3; 2) 85.18; 3) 90.59; 4) 85.18;	82.756.200,00	1) 40.45; 2) 86.18; 3) 92.09; 4) 86.18;	696.510.000,00	1) 40.59; 2) 87.15; 3) 93.59; 4) 87.15;	1.355.000.000,00	1) 40.67; 2) 90.18; 3) 95.05; 4) 90.18;	1.355.000.000,00	1) 40.67; 2) 90.18; 3) 95.05; 4) 90.18;	3.489.266.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08 . 2.08.01 . 01 . 26	Program Pengendalian Penduduk	1) Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah PPKB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk; 2) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);	1) Persen; 2) Persen;	n.a					1) 100; 2) 2.24;	6.479.563.000,00	1) 100; 2) 2.2;	1.035.000.000,00	1) 100; 2) 2.16;	1.035.000.000,00	1) 100; 2) 2.16;	8.549.563.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09	PERHUBUNGAN					72.476.986.748,00		14.907.686.205,00		42.989.122.137,00		26.133.255.280,00		26.333.255.280,00		182.840.305.650,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN					72.476.986.748,00		14.907.686.205,00		42.989.122.137,00		26.133.255.280,00		26.333.255.280,00		182.840.305.650,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.09 . 2.09.01 . 01	DINAS PERHUBUNGAN					72.476.986.748,00		14.907.686.205,00		42.989.122.137,00		26.133.255.280,00		26.333.255.280,00		182.840.305.650,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100,00	3.748.032.045,00	100,00	3.858.731.214,00	100,00	4.204.851.259,00	100,00	6.253.255.280,00	100,00	6.253.255.280,00	100,00	24.318.125.078,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	29	33	347.624.130,00	42,00	369.000.540,00	51,00	359.432.060,00	87,00	7.300.000.000,00	100,00	7.300.000.000,00	100,00	15.676.056.730,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	500.000.000,00	0,05	500.000.000,00	0,05	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	80	81	0,00	82	0,00	83	200.000.000,00	84,00	350.000.000,00	85,00	350.000.000,00	85	900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100; 2) 100; 3) 80;	1) 100; 2) 100; 3) 80;	67.655.119.573,00	1) 100; 2) 100; 3) 80;	8.117.890.610,00	1) 100; 2) 100; 3) 80;	500.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	300.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	300.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	76.873.010.183,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Persen	38,00	41,00	67.885.750,00	44,00	245.570.900,00	63,00	4.220.000.000,00	84,00	1.980.000.000,00	100	1.980.000.000,00	100	8.493.456.650,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persen	50,00	54,00	0,00	55,00	349.713.141,00	65,00	3.050.000.000,00	82,00	1.150.000.000,00	100	1.150.000.000,00	100	5.699.713.141,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Persen	70,00	73,00	584.266.450,00	74,00	0,00	84,00	14.524.838.818,00	94,00	5.500.000.000,00	100	5.700.000.000,00	100	26.309.105.268,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)	Persen	12,00	18,00	53.054.400,00	41,00	383.543.800,00	56,00	2.450.000.000,00	85,00	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	4.286.598.200,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	Persen	16,00	26,00	21.004.400,00	35,00	1.583.236.000,00	69,00	13.480.000.000,00	86,00	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	19.284.240.400,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2.14	STATISTIK					746.643.000,00		0,00		1.362.409.800,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		5.109.052.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.14 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					746.643.000,00		0,00		1.362.409.800,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		5.109.052.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.14 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					746.643.000,00		0,00		1.362.409.800,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		5.109.052.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan Data Statistik Daerah;	1) Persen;	100	100	746.643.000,00	100	0,00	100	1.362.409.800,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	5.109.052.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.689.895.247,00		7.386.048.353,00		15.653.496.908,11		24.463.982.200,00		24.463.982.200,00		76.657.404.908,11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.689.895.247,00		7.386.048.353,00		15.653.496.908,11		24.463.982.200,00		24.463.982.200,00		76.657.404.908,11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.689.895.247,00		7.386.048.353,00		15.653.496.908,11		24.463.982.200,00		24.463.982.200,00		76.657.404.908,11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100	3.348.254.379,00	100	3.340.385.996,00	100	5.081.627.090,00	100	4.191.224.875,00	100	4.191.224.875,00	100	20.152.717.215,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	94,47	94,51	333.325.590,00	94,49	790.526.653,00	94,51	2.451.303.440,00	94,50	1.485.000.000,00	94,51	1.485.000.000,00	94,51	6.545.155.683,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	168.000.000,00	0,000	168.000.000,00	0	336.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	87,30	87,3	0,00	87,39	0,00	87,48	100.000.000,00	87,57	662.796.000,00	87,66	662.796.000,00	87,66	1.425.592.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 100; 2) 100; 3) 100	29.452.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	2.998.727.260,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	174.806.325,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	275.994.325,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	275.994.325,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	3.754.974.235,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1) Cakupan Layanan Sistem Informasi yang terintegrasi; 2) Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan; 3) Cakupan Sistem Informasi E-Government yang aktif; 4) Penerapan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa; 5) Cakupan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen; 4) Persen; 5) Persen;	1) 0 2) 30,56 3) 0 4) 0 5) 94,83	1) 6.85; 2) 72.55; 3) 94.52; 4) 0 5) 0;	138.086.703,00	1) 10.67; 2) 72.55; 3) 94.67; 4) 56.9; 5) 0;	256.408.444,00	1) 23.68; 2) 74.51; 3) 97.37; 4) 100; 5) 37.93;	2.948.560.053,11	1) 46.05; 2) 90.2; 3) 100; 4) 100; 5) 62;	8.875.967.000,00	1) 64.1; 2) 100; 3) 100; 4) 100; 5) 100;	8.875.967.000,00	1) 64.1; 2) 100; 3) 100; 4) 100; 5) 100;	21.094.989.200,11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.25 . 1.25.01 . 01 . 19	Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM;	Persen;	100	100;	0,00	100;	0,00	72.57;	250.000.000,00	93.67;	2.200.000.000,00	100;	2.200.000.000,00	100;	4.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Cakupan advertorial di media elektronik, cetak dan media sosial;	Persen;	86,21	31.03;	840.776.575,00	86.21;	0,00	100;	0,00	100;	6.305.000.000,00	100;	6.305.000.000,00	100;	13.450.776.575,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase aplikasi yang telah diproteksi;	Persen;	n/a					5.26;	4.647.200.000,00	7.89;	300.000.000,00	10;	300.000.000,00	10;	5.247.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					1.441.598.576,00		1.862.170.623,00		5.915.068.663,97		6.650.695.720,00		6.650.695.720,00		22.520.229.302,97	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					1.441.598.576,00		1.862.170.623,00		5.915.068.663,97		6.650.695.720,00		6.650.695.720,00		22.520.229.302,97	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
2.11 . 2.11.01 . 01	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					1.441.598.576,00		1.862.170.623,00		5.915.068.663,97		6.650.695.720,00		6.650.695.720,00		22.520.229.302,97	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	839.936.526,00	100	1.264.975.623,00	100	1.544.077.520,00	100	1.982.932.720,00	100	1.982.932.720,00	100	7.614.855.109,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	80	80	46.590.000,00	80	292.423.100,00	80	1.016.397.000,00	80	343.170.000,00	80	343.170.000,00	80	2.041.750.100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	n.a	0,00	0	0,00	0	90.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	90.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	84	84	0,00	84	0,00	84	100.000.000,00	84	100.000.000,00	84	100.000.000,00	84	300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 100 3) 80	1) 100 2) 100 3) 80	0,00	1) 100 2) 100 3) 80	97.789.900,00	1) 100 2) 100 3) 80	441.783.388,00	1) 100 2) 100 3) 80	441.783.000,00	1) 100 2) 100 3) 80	441.783.000,00	1) 100 2) 100 3) 80	1.423.139.288,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1) Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; 2) Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	1) Persen; 2) Persen	1) 2 2) 2.89	1) 2 2) 2.89	208.402.000,00	1) 2 2) 2.84	0,00	1) 3 2) 3.06	349.500.000,00	1) 3.2 2) 3.28	377.810.000,00	1) 3.2 2) 3.6	377.810.000,00	1) 3.2 2) 3.6	1.313.522.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1) Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi 2) Cakupan Bina UMKM	1) Persen; 2) Bersen	1) 25 2) 11	1) 25 2) 11	75.000.000,00	1) 28 2) 15	206.982.000,00	1) 31 2) 20	843.815.000,00	1) 33 2) 25	1.365.000.000,00	1) 35 2) 30	1.365.000.000,00	1) 35 2) 30	3.855.797.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1) Koperasi Melakukan RAT 2) Koperasi Berprestasi 3) Cakupan Bina Koperasi	1) Persen; 2) Unit; 3) Bersen	1) 28,46 2) 0 3) 0	1) 28,46 2) 0 3) 0	271.670.050,00	1) 29,16 2) 5 3) 2,89	0,00	1) 30,5 2) 5 3) 3,13	1.279.495.755,97	1) 31 2) 5 3) 3,64	1.340.000.000,00	1) 31,5 2) 5 3) 5,26	1.340.000.000,00	1) 31,5 2) 5 3) 5,26	4.231.165.805,97	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Jumlah fasilitas masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru	Orang	0					280	250.000.000,00	300	700.000.000,00	500	700.000.000,00	1080	1.650.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.12	PENANAMAN MODAL					2.272.268.445,00		3.167.402.681,00		5.774.759.080,00		7.557.110.560,00		7.557.110.560,00		26.328.651.326,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					2.272.268.445,00		3.167.402.681,00		5.774.759.080,00		7.557.110.560,00		7.557.110.560,00		26.328.651.326,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					2.272.268.445,00		3.167.402.681,00		5.774.759.080,00		7.557.110.560,00		7.557.110.560,00		26.328.651.326,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	n.a	100	1.057.295.400,00	100	1.338.695.911,00	100	1.925.630.085,00	100	2.652.110.560,00	100	2.652.110.560,00	100	9.625.842.516,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	n.a	70	212.889.545,00	75	157.983.000,00	80	1.930.000.000,00	90	650.000.000,00	90	650.000.000,00	90	3.600.872.545,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	n.a	80	128.970.200,00	82	43.240.800,00	85	300.000.000,00	87	375.000.000,00	90	375.000.000,00	90	1.222.211.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) n.a; 2) n.a; 3) n.a;	1) 80; 2) 100; 3) 100;	49.997.600,00	1) 89; 2) 100; 3) 100;	628.698.100,00	1) 95; 2) 100; 3) 100;	163.655.871,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	350.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	350.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	1.542.351.571,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMDN/PMA	jumlah investor	38	38	313.755.600,00	40	195.415.875,00	42	250.000.000,00	44	1.280.000.000,00	48	1.280.000.000,00	48	3.319.171.475,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Peningkatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan	Jam	n.a							1,00	900.000.000,00	0,97	900.000.000,00	0,97	1.800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 2) Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	1) Rasio 2) Rp	1) n.a 2) 8.618	1) n.a 2) 9.999	178.507.200,00	1) n.a 2) 111.380	91.049.200,00							1) n.a 2) 111.380	269.556.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	70	86,55	219.999.900,00	86,61	591.877.319,00							86,61	811.877.219,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pelayanan Perizinan	Persentase layanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	100	110.853.000,00	100,00	120.442.476,00							100,00	231.295.476,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21	Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan	jam	n.a	1,12	0,00	1,08	0,00	1,04	373.003.188,00					1,04	373.003.188,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22	Program Pengembangan Sistem Evaluasi dan Advokasi Layanan	Penilaian Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha terhadap Pelayanan	Skor	70					83	632.469.936,00	85	500.000.000,00	87	500.000.000,00	87	1.632.469.936,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12 . 2.12.01 . 01 . 23	Program Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang patuh melaporkan Realisasi Investasi secara Periodik (LKPM)	Persen	7,13					7,13	200.000.000,00	10,18	300.000.000,00	13,23	300.000.000,00	13,23	800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					16.860.009.520,00		37.380.138.963,00		45.665.862.900,00		25.387.482.456,00		29.637.482.456,00		154.930.976.295,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					16.860.009.520,00		37.380.138.963,00		45.665.862.900,00		25.387.482.456,00		29.637.482.456,00		154.930.976.295,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					16.860.009.520,00		37.380.138.963,00		45.665.862.900,00		25.387.482.456,00		29.637.482.456,00		154.930.976.295,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	4.460.553.421,00	100	5.750.774.183,00	100	5.583.709.100,00	100	5.740.914.530,00	100	5.740.914.530,00	100	27.276.865.764,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
1	2	3	4	5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	18
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	65	70	263.913.770,00	75	1.352.977.726,00	80	388.600.000,00	90	750.000.000,00	95	750.000.000,00	95	3.505.491.496,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0,00	0,00	41427500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.427.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	88,74	88,76	0,00	88,78	0,00	88,80	284.270.800,00	88,82	679.000.000,00	88,84	679.000.000,00	88,84	1.642.270.800,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 100	3.021.241.400,00	1) 100 2) 100 3) 100	2.343.934.150,00	1) 100 2) 100 3) 100	476.600.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	800.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	800.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	7.441.775.550,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif kepemudaan	Persen	16,4	18,7	2.023.619.200,00	20,6	1.877.176.400,00	24,3	4.548.829.000,00	26,8	3.644.047.906,00	28,5	3.756.109.306,00	28,5	15.849.781.812,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha	Persen	0	5	222.849.100,00	8,33	176.592.716,00	11,90	850.000.000,00	13,22	1.312.061.400,00	14,54	1.200.000.000,00	14,54	3.761.503.216,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase Pencegahan bagi Pemuda (pelajar) terhadap bahaya Narkoba	Persen	33,33			39,58	125.450.000,00	41,67	0,00	45,83	100.000.000,00	50,00	100.000.000,00	50,00	325.450.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	Persen	30,0	32,5	210.634.641,00	35,2	146.469.800,00	37,8	200.000.000,00	42,5	200.000.000,00	45,0	350.000.000,00	45,0	1.107.104.441,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1) Persentase pembinaan atlit lokal ; 2) Jumlah atlet pelajar yang dibina; 3) Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi ; 4) Prosentase Pembinaan Olahraga; 5) Cakupan Pembinaan Atlet Muda; 6) Jumlah Atlet Berprestasi ; 7) Jumlah Prestasi Olahraga.	1) Persen; 2) orang; 3) orang; 4) Persen; 5) Persen; 6) Atlet; 7) Medali.	1) 20; 2) 40; 3) 30; 4) 75.21; 5) 11.43; 6) 75; 7) 100.	1) 30; 2) 40; 3) 278; 4) 77; 5) 16; 6) 8; 7) 8;	4.201.562.163,00	1) 35; 2) 40; 3) 279; 4) 78; 5) 24,84; 6) 730; 7) 2673;	19.954.922.366,00	1) 640; 2) 30; 3) 279; 4) 88; 5) 22; 6) 76; 7) 4.	25.620.000.000,00	1) 40; 2) 52; 3) 279; 4) 77; 5) 34; 6) 34; 7) 50.	7.110.941.150,00	1) 45; 2) 55; 3) 279; 4) 82; 5) 26; 6) 42; 7) 60.	9.560.941.150,00	1) 45; 2) 55; 3) 279; 4) 82; 5) 26; 6) 42; 7) 60.	66.448.366.829,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	Persen	94,37	95,49	636.787.350,00	96,92	3.436.728.422,00	97,74	4.703.854.000,00	98,80	1.930.000.000,00	100	2.830.000.000,00	100	13.537.369.772,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	Kecamatan	16,70	27,78	139.329.200,00	27,78	0,00	50,00	250.000.000,00	55,56	383.654.970,00	66,67	383.654.970,00	66,67	1.156.639.140,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 23	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ke Pramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	Persen	n.a	100	147.689.400,00	100	1.032.904.400,00	100	1.600.000.000,00	100	1.550.000.000,00	100	2.300.000.000,00	100	6.630.593.800,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 24	Program Pemeliharaan Saranan dan Prasaran Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara	Persen	100	100	1.291.004.875,00	100	1.182.208.800,00	100	1.160.000.000,00	100	1.186.862.500,00	100	1.186.862.500,00	100	6.006.938.675,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13 . 2.13.01 . 01 . 25	Program Upaya Pencegahan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Cakupan Pencegahan bagi Pemuda (Pelajar) terhadap bahaya Narkoba	Persen	33,33	33,33	199.397.500,00									0	199.397.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.16	KEBUDAYAAN					375.059.400,00		2.714.670.765,00		3.322.691.314,00		5.650.000.000,00		6.250.000.000,00		18.312.421.479,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.16 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					375.059.400,00		2.714.670.765,00		3.322.691.314,00		5.650.000.000,00		6.250.000.000,00		18.312.421.479,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.16 . 1.01.01 . 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					375.059.400,00		2.714.670.765,00		3.322.691.314,00		5.650.000.000,00		6.250.000.000,00		18.312.421.479,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1)Cakupan pembinaan seni budaya 2)Cakupan Kajian Seni budaya	1)sanggar seni 2)jenis seni budaya	1)10 2)10	1)100 2)55	375.059.400,00	1)100 2)100	2.714.670.765,00	1)100 2)61		1)100 2)65	0,00	1)100 2)68	0,00	1)100 2)68	3.089.730.165,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.16 . 1.01.01 . 01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1)Jumlah Museum yang dikelola 2)Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1)Museum 2)Persen	1)2 2)90	1)2 2)94	0,00	1)2 2)95	0,00	1)2 2)95	2.399.691.314,00	1)2 2)96	0,00	1)2 2)98	0,00	1)2 2)98	2.399.691.314,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.16 . 1.01.01 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1)Jumlah perlindungan karya seni 2)Misi Kesenian Daerah yang di adakan 3)Cakupan Fasilitas seni budaya 4)Cakupan Gelar Seni 5)Jumlah grup kesenian 6)Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya 7)Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya	1)Karya Seni 2)Misi 3)Persen 4)Persen 5)Grup 6)Festival 7)Sarana	1)0 2)0 3)0 4)0 5)0 6)0 7)0	1)0 2)0 3)0 4)0 5)0 6)0 7)0	0,00	1)0 2)0 3)0 4)0 5)0 6)0 7)0	0,00	1)0 2)0 3)0 4)0 5)0 6)0 7)0	923.000.000,00	1) 12; 2) 1; 3) 80; 4) 82; 5) 97; 6) 82; 7) 24.	0,00	1) 12; 2) 1; 3) 80; 4) 82; 5) 97; 6) 84; 7) 26.	0,00	1) 12; 2) 1; 3) 80; 4) 82; 5) 97; 6) 84; 7) 26.	923.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Budaya Daerah	1) Cakupan cagar budaya dan Museum yang dilestarikan dan dikelola; 2) Cakupan Pelestarian Budaya Daerah;	1) Persen; 2) Persen;	1) 1.74; 2) 75;	1) 1.74; 2) 75;	0,00	1) 1.74; 2) 75;	0,00	1) 34.3; 2) 75;	0,00	1) 69.2; 2) 100;	5.650.000.000,00	1) 100; 2) 100;	6.250.000.000,00	1) 100; 2) 100;	11.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.17	PERPUSTAKAAN					247.299.775,00		0,00		257.156.000,00		1.175.040.000,00		1.375.040.000,00		3.054.535.775,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.17 . 2.18.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					247.299.775,00		0,00		257.156.000,00		1.175.040.000,00		1.375.040.000,00		3.054.535.775,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.17 . 2.18.01 . 01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					247.299.775,00		0,00		257.156.000,00		1.175.040.000,00		1.375.040.000,00		3.054.535.775,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.17 . 2.18.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1) Rasio pengunjung perpustakaan per tahun; 2) Persentase perpustakaan desa / taman baca yang aktif.	1) Rasio 2) Persen	1) 0 2) 11	1) 0.57 2) 14	247.299.775,00	1) 0.57 2) 15	0,00	1) 0.58 2) 25	257.156.000,00	1) 0.59 2) 35	1.175.040.000,00	1) 0.6 2) 50	1.375.040.000,00	1) 0.6 2) 50	3.054.535.775,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.18	KEARSIPAN					1.571.790.806,00		2.521.437.049,00		4.329.187.716,00		4.808.803.411,00		4.808.803.411,00		18.040.022.393,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.18 . 2.18.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					1.571.790.806,00		2.521.437.049,00		4.329.187.716,00		4.808.803.411,00		4.808.803.411,00		18.040.022.393,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
1	2	3	4	5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	18
2.18 . 2.18.01 . 01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					1.571.790.806,00		2.521.437.049,00		4.329.187.716,00		4.808.803.411,00		4.808.803.411,00		18.040.022.393,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	76	100	1.097.139.256,00	100,00	902.099.765,00	100,00	1.017.025.916,00	100,00	2.697.828.361,00	100,00	2.697.828.361,00	100	8.411.921.659,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	144.235.150,00	75,00	76.330.900,00	76,00	140.994.000,00	76,00	500.000.000,00	76,00	500.000.000,00	76	1.361.560.050,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.18 . 2.18.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Surat Peringatan	2	1	0,00		0,00		0,00					0	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.18 . 2.18.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	85,65	87	0,00	87,00	0,00	88,00	100.000.000,00	89,00	100.000.000,00	90,00	100.000.000,00	90	300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 0	1) 92 2) 100; 3) 0	84.516.800,00	1) 100;2) 100;3) 0	1.543.006.384,00	1) 100;2) 100;3) 100	250.000.000,00	1) 100;2) 100;3) 100	309.941.800,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	309.941.800,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	2.497.406.784,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.18 . 2.18.01 . 01 . 20	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	1) Jumlah Dokumen Arsip daerah yang akan diselamatkan 2) Jumlah dokumen arsip yang dilestarikan	dokumen	n/a	1) 0 2) 6.100	145.900.000,00	1) 0 2) 0	0,00	1) 10.030 2) 6100	2.474.190.000,00					1) 10.030 2) 6100	2.620.090.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.18 . 2.18.01 . 01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	n/a	41,00	99.999.600,00	50,00	0,00	75,00	346.977.800,00	85,00		95,00		95,00	446.977.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	1) Persentase OPD yang menerapkan Arsip secara baku; 2) Jumlah dokumen arsip yang diselamatkan dan dilestarikan; 3) Cakupan PD yang terkoneksi dengan sistem informasi kearsipan	1) Persen; 2) Dok; 3) Persen.	1) 41 2) 6.100 3) 0							1) 80 2) 10.867 3) 2	1.201.033.250,00	1) 82 2) 10.866 3) 69	1.201.033.250,00	1) 82 2) 10.866 3) 69	2.402.066.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN PILIHAN						475.204.492.718,00		540.010.198.683,50		688.588.437.143,00		516.516.006.248,00		536.211.021.128,00		2.820.331.551.760,50	
3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.568.156.273,00		5.425.436.217,00		41.875.848.954,00		31.351.100.000,00		35.926.100.000,00		120.146.641.444,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.568.156.273,00		5.425.436.217,00		41.875.848.954,00		31.351.100.000,00		35.926.100.000,00		120.146.641.444,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.568.156.273,00		5.425.436.217,00		41.875.848.954,00		31.351.100.000,00		35.926.100.000,00		120.146.641.444,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	90	1.520.370.825,00	90	1.569.887.644,00	90	2.695.000.000,00	90	2.878.750.000,00	90	2.878.750.000,00	90	11.542.758.469,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	80	80	120.947.898,00	80	618.955.648,00	90	1.330.000.000,00	90	551.250.000,00	90	601.250.000,00	90	3.222.403.546,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.18 . 2.18.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	4,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	79	80	0,00	82	0,00	83	175.000.000,00	84	50.000.000,00	85	50.000.000,00	85	275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 50 2) 90 3) 80	1) 70 2) 90 3) 80	34.130.000,00	1) 80 2) 95 3) 80	100.000.000,00	1) 90 2) 100 3) 80	350.000.000,00	1) 95 2) 100 3) 100	820.000.000,00	1) 95 2) 100 3) 100	820.000.000,00	1) 95 2) 100 3) 100	2.124.130.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	67.723	72.533	2.973.438.800,00	73.000	1.896.522.725,00	76.540	25.910.839.384,00					84.070	30.780.800.909,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Budidaya Perikanan	ton	84235,9	92.000	484.290.500,00	104.000,00	1.158.749.000,00	107.120,00	9.494.009.570,00	112.630,00	0,00	118.415,00	0,00	104.000,00	11.137.049.070,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 25	Program penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	Orang	613			100	43.667.400,00	100	0,00	200	4.000.000.000,00	200	4.000.000.000,00	600	8.043.667.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 26	Program Pengembangan Ikan Spesifik Lokal	Cakupan Komoditas Ikan Lokal dibudidayakan	Jenis komoditas	1	1	318.982.250,00									1	318.982.250,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 27	Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kelompok Masyarakat Kelautan Perikanan yang Terbina	Persen	20			1,00	37.653.800,00							1,00	37.653.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 28	Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Budidaya	Cakupan Kelompok Perikanan Terbina Oleh UPTD	kelompok	85	34	115.996.000,00									34	115.996.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 30	Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP	Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan Mandiri	Orang	500					1.000	1.921.000.000,00					1.000	1.921.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Kelautan Perikanan (KP)	Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Kelompok								40,00	1.850.000.000,00	40,00	2.300.000.000,00	40	4.150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program Peningkatan Produksi & Produktifitas Perikanan	1) Produksi Budidaya Perikanan; 2) Produksi Perikanan Tangkap	1) ton; 2) ton	n.a	1) 92000; 2) 72533	0,00	1) 104000; 2) 73000	0,00	1) 107120; 2) 76540	0,00	1) 112630; 2) 80213	21.201.100.000,00	1) 118415; 2) 84070	25.276.100.000,00	1) 118415; 2) 84070	46.477.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.02	PARIWISATA					9.942.594.449,00		10.139.823.446,00		25.592.752.699,00		23.057.177.000,00		23.317.177.000,00		92.049.524.594,00	DINAS PARIWISATA
3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA					9.942.594.449,00		10.139.823.446,00		25.592.752.699,00		23.057.177.000,00		23.317.177.000,00		92.049.524.594,00	DINAS PARIWISATA
3.02 . 3.02.01 . 01	DINAS PARIWISATA					9.942.594.449,00		10.139.823.446,00		25.592.752.699,00		23.057.177.000,00		23.317.177.000,00		92.049.524.594,00	DINAS PARIWISATA
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	3.575.170.669,00	100	2.866.329.705,00	100	2.982.988.000,00	100	3.232.987.000,00	100	3.232.987.000,00	100	15.890.462.374,00	DINAS PARIWISATA
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	15	17,00	438.600.300,00	14,00	191.867.580,00	28,00	192.000.000,00	30,00	542.000.000,00	33,00	542.000.000,00	33,00	1.906.467.880,00	DINAS PARIWISATA
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0	30	37.610.200,00	15		0,00	42		0,00	25		0,00	37.610.200,00	DINAS PARIWISATA
3.02 . 3.02.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	0	84,67	0,00	88,67	0,00	90,67	100.000.000,00	92,67	100.000.000,00	94,67	100.000.000,00	94,67	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 90 2) 100; 3) 100	1) 90 2) 100; 3) 100	0,00	1) 80 2) 100; 3) 100	485.993.400,00	1) 100 2) 100; 3) 100	250.000.000,00	1) 100 2) 100; 3) 100	350.000.000,00	1) 100 2) 100; 3) 100	350.000.000,00	1) 100 2) 100; 3) 100	1.435.993.400,00	DINAS PARIWISATA	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1) Jumlah kunjungan wisatawan 2) Cakupan Layanan Data dan Informasi Pariwisata 3) Jumlah analisis pasar pariwisata	1)Ibrang 2)Bata dan informasi 3)Bokumen	1) 1795245 2) 4 3) 1	1) 1795245 2) 4 3) 1	4.752.723.980,00	1) 1961150 2) 5 3) 1	4.298.645.411,00	1) 2019984 2) 5 3) 1	625.041.000,00	1) 2201783 2) 5 3) 1	2.610.000.000,00	1) 25110033 2) 5 3) 1	2.800.000.000,00	1) 25110033 2) 5 3) 1	15.086.410.391,00	DINAS PARIWISATA	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	1) Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan 2) Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	1)DWTW 2)Persen	1)16 2)2	1) 4 2) 129.24	982.906.200,00	1) 4 2) 89.79	2.128.167.175,00	1) 4 2) 10	5.020.000.000,00	1) 5 2) 1	5.075.000.000,00	1) 5 2) 2	5.075.000.000,00	1) 5 2) 2	18.281.073.375,00	DINAS PARIWISATA	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah Mitra Kelompok	Kelompok Wisata	11			20	155.330.600,00	36	590.000.000,00	41	590.000.000,00	45	590.000.000,00	45	1.925.330.600,00	DINAS PARIWISATA	
3.02 . 1.03.01 . 01 . 18	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisataan	Jumlah sarana prasarana kepariwisataan	Unit	0	0	155.583.100,00	0	13.489.575,00	90	11.132.723.699,00	28	3.624.190.000,00	28	3.694.190.000,00	146	18.620.176.374,00	DINAS PARIWISATA	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	1) Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya 2) Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek 3) Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif	1)Bali 2)Bali 3)Regiatan	1)76 2)0 3)0					1)805 2)8 3)8	4.435.000.000,00	1)810 2)80 3)8	6.608.000.000,00	1)810 2)80 3)7	6.608.000.000,00	1) 401 2) 28 3) 17	17.651.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	Program Pembinaan Industri Pariwisata	1) Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata 2) Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata 3) Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri pariwisata	1)BIP 2)BSP 3)ILP	1)1 2)1 3)2					1)80 2)80 3)8	265.000.000,00	1)80 2)80 3)8	325.000.000,00	1)80 2)80 3)8	325.000.000,00	1)80 2)80 3)8	915.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
3.03	PERTANIAN					29.282.840.047,00		27.416.663.894,00		80.631.356.456,00		93.046.513.000,00		98.569.513.000,00		328.946.886.397,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN, DINAS PERKEBUNAN	
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN					22.446.956.663,00		22.825.951.336,00		61.928.290.686,00		74.879.456.000,00		78.902.456.000,00		260.983.110.685,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
3.03 . 3.03.01 . 01	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN					22.446.956.663,00		22.825.951.336,00		61.928.290.686,00		74.879.456.000,00		78.902.456.000,00		260.983.110.685,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	3.898.898.813,00	100	4.434.554.342,00	100	6.312.020.826,00	100	5.699.456.000,00	100	5.699.456.000,00	100	26.044.385.981,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	70	80	261.567.250,00	85	349.281.029,00	90	1.532.925.000,00	95	12.670.000.000,00	95	12.670.000.000,00	95	27.483.773.279,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	1,94	1,55	0,00	1,16	0,00	0,78	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	80		82,00	0,00	84,00	0,00	85,00	100.000.000,00	87,00	75.000.000,00	90,00	75.000.000,00	90,00	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 90; 2) 75; 3) 100.	1) 92; 2) 80; 3) 100.	0,00	1) 92; 2) 85; 3) 100.	4.151.552.200,00	1) 100; 2) 90; 3) 100.	560.000.000,00	1) 100; 2) 95; 3) 100.	600.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	600.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	5.911.552.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Cakupan penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura (Rasio ketersediaan Alsintan)	Persen	59,38 % (2.989 buah dari kebutuhan 5000 buah)		65,98	72.071.500,00	67,00	723.930.915,00	69,00	4.505.000.000,00			540.000.000,00	69,00	5.841.002.415,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
2.01 . 2.02.01 . 01 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	1) Cakupan Nilai Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Pertumbuhan Nilai pemasaran komoditi pertanian	1) Rp. 2) Persen	1) 2.627.173.415.000 2) n.a	1) 3.393.847.660.258 2) n.a	1.890.000.000,00	1) 3.812.299.421.725 2) n.a	1.890.000.000,00	1) 4.284.951.069.069 2) n.a	1.750.000.000,00	1) 0 2) 12.45	650.000.000,00	1) 0 2) 12.51	650.000.000,00	1) 11.491.098.151.052 2) 12.51	6.830.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian	1) Padi Sawah (Kwt/Ha) 2) Padi Ladang (Kwt/Ha) 3) Kedelai (Kwt/Ha) 4) Kacang Tanah (Kwt/Ha) 5) Ubi Kayu (Kwt/Ha) 6) Ubi Jalar (Kwt/Ha) 7) Padi Sawah (Ton) 8) Padi Ladang (Ton) 9) Kedelai (Ton) 10) Kacang Tanah (Ton) 11) Ubi Kayu (Ton) 12) Ubi Jalar (Ton) 13) Tanaman Buah (Ton) 14) Tanaman Sayuran Dataran Rendah (Ton)	1) Kwt / Ha 2) Kwt / Ha 3) Kwt / Ha 4) Kwt / Ha 5) Kwt / Ha 6) Kwt / Ha 7) Ton 8) Ton 9) Ton 10) Ton 11) Ton 12) Ton 13) Ton 14) Ton	1) 51.13 2) 32.45 3) 14.40 4) 13.27 5) 226.52 6) 108.61 7) 173.848 8) 12.982 9) 154 10) 463 11) 21.701 12) 5.214 13) 62.156 14) 30.032	1) 52.63 2) 34.09 3) 14.44 4) 12.92 5) 238.90 6) 118.45 7) 205.644 8) 15.000 9) 446 10) 659 11) 27.006 12) 6.041 13) 63.230 14) 32.389	3.101.763.700,00	1) 54.13 2) 35.48 3) 14.58 4) 12.95 5) 255.62 6) 118.47 7) 223.404 8) 16.321 9) 476 10) 662 11) 35.176 12) 6.042 13) 63.773 14) 33.636	1.017.234.500,00	1) 55.63 2) 36.76 3) 14.71 4) 12.98 5) 278.63 6) 118.49 7) 235.628 8) 17.645 9) 509 10) 665 11) 45.818 12) 6.043 13) 64.322 14) 34.931	9.458.346.000,00						13.577.344.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1) Pertumbuhan populasi ternak sapi 2) Pertumbuhan Produksi daging ternak 3) Pertumbuhan Produksi telur	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 27.508 (4%) 2) 14.165 (3.7%) 3) 3.522 (2.83%)	1) 34.285 (13.31%) 2) 21.543 (15%) 3) 5.357 (15%)	418.876.650,00	1) 14; 2) 15; 3) 15	1.622.620.250,00	1) 14; 2) 15; 3) 15	5.369.125.000,00	1) 14; 2) 15; 3) 15	6.000.000.000,00	1) 14; 2) 15; 3) 15	7.210.000.000,00	1) 57,906 2) 32,765 3) 8,147	20.620.621.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Penyuluhan	1) Cakupan Demplot Budidaya Tanaman Jagung 2) Cakupan Paket Teknologi Budidaya Tanaman Jagung 3) Cakupan Paket Teknologi Pasca Panen Dan Agroidustri Komoditas Jagung 4) Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diterapkan (Padi, Kedelai) 5) Cakupan Paket Teknologi Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan & Hortikultura 6) Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diterapkan (Aren) 7) Cakupan Paket Teknologi Integrasi Budidaya Tanaman Sawit dengan Sapi Potong	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen; 4) Persen; 5) Persen; 6) Persen; 7) Persen.	1) 50% dari rekomendasi 2) 60 % dari rekomendasi 3) 50% dari rekomendasi 4) 60 % dari rekomendasi 5) 50% dari rekomendasi 6) 50% dari rekomendasi 7) 50% dari rekomendasi	1) 50% dari rekomendasi 2) 60 % dari rekomendasi 3) 50% dari rekomendasi 4) 60 % dari rekomendasi 5) 50% dari rekomendasi 6) 50% dari rekomendasi 7) 50% dari rekomendasi	41.543.300,00	1) 75; 2) 80; 3) 75; 4) 80; 5) 65; 6) 65; 7) 65.	0,00	1) 75; 2) 80; 3) 75; 4) 80; 5) 75; 6) 75; 7) 75.	350.000.000,00					1) 90% dari rekomendasi 2) 95% dari rekomendasi 3) 90% dari rekomendasi 4) 95% dari rekomendasi 5) 90% dari rekomendasi 6) 90% dari rekomendasi 7) 90% dari rekomendasi	391.543.300,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.03 . 3.03.01 . 01 . 32	Program Revolusi Jagung	1) Pertumbuhan Produksi tanaman jagung 2) Produktivitas Jagung (kw/ha)	1) Persen/Ton; 2) kw/ha;	1) 1.576 Ton 2) 37,52 Kw./Ha.	1) 70; 2) 39.40	820.885.500,00	1) 70; 2) 40.99	1.279.764.200,00	1) 75; 2) 42.22	9.493.858.860,00	1) 75; 2) 43.49	8.235.000.000,00	1) 75; 2) 44.79	8.235.000.000,00	1) 75; 2) 44.79	28.064.508.560,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.03 . 3.03.01 . 01 . 36	Program Pelestarian Sumber Daya Lokal Komoditas Peternakan	Pertumbuhan populasi ternak Kerbau dan sapi Kalang (10%/Tahun)	Persen	1257	1.521 (10%)	74.738.700,00									2.227 (10%)	74.738.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.03 . 3.03.01 . 01 . 41	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	Penambahan luas areal pertanian yang terlayani jaringan irigasi dan jalan pertanian	Persen	0,7 % (Penambahan luas areal terlayani = 119 Ha. dari 16.000 Ha lahan)	20,00	2.567.039.100,00	22,00	707.013.900,00	25,00	4.469.065.000,00				670.000.000,00	25,00	8.413.118.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	1) Padi Sawah 2) Padi Ladang 3) Kedelai 4) Kacang Tanah 5) Ubi Kayu 6) Ubi Jalar 7) Padi Sawah 8) Padi Ladang 9) Kedelai 10) Kacang tanah 11) Ubi Kayu 12) Ubi Jalar 13) Tanaman Buah 14) Tanaman Sayuran Dataran Rendah 15) Rasio Ketersediaan ALSINTAN 16) Produksi Padi Sawah 17) Produksi Padi Ladang	1) Kwt/Ha; 2) Kwt/Ha; 3) Kwt/Ha; 4) Kwt/Ha; 5) Kwt/Ha; 6) Kwt/Ha; 7) Ha; 8) Ha; 9) Ha; 10) Ha; 11) Ha; 12) Ha; 13) Ton; 14) Ton; 15) Persen 16) Ton 17) Ton	1) 308.126 Ton 2) 59,38 % (2.989 buah dari kebutuhan 5000 buah) 3) 0,7 % (Penambahan luas areal terlayani = 119 Ha. dari 16.000 Ha lahan)							1) 57.13 2) 37.13 3) 14.85 4) 13.01 5) 309 6) 118.51 7) 43.441 8) 5000 9) 366 10) 513 11) 1.930 12) 510 13) 64.864 14) 36168 15) 70 16) 248179 17) 18565	38.230.000.000,00	1) 58.63 2) 38.87 3) 14.99 4) 13.03 5) 349.49 6) 118.53 7) 44.156 8) 5200 9) 387 10) 515 11) 2.242 12) 510 13) 65.905 14) 37436 15) 72,3 16) 258884 17) 20212	38.923.000.000,00	1) 58.63 2) 38.87 3) 14.99 4) 13.03 5) 349.49 6) 118.53 7) 44.156 8) 5200 9) 387 10) 515 11) 2.242 12) 510 13) 65.905 14) 37436 15) 72,3 16) 258884 17) 20212	77.153.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1) Cakupan Usaha Pengolahan Hasil Produk Peternakan 2) Pertumbuhan Nilai Pemasaran Hasil Komoditi Peternakan	1) Persen 2) Persen	1) 25.00 2) n.a	1) 32.00 2) n.a	1.300.000.000,00	1) 37.00 2) n.a	1.300.000.000,00	1) 43.00 2) n.a	1.250.000.000,00	1) 0 2) 49.00	350.000.000,00	1) 0 2) 57.00	350.000.000,00	1) 0 2) 57.00	4.550.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
2.01 . 2.01.02 . 01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1) Persentase derajat Kesehatan Ternak Sapi potong pada Masyarakat 35%/tahun 2) Persentase Penurunan Tingkat Kematian Ternak	1) Persen 2) Persen	1) 34 2) n.a	1) 35 2) n.a	3.350.000.000,00	1) 35 2) n.a	3.350.000.000,00	1) 35 2) n.a	3.350.000.000,00	1) 0 2) 15	900.000.000,00	1) 0 2) 10	900.000.000,00	1) 17.056 (35%) 2) 10	11.850.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.03 . 3.03.01 . 01 . 35	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Rumah Tangga Peternakan yang menerapkan Teknologi (RTP/tahun)	Unit	354	70	2.000.000.000,00	70	2.000.000.000,00	70	2.000.000.000,00	70,00	0,00	70,00	1.560.000.000,00	704,00	7.560.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.03 . 3.03.01 . 01 . 31	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian	Cakupan petani miskin yang mendapat bantuan modal usaha	Persen	11,31 % (2.785 orang petani TPH miskin yang dibantu modal)	11,31 % (2.785 orang petani TPH miskin yang dibantu modal)	0,00	17,00	0,00	23,00	4.430.000.000,00	26,00	670.000.000,00	30,00	670.000.000,00	30,98 % (7.600 orang petani TPH miskin yang dibantu modal)	5.770.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	Cakupan Penurunan Kemiskinan masyarakat Peternakan	Orang	n.a	150	0,00	150	0,00	150	2.500.000.000,00	150,00	650.000.000,00	0,00	0,00	450,00	3.150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	Program Pengembangan Komoditas Spesifik Lokasi/Tanaman Lokal	Luas tanam komoditas tanaman buah lokal/spesifik lokasi	Ha	2	75	0,00	75	0,00	75	0,00	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00	375	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	1) Cakupan Bina Kelompok Tani (Madya dan Utama) 2) Cakupan Pelayanan Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh	1) Jumlah; 2) Persen.	1) 59 2) 59% (140 desa berpenyuluh)	1) 71 2) 70% (165 desa berpenyuluh)	2.649.572.150,00	1) 93 2) 75	0,00	1) 120 2) 80	4.497.950.000,00					1) 615 2) 95% (225 desa berpenyuluh)	7.147.522.150,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.03 . 3.03.02	DINAS PERKEBUNAN					6.835.883.384,00		4.590.712.558,00		18.703.065.770,00		18.167.057.000,00		19.667.057.000,00		67.963.775.712,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01	DINAS PERKEBUNAN					6.835.883.384,00		4.590.712.558,00		18.703.065.770,00		18.167.057.000,00		19.667.057.000,00		67.963.775.712,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.947.470.444,00	100	1.948.749.621,00	100	2.749.129.200,00	100	3.169.169.000,00	100	3.169.169.000,00	100	12.983.687.265,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	60	65	182.470.200,00	70	247.447.200,00	75	385.130.000,00	80	485.270.000,00	80	485.270.000,00	85	1.785.587.400,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	Nilai	84,9	85	0,00	85	0,00	86	100.000.000,00	87	400.000.000,00	87	400.000.000,00	88	900.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.03 . 3.03.02 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 75; 2) 100; 3) 100	1) 80; 2) 100; 3) 100	1.195.405.000,00	1) 85; 2) 100; 3) 100	1.170.742.800,00	1) 90; 2) 100; 3) 100	503.282.926,00	1) 95; 2) 100; 3) 100	505.400.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	505.400.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	3.880.230.726,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 27	Program Perluasan Komoditas Perkebunan	1) Luas Areal Komoditi Perkebunan; 2) Jumlah Pekebun;	1) ha; 2) kk;	1) 239767; 2) 48758;	1) 252855; 2) 46753;	1.850.153.565,00	1) 255837; 2) 48332;	1.018.652.437,00	1) 257632; 2) 48337;	6.787.273.285,00	1) 259252; 2) 48344;	1.721.692.000,00	1) 261128; 2) 48354;	2.446.692.000,00	1) 261128; 2) 48354;	13.824.463.287,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 28	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Perkebunan	Panjang Jalan Produksi	Meter	n.a	653,80	816.852.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.418.005.000,00					2.053,80	2.234.857.400,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 29	Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Luasan Penurunan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Ha	154,8 Ha (22%)	145,00	0,00	130,00	49.250.000,00	110,00	450.000.000,00					110,00	499.250.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 30	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Penurunan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Kasus	23 Kasus (135%)	21 Kasus (91%)	0,00	19,00	49.935.000,00	17,00	350.000.000,00					17,00	399.935.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 37	Program Peningkatan Kesejahteraan Pekebunan	1) Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pekebun 2) Pertumbuhan Jumlah Pekebun	1) Nilai NTP 2) KK	1) 98,5 (3%) 2) 47.658 KK (3%)	1) 101,6 (3%) 2) 50.565 KK (6%)	0,00	1) 105; 2) 54015 KK	0,00	1) 109; 2) 58122 KK	689.717.074,00					1) 109; 2) 58122 KK	689.717.074,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 39	Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Produktivitas Komoditi Perkebunan	Kg/Ha/Tahun	Sawit : 18.100, Karet : 1.430, Lada : 1.220, Kopi : 350, Kelapa : 1.000, Kakao : 1.195, Aren : 600	Sawit : 18.700, Karet : 1.470, Lada : 1.260, Kopi : 360, Kelapa : 1.060, Kakao : 1.205, Aren : 780	46.996.800,00	Sawit : 19.300, Karet : 1.530, Lada : 1.310, Kopi : 375, Kelapa : 1.130, Kakao : 1.220, Aren : 1.220	52.131.700,00	Sawit : 20.000, Karet : 1.590, Lada : 1.380, Kopi : 395, Kelapa : 1.220, Kakao : 1.240, Aren : 1.350	170.000.000,00					Sawit : 20.000, Karet : 1.590, Lada : 1.380, Kopi : 395, Kelapa : 1.220, Kakao : 1.240, Aren : 1.350	269.128.500,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 40	Program peningkatan produksi perkebunan	1) Produksi Komoditi Perkebunan; 2) PAD Kebun Dinas Perkebunan	1) ton; 2) Rp	1) 1.957.706; 2) 0	1) 2.002.838; 2) 0	796.534.975,00	1) 2.054.870; 2) 0	53.803.800,00	1) 2.147.863; 2) 0	3.680.528.285,00	1) 2.270.682; 2) 415.000.000	10.586.744.000,00	1) 2.576.843; 2) 460.000.000	11.361.744.000,00	1) 13.010.757; 2) 875.000.000	26.479.355.060,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 26	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan	org/perkebun	0					72	1.220.000.000,00	72	698.720.000,00	72	698.720.000,00	216	2.617.440.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02 . 01 . 38	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Harga Pasar Komoditi Perkebunan	Rp / Kg	Sawit Rakyat : 1.258 Sawit PBS : 1.629 Karet : 6.629 Lada : 115.625 Kelapa : 5.375 Kopi : 22.375 Kakao : 25.500 Aren : 18.850	Sawit Rakyat : 1.246 Sawit PBS : 1.629 Karet : 6.536 Lada : 106.825 Kelapa : 4.078 Kopi : 22.821 Kakao : 19.083 Aren : 17.065	0,00	Sawit Rakyat : 954 Sawit PBS : 1.529 Karet : 6.536 Lada : 65.004 Kelapa : 4.078 Kopi : 24.366 Kakao : 20.250 Aren : 17.599	0,00	Sawit Rakyat : 1.000 Sawit PBS : 1.550 Karet : 7.050 Lada : 82.000 Kelapa : 4.277 Kopi : 25.000 Kakao : 22.000 Aren : 18.500	200.000.000,00	Sawit Rakyat : 1.050 Sawit PBS : 1.600 Karet : 7.050 Lada : 100.000 Kelapa : 4.500 Kopi : 26.000 Kakao : 23.000 Aren : 20.000	600.062.000,00	Sawit Rakyat : 1.150 Sawit PBS : 1.650 Karet : 7.400 Lada : 110.000 Kelapa : 4.800 Kopi : 27.000 Kakao : 24.000 Aren : 21.500	600.062.000,00	Sawit Rakyat : 1.150 Sawit PBS : 1.650 Karet : 7.400 Lada : 110.000 Kelapa : 4.800 Kopi : 27.000 Kakao : 24.000 Aren : 21.500	1.400.124.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.04	KEHUTANAN					0,00		11.594.400,00		1.406.258.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		4.117.852.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.04 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					0,00		11.594.400,00		1.406.258.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		4.117.852.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.04 . 2.05.01 . 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					0,00		11.594.400,00		1.406.258.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		4.117.852.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.04 . 2.05.01 . 01 . 17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Cakupan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	11.594.400,00							100,00	11.594.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.04 . 2.05.01 . 01 . 22	Program Pemeliharaan, Pengelolaan Dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya Dan Pelestarian Lingkungan	Jumlah kampung iklim Kutai Kartanegara	Desa	n.a			1,00	0,00	2,00	1.406.258.000,00	22,00	1.350.000.000,00	42,00	1.350.000.000,00	42,00	4.106.258.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					14.941.586.489,00		14.123.461.993,00		18.378.222.120,00		24.927.143.064,00		24.672.143.064,00		97.042.556.730,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					14.941.586.489,00		14.123.461.993,00		18.378.222.120,00		24.927.143.064,00		24.672.143.064,00		97.042.556.730,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					14.941.586.489,00		14.123.461.993,00		18.378.222.120,00		24.927.143.064,00		24.672.143.064,00		97.042.556.730,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.083.272.267,00	100	1.219.925.459,00	100	1.297.110.120,00	100	1.847.107.000,00	100	1.847.107.000,00	100	7.294.521.846,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	80	100	29.368.578,00	100	52.482.916,00	100	138.000.000,00	100	138.000.000,00	100	138.000.000,00	100	495.851.494,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0	0	0,00	17,57	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	75	80,00	0,00	82,00	0,00	83,00	50.000.000,00	84,00	50.000.000,00	85,00	50.000.000,00	85,00	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 90 2) 100 3) 100	1) 90 2) 100 3) 100	2.894.634.700,00	1) 90 2) 100 3) 100	3.504.394.200,00	1) 100 2) 100 3) 100	100.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	250.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	250.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	6.999.028.900,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Prosentase Rumah Tangga Berlistrik / Rasio Elektrifikasi	Persen	70% (143.888 KK /Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingkan Total KK Tahun 2015 sebanyak 205.550 KK)	73	0,00	77	0,00	81	600.000.000,00	86	100.000.000,00	90	175.000.000,00	90	875.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01 . 19	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan EBT	Persen	2,4% (4.933 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	2,78 % (5.573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	0,00	3,30	75.834.700,00	6,00	1.200.000.000,00	7,00	860.000.000,00	8,00	530.000.000,00	8% (9.573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	2.665.834.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20	Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah	Cakupan Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah	Persen	32,00			32,00	50.000.000,00	48,00	600.000.000,00	64,00	544.000.000,00	80,00	544.000.000,00	80,00	1.738.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22	Program Pembinaan dan pengembangan Panas Bumi	Persentase Pemanfaatan Panas Bumi di Kabupaten Kutai	Izin	5	5	343.513.350,00	1	97.055.840,00	2	350.000.000,00					5	790.569.190,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
1	2	3	4	5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	18
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	Cakupan LPUJ dalam Kondisi Baik	Persen	60,00	60,00	10.590.797.594,00	60,00	9.123.768.878,00	65,00	13.843.112.000,00	70,00	20.388.036.064,00	80,00	20.388.036.064,00	80	74.333.750.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Cakupan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Persen	n.a							16,00	350.000.000,00	16,00	350.000.000,00	68,00	700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Program penyediaan data, Informasi BBM Tertentu & LPG serta Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)	Cakupan Jenis Data dan Informasi	Persen	LPG : 89,25% (6.852.276 Tabung/Realisasi Kuota LPG tahun 2016 sebanyak 7.677.800 Tabung) BBM : 95,43% (121.886,4 MT BBM/Realisasi kuota BBM 2016 sebanyak 127.719,97 MT)							100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	800.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05 . 3.05.01 . 01 . 25	Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Migas	Persen	100					100,00	200.000.000,00					100,00	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.06	PERDAGANGAN					3.486.707.777,00		4.667.227.301,50		7.587.667.984,00		14.230.000.000,00		17.730.000.000,00		47.701.603.062,50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.06 . 3.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					3.486.707.777,00		4.667.227.301,50		7.587.667.984,00		14.230.000.000,00		17.730.000.000,00		47.701.603.062,50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.06 . 3.07.01 . 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					3.486.707.777,00		4.667.227.301,50		7.587.667.984,00		14.230.000.000,00		17.730.000.000,00		47.701.603.062,50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.06 . 3.07.01 . 01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pertumbuhan pelaku ekonomi yang tertib niaga	Persen	n.a	9,7	211.203.000,00	1,51	1.275.796.955,50	3,23	525.000.000,00	3,13	800.000.000,00	3,13	800.000.000,00	3,13	3.611.999.955,50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.06 . 3.07.01 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor bersih perdagangan	Rupiah	66.210.384.000.000	68.386.360.320.000	44.130.877,00	71.238.057.729.600	35.361.596,00	73.446.923.352.192	207.894.166,00					#####	287.386.639,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.06 . 3.07.01 . 01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1) Pertumbuhan Ekspor 2) Pertumbuhan Pedagang sektor perdagangan Besar dan Eceran 3) Persentase realisasi kerjasama	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen	1) 2; 2) 4,2; 3) 0	1) 2; 2) 4,2; 3) 0	3.167.668.900,00	1) 3; 2) 15,00; 3) 0	3.155.153.450,00	1) 1; 2) 5,00; 3) 30	6.704.773.818,00	1) 0; 2) 58,00; 3) 40	1.080.000.000,00	1) 0; 2) 50,00; 3) 30	980.000.000,00	1) 0; 2) 50,00; 3) 30	15.087.596.168,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.06 . 3.07.01 . 01 . 19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	20	20	63.705.000,00	20	200.915.300,00	33,33	150.000.000,00					33,33	414.620.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar	1) Indeks Kualitas Pasar 2) Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar 3) Pertumbuhan Pendapatan Pasar	1) Skor; 2) Skor; 3) Persen	1) 77,30 2) - 3) (35,10)							1) 80,15 2) 70 3) 19,90	12.350.000.000,00	1) 80,80 2) 85 3) 25,00	15.950.000.000,00	1) 80,80 2) 85 3) 25,00	28.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07	PERINDUSTRIAN					3.662.759.822,00		6.044.300.322,00		10.461.307.259,00		16.038.200.000,00		15.988.200.000,00		52.194.767.403,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07 . 3.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					3.662.759.822,00		6.044.300.322,00		10.461.307.259,00		16.038.200.000,00		15.988.200.000,00		52.194.767.403,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07 . 3.07.01 . 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					3.662.759.822,00		6.044.300.322,00		10.461.307.259,00		16.038.200.000,00		15.988.200.000,00		52.194.767.403,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	3.147.750.697,00	100	4.130.595.407,00	100	5.547.976.782,00	100	7.034.221.280,00	100	7.034.221.280,00	100	26.894.765.446,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	76,84	100	181.662.625,00	100	692.013.465,00	100	929.532.300,00	100	1.853.978.720,00	100	1.853.978.720,00	100	5.511.165.830,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin	Persen	0	15	0,00	15	0,00	0	0,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0,00	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07 . 3.07.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	83,85	83,86	0,00	84,19	0,00	85,19	100.000.000,00	86,19	650.000.000,00	87,19	650.000.000,00	87,19	1.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1)Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2)Persentase Tindaklanjut temuan audit; 3) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) - 2) 100 3) 100	1) 62 2) 100 3) 100	17.850.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	794.735.800,00	1) 100 2) 100 3) 100	542.161.177,00	1) 100 2) 100 3) 100	800.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	900.000.000,00	1) 100 2) 100 3) 100	3.054.746.977,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1) Pertumbuhan IKM 2) Jumlah Sentra 3) Cakupan Sertifikasi Produk IKM 4) Pertumbuhan Omzet IKM	1) Persen; 2) Kawasan IKM; 3) Persen; 4) Persen.	1) (3,78) 2) - 3) 0% 4) -	1) 2,81 2) 0 3) 0 4) 1,14	255.326.500,00	1) 1,86 2) 0 3) 13 4) 1,21	426.955.650,00	1) 2,05 2) 0 3) 13 4) 3,22	1.695.000.000,00	1) 2,40 2) 1 3) 27 4) 4,89	5.550.000.000,00	1) 2,92 2) 1 3) 27 4) 5,36	5.400.000.000,00	1) 2,92 2) 1 3) 27 4) 5,36	13.327.282.150,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Cakupan Jumlah IKM yang memanfaatkan Teknologi Industri	Persen	12,5	13,6	60.170.000,00	12,6	0,00	25,64	1.546.637.000,00					25,64	1.606.807.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Cakupan pengembangan sentra Industri potensial	Persen	n.a	0	0,00	0	0,00	33,33	100.000.000,00					33,33	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.08	TRANSMIGRASI					0,00		325.092.450,00		630.000.000,00		1.171.420.000,00		1.171.420.000,00		3.297.932.450,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.08 . 2.01.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					0,00		325.092.450,00		630.000.000,00		1.171.420.000,00		1.171.420.000,00		3.297.932.450,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.08 . 2.01.01 . 01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					0,00		325.092.450,00		630.000.000,00		1.171.420.000,00		1.171.420.000,00		3.297.932.450,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.08 . 2.01.01 . 01 . 18	Program Pengembangan Kawasan/ Desa/Kimtrans	Jumlah Kawasan/Desa/Kimstran yang ditata/dibangun	Jumlah kawasan	47	47	0,00	48	325.092.450,00	49	630.000.000,00	51	1.171.420.000,00	52	1.171.420.000,00	52	3.297.932.450,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
URUSAN UNSUR PENUNJANG					408.319.847.861,00		471.856.598.660,00		502.025.023.671,00		311.344.453.184,00		317.486.468.064,00		2.074.833.787.280,00		
0.04	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PERENCANAAN					13.861.103.282,00		11.607.845.693,00		16.645.833.517,00		19.040.588.937,00		19.040.401.336,00		80.195.772.765,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)					13.861.103.282,00		11.607.845.693,00		16.645.833.517,00		19.040.588.937,00		19.040.401.336,00		80.195.772.765,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)					13.861.103.282,00		11.607.845.693,00		16.645.833.517,00		19.040.588.937,00		19.040.401.336,00		80.195.772.765,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100,00	3.515.158.813,00	100,00	3.667.881.532,00	100,00	4.902.097.700,00	100,00	4.771.127.238,00	100,00	4.773.060.237,00	100,00	21.629.325.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	n/a	69,00	804.348.202,00	71,00	647.181.555,00	73,00	1.448.519.286,00	77,00	3.504.611.900,00	82,00	3.153.491.300,00	82,00	9.558.152.243,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur ASN	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n/a	15,00	0,00	10,00	0,00	8,00	0,00	5,00	690.836.599,00	3,00	690.836.599,00	3,00	1.381.673.198,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	n/a	83,00	0,00	83,00	0,00	84,12	300.000.000,00	84,44	509.163.200,00	85,00	509.163.200,00	85,00	1.318.326.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100; 2) 100; 3) 100;	1) 100; 2) 100; 3) 100;	638.243.250,00	1) 90; 2) 100; 3) 100;	205.145.200,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	755.366.531,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	725.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	725.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	3.048.754.981,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi	Tingkat keterisian Data Pembangunan	persen	34	45	718.399.500,00	60	318.823.524,00	75	600.000.000,00					75	1.637.223.024,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21	Program Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah	1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD; 2) Presentase Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD	1) Persen; 2) Persen.	1. 70 2. 70	1. 79 2. 75	4.102.696.003,00	1. 75 2. 75	3.120.000.000,00							1. 75 2. 75	7.222.696.003,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-Rata Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen	80,71	86,00	737.272.667,00	90,00	1.250.000.000,00							90,00	1.987.272.667,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	Rata-Rata Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persen	85,58	77,00	2.092.549.233,00	90,00	750.000.000,00							90,00	2.842.549.233,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rata-Rata Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	Persen	61	89,00	937.620.692,00	81,00	750.000.000,00							81,00	1.687.620.692,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26	Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	persen	70	75,00	314.814.922,00									75,00	314.814.922,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 28	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Fisik Pembangunan Daerah	persen	70	79,00	0,00	75,00	898.813.882,00							75,00	898.813.882,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD ; 2) Presentase Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD;	1) Persen; 2) Persen;	1. 79.02 2. 70.91					1) 100; 2) 98;	4.089.850.000,00	1) 100; 2) 99;	5.139.850.000,00	1) 100; 2) 99;	4.938.850.000,00	1) 100; 2) 99;	14.168.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	Program perencanaan pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;	Persen;	80,71					93,00	1.100.000.000,00	95,00	1.100.000.000,00	97,00	1.100.000.000,00	97,00	3.300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah;	Persen;	61,00					84,00	1.250.000.000,00	86,00	950.000.000,00	88,00	950.000.000,00	88,00	3.150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;	Persen;	85,58					91,00	2.200.000.000,00	92,00	1.650.000.000,00	93,00	2.200.000.000,00	93,00	6.050.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
0.04	UNSUR PENUNJANG FUNGSI KEUANGAN					22.364.768.687,00		23.340.193.045,00		42.821.267.790,00		34.012.412.087,00		34.012.414.567,00		156.551.056.176,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.04 . 4.04.01	BADAN PENDAPATAN DAERAH					7.102.285.522,00		6.969.044.265,00		17.943.308.786,00		15.629.316.000,00		15.629.316.000,00		63.273.270.573,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.04 . 4.04.01 . 01	BADAN PENDAPATAN DAERAH					7.102.285.522,00		6.969.044.265,00		17.943.308.786,00		15.629.316.000,00		15.629.316.000,00		63.273.270.573,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	80	80	4.256.233.070,00	80	3.193.402.775,00	80	4.805.647.542,00	80	4.491.370.000,00	80	4.491.370.000,00	80	21.238.023.387,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	80	80	625.810.752,00	80	1.086.246.657,00	80	3.189.501.200,00	80	3.101.500.000,00	80	3.101.500.000,00	80	11.104.558.609,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	75	0	64.245.600,00	0	253.737.300,00	85	826.090.000,00	87	325.000.000,00	90	325.000.000,00	90	1.794.072.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 100 3) 80	1) 100 2) 100 3) 80	366.712.800,00	1) 100 2) 100 3) 80	1.042.700.400,00	1) 100 2) 100 3) 90	2.279.447.544,00	1) 100 2) 100 3) 95	821.446.000,00	1) 100 2) 100 3) 95	821.446.000,00	1) 100 2) 100 3) 95	5.331.752.744,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Realisasi DBH	Persen	n/a					70	701.315.200,00	70	500.000.000,00	70	500.000.000,00	70	1.701.315.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1) Pertumbuhan pajak 2) Pertumbuhan retribusi 3) Pertumbuhan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1) Persen 2) Persen 3) Persen	1) 50 2) 8 3) 32	1) 50 2) 8 3) 32	1.789.283.300,00	1) 50 2) 8 3) 32	1.392.957.133,00	1) 50 2) 8 3) 32	6.141.307.300,00	1) 50 2) 8 3) 32	6.390.000.000,00	1) 50 2) 8 3) 32	6.390.000.000,00	1) 50 2) 8 3) 32	22.103.547.733,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.01 . 4.04.02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					15.262.483.165,00		16.371.148.780,00		24.877.959.004,00		18.383.096.087,00		18.383.098.567,00		93.277.785.603,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.01 . 4.04.02 . 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)					15.262.483.165,00		16.371.148.780,00		24.877.959.004,00		18.383.096.087,00		18.383.098.567,00		93.277.785.603,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.01 . 4.04.02 . 01 . 16	Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	cakupan layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala Daerah	Persen	n.a	100,00	473.670.964,00									100	473.670.964,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.01 . 4.04.02 . 01 . 26	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	cakupan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persen	n.a	100,00	45.205.498,00									100	45.205.498,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100,00	4.006.576.150,00	100	4.731.847.158,00	100	5.406.603.904,00	100	5.181.583.867,00	100	5.181.583.867,00	100	24.508.194.946,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	83	80,00	497.379.132,00	85	949.944.229,00	90	2.334.300.000,00	95	1.764.772.911,00	95	1.764.775.391,00	95	7.311.171.663,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.04 . 4.04.02 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	10	15,00	0,00	12	65.263.000,00	10	75.000.000,00	7	130.836.480,00	7	130.836.480,00	7	401.935.960,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.04 . 4.04.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	Nilai	85,95	86,89	447.051.800,00	87,14	106.872.600,00	87,14	400.000.000,00	87,39	547.688.145,00	87,39	547.688.145,00	87,39	2.049.300.690,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 100	850.852.051,00	1) 100 2) 100 3) 100	1.431.169.291,00	1) 100 2) 100 3) 100	753.355.100,00	1) 100 2) 100 3) 100	532.428.349,00	1) 100 2) 100 3) 100	685.781.033,00	1) 100 2) 100 3) 100	4.253.585.824,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	1) Penetapan APBD dan APBD Perubahan; 2) Penyampaian LKPD tepat waktu; 3) Penerbitan SP2D tepat waktu	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	58,93	1) 20 2) 20 3) 90	8.941.747.570,00	1) 0 2) 0 3) 90	6.956.394.567,00	1) 0 2) 0 3) 90	10.209.200.000,00	1) 0 2) 0 3) 90	7.119.489.618,00	1) 0 2) 0 3) 90	6.966.136.934,00	1) 0 2) 0 3) 90	40.192.968.689,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah	Cakupan Aset Daerah yang telah dikelola dan dikembangkan	Persen	20,00	60,00	0,00	65	2.129.657.935,00	70	5.699.500.000,00	75	3.106.296.717,00	75	3.106.296.717,00	75	14.041.751.369,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.05	UNSUR PENUNJANG FUNGSI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.831.598.196,00		5.936.958.799,00		11.444.366.206,00		15.597.960.640,00		15.597.960.640,00		53.408.844.481,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.831.598.196,00		5.936.958.799,00		11.444.366.206,00		15.597.960.640,00		15.597.960.640,00		53.408.844.481,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.05 . 4.05.01 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.831.598.196,00		5.936.958.799,00		11.444.366.206,00		15.597.960.640,00		15.597.960.640,00		53.408.844.481,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	1) 100;	1.580.259.520,00	1) 100;	1.600.770.641,00	1) 100;	1.920.151.686,00	1) 100;	2.916.345.240,00	1) 100;	2.916.345.240,00	1) 100;	10.933.872.327,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	1) 80;	199.858.400,00	1) 80;	0,00	1) 80;	167.651.400,00	1) 80;	2.382.504.775,00	1) 80;	2.382.504.775,00	1) 80;	5.132.519.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	1	1) 1;	0,00	1) 1;	0,00	0	0,00	0	0,00	1) 1;	0,00	1) 1;	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	Nilai	80,00	1) 85.76;	0,00	1) 85.78;	0,00	1) 85.8;	250.000.000,00	1) 85.82;	253.375.250,00	1) 85.84;	253.375.250,00	1) 85.84;	756.750.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENUA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 0	1) 72; 2) 100;	149.695.300,00	1) 89; 2) 100;	150.002.600,00	1) 100; 2) 100;	150.000.000,00	1) 100; 2) 100;	150.000.000,00	1) 100; 2) 100;	150.000.000,00	1) 100; 2) 100;	749.697.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	Program Layanan Administrasi Kepegawaian	1) Persentase permohonan layanan mutasi yang selesai sesuai SOP; 2) Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP;	1) Persen; 2) Persen;	1) 60 2) 65	1) 65; 2) 65;	1.896.831.626,00	1) 75; 2) 75;	620.268.777,00	1) 75; 2) 80;	850.000.000,00	1) 80; 2) 85;	850.000.000,00	1) 85; 2) 95;	850.000.000,00	1) 85; 2) 95;	5.067.100.403,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	Program Penyediaan Informasi Kepegawaian	Cakupan Informasi Kepegawaian	Persen	n/a	n/a	0,00	100	257.400.545,00							100,00	257.400.545,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1) Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir; 2) Persentase Bezetting Dalam Pengisian Formasi;	1) Persen; 2) Persen;	1) 45 2) n.a	1) 45; 2) 0;	0,00	1) 75; 2) 80;	0,00	1) 90; 2) 85;	935.000.000,00	1) 95; 2) 90;	1.060.000.000,00	1) 100; 2) 95;	1.060.000.000,00	1) 100; 2) 95;	3.055.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.06 - 4.05.01 - 01 - 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)	1) Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis fungsional dan sertifikasi ; 2) Tingkat pengembangan kompetensi ASN;	1) Persen; 2) Persen;	1) 58 2) n.a	1) 60; 2) 0;	1.004.953.350,00	1) 62; 2) 7;	1.880.159.371,00	1) 65; 2) 23;	4.921.563.120,00	1) 70; 2) 39;	6.585.735.375,00	1) 75; 2) 54;	6.585.735.375,00	1) 75; 2) 54;	20.978.146.591,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.06 - 4.05.01 - 01 - 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1) Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 76; 2) Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan; 3) Persentase perangkat daerah yang memiliki pola karier ASN ;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 80 2) 75 3) n.a	1) 80; 2) 75; 3) 0;	0,00	1) 83; 2) 75; 3) 0;	1.428.356.865,00	1) 86; 2) 80; 3) 25;	2.250.000.000,00	1) 90; 2) 85; 3) 50;	1.400.000.000,00	1) 95; 2) 90; 3) 75;	1.400.000.000,00	1) 95; 2) 90; 3) 75;	6.478.356.865,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.07	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.550.678.336,00		1.664.464.483,00		4.908.979.400,00		4.624.696.441,00		4.624.696.441,00		18.373.515.101,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.07 - 4.07.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.550.678.336,00		1.664.464.483,00		4.908.979.400,00		4.624.696.441,00		4.624.696.441,00		18.373.515.101,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.07 - 4.07.01 - 01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.550.678.336,00		1.664.464.483,00		4.908.979.400,00		4.624.696.441,00		4.624.696.441,00		18.373.515.101,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.07 - 4.07.01 - 01 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persen;	100	100,00	797.251.245,00	100,00	808.619.502,00	100	921.998.000,00	100	1.610.696.541,00	100	1.610.696.541,00	100	5.749.261.829,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.07 - 4.07.01 - 01 - 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik;	Persen;	87,73	86,00	13.621.624,00	87,00	150.221.345,00	87	252.625.000,00	87	563.999.900,00	88	563.999.900,00	88	1.544.467.769,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.01 - 1.01.01 - 01 - 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen;	36	15,00	0,00	10,00	0,00	7	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	100.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.07 - 4.07.01 - 01 - 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP ;	Nilai	n/a	85,90	0,00	86,48	40.837.400,00	87,19	209.000.000,00	87,84	470.000.000,00	88,53	470.000.000,00	88,53	1.189.837.400,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.07 - 4.07.01 - 01 - 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Temuan Audit Yang ditindaklanjuti;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 78 3) 100	1) 86; 2) 78; 3) 100;	0,00	1) 54; 2) 100; 3) 100;	113.762.400,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	120.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	380.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	380.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	993.762.400,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.20 - 1.20.08 - 01 - 16	Program Sistem Inovasi Daerah	Cakupan Inovasi di bidang Teknologi	Persen	n/a	5,00	0,00	14,00	0,00	29	300.000.000,00	67	0,00	100	0,00	100	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.07 - 4.07.01 - 01 - 15	Program Penelitian Umum	1) Cakupan Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan; 2) Cakupan Penelitian bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan ; 3) Cakupan Penelitian dibidang Pemerintahan;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) n.a 2) 0 3) 0	1) 29; 2) 15; 3) 7;	1.739.805.467,00	1) 33; 2) 23; 3) 14;	551.023.836,00	1) 43; 2) 38; 3) 43;	3.005.356.400,00	1) 71; 2) 69; 3) 71;	1.600.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	1.600.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	8.496.185.703,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.02	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN					6.443.145.447,00		6.071.844.285,00		6.535.476.160,00		11.436.546.240,00		11.436.546.240,00		41.923.558.372,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.02 - 4.02.01	INSPEKTORAT KABUPATEN					6.443.145.447,00		6.071.844.285,00		6.535.476.160,00		11.436.546.240,00		11.436.546.240,00		41.923.558.372,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.02 - 4.02.01 - 01	INSPEKTORAT KABUPATEN					6.443.145.447,00		6.071.844.285,00		6.535.476.160,00		11.436.546.240,00		11.436.546.240,00		41.923.558.372,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.02 - 4.02.01 - 01 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persen;	100	100	1.736.220.067,00	100	1.570.297.193,00	100	1.735.476.160,00	100	2.086.546.240,00	100	2.086.546.240,00	100	9.215.085.900,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.02 - 4.02.01 - 01 - 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik;	Persen;	99	90	328.009.186,00	88	368.181.378,00	85	425.000.000,00	84	525.000.000,00	82	525.000.000,00	82	2.171.190.564,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
1.01 - 1.01.01 - 01 - 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen;	8,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.02 - 4.02.01 - 01 - 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP ;	Nilai	86,4	86,4	0,00	87,88	0,00	87,96	100.000.000,00	88,74	950.000.000,00	89,52	950.000.000,00	89,52	2.000.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.02 - 4.02.01 - 01 - 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Temuan Audit Yang ditindaklanjuti;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100; 2) 100; 3) 100;	144.630.800,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	57.844.900,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	100.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	200.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	200.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	702.475.700,00	INSPEKTORAT KABUPATEN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1) Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa ; 2) Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa (Irbn I) ; 3) Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa (Irbn II); 4) Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa (Irbn III); 5) Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa (Irbn IV); 6) Cakupan Implementasi SPIP; 7) Cakupan Implementasi SPIP (Irbn I); 8) Cakupan Implementasi SPIP (Irbn II); 9) Cakupan Implementasi SPIP (Irbn III); 10) Cakupan Implementasi SPIP (Irbn IV);	1) persen; 2) persen; 3) persen; 4) 71 5) persen; 6) persen; 7) persen; 8) 21 9) persen; 10) persen;	1) 100 2) 82 3) 86 4) 71 5) 68 6) 7) 21 8) 21 9) 21 10) 20	1) 76.75; 2) 0; 3) 0; 4) 0; 5) 0; 6) 20.75; 7) 0; 8) 0; 9) 0; 10) 0;	3.202.755.805,00	1) 82; 2) 0; 3) 0; 4) 0; 5) 0; 6) 28.5; 7) 0; 8) 0; 9) 0; 10) 0;	3.655.862.390,00	1) 86.25; 2) 0; 3) 0; 4) 0; 5) 0; 6) 28.5; 7) 0; 8) 0; 9) 0; 10) 0;	3.275.000.000,00	1) 0; 2) 98; 3) 97; 4) 88; 5) 83; 6) 0; 7) 36; 8) 36; 9) 33; 10) 36;	6.575.000.000,00	1) 0; 2) 98; 3) 97; 4) 88; 5) 83; 6) 0; 7) 43; 8) 43; 9) 40; 10) 43;	6.575.000.000,00	1) 0; 2) 98; 3) 97; 4) 88; 5) 83; 6) 0; 7) 43; 8) 43; 9) 40; 10) 43;	23.283.618.195,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16	Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Pengawas	Persen	100	100	344.627.520,00	100,00	180.720.538,00	100,00	250.000.000,00					100,00	775.348.058,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1) Penurunan Kasus Korupsi;	1) Persen;	n.a	1) 66;	686.902.069,00	1) 40;	238.937.886,00	1) 35;	650.000.000,00	1) 33;	1.100.000.000,00	1) 25;	1.100.000.000,00	1) 25;	3.775.839.955,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.01	UNSUR STAF PENDUKUNG KEPALA DAERAH					251.934.371.445,00		248.772.110.377,00		290.801.934.721,00		80.393.070.563,00		80.393.070.563,00		1.016.095.953.509,00	SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DP. KORPRI
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH					250.909.769.925,00		247.684.432.152,00		289.097.835.750,00		77.046.441.439,00		77.046.441.439,00		1.005.586.316.545,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Umum); 2) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Penatausahaan Keuangan); 3) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Perlengkapan);	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 100; 2) 100; 3) 100;							1) 100; 2) 100; 3) 100;	23.236.138.890,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	23.236.138.890,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	46.472.277.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Pemerintahan)	Persen	100	100	114.462.100,00	100	61.664.900,00	100	153.576.500,00					100	329.703.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Organisasi)	Persen	100	100	152.115.327,00	100	110.092.646,00	100	187.496.654,00					100	449.704.627,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Hukum)	Persen	100	100	222.975.520,00	100	118.902.656,00	100	200.000.000,00					100	541.878.176,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Perekonomian)	Persen	100	100	202.345.700,00	100	113.096.764,00	100	200.000.000,00					100	515.442.464,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Pembangunan)	Persen	100	100	141.128.400,00	100	231.741.200,00	100	300.000.000,00					100	672.869.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian SDA)	Persen	100	100	127.779.400,00	100	35.667.700,00	100	127.000.000,00					100	290.447.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Layanan Pengadaan)	Persen	100	100	9.654.000,00	100	181.774.001,00	100	300.000.000,00					100	491.428.001,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Umum)	Persen	100	100	11.820.359.626,00	100	10.278.165.857,00	100	13.477.698.000,00	100		100		100	79.742.428.883,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.20 . 1.20.03 . 03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Perlengkapan)	Persen	100	100	1.239.457.160,00	100	1.642.343.711,00	100	1.776.544.410,00	100		100		100	8.841.723.681,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Penatausahaan Keuangan)	Persen	100	100	4.492.260.214,00	100	4.655.628.356,00	100	4.838.482.020,00	100		100		100	26.263.334.630,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Protokol dan Komunikasi Publik)	Persen	100	100	99.800.900,00	100	93.157.800,00	100	100.000.000,00					100	292.958.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1) Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan; 2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik Bagian Umum;	1) Persen; 2) Persen;	1) 81; 2) 95;							1) 81; 2) 95;	12.389.764.795,00	1) 82; 2) 100;	12.389.764.795,00	1) 82; 2) 100;	24.779.529.590,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Surat Teguran	n.a	3	0,00	2	0,00	2	175.000.000,00	1) 1;	175.000.000,00	0	175.000.000,00	0	525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit;	1) persen; 2) persen; 3) persen;	1) 100; 2) 100; 3) 100;							1) 100; 2) 100; 3) 100;	790.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	790.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	1.580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.04 . 4.01.03 . 10 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	1)Persentase barang bergerak/tidak bergerak dalam kondisi baik 2)Ketersediaan Dokumen ASB dan SHBJ	1) Persen 2) Tersedia/ Tidak Tersedia	1) 99.62 2) Tersedia	1) 99.62 2) Tersedia	1.841.352.092,00	1) 99.61 2) Tersedia	921.269.641,00	1) 99.62 2) Tersedia	1.193.200.000,00	1) 99.57; 2) 1;	1.988.200.000,00	1) 99.57; 2) 1;	1.988.200.000,00	1) 99.57; 2) 1;	7.932.221.733,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 12 . 16	Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Persen	100	100	2.482.906.359,00	80	2.003.050.462,00	100	2.796.549.900,00	1) 100;	3.790.698.700,00	1) 100;	3.790.698.700,00	1) 100;	14.863.904.121,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 17	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	1) Nilai Rata - rata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2) Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi 3) Persentase Nilai SAKIP PD Predikat A	1) Nilai 2) Persen 3) Persen	1) 66.78 2) 0 3) 2	1) 70 2) 94.83 3) 9	783.319.431,00	1) 75 2) 96.55 3) 17	145.370.600,00	1)80 2)77,59 3)25	2.350.000.000,00	1) 85; 2) 96.55; 3) 43;	2.537.496.654,00	1) 90; 2) 98.28; 3) 52;	2.537.496.654,00	1) 90; 2) 98.28; 3) 52;	8.353.683.339,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penataan Wilayah Kab. Kutai Kartanegara	Persen	n/a	100	382.446.700,00	100	293.662.401,00	100	705.670.550,00	1) 100;	1.316.953.900,00	1) 100;	1.316.953.900,00	1) 100;	4.015.687.451,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1) Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP); 2) Persentase publikasi peraturan perundang undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah; 3) Jumlah Pendampingan Penanganan Perkara;	1) Persen; 2) Persen; 3) Jumlah SKK;	1) 100 2) n.a 3) n.a							1) 100; 2) 80; 3) 80;	1.350.000.000,00	1) 100; 2) 90; 3) 90;	1.350.000.000,00	1) 100; 2) 90; 3) 90;	2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	104.963.550,00	100	0,00	100	0,00					100	104.963.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	532.318.000,00	100	137.163.800,00	100	0,00					100	669.481.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 03 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1) Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP) 2) Persentase publikasi peraturan perundang undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah 3) Persentase penyelesaian permasalahan hukum Pemda	1) Persen 2) Persen 3) Persen	1) 100 2) n.a 3) n.a	1) 100 2) 0 3) 85	971.552.033,00	1)100 2)63 3)90	660.442.921,00	1)100 2)70 3)70	1.150.000.000,00					1)100 2)90 3)90	6.831.994.954,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 04 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1) Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP) 2) Persentase publikasi peraturan perundang undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	1) Persen 2) Persen	1) 100 2) n.a 3) n.a	1) 100 2) 0	0,00	1)100 2)63	0,00	1)100 2)70	0,00					0	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	82.725.000,00	100	0,00	100	0,00					100	82.725.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.20 . 1.20.03 . 05 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	82.725.000,00	100	0,00	100	0,00					100	82.725.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 07 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	214.378.300,00	100	100.123.300,00	100	99.000.000,00					100	413.501.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Pemerintah	Persen	n.a	100	93.933.600,00	100	170.550.000,00	100	200.000.000,00	1) 100;	200.000.000,00	1) 100;	200.000.000,00	1) 100;	864.483.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah;	1) Persentase MoU kerjasama Pemerintah Daerah;	Persen	n.a			58	0,00	67	0,00	75	0,00	1) 83;	0,00	1) 83;	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 12 . 23	Program Keprotokolan Daerah	Cakupan Pelayanan Keprotokolan Daerah	Persen	70	72	1.942.667.703,00	60	1.112.556.313,00	100	1.436.850.900,00	1) 100;	1.871.870.900,00	1) 100;	1.871.870.900,00	1) 100;	8.235.816.716,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 08 . 24	Program Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien	Persen	n.a	23	99.518.790,00	8	66.271.500,00	9	400.000.000,00	1) 11;	2.450.000.000,00	1) 13;	2.450.000.000,00	1) 13;	5.465.790.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	1) Cakupan Pelayanan Kesra;	Persen		1) 100;		1) 100;		1) 100;		1) 100;	0,00	1) 100;	0,00	1) 100;	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 12 . 27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rasio Jumlah berita positif di media massa dan online	Rasio	100	100	3.978.236.478,00	100	2.238.074.368,00	100	3.494.360.200,00	1) 100;	8.594.360.200,00	1) 100;	8.594.360.200,00	1) 100;	26.899.391.446,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.02 . 4.01.03 . 06 . 15	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Pembangunan)	Nilai rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Daerah	Nilai Rata-Rata	n/a	n/a	642.847.000,00	75	320.659.210,00	80	755.000.000,00	1) 85;	950.000.000,00	1) 90;	950.000.000,00	1) 90;	3.618.506.210,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.02 . 4.01.03 . 05 . 15	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Perekonomian)	1)Prosentase BUMD Sehat 2)Rekomendasi kebijakan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti 3)Persentase Rekomendasi TPID	1)Persen 2)Persen 3)Persen	1)n/a2)n/a3)n/a	1)n/a 2)n/a 3)n/a	530.441.800,00	1)n/a 2)n/a 3)n/a	181.226.200,00	1)n/a 2)n/a 3)n/a	725.000.000,00	1) 50; 2) 73; 3) 100;	1.450.000.000,00	1) 75; 2) 80; 3) 100;	1.450.000.000,00	1) 75; 2) 80; 3) 100;	4.336.668.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.02 . 4.01.03 . 07 . 15	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian SDA)	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA	Persen	100	100	268.913.000,00	100	243.355.100,00	100	570.000.000,00	1) 100;	1.685.613.000,00	1) 100;	1.685.613.000,00	1) 100;	4.453.494.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Persen	n/a	86	103.819.806,00	87	67.406.801,00	88	325.000.000,00					87	496.226.607,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	Persen	100	100	176.703.200,00	100	110.676.600,00	100	301.513.800,00					100	588.893.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penataan Wilayah Kab. Kutai Kartanegara	Persen	n/a	100	382.446.700,00	100	293.662.401,00	100	705.670.550,00					100	1.381.779.651,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	104.963.550,00	100	0,00	100	0,00					100	104.963.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Pemerintah	Persen	n/a	100	93.933.600,00	100	170.550.000,00	100	200.000.000,00					100	464.483.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21	Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah	Persentase MoU kerjasama Pemerintah Daerah	Persen	n.a	0	113.822.600,00	58,00	103.065.750,00	67,00	746.957.450,00	75,00	873.314.400,00	83,00	873.314.400,00	83	1.835.322.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	152.115.327,00	100,00	110.092.646,00	100,00	187.496.654,00					100	449.704.627,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Surat Teguran	Surat Teguran	n.a	3	1.728.500.145,00	2,00	474.494.500,00	2,00	0,00					2	2.202.994.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Persen	n/a	86	0,00	87,00	0,00	88,00	0,00					87	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	Persen	100	100	178.987.500,00	100,00	189.856.239,00	100,00	0,00					100	368.843.739,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 17	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	1) Nilai Rata - rata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2) Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi 3) Persentase Nilai SAKIP PD Predikat A	1) Nilai 2) Persen 3) Persen	1) 66.78 2) 0 3) 2	1) 70 2) 94.83 3) 9	783.319.431,00	1) 75 2) 96.55 3) 17	145.370.600,00	1)80 2)77,59 3)25	2.350.000.000,00					1)80 2)77,59 3)25	3.278.690.031,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	532.318.000,00	100,00	137.163.800,00							100	669.481.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	222.975.520,00	100,00	118.902.656,00	100,00	200.000.000,00					100	541.878.176,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	Persen	100	100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00					100	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 03 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1) Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP) 2) Persentase publikasi peraturan perundang undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah 3) Persentase penyelesaian permasalahan hukum Pemda	1) Persen 2) Persen 3) Persen	1) 100 2) n.a 3) n.a	1) 100 2) 0 3) 85	971.552.033,00	1)100 2)63 3)90	660.442.921,00	1)100 2)70 3)70	1.150.000.000,00					1)100 2)70 3)70	2.781.994.954,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Persen	n/a	86	339.074.600,00	87,00	100.185.000,00	88,00	250.000.000,00					88	689.259.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	Persen	100	100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00					100	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 04 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1) Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP) 2) Persentase publikasi peraturan perundang undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	1) Persen 2) Persen	1) 100 2) n.a 3) n.a	1) 100 2) 0	0,00	1)100 2)63	0,00	1)100 2)70	0,00					1)100 2)70	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 04 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Kesra	Persen	100	100	11.016.897.876,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.397.030.000,00	100,00	11.397.030.000,00	100	33.810.957.876,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 04 . 25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesra	Persen	100	100	0,00	100	5.029.157.203,00	100	8.997.030.000,00					100	14.026.187.203,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	202.345.700,00	100	139.563.164,00	100	200.000.000,00					100	541.908.864,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Persen	n.a	0	0,00	0,00	0,00	78,50	75.000.000,00					78,5	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peraturan daerah yang disosialisasikan	Persen	n.a	100	82.725.000,00	100	0,00							0	82.725.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 05 . 26	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan obyek kegiatan dan anggaran yang diawasi	Persen	100	100	0,00	100	233.488.800,00							0	233.488.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	141.128.400,00	100	231.741.200,00	100,00	300.000.000,00					100	672.869.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	Persen	100	100	53.774.200,00	100	29.019.000,00							100	82.793.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	127.779.400,00	100	51.067.700,00	100,00	127.000.000,00					100	305.847.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 07 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	Persen	100	100	0,00	100	78.665.000,00							100	78.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 07 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Regulasi Daerah yang disosialisasikan	Persen	90	100	214.378.300,00	100	131.768.100,00	100	99.000.000,00					100	445.146.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	9.654.000,00	100	286.426.872,00	100	300.000.000,00					100	596.080.872,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik Bagian Umum	Persen	80	80	755.726.143,00									80	755.726.143,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01 . 4.01.03 . 08 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Persen	n.a	82,00	9.487.600,00	85,00	203.072.800,00	87,00	100.000.000,00					87,00	312.560.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 08 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	Persen	100	100	0,00	100	183.245.000,00							100	183.245.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Umum	Persen	100	100	11.820.359.626,00	100	11.665.087.311,00	100	13.477.698.000,00					100	36.963.144.937,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik Bagian Umum	Persen	100	100	3.296.474.211,00	100	5.364.257.653,00	100	7.846.702.029,00					100	16.507.433.893,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Surat Teguran	Surat Teguran	n.a	1	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00					0,00	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	Persen	100	100	1.157.841.057,00	100	7.568.125.992,00							100	8.725.967.049,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Perlengkapan	Persen	100	100	1.239.457.160,00	100	1.659.810.311,00	100	1.776.544.410,00					100	4.675.811.881,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan	Persen	92	61	1.120.054.200,00	70,00	121.187.100,00	80,00	1.316.062.600,00					80,00	2.557.303.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 10 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Persen	80	82	104.741.300,00	85,00	41.473.800,00	87,00	150.000.000,00					87	296.215.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	Persen	100	100	8.619.595.675,00	100	1.204.570.800,00	100	445.000.000,00					100	10.269.166.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Penatausahaan Keuangan	Persen	100	100	4.492.260.214,00	100	5.063.988.516,00	100	4.838.482.020,00					100	14.394.730.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 11 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Persen	75,5	80	126.925.200,00	80,50	88.845.600,00	82,00	250.000.000,00					82	465.770.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 11 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset 2) PersentaseTindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen 2) Persen	1) 100 2) n.a	1) 100 2) 100	582.461.500,00	1) 100 2) 100	475.826.200,00	1) 100 2) 100	535.000.000,00					1) 100 2) 100	1.593.287.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 11 . 26	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan obyek kegiatan dan anggaran yang diawasi	Persen	100	100	0,00	100	72.750.000,00							0	72.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	99.800.900,00	100	95.955.600,00	100	100.000.000,00					100	295.756.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 12 . 16	Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Persen	100	100	2.482.906.359,00	100	2.443.302.904,00	100	2.796.549.900,00					100	7.722.759.163,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 12 . 23	Program Keprotokolan Daerah	Cakupan Pelayanan Keprotokolan Daerah	Persen	70	72	1.942.667.703,00	75,00	1.396.037.824,00	77,00	1.436.850.900,00					77	4.775.556.427,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01 . 4.01.03 . 12 . 27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rasio Jumlah berita positif di media massa dan online	Rasio	100	100	2.536.034.678,00	100	2.011.428.671,00	100	6.444.360.200,00					100	10.991.823.549,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.02 . 4.01.03 . 05 . 15	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1)Prosentase BUMD Sehat 2)Rekomendasi kebijakan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti 3)Persentase Rekomendasi TPID	1)Persen 2)Persen 3)Persen	1)n/a 2)n/a 3)n/a	1)n/a 2)n/a 3)n/a	530.441.800,00	1)n/a 2)n/a 3)n/a	181.226.200,00	1)n/a 2)n/a 3)n/a	725.000.000,00					1)n/a 2)n/a 3)n/a	1.436.668.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.04 . 4.01.03 . 09 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Persentase barang bergerak/tidak bergerak dalam kondisi baik	Persen	99,62	99,62	156.760.384.436,00	99,61	171.914.191.869,00	99,62	191.265.288.103,00					99,62	519.939.864.408,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.04 . 4.01.03 . 10 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	1)Persentase barang bergerak/tidak bergerak dalam kondisi baik 2)Ketersediaan Dokumen ASB dan SHBJ	1) Persen 2) Tersedia/ Tidak Tersedia	1) 99.62 2) Tersedia	1) 99.62 2) Tersedia	1.841.352.092,00	1) 99.61 2) Tersedia	921.269.641,00	1) 99.62 2) Tersedia	1.193.200.000,00					1) 99.62 2) Tersedia	3.955.821.733,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.02 . 4.01.05	SEKRETARIAT DP. KORPRI					1.024.601.520,00		1.087.678.225,00		1.704.098.971,00		3.346.629.124,00		3.346.629.124,00		10.509.636.964,00	SEKRETARIAT DP. KORPRI
1.02 . 4.01.05 . 01	SEKRETARIAT DP. KORPRI					1.024.601.520,00		1.087.678.225,00		1.704.098.971,00		3.346.629.124,00		3.346.629.124,00		10.509.636.964,00	SEKRETARIAT DP. KORPRI
1.02 . 4.01.05 . 01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat-obaan dan Perbekalan Kesehatan	Jenis Obat	70	70	318.802.000,00										318.802.000,00	SEKRETARIAT DP. KORPRI
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran;	Persen	100	100	672.338.570,00	100	738.447.470,00	100	861.280.171,00	100	1.222.912.839,00	100	1.222.912.839,00	100	4.717.891.889,00	SEKRETARIAT DP. KORPRI
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi baik;	Persen	n/a	40	23.310.950,00	42	268.804.355,00	59	229.818.800,00	65	139.999.999,00	75	139.999.999,00	75	801.934.103,00	SEKRETARIAT DP. KORPRI
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	2	0	0,00	1,00	80.426.400,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	180.426.400,00	SEKRETARIAT DP. KORPRI
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai kinerja SKP;	Nilai	85,2	85,32	0,00	85,4	0,00	86	385.000.000,00	86,5	118.000.000,00	87	118.000.000,00	85,8	621.000.000,00	SEKRETARIAT DP. KORPRI
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi program dan kegiatan Renstra dan Renja KORPRI; 2) Ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset; 3) Persentase Tindak lanjut temuan Audit;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) 78,13; 2) 100; 3) 0	1) 30,3; 2) 100; 3) 0;	10.150.000,00	1) 57,17; 2) 100; 3) 0;	0,00	1) 59,38; 2) 100; 3) 0;	128.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	207.999.990,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	207.999.990,00	0	554.149.980,00	SEKRETARIAT DP. KORPRI
	Program Peningkatan Pelayanan ASN	1) Persentase Pelayanan Sekretariat Korpri terhadap ASN;	1) Persen;	0							100	1.657.716.296,00	100	1.657.716.296,00	100	3.315.432.592,00	SEKRETARIAT DP. KORPRI
4.03	UNSUR STAF PENDUKUNG DPRD					47.760.987.079,00		52.997.385.586,00		58.123.112.975,00		55.712.970.989,00		55.712.970.989,00		270.307.427.618,00	SEKRETARIAT DPRD
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD					47.760.987.079,00		52.997.385.586,00		58.123.112.975,00		55.712.970.989,00		55.712.970.989,00		270.307.427.618,00	SEKRETARIAT DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01	SEKRETARIAT DPRD					47.760.987.079,00		52.997.385.586,00		58.123.112.975,00		55.712.970.989,00		55.712.970.989,00		270.307.427.618,00	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persen	100	100	8.562.266.547,00	100	8.737.730.795,00	100	10.590.452.265,00	100	9.815.086.401,00	100	9.815.086.401,00	100	47.520.622.409,00	SEKRETARIAT DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik;	Persen	n/a	1) 71.95;	2.356.499.034,00	100	1.642.109.983,00	100	6.513.163.750,00	100	4.707.980.312,00	100	4.707.980.312,00	100	19.927.733.391,00	SEKRETARIAT DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur ASN	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n/a	1	119.330.000,00	0	89.024.400,00	0	793.659.125,00	0	679.372.211,00	0	679.372.211,00	0	2.360.757.947,00	SEKRETARIAT DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP ;	Nilai	70	70	0,00	75,00	67.052.000,00	83,00	459.194.390,00	85,00	1.027.200.000,00	87,00	1.027.200.000,00	87,00	2.580.646.390,00	SEKRETARIAT DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) PersentaseTindak Lanjut Temuan Audit;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen;	1) n.a; 2) 100; 3) na	1) 0; 2) 100; 3) 0;	1.846.061.438,00	1) 95; 2) 100; 3) 0;	8.975.511.636,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	4.804.770.200,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	2.304.476.330,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	2.304.476.330,00	1) 100; 2) 100; 3) 100;	20.235.295.934,00	SEKRETARIAT DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1) Persentase Rapat-Rapat Dewan; 2) Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA; 3) Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat; 4) Persentasi Fasilitasi Protokolер dan Humas DPRD;	1) persen; 2) Persen; 3) persen; 4) persen;	1) 60; 2) 55; 3) n.a; 4) n.a.	1) 60.72; 2) 54; 3) 73.73; 4) 100;	33.168.855.933,00	1) 62.5; 2) 58.82; 3) 74.65; 4) 100;	33.485.956.772,00	1) 65; 2) 60; 3) 77.78; 4) 100;	34.961.873.245,00	1) 76; 2) 65; 3) 79; 4) 100;	37.178.855.735,00	1) 80; 2) 73; 3) 81; 4) 100;	37.178.855.735,00	1) 80; 2) 73; 3) 81; 4) 100;	175.974.397.420,00	SEKRETARIAT DPRD
4.03 . 4.01.04 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi					1.707.974.127,00										1.707.974.127,00	SEKRETARIAT DPRD
4.03	UNSUR KOORDINASI KEWILAYAHAN					58.573.195.389,00		121.465.796.392,00		70.744.052.902,00		90.526.207.287,00		96.668.407.288,00		437.977.659.258,00	KECAMATAN TENGGARONG, KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG, KECAMATAN LOA KULU, KECAMATAN LOA JANAN, KECAMATAN MUARA BADAK, KECAMATAN MARANG KAYU, KECAMATAN MUARA JAWA, KECAMATAN SAMBOJA, KECAMATAN SEBULU, KECAMATAN MUARA KAMAN, KECAMATAN KOTA BANGUN, KECAMATAN MUARA MUNTAI, KECAMATAN KENOHAN, KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KECAMATAN TABANG, KECAMATAN MUARA WIS, KECAMATAN SANGA-SANGA, KECAMATAN ANGGANA
4.01 . 4.01.06	KECAMATAN TENGGARONG					13.489.493.344,00		24.510.690.436,00		14.945.027.278,00		21.434.711.098,00		21.634.711.098,00		96.014.633.254,00	KECAMATAN TENGGARONG
4.01 . 4.01.06 . 01	KECAMATAN TENGGARONG					13.489.493.344,00		24.510.690.436,00		14.945.027.278,00		21.434.711.098,00		21.634.711.098,00		96.014.633.254,00	KECAMATAN TENGGARONG
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100,00	3.400.598.344,00	100,00	3.296.792.136,00	100,00	3.569.964.878,00	100,00	4.495.103.198,00	100	4.495.103.198,00	100	19.257.561.754,00	KECAMATAN TENGGARONG
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100,00	99.710.600,00	0,00	95.128.800,00	0,00	805.331.400,00	0,00	126.537.200,00	0	326.537.200,00	0	1.453.245.200,00	KECAMATAN TENGGARONG
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur ASN	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0,00	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	KECAMATAN TENGGARONG
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset; 3) PersentaseTindak Lanjut Temuan Audit;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) n.a	1) 100; 2) 100; 3) n.a	0,00	1) 100; 2) 100; 3) n.a	12.155.994.450,00	1) 100; 2) 100; 3) n.a	100.000.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	125.000.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	125.000.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	12.505.994.450,00	KECAMATAN TENGGARONG
4.01 . 4.01.06 . 01 . 25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan	Persen	100			0,00	52.506.800,00	0,00		0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	202.506.800,00	KECAMATAN TENGGARONG
4.01 . 4.01.06 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	100	100	116.750.000,00									0,00	116.750.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Pelaksanaan, Peserta, Lembaga, Personil	1 Pelaksanaan, 100 Peserta, 3 Lembaga, 12 personil	0,00	9.872.434.400,00	0,00	8.910.268.250,00	0,00	10.469.731.000,00	0,00	14.800.649.904,00	0,00	14.800.649.904,00	0,00	58.853.733.458,00	KECAMATAN TENGGARONG
	Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Prosentase Masyarakat Miskin di Kecamatan Tenggarong	Persen								70,00	1.812.420.796,00	72,00	1.812.420.796,00	72,00	3.624.841.592,00	KECAMATAN TENGGARONG
4.01 . 4.01.07	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG					751.652.842,00		8.164.073.410,00		1.549.447.160,00		1.749.447.160,00		3.059.447.160,00		15.274.067.732,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
4.01 . 4.01.07 . 01	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG					751.652.842,00		8.164.073.410,00		1.549.447.160,00		1.749.447.160,00		3.059.447.160,00		15.274.067.732,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	95,00	536.511.842,00	95,00	733.938.739,00	98,00	924.447.160,00	100,00	1.174.447.160,00	100,00	1.174.447.160,00	100,00	4.543.792.061,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	65	81,00	76.175.000,00	81,00	202.611.371,00	85,00	200.000.000,00	90,00	195.000.000,00	95,00	295.000.000,00	95,00	968.786.371,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	Surat Peringatan	n.a	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-	10.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Persentase Penyelesaian temuan audit; 3) Persentase ketepatan waktu penvamaian laporan keuangan.	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 0; 2) 0; 3) 0.	0,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	7.172.425.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	63.000.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	13.000.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	13.000.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	7.261.425.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
4.01 . 4.01.07 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	n.a												0,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	95,00	138.966.000,00	95,00	55.098.300,00	95,00	362.000.000,00	95,00	362.000.000,00	100,00	1.572.000.000,00	100,00	2.490.064.300,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
4.01 . 4.01.08	KECAMATAN LOA KULU					1.481.765.197,00		8.447.662.496,00		1.666.125.834,00		1.866.125.768,00		2.166.125.768,00		15.627.805.063,00	KECAMATAN LOA KULU
4.01 . 4.01.08 . 01	KECAMATAN LOA KULU					1.481.765.197,00		8.447.662.496,00		1.666.125.834,00		1.866.125.768,00		2.166.125.768,00		15.627.805.063,00	KECAMATAN LOA KULU
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100,00	686.023.572,00	100,00	894.852.063,00	100,00	861.044.714,00	100,00	1.097.294.698,00	100,00	1.097.294.698,00	100,00	4.636.509.745,00	KECAMATAN LOA KULU
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	65	100,00	81.143.950,00	100,00	208.646.433,00	100,00	148.049.120,00	100,00	150.049.120,00	100,00	150.049.120,00	100,00	737.937.743,00	KECAMATAN LOA KULU
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22.725.000,00	0,00	22.725.000,00	-	45.450.000,00	KECAMATAN LOA KULU
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai SKP	Jumlah Aparatur	n.a	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	KECAMATAN LOA KULU
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Presentase Penurunan Temuan Audit.	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 0; 2) 0; 3) 0.	0,00	1) 0; 2) 100; 3) 0.	6.653.796.700,00	1) 0; 2) 100; 3) 0.	70.000.000,00	1) 100; 2) 0; 3) 0.	20.000.000,00	1) 0; 2) 100; 3) 100.	20.000.000,00	1) 0; 2) 100; 3) 100.	6.763.796.700,00	KECAMATAN LOA KULU
4.01 . 4.01.08 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	n.a												0,00	KECAMATAN LOA KULU
4.01 . 4.01.08 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	100,00	714.597.675,00	100,00	690.367.300,00	100,00	587.032.000,00	100,00	576.056.950,00	100,00	876.056.950,00	100,00	3.444.110.875,00	KECAMATAN LOA KULU
4.01 . 4.01.09	KECAMATAN LOA JANAN					747.874.707,00		2.278.986.749,00		1.314.675.200,00		2.237.883.200,00		2.261.483.200,00		8.840.903.056,00	KECAMATAN LOA JANAN
4.01 . 4.01.09 . 01	KECAMATAN LOA JANAN					747.874.707,00		2.278.986.749,00		1.314.675.200,00		2.237.883.200,00		2.261.483.200,00		8.840.903.056,00	KECAMATAN LOA JANAN
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100,00	587.025.353,00	100,00	602.347.599,00	100,00	687.426.420,00	100,00	1.047.175.200,00	100,00	1.047.175.200,00	100,00	3.971.149.772,00	KECAMATAN LOA JANAN
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Persen	75	0,00	18.986.654,00	0,00	25.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	778.208.000,00	0,00	778.208.000,00	-	1.775.402.654,00	KECAMATAN LOA JANAN
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Persentase Penyelesaian temuan audit; 3) Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 0; 2) 0; 3) 0.	0,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	1.556.656.600,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	132.248.780,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	165.000.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	165.000.000,00	1) 0; 2) 0; 3) 0.	2.018.905.380,00	KECAMATAN LOA JANAN
4.01 . 4.01.09 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	n.a												0,00	KECAMATAN LOA JANAN
4.01 . 4.01.09 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	0,00	141.862.700,00	0,00	94.982.550,00	0,00	320.000.000,00	0,00	247.500.000,00	0,00	271.100.000,00	-	1.075.445.250,00	KECAMATAN LOA JANAN
4.01 . 4.01.10	KECAMATAN MUARA BADAK					1.224.035.940,00		2.409.171.090,00		1.783.695.000,00		2.649.842.000,00		2.649.842.000,00		10.716.586.030,00	KECAMATAN MUARA BADAK
4.01 . 4.01.10 . 01	KECAMATAN MUARA BADAK					1.224.035.940,00		2.409.171.090,00		1.783.695.000,00		2.649.842.000,00		2.649.842.000,00		10.716.586.030,00	KECAMATAN MUARA BADAK
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100,00	876.518.590,00	100,00	1.183.222.390,00	100,00	1.136.593.500,00	100,00	1.386.593.500,00	100,00	1.386.593.500,00	100,00	5.969.521.480,00	KECAMATAN MUARA BADAK
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	75	100,00	87.517.350,00	100,00	169.789.200,00	100,00	148.392.000,00	100,00	814.539.000,00	100,00	814.539.000,00	100,00	2.034.776.550,00	KECAMATAN MUARA BADAK
2.18 . 2.18.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	KECAMATAN MUARA BADAK
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai Kerja SKP	Persen	n.a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	KECAMATAN MUARA BADAK
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Presentase Penurunan Temuan Audit.	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	648.612.500,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	95.662.500,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	45.662.500,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	45.662.500,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	835.600.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
0	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	n.a												0,00	KECAMATAN MUARA BADAK
4.01 . 4.01.10 . 01 . 25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase Ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan	Persen	n.a	100,00	0,00	100,00	72.900.000,00	100,00	68.400.000,00	100,00	68.400.000,00	100,00	68.400.000,00	100,00	278.100.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
4.01 . 4.01.10 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	100,00	260.000.000,00	100,00	334.647.000,00	100,00	334.647.000,00	100,00	334.647.000,00	100,00	334.647.000,00	100,00	1.598.588.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
1	2	3	4	5	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	18
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN MARANG KAYU					978.457.011,00		2.905.674.778,00		1.300.453.000,00		2.303.305.998,00		2.303.305.998,00		9.791.196.785,00	KECAMATAN MARANG KAYU
4.01 . 4.01.11 . 01	KECAMATAN MARANG KAYU					978.457.011,00		2.905.674.778,00		1.300.453.000,00		2.303.305.998,00		2.303.305.998,00		9.791.196.785,00	KECAMATAN MARANG KAYU
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100,00	669.469.311,00	100,00	695.971.178,00	100,00	629.123.360,00	100,00	1.153.823.358,00	100,00	1.153.823.358,00	100,00	4.302.210.565,00	KECAMATAN MARANG KAYU
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	75	100,00	49.027.700,00	100,00	138.880.000,00	100,00	440.329.640,00	100,00	892.382.640,00	100,00	892.382.640,00	100,00	2.413.002.620,00	KECAMATAN MARANG KAYU
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	60.000.000,00	KECAMATAN MARANG KAYU
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	rata-rata kinerja SKP	Nilai	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	KECAMATAN MARANG KAYU
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) tingkat konsentrasi renstra dan renja; 2) ketepatan waktu laporan keuangan dan aset; 3) presentase penurunan temuan audit.	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) %; 2) %; 3) %.	0,00	1) 0; 2) 100; 3) 0.	1.807.514.800,00	1) 0; 2) 100; 3) 0.	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	27.500.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	27.500.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1.862.514.800,00	KECAMATAN MARANG KAYU
0	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	n.a												0,00	KECAMATAN MARANG KAYU
4.01 . 4.01.11 . 01 . 25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	presentase ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan	Persen	n.a	100,00	0,00	100,00	17.400.000,00	100,00	109.600.000,00	100,00	24.600.000,00	100,00	24.600.000,00	100,00	176.200.000,00	KECAMATAN MARANG KAYU
4.01 . 4.01.11 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	tingkat pasrtisipasi masyarakat	Persen	n.a	100,00	259.960.000,00	100,00	245.908.800,00	100,00	121.400.000,00	100,00	175.000.000,00	100,00	175.000.000,00	100,00	977.268.800,00	KECAMATAN MARANG KAYU
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN MUARA JAWA					6.809.922.213,00		15.600.218.400,00		8.936.827.500,00		10.944.741.500,00		10.944.741.500,00		53.236.451.113,00	KECAMATAN MUARA JAWA
4.01 . 4.01.12 . 01	KECAMATAN MUARA JAWA					6.809.922.213,00		15.600.218.400,00		8.936.827.500,00		10.944.741.500,00		10.944.741.500,00		53.236.451.113,00	KECAMATAN MUARA JAWA
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	2.261.010.025,00	100,00	2.426.164.553,00	100,00	3.069.547.500,00	100,00	3.403.187.500,00	100,00	3.403.187.500,00	100,00	14.563.097.078,00	KECAMATAN MUARA JAWA
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	Persen	75	94,12	86.032.188,00	94,12	364.966.322,00	94,55	460.000.000,00	95,00	985.000.000,00	96,33	985.000.000,00	96,33	2.880.998.510,00	KECAMATAN MUARA JAWA
2.18 . 2.18.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	3,61	0,00	3,61	0,00	2,50	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur	Orang	n.a	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	60.000.000,00	62,00	60.000.000,00	62,00	120.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Presentase Penurunan Temuan Audit.	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 67,44; 2) 100; 3) 25.	0,00	1) 90; 2) 100; 3) 25.	7.770.407.525,00	1) 94,4; 2) 100; 3) 50.	80.000.000,00	1) 95; 2) 100; 3) 50.	75.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 50.	75.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 50.	8.000.407.525,00	KECAMATAN MUARA JAWA
4.01 . 4.01.12 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)														0,00	KECAMATAN MUARA JAWA
4.01 . 4.01.12 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	100,00	4.462.880.000,00	100,00	5.038.680.000,00	100,00	5.327.280.000,00	100,00	5.916.554.000,00	100,00	5.916.554.000,00	100	26.661.948.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan	Persen	n.a	50,00		50,00		50,00		85,00	20.000.000,00	87,50	20.000.000,00	87,50	40.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Jumlah Penanganan Warga Miskin Kecamatan	Persen	n.a							100,00	485.000.000,00	100,00	485.000.000,00	100,00	970.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN SAMBOJA					12.915.797.448,00		24.952.484.018,00		15.725.423.238,00		23.721.113.238,00		23.976.113.238,00		101.290.931.180,00	KECAMATAN SAMBOJA
4.01 . 4.01.13 . 01	KECAMATAN SAMBOJA					12.915.797.448,00		24.952.484.018,00		15.725.423.238,00		23.721.113.238,00		23.976.113.238,00		101.290.931.180,00	KECAMATAN SAMBOJA
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	80,00	3.885.567.238,00	80,00	4.093.288.947,00	90,00	4.756.517.238,00	90,00	5.768.717.238,00	90,00	5.768.717.238,00	90,00	24.272.807.899,00	KECAMATAN SAMBOJA
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	75	100,00	42.121.210,00	100,00	850.259.770,00	100,00	942.900.000,00	100,00	2.575.414.000,00	100,00	2.575.414.000,00	100,00	6.986.108.980,00	KECAMATAN SAMBOJA
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	10,00	0,00	8,00	0,00	5,00		4,00	117.138.000,00	3,00	117.138.000,00	3,00	234.276.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai Kinerja SKP	Nilai	n.a	70,00	0,00	70,00	0,00	80,00		80,00	725.000.000,00	80,00	725.000.000,00	80,00	1.450.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Presentase Penurunan Temuan Audit.	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 0; 2) 0; 3) 0.	0,00	1) 100; 2) 90; 3) 100.	10.374.486.844,00	1) 100; 2) 90; 3) 100.	91.400.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	92.100.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	92.100.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	10.650.086.844,00	KECAMATAN SAMBOJA
4.01 . 4.01.13 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)														0,00	KECAMATAN SAMBOJA
4.01 . 4.01.13 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	100,00	8.988.109.000,00	100,00	9.634.448.457,00	100,00	9.934.606.000,00	100,00	11.527.606.000,00	100,00	11.782.606.000,00	100	51.867.375.457,00	KECAMATAN SAMBOJA
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan	Persen	n.a	70,00		70,00		70,00		80,00	100.000.000,00	80,00	100.000.000,00	80,00	200.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	Jumlah Penanganan Warga Miskin Kecamatan	Jumlah Penanganan Warga Miskin Kecamatan	Persen	n.a							100,00	2.815.138.000,00	100,00	2.815.138.000,00	100,00	5.630.276.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN SEBULU					907.955.789,00		2.872.235.206,00		885.653.408,00		1.827.759.619,00		2.227.759.619,00		8.721.363.641,00	KECAMATAN SEBULU
4.01 . 4.01.14 . 01	KECAMATAN SEBULU					907.955.789,00		2.872.235.206,00		885.653.408,00		1.827.759.619,00		2.227.759.619,00		8.721.363.641,00	KECAMATAN SEBULU
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	58,00	431.019.305,00	59,00	470.152.906,00	60,00	615.539.408,00	61,00	1.092.436.831,00	62,00	1.092.436.831,00	62,00	3.701.585.281,00	KECAMATAN SEBULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
1	2	3	4	5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	18
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75	58,00	37.456.000,00	59,00	45.528.000,00	60,00	46.000.000,00	61,00	194.015.190,00	62,00	444.015.190,00	62,00	767.014.380,00	KECAMATAN SEBULU
4.01 . 4.01.14 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	KECAMATAN SEBULU
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata - rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		61,00	72.200.000,00	62,00	72.200.000,00	62,00	144.400.000,00	KECAMATAN SEBULU
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renja dan Renstra; 2) Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentase Penurunan Temuan Audit.	1) Nilai; 2) Nilai; 3) Nilai.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 0; 2) 0; 3) 75.	210.580.484,00	1) 0; 2) 0; 3) 80.	2.132.552.300,00	1) 0; 2) 0; 3) 85.		1) 61; 2) 61; 3) 86.	97.388.800,00	1) 62; 2) 62; 3) 87.	97.388.800,00	1) 62; 2) 62; 3) 87.	2.537.910.384,00	KECAMATAN SEBULU
4.01 . 4.01.14 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	n.a												0,00	KECAMATAN SEBULU
4.01 . 4.01.14 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	58,00	228.900.000,00	59,00	224.002.000,00	60,00	224.114.000,00	61,00	295.851.598,00	62,00	445.851.598,00	62,00	1.418.719.196,00	KECAMATAN SEBULU
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan	Persen	n.a					67,00		68,00	75.867.200,00	72,00	75.867.200,00	72,00	151.734.400,00	KECAMATAN SEBULU
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN MUARA KAMAN					1.218.685.340,00		4.204.459.575,00		1.689.500.000,00		1.889.500.000,00		1.889.500.000,00		10.891.644.915,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 01	KECAMATAN MUARA KAMAN					1.218.685.340,00		4.204.459.575,00		1.689.500.000,00		1.889.500.000,00		1.889.500.000,00		10.891.644.915,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran	Persen	100	100,00	843.610.340,00	100,00	892.676.675,00	100,00	1.048.700.000,00	100,00	1.310.843.000,00	100,00	1.310.843.000,00	100,00	5.406.673.015,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	75	100,00	39.500.000,00	100,00	369.817.300,00	100,00	117.500.000,00	100,00	57.000.000,00	100,00	57.000.000,00	100,00	640.817.300,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.14 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai Kinerja SKP	Nilai	n.a	80,00	0,00	83,00	0,00	85,00		90,00	25.500.000,00	95,00	25.500.000,00	95,00	51.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan waktu laporan Keuangan dan Aset; 3) Persentasee Temuan Audit.	1) Persentase; 2) Persentase; 3) Persentase.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 100; 2) 100; 3) 0.	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 0.	2.557.665.600,00	1) 100; 2) 100; 3) 0.	90.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 0.	51.822.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 0.	51.822.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 0.	2.751.309.600,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	0 Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	n.a												0,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 01 . 25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	n.a			0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	120.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.15 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	50,00	335.575.000,00	50,00	364.300.000,00	50,00	413.300.000,00	100,00	404.335.000,00	100,00	404.335.000,00	100,00	1.921.845.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
4.01 . 4.01.16	KECAMATAN KOTA BANGUN					1.520.711.848,00		2.738.800.301,00		1.580.500.199,00		1.830.500.199,00		1.830.500.200,00		9.501.012.747,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
4.01 . 4.01.16 . 01	KECAMATAN KOTA BANGUN					1.520.711.848,00		2.738.800.301,00		1.580.500.199,00		1.830.500.199,00		1.830.500.200,00		9.501.012.747,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100,00	1.114.544.598,00	100,00	1.090.953.401,00	100,00	1.189.922.396,00	100,00	1.437.822.396,00	100,00	1437822396,00	100,00	6.271.065.187,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	75	100,00	68.256.450,00	100	127.882.300,00	100	85.844.522,00	100,00	87.944.522,00	100	87.944.522,00	100,00	457.872.316,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
4.01 . 4.01.16 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai		80,00	0,00	83,00	0,00	85,00		90,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.		0,00		1.190.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.190.948.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	n.a												0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
4.01 . 4.01.15 . 01 . 25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat													1,00		1,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	50,00	337.910.800,00	50,00	329.016.600,00	59,00	304.733.281,00	100,00	304.733.281,00	100,00	304.733.281,00	100,00	1.581.127.243,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Persen	n.a	0,00							0,00		0,00		0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
4.01 . 4.01.17	KECAMATAN MUARA MUNTAI					1.284.266.574,00		2.119.455.755,00		1.130.072.920,00		1.880.072.920,00		1.880.072.920,00		8.293.941.089,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
4.01 . 4.01.17 . 01	KECAMATAN MUARA MUNTAI					1.284.266.574,00		2.119.455.755,00		1.130.072.920,00		1.880.072.920,00		1.880.072.920,00		8.293.941.089,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	777.093.574,00	100,00	705.993.560,00	100,00	757.372.920,00	100,00	1.053.372.920,00	100,00	1.053.372.920,00	100,00	4.347.205.894,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	85	100	247.173.000,00	100,00	91.897.650,00	100,00	37.700.000,00	100,00	458.700.000,00	100,00	458.700.000,00	100,00	1.294.170.650,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
4.01 . 4.01.17 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai			0,00		0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.		0,00		1.036.568.000,00	100,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.086.568.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
4.01 . 4.01.17 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)							100,00	0,00						0,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
4.01 . 4.01.17 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi Masyarakat	Persen	n.a		260.000.000,00		284.996.545,00	100,00	285.000.000,00	100,00	368.000.000,00		368.000.000,00	100,00	1.565.996.545,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Persen	n.a					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		Persen	n.a					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
4.01 . 4.01.18	KECAMATAN KENOHAN					7.910.671.547,00		1.019.179.292,00		1.268.563.510,00		1.805.200.517,00		1.805.200.517,00		13.808.815.383,00	KECAMATAN KENOHAN
4.01 . 4.01.18 . 01	KECAMATAN KENOHAN					7.910.671.547,00		1.019.179.292,00		1.268.563.510,00		1.805.200.517,00		1.805.200.517,00		13.808.815.383,00	KECAMATAN KENOHAN
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	403.412.075,00	100,00	622.304.902,00	100,00	627.063.510,00	100,00	967.563.517,00	100,00	967.563.517,00	100,00	3.587.907.521,00	KECAMATAN KENOHAN
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	85	100	0,00	100,00	16.420.990,00	100,00	233.000.000,00	100,00	371.637.000,00	100,00	371.637.000,00	100,00	992.694.990,00	KECAMATAN KENOHAN
4.01 . 4.01.17 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a		0,00		0,00		0,00						0,00	KECAMATAN KENOHAN
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai		80	0,00	83,00	0,00	85,00		90,00		95,00		95,00	0,00	KECAMATAN KENOHAN
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 0; 2) 0; 3) 0.	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	83.363.400,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	97.500.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 0.	55.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 0.	55.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 0.	290.863.400,00	KECAMATAN KENOHAN
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen		100	7.507.259.472,00	100,00	297.090.000,00	100,00	311.000.000,00	100,00	336.000.000,00	100,00	336.000.000,00	100,00	8.787.349.472,00	KECAMATAN KENOHAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	Kegiatan			0,00		0,00								0,00	KECAMATAN KENOHAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rata-rata nilai Kinerja SKP	Nilai			0,00		0,00								0,00	KECAMATAN KENOHAN
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan	Persen								100,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	150.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
4.01 . 4.01.19	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT					670.239.425,00		1.225.236.894,00		946.350.000,00		3.243.899.363,00		6.843.899.363,00		12.929.625.045,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
4.01 . 4.01.19 . 01	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT					670.239.425,00		1.225.236.894,00		946.350.000,00		3.243.899.363,00		6.843.899.363,00		12.929.625.045,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	303.780.757,00	100,00	407.507.294,00	100,00	411.523.000,00	100,00	661.523.000,00	100,00	661.523.000,00	100,00	2.445.857.051,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	85	100	56.558.668,00	100,00	71.816.300,00	100,00	42.600.000,00	100,00	42.600.000,00	100,00	42.600.000,00	100,00	256.174.968,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	100	0,00	100	0,00	100		100		100	0,00	100,00	0,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai		100	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
4.01 . 4.01.19 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 100; 2) 100; 3) 100	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	446.487.700,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	99.300.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	100.138.820,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	100.138.820,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	746.065.340,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
4.01 . 4.01.19 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	100											-	0,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
4.01 . 4.01.19 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	100	100	309.900.000,00	100,00	299.425.600,00	100,00	392.927.000,00	100,00	392.927.000,00	100,00	392.927.000,00	100,00	1.788.106.600,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a	100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai Kinerja SKP seluruh ASN Perangkat Daerah	Nilai	n.a		0,00		0,00		0,00				0,00	-	0,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	Cakupan Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	n.a	72		75,00		80,00		42,00	1.048.355.271,00	90,00	4.648.355.271,00	90,00	5.696.710.542,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	Program Pembangunan/Pemeliharaaa saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan	Cakupan drainase dalam kondisi baik & Cakupan gorong-gorong dalam kondisi baik	Persen	n.a	50		55,00		60,00		65,00		70,00	0,00	70,00	0,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	Program Pembangunan / Pemeliharaan Sarana /Prasarana Umum Kecamatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Umum kecamatan dalam kondisi baik	Persen	n.a	33		35,00		40,00		42,00	998.355.272,00	44,00	998.355.272,00	44,00	1.996.710.544,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
4.01 . 4.01.20	KECAMATAN TABANG					635.809.224,00		1.197.423.036,00		8.841.173.000,00		1.805.592.001,00		1.805.592.001,00		14.285.589.262,00	KECAMATAN TABANG
4.01 . 4.01.20 . 01	KECAMATAN TABANG					635.809.224,00		1.197.423.036,00		8.841.173.000,00		1.805.592.001,00		1.805.592.001,00		14.285.589.262,00	KECAMATAN TABANG
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	276.517.224,00	100	302.236.136,00	100	377.396.000,00	100	651.012.401,00	100	651.012.401,00	100	2.258.174.162,00	KECAMATAN TABANG
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	85	100	32.600.000,00	100	28.705.000,00	100	283.000.000,00	100	759.383.600,00	100	759.383.600,00	100	1.863.072.200,00	KECAMATAN TABANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Program Peningkatan disiplin aparatur ASN	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	n.a		0,00		0,00								0,00	KECAMATAN TABANG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai			0,00		0,00								0,00	KECAMATAN TABANG
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Presentase Penurunan Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 100; 2) 100; 3) 100	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	492.119.500,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	50.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	50.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	50.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100	642.119.500,00	KECAMATAN TABANG
4.01 . 4.01.20 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	100												0,00	KECAMATAN TABANG
4.01 . 4.01.20 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi Masyarakat	Persen	100		326.692.000,00		374.362.400,00		8.130.777.000,00		345.196.000,00		345.196.000,00		9.522.223.400,00	KECAMATAN TABANG
4.01 . 4.01.21	KECAMATAN MUARA WIS					968.154.656,00		8.670.814.309,00		1.145.184.000,00		1.781.237.000,00		1.781.237.000,00		14.346.626.965,00	KECAMATAN MUARA WIS
4.01 . 4.01.21 . 01	KECAMATAN MUARA WIS					968.154.656,00		8.670.814.309,00		1.145.184.000,00		1.781.237.000,00		1.781.237.000,00		14.346.626.965,00	KECAMATAN MUARA WIS
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	651.904.656,00	100,00	898.544.909,00	100,00	705.739.400,00	100,00	998.292.400,00	100,00	998.292.400,00	100,00	4.252.773.765,00	KECAMATAN MUARA WIS
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	77.250.000,00	100,00	99.149.000,00	100,00	125.775.200,00	100,00	335.275.200,00	100,00	335.275.200,00	100,00	972.724.600,00	KECAMATAN MUARA WIS
4.01 . 4.01.21 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur ASN	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-	0,00	KECAMATAN MUARA WIS
4.01 . 4.01.21 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai Kinerja SKP	Nilai	70	83	0,00	83,00	0,00	84,00	0,00	84,00	27.000.000,00	84,00	27.000.000,00	84,00	54.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Presentase Penurunan Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Angka	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 92; 2) 85; 3) -40	0,00	1) 96; 2) 80; 3) -33	48.085.000,00	1) 100; 2) 95; 3) -50	50.000.000,00	1) 100; 2) 100; 3) -50	35.400.000,00	1) 100; 2) 100; 3) -50	35.400.000,00	1) 100; 2) 100; 3) -50	168.885.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
0	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	n.a												0,00	KECAMATAN MUARA WIS
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	100	239.000.000,00	100,00	7.625.035.400,00	100,00	263.669.400,00		385.269.400,00		385.269.400,00		8.898.243.600,00	KECAMATAN MUARA WIS
4.01 . 4.01.22	KECAMATAN SANGA-SANGA					4.343.598.486,00		4.950.988.384,00		4.752.881.495,00		6.022.812.546,00		6.026.412.546,00		26.096.693.457,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
4.01 . 4.01.22 . 01	KECAMATAN SANGA-SANGA		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.343.598.486,00		4.950.988.384,00		4.752.881.495,00		6.022.812.546,00		6.026.412.546,00		26.096.693.457,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran;	Persen	100	1) 100;	1.149.714.680,00	1) 100;	1.217.593.125,00	1) 100;	1.337.261.495,00	1) 100;	1.755.515.496,00	1) 100;	1.759.115.496,00	1) 100;	7.219.200.292,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik;	1) Persen;	100	1) 100;	63.397.556,00	1) 100;	78.609.108,00	1) 100;	86.700.000,00	1) 100;	168.446.000,00	1) 100;	168.446.000,00	1) 100;	565.598.664,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
4.01 . 4.01.22 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur ASN	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	2	1) 0;	0,00	1) 0;	0,00	1) 0;		1) 0;		1) 0;		1) 0;	0,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
4.01 . 4.01.21 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	70		0,00		0,00							-	0,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2) Persentase Penyelesaian temuan audit; 3) Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	521.143.200,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	57.500.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	22.500.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	22.500.000,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	623.643.200,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
4.01 . 4.01.22 . 01 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	n.a	100	599.950.000,00									-	599.950.000,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
4.01 . 4.01.22 . 01 . 25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1) Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan;	Persen	n.a				24.980.000,00	1) 0;	25.000.000,00	1) 0;	25.000.000,00	1) 0;	25.000.000,00	1) 0;	99.980.000,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
4.01 . 4.01.22 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	1) Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	n.a	1) 0;	2.530.536.250,00	1) 0;	3.108.662.951,00	1) 0;	3.246.420.000,00	1) 0;	3.246.420.000,00	1) 0;	3.246.420.000,00	1) 0;	15.378.459.201,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	n.a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
	Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	1) Jumlah Warga yang mendapat penanganan kemiskinan	1) Warga;	n.a							1) 100;	804.931.050,00	1) 100;	804.931.050,00	1) 100;	1.609.862.100,00	KECAMATAN SANGA-SANGA
4.01 . 4.01.23	KECAMATAN ANGGANA					714.103.798,00		3.198.242.263,00		1.282.500.160,00		1.532.463.160,00		1.582.463.160,00		8.309.772.541,00	KECAMATAN ANGGANA
4.01 . 4.01.23 . 01	KECAMATAN ANGGANA					714.103.798,00		3.198.242.263,00		1.282.500.160,00		1.532.463.160,00		1.582.463.160,00		8.309.772.541,00	KECAMATAN ANGGANA
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran;	Persen	100	1) 90;	312.849.798,00	1) 100;	468.652.595,00	1) 100;	465.723.860,00	1) 100;	805.866.860,00	1) 100;	805.866.860,00	1) 100;	2.858.959.973,00	KECAMATAN ANGGANA
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan sarana dan prasarana dalam kondisi baik;	Persen	100	1) 100;	21.304.000,00	1) 100;	244.666.700,00	1) 100;	413.204.300,00	1) 100;	323.024.300,00	1) 100;	323.024.300,00	1) 100;	1.325.223.600,00	KECAMATAN ANGGANA
4.01 . 4.01.23 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur ASN	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	KECAMATAN ANGGANA
4.01 . 4.01.21 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	KECAMATAN ANGGANA
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	1) 100; 2) 100; 3) 100.	0,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.	2.031.772.968,00	1) 100; 2) 100; 3) 100.		1) 100; 2) 100; 3) 100.		1) 100; 2) 100; 3) 100.		1) 100; 2) 100; 3) 100.	2.031.772.968,00	KECAMATAN ANGGANA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017*		2018 **		2019 ***		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01 . 4.01.23 . 01 . 25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan	Persen	100	100	0,00	100,00	50.000.000,00	75,00	0,00	78,00	0,00	79,00	0,00	79,00	50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
0	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Persen	100	100	0,00									-	0,00	KECAMATAN ANGGANA
4.01 . 4.01.23 . 01 . 28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	1) Tingkat Partisipasi Masyarakat;	1) Persen;	100	1) 0;	379.950.000,00	1) 0;	403.150.000,00	1) 0;	403.572.000,00	1) 0;	403.572.000,00	1) 0;	453.572.000,00	1) 0;	2.043.816.000,00	KECAMATAN ANGGANA

Bab VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab Ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Dalam upaya meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, keberadaan indikator kinerja menjadi bagian penting sebagai instrumen penilaian hasil pengendalian dan evaluasi pencapaian pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target ditetapkan sebagai ukuran komitmen pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2017-2021. Berikut Tabel IKU dan IKK Kutai Kartanegara 2017-2021.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara

No	INDIKATOR DAERAH	Realisasi	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A	
2	Indeks Persepsi Korupsi	5,93	6.00	6.30	6.60	6.90	
3	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB)	8.17	8.19	8.24	8.50	8.75	
4	Rata-Rata Lama Sekolah	8.83	8.98	9.12	9.26	9.41	
5	Harapan Lama Sekolah	13,56	13,60	13,70	13,81	13,91	
6	Angka Harapan Hidup	71,68	71,71	71,75	71,79	71,83	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.72%	5,55%	5,25%	5,08%	4.96%	
8	Tingkat Kemiskinan	7.57%	7.65%	7.46%	6,87%	6,63%	
9	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	1.50 %	1.48%	1.21%	1.40%	1.98%	
10	Tingkat Pertumbuhan PAD	33.66%	7.18%	13.56%	11.62%	10.61%	
11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	5.52%	6.64%	6.92%	7.06%	7.16%	
12	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,33%	6,81%	6,53%	7,25%	7,97%	
13	Indeks Gini	0.290	0.280	0.276	0.273	0.269	
14	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	75.0%	75.2%	75.8%	76.70%	77.00%	
15	Status pencemaran air sungai	56.15	56.25	56.37	56.46	56.78	
16	Status pencemaran udara	89.83	90.96	92.10	93.26	95.48	
17	Tutupan Lahan	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	
18	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	55.07	57.95	59.93	61.92	63.90	

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2.12	1.08	2.35	2.76
1.02	Tingkat inflasi	%	3.27	3.50	3.50	3.50
1.3a	PDRB ADHB	Juta Rp	160,596.00	176,419.00	184,338	193,020
1.3b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	208,837.45	224,475.07	229,726.52	235,599.62
1.04	Indeks gini	%	0.28	0.28	0.27	0.27
1.05	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	92.35	92.54	93.13	93.37
			7.65	7.46	6.87	6.63
1.06	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	78.00	79.00	80.00	81.00
1.07	Tingkat pengangguran	%	5.55	5.25	5.08	4.96
1.10.a	Jumlah Penduduk (ribu)	Jiwa	769.00	785.92	802.42	819.27
1.10.b	Pertumbuhan Penduduk	%	2.26	2.20	2.10	2.10
1.11	Pengeluaran perkapita	Ribu Rp	1,191,080.14	1,266,714.28	1,342,348.42	1,417,982.56
1.12	IPM	%	73.17	73.47	73.68	73.75
II	Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.01	Pendidikan					
02.01.02	Angka melek huruf	%	99.94	99.47	99.61	99.75
02.01.03	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.98	9.12	9.26	9.41
2.1.4a	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	77.85	77.90	78.00	78.10
2.1.4b	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.4c	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	95.00	95.50	96.75	96.80
2.1.4d	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	%				
2.1.5a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	99.96	99.69	99.70	99.71
2.1.5b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	93.92	92.25	92.50	92.75
2.1.5c	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	%				
2.02	Kesehatan					
02.02.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	per 1.000 kelahiran	0.99	0.99	0.99	0.99
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran	13.00	13.00	12.00	11.00
02.02.02	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,71	71,75	71,79	71,83
02.02.03	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.10	0.09	0.08	0.07
2.03	Pertanahan					
02.03.01	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	54.65	65.00	75.00	100.00
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	95.83	96.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00
2.04	Ketenagakerjaan					
02.04.01	Rasio penduduk yang bekerja	%	94.45	94.75	94.92	95.04
02.04.02	Jumlah penduduk yang bekerja	orang	333,530	337,312	341,097	344,884
02.04.03	Jumlah Angkatan Kerja	orang	352,659	356,897	361,137	365,378
III	Fokus Budaya dan Olahraga					
3.01	Kebudayaan					
03.01.01	Jumlah grup kesenian	grup	270	275	280	285
03.01.02	Jumlah gedung kesenian	unit	-	-	-	-
3.02	Pemuda dan Olahraga					
03.02.01	Jumlah klub olahraga	klub	436.00	436.00	436.00	436.00
03.02.02	Jumlah gedung olahraga	unit	1,031.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00
Aspek Pelayanan Umum						
A	Urusan Pemerintahan Wajib					
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1.01	Urusan Pendidikan					
1.1.1.a	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	100.00	100.00	100.00	100.00
1.1.1.b	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTS	%	95.00	95.50	96.75	96.80
1.1.1.c	Angka Partisipasi Sekolah SLTA/MA/SMK	%				
1.1.2a	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SLTP/MTs	per 10.000				
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD / MI	Rasio	1:259	1:278	1:298	1:305
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SMP / MTs	Rasio	1:294	1:301	1:311	1:322
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah SLTA/MA/SMK	per 10.000	n.a	n.a	n.a	n.a
1.1.3a	Rasio Murid terhadap Guru SD	Per 1 guru	1 : 18	1 : 19	1 : 20	1 : 21
1.1.3b	Rasio Murid terhadap Guru SLTP/MTs	Per 1 guru	1 : 19	1 : 20	1 : 21	1 : 22
1.1.3c	Rasio Murid terhadap Guru SLTA / MA / SMK	Per 1 guru	n.a	n.a	n.a	n.a
1.1.5a	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	%	0.0020	0.0010	0.0010	0.0010
1.1.5b	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	%	0.080	0.070	0.015	0.010
1.1.5c	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	n.a	n.a	n.a	n.a
1.1.6a	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	%	99.13	99.14	99.15	99.16
1.1.6b	Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	%	99.99	99.99	99.99	99.99
1.1.6c	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	n.a	n.a	n.a	n.a
1.1.7.a	Angka Melanjutkan SD/MI ke SLTP/MTs	%	100.02	100.00	100.00	100.00
1.1.7.b	Angka Melanjutkan SLTP/MTs ke SLTA/MA/SMK	%	n.a	n.a	n.a	n.a

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.1.8.a	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI	%	91.04	91.98	92.18	93.25
1.1.8.b	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs	%	95.50	95.16	96.10	97.20
1.1.8.c	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMA/MA/SMK	%	n.a	n.a	n.a	n.a
01.01.09	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,56	13,60	13,70	13,81
1.02	Urusan Kesehatan					
01.02.01	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/Jiwa	1.00	1.00	1.00	1.00
	Jumlah balita	Jiwa	59,718	60,912	62,131	63,373
	Jumlah Posyandu	Unit	765.00	765.00	765.00	765.00
01.02.02	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	Per 10.000 penduduk	2,87	2,87	2,87	2,87
	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Unit	14	14	14	14
	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Unit	18	18	18	18
01.02.03	Jumlah Poliklinik	Unit	40	40	40	40
	Jumlah Pustu	Unit	177	177	177	177
01.02.04	Jumlah Penduduk	Jiwa (000)	769	786	802	819
01.02.05	Jumlah Rumah Sakit (RS Umum Pemerintah dan RS Khusus)	Unit	3	3	3	3
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Unit/Jiwa (per 1.000)	0.0039	0.0038	0.0037	0.0037
01.02.06	Jumlah Dokter Umum	Jiwa	125	125	125	125
	Jumlah Dokter Spesialis		56	56	56	56
	Rasio Dokter per satuan Penduduk	Dokter/Jiwa	16.02	16.02	16.02	16.02
01.02.07	Jumlah tenaga medis (Bidan + Perawat)	Jiwa	1,796	1,796	1,796	1,796
	Jumlah Tenaga Medis bidan	Juwa	705	705	705	705
	Jumlah Tenaga Medis Perawat	Jiwa	1,091	1,091	1,091	1,091
	Rasio tenaga medis bidan per satuan penduduk	Tenaga Medis/Jiwa	0.43	0.44	0.45	0.46
	Rasio Tenaga Medis Bidan	Per 100.000 Penduduk	91.06	91.06	91.06	91.06
	Rasio Tenaga Medis Perawat	Per 100.000 Penduduk	141.80	141.80	141.80	141.80
01.02.08	Jumlah Kematian Bayi	1/1000 KH	178	168	157	146
	Jumlah Kematian Balita	1/1000 KH	22	21	20	19
01.02.09	Jumlah Kematian Ibu	1/100.000 KH	22	21	20	19
01.02.10	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Jiwa	23,633.00	22,762.30	22,643.53	22,224.74
01.02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	85.90	88.00	89.00	90.00
01.02.12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	78.50	93.00	93.00	93.00
01.02.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	52.90	74.00	86.00	90.00
01.02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00
01.02.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00
01.02.16	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100.00	100.00	100.00	100.00
01.02.17	Cakupan kunjungan bayi	%	82.50	83.00	84.00	85.00
01.02.18	Penemuan Kasus HIV	Kasus	62.00	65.00	67.00	70.00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
01.02.19	Penemuan penderita pneumonia Balita	%	16.70	48.10	49.00	50.00
01.02.20	Penanganan penderita diare	%	71.70	85.00	87.00	90.00
1.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
01.03.01	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status					
	Jalan Nasional	Km	360.65	360.65	360.65	360.65
	Jalan Propinsi	Km	222.24	222.24	222.24	222.24
	Jalan Kabupaten	Km	2,193.02	2,193.02	2,193.02	2,193.02
01.03.02	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	80.20	86.80	93.40	100.00
01.03.03	Jumlah Jembatan	Buah	12.00	13.00	13.00	13.00
01.03.04	Luas Daerah Irigasi Teknis	Ha	15,519.60	16,246.27	17,201.32	17,751.51
01.03.05	Jumlah Bangunan Seluruhnya	Unit	6.00	8.00	10.00	10.00
1.04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
01.04.01	Rumah tangga pengguna air bersih	%	84.88	87.38	89.88	92.38
01.04.02	Rumah tangga pengguna listrik	%	77.00	81.00	86.00	90.00
01.04.03	Rumah tangga ber sanitasi	%	86.49	87.51	89.20	91.35
01.04.04	Persentase rumah layak huni	%	90.91	92.12	92.78	92.53
01.03.11	Persentase pemukiman kumuh	%	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
1.05	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
01.05.01	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	93.28	95.00	95.00	95.00
01.05.02	Angka Kriminalitas		506.00	400.00	400.00	400.00
1.06	Urusan Sosial					
01.06.01	Jumlah penduduk miskin	jiwa	56,560.00	58,629.48	55,126.41	54,317.81
01.06.02	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	92.25	92.25	92.25	92.25
01.06.03	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	69.91	70.27	70.32	70.23
	Jumlah anak terlantar	orang	120.00	120.00	120.00	120.00
	Jumlah lanjut usia >60 th	orang	600.00	670.00	670.00	670.00
	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi	orang	-	70.00	70.00	70.00
	Jumlah penyandang cacat	orang	131.00	141.00	161.00	161.00
	Jumlah bekas narapidana	orang	20.00	25.00	25.00	25.00
	Jumlah keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial:	orang	29,122.00	29,122.00	29,122.00	29,122.00
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.01	Urusan Tenaga Kerja					
02.01.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,36	62,26	62,85	63,42
02.01.02	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	81.00	100.00	100.00	100.00
02.01.03	Tingkat pengangguran terbuka	%	5.96	5.25	5.08	4.96
02.01.04	Penduduk bekerja	Orang	337,049.70	346,386.31	353,947.95	361,483.33
02.01.05	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	358,411	365,579	372,891	380,349
2.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
02.02.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	51.08	51.08	51.08	51.08
02.02.02	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	50.00	50.00	50.00	50.00
02.02.03	Rasio KDRT	%	20.00	22.00	23.00	25.00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
02.02.04	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	-	-	-	-
02.02.05	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	84.33	84.50	84.70	84.90
02.02.06	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	85.00	86.00	88.00	90.00
2.03	Urusan Pangan					
02.03.01	Ketersediaan Pangan	Kg/Tahun	507.00	518.00	528.00	539.00
02.03.02	Jumlah produksi padi	Ton	184,067.00	188,117.00	192,255.00	192,485.00
	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani	Ton	172.83	176.63	180.51	184.48
02.03.03	Ketersediaan pangan daerah	%	121.78	125.36	126.93	129.74
02.03.05	Regulasi ketahanan pangan	Regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi
02.03.08	Ketersediaan Energi dan Protein					
2.3.8.a	1. Energi	Kal/Kap/Hari	2,763.00	2,821.00	2,880.00	2,937.00
2.3.8.b	2. Protein	Kal/Kap/Hari	80.91	82.63	84.34	86.03
2.04	Urusan Pertanahan					
02.04.01	Persentase luas lahan bersertifikat	%	12.37	24.00	50.00	100.00
02.04.02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	95.83	96.00	100.00	100.00
02.04.03	Penyelesaian izin lokasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00
2.05	Urusan Lingkungan Hidup					
02.05.01	Persentase penanganan sampah	%				
02.05.02	Indeks Kualitas udara	%	90.96	92.10	93.26	95.48
02.05.04	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	Ha				
02.05.05	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%				
2.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
02.06.01	Jumlah akte lahir yang dikeluarkan	orang	625.44	640.23	655.02	669.81
02.06.02	Kepadatan penduduk	org/ha	27	28	28	29
02.06.03	Laju pertumbuhan penduduk	%	2.26	2.20	2.10	2.10
2.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
02.08.01	Cakupan peserta KB aktif	pasangan	73.29	74.40	74.90	75.40
02.08.02	Ratio petugas lapangan KB/Penyuluh KB		0.38	1.00	1.00	1.00
2.09	Urusan Perhubungan					
02.09.01	Jumlah angkutan darat	Unit	57.00	57.00	57.00	57.00
02.09.02	Jumlah ijin trayek	Trayek	13.00	13.00	13.00	13.00
2.1	Urusan Komunikasi dan Informatika					
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
02.11.01	Jumlah koperasi aktif	Unit	519.00	538.00	569.00	587.00
02.11.02	Jumlah koperasi	unit	656.00	659.00	679.00	699.00
2.12	Urusan Penanaman Modal					

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
02.12.01	Nilai Investasi	Rp.	3,918,961,657,024.00	3,172,331,789,903.00	3,204,055,107,801.00	3,236,095,658,879.00
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga					
02.13.01	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	143	143	143	143
02.13.02	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	51	51	51	51
02.13.03	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	12.00	12.00	16.00	16.00
02.13.04	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	9.00	15.00	11.00	15.00
02.13.05	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	187.00	187.00	187.00	187.00
02.13.06	Lapangan olahraga	Unit	1,342.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00
2.14	Urusan Statistik					
02.14.01	Buku Kutai Kartanegara Dalam Angka	-	1.0	1.0	1.0	1.0
02.14.02	Buku PDRB Kutai Kartanegara	-	2.0	2.0	2.0	2.0
2.15	Urusan Kebudayaan					
02.15.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	78.00	80.00	82.00	84.00
02.15.02	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	20.00	22.00	24.00	26.00
02.15.03	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	95.00	95.00	96.00	98.00
2.16	Urusan Perpustakaan					
02.16.01	Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan	%	27.64	5,34	5,40	5,50
2.17	Urusan Kearsipan					
02.17.01	Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai	75,00	80,00	85,00	90,00
B	Urusan Pemerintahan Pilihan					
1	Urusan Kelautan dan Perikanan					
1.01	Nilai ekspor perikanan	Rp.	433,295,265,344	463,165,887,240	485,794,646,802	508,423,406,363
1.02	Produksi Ikan	Ton	177,000.00	183,660.00	192,843.00	202,485.00
2	Urusan Pariwisata					
2.01	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1,961,150.00	2,019,984.00	2,201,783.00	2,510,033.00
02.01.01	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	9.24	3.00	9.00	14.00
02.01.02	Tingkat hunian hotel	Orang	27.00	28.00	29.00	30.00
3	Urusan Pertanian					
3.01	Produksi padi	ton	191,779.00	202,011.01	225,019.07	247,670.28
4	Urusan Kehutanan					
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					
5.01	Pangkalan Minyak Tanah	Unit	-	-	-	-
5.02	Agen LPG	Unit	8	8	8	8
5.03	Pangkalan Gas	Unit	49	49	49	49
5.04	SPBU	Unit	13	14	15	16
5.05	APMS	Unit	10	10	10	10
6	Urusan Perdagangan					
6.01	Prasarana Pasar		41	42	43	44
6.02	Cakupan bina kelompok pedagang (%)	%	14.28	14.28	14.28	14.28
6.03	Ketersediaan lokasi PKL	wilayah	4	4	4	4

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target			
			2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7	Urusan Perindustrian					
7.01	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4.00	4.10	4.15	4.20
7.02	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	4.26	4.30	4.50	5.00
7.03	Jumlah IKM	IKM	9,183.15	9,458.64	9,742.40	10,034.68

Bab IX

Penutup

Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaedah pelaksanaan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJM Nasional. Selain itu, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan dan program, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam upaya menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 harus memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD tahun 2021 hingga terpilihnya Bupati baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga di maksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kesosongan rencana pembangunan daerah maka perlu menyusun dokumen:

a. RPJMD Teknokratik 2021-2024

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015 melaksanakan pemungutan pilkada serentak pada bulan September tahun 2020. Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

Pada 2020 Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Teknokratik dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. RPJMD Teknokratik ini menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pada Tahun 2020 Pemerintah daerah wajib mensosialisasikan RPJMD Teknokratik kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Kutai Kartanegara, agar partai politik yang ingin mengajukan calon bupati dan wakil bupati dalam penyusunan visi, misi dan program kerjanya berpedoman pada RPJMD Teknokratik. RPJMD teknokratik ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMD pada tahun 2021, setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

b. RKPd tahun 2022

RKPD tahun 2022 di susun dengan mengacu pada RPJMD teknokratik dan/atau arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat. Pada masa transisi pergantian bupati di harapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terganggu dan terus berjalan berkesinambungan. RKPD tahun 2022 selanjutnya dijadikan sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas tahun pertama RPJMD periode 2021-2024. RKPD sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA PPAS dan APBD tahun 2022.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya; Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
3. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
7. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menjadi tanggung jawab bersama diantara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan menekankan kepada kerja cerdas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas bagi :


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH